



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, JUNI 2018

DAFTAR ISI

E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY Ahmad Fuadillah Sam	1
MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir	15
HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro	31
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati	47
JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari	61
TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady	75
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna, Subagio, dan Budi Irawanto	89
KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso	105
RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi	121
TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah	137



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, 2018

DAFTAR ISI

E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY Ahmad Fuadillah Sam	1
MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir	15
HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro	31
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati	47
JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari	61
TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady	75
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)	89
KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso	105
RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi	121
TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah	137



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 41

NOMOR 1, SEPTEMBER 2016

DDC: 302.3**Ahmad Fuadillah Sam****E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY****ABSTRAK**

Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

Kata kunci: *Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalities, Jakarta Smart City*

DDC: 305.8**Ibnu Nadzir****MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA****ABSTRAK**

Artikel ini mengeksplorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.

Kata Kunci: *daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet*

DDC: 302.2

Triyono Lukmantoro

HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGGOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

ABSTRAK

Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.

Kata kunci: hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan

DDC: 302.2

Nina Widyawati

KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL¹

ABSTRAK

Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirnya masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.

Kata kunci: budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu

¹ Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah dipublikasikan.

DDC: 302.2

Dian Tri Hapsari

JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DAN TANTANGAN

ABSTRAK

Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunaannya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.

Kata Kunci: Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.

DDC: 390.9

Ahmad Helmy Fuady

TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.

Kata Kunci: teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK

DDC: 302.2

Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto)**

BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS²

ABSTRAK

Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News,

² Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul "Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (*witness journalism*) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.

Kata kunci: penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0

DDC: 305.4

Widjajanti M Santoso³

KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

ABSTRAK

Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menggalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.

Kata Kunci: femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan

Rosita Dewi

RINGKASAN DISERTASI

ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA

Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (*win-win solution*) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (*corrupted recognition*) melalui pembentukan Lembaga

³ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.

Kata kunci: rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif

Fachri Aidulsyah

TINJAUAN BUKU

ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA

Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 1, 2018

DDC: 302.3**Ahmad Fuadillah Sam****E-NETWORK SOCIETY: CITIZENS COMMUNALITY IN SMART CITY CONTEXT****ABSTRACT**

Smart city is an informational society's product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city's implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens' communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen's trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communalism, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.

Keywords: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalism, Jakarta Smart City

DDC: 305.8**Ibnu Nadzir****RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS****ABSTRACT**

This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.

Keywords: online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet

DDC: 302.2

Triyono Lukmantoro

THE HOAXES OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS FROM CHINA: MORAL PANICS AND CULTURE OF FEAR

ABSTRACT

At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is *Postmetro*. This article is a textual review of various hoax titles displayed by *Postmetro*. The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.

Keywords: hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear

DDC: 302.2

Nina Widyawati

COMMODIFICATION OF PRIVACY AND PSEUDO-DEMOCRACY IN DIGITAL CULTURE

ABSTRACT

Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.

Keywords: digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy

DDC: 302.2

Dian Tri Hapsari

RADIO JOURNALISM IN DIGITAL ERA: TRANSFORMATION AND CHALLENGE

ABSTRACT

During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept

of spiral of silence. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.

Key Words: *Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence*

DDC: 390.9

Ahmad Helmy Fuady

DIGITAL TECHNOLOGY AND ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICT development and economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neighbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.

Keywords: *digital technology, inequality, disruption, ICT development index*

DDC: 302.2

Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto)**

BEYOND PROSUMPTION: PROSUMPTION PRACTICE OF CONTENT WRITERS IN NEWS AGGREGATOR PLATFORM UC NEWS

ABSTRACT

The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News's content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and consumption activity only but also distribution and marketization by the users.

Keywords: *content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0*

DDC: 305.4

Widjajanti M Santoso¹

PROBLEMATIC OF FEMININITY CONSTRUCTION IN VIRTUAL PUBLIC SPHERE

ABSTRACT

Femininity construction is very apparent in Indonesia's women's movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the "Ibuisme" and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to

¹ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group. Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing 'new' definition of women's participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women's movement that need to be reconsidered thoroughly.

Key words: *femininity, virtual public sphere, women's problem.*

Rosita Dewi

RINGKASAN DISERTASI

REKOGNISI ADAT DALAM PENGEMBANGAN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE DI PAPUA, INDONESIA

Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

ABSTRACT

The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with ethnographic method consisted of participant observations, interviews, and literature studies.

Keywords: *recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, participatory mapping*

Fachri Aidulsyah

TINJAUAN BUKU

ISLAMISM AND THE POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA

Judul Buku: Eric Hiarij And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY

Ahmad Fuadillah Sam

*Research Cluster Cultural Transformation and New Media - Departemen Sosiologi
Universitas Indonesia
Email: fuadillah94@gmail.com*

ABSTRACT

Smart city is an informational society's product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city's implication towards the emergence of communalism in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens' communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen's trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communalism, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.

Keywords: *Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalism, Jakarta Smart City*

ABSTRAK

Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

Kata kunci: *Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communalism, Jakarta Smart City*

PENDAHULUAN

“If you do not care about the networks, the networks will care about you, anyway. For as long as you want to live in society, at this time and in this place, you will have to deal with the network society. Because we live in the Internet Galaxy.” (Castells, 2001)

Jaringan tidak terlepas dari kehidupan keseharian kita. Seperti kutipan Castells (2001) di atas, jaringan akan terus membayangi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Hal ini karena jaringan semakin mudah terbentuk terlebih dengan dibantu dan dimediasi internet. Pembentukan masyarakat jaringan menjadi hal yang terjadi alami karena dalam bermasyarakat, dan jaringan-jaringan ini akan terbentuk dengan sendirinya.

Pembahasan mengenai masyarakat jaringan tidak terlepas dari adanya masyarakat informasi dan masyarakat informasional. Masyarakat informasional akan membentuk noktah-noktah yang saling terhubung satu sama lain hingga membangun sebuah jaringan. Castells (2010) berusaha membedah masyarakat jaringan melalui bentuk komunitas virtual yang hadir secara metafisik, namun memberi implikasi yang nyata pada perubahan sosial. Komunitas virtual ini tentu berkaitan erat dengan masyarakat informasional karena hal-hal yang dibagikan dan disebarluaskan adalah data dan informasi. Komunitas virtual, menurut Castells (2010), menawarkan konteks baru pada identitas seseorang melalui medium teknologi informasi yang saling terhubung.

Fenomena *smart city* merupakan ilustrasi dari bagaimana informasi dan teknologi bekerja dalam masyarakat jaringan. Secara sederhana, Dirks dan Keeling (2009) memberi gambaran mengenai *smart city*, yakni bentuk inisiatif yang menghubungkan pemerintah, warga, dan korporasi melalui teknologi informasi. Di Indonesia, terdapat beberapa kota yang mengimplementasikan *smart city*, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar (IISMEX, 2017). Jakarta, yang menjadi fokus studi dalam artikel ini, mulai menerapkan *smart city* sejak tahun 2014 dan berfokus pada pengumpulan *big data* serta analisis untuk menentukan kebijakan.

Jakarta Smart City membutuhkan korporasi teknologi dalam bentuk aplikasi yang menjadi

penghubung, seperti Qlue (untuk pelaporan warga) dan CROP (untuk tindak lanjut dari pemerintah), untuk pengambilan keputusan. Aplikasi tersebut memunculkan forum diskusi antarwarga dan pemerintah atau instansi terkait. Dari sana, muncul sebuah komunitas virtual yang saling terhubung karena adanya ikatan sebagai warga yang tinggal dan atau beraktivitas di Jakarta.

Konteks aplikasi *smart city* di Jakarta yang diinisiasi pemerintah menunjukkan masih kuatnya peran pemerintah di Jakarta yang justru memfasilitasi pembangunan infrastruktur teknologi untuk membangun komunalitas. Komunalitas ini memunculkan komunitas-komunitas virtual yang hadir secara metafisik, namun cukup berpengaruh dalam bekerjanya *smart city* di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunalitas virtual bisa hadir di Jakarta Smart City dan apa implikasinya.

Dalam studi sebelumnya, terdapat beberapa pandangan mengenai *smart city* dan masyarakat jaringan. Beberapa menganggap bahwa *smart city* menjadi bagian penting untuk kemajuan pemerintahan melalui *bottom-up*, yang mendorong transparansi publik dan aspek kewargaan di sebuah kota melalui teknologi informasi (Gabrys, 2014; Meijer & Bolivar, 2016; Thompson, 2016; Dameri & Bonevelo, 2016), dan adanya relasi yang baik antara pemerintah, warga, dan korporasi (Lim, 2002; Sumanjeet, 2006). Studi yang lain menjelaskan mengenai *smart city*, yang berimplikasi pada pengintaian data-data pribadi, justru menghilangkan aspek kewargaan karena akan lenyapnya kepercayaan warga yang memiliki data terhadap pemerintah (Klauser, Paasche, & Söderström, 2014).

Dari studi sebelumnya, terdapat sebuah kesamaan, yakni melihat pentingnya pengadopsian teknologi dan pengikutsertaan warga. Penulis sepakat dengan hal tersebut dan berusaha melengkapinya dengan melihat aspek komunalitas yang dalam konteks *smart city* justru diinisiasi pemerintah. Penulis berusaha membedah fenomena tersebut dan melihat implikasi yang mungkin dihadirkan, misalnya kapitalisasi informasi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menganggap kapitalisasi informasi sebagai pertanda lemahnya

peran pemerintah dalam kapitalisme global (Fuchs, 2012; Topak, 2013), penulis beranggapan bahwa kapitalisasi informasi adalah hal yang wajar dan dapat dikontrol melalui pemerintah. *Smart city* menjadi indikasi dari masyarakat jaringan pada era informasi melalui infrastruktur teknologi, komunitas virtual, dan kapitalisasi informasi. Hal inilah yang akan menjadi bahasan utama artikel ini.

MASYARAKAT INFORMASI DAN KEMUNCULAN KOMUNITAS VIRTUAL

Transisi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi menjadi signifikan dalam era kontemporer. Rule dan Besen (2008) menegaskan bahwa memasuki abad ke-20, masyarakat akan memasuki era masyarakat informasi yang menjadikan informasi sebagai inti dan pembeda dari era-era sebelumnya. Masyarakat informasional, dalam pandangan Castells (2010), menjadi peralihan yang cukup signifikan dari era post-industri yang menjadikan masyarakat memiliki literasi terhadap informasi yang diterima dan diserap. Hal ini terjadi ketika terjadi perubahan dari masyarakat post-industri yang berfokus pada perkembangan industri besar-besaran menjadi masyarakat informasional yang menjadikan informasi sebagai sumber daya yang bisa direproduksi. Lyon (1986) memaparkan bahwa konsep masyarakat informasi dan masyarakat post-industri tidak bisa dijadikan sebagai konsep tunggal. Konsep masyarakat informasi kerap diasosiasikan dengan perkembangan masyarakat post-industri masa depan yang mulai beralih dari basis fisik material menjadi basis teknologi informasi, seperti yang diungkapkan Daniel Bell dalam Lyon (1986). Penulis sepakat dengan hal tersebut karena teknologi informasi saat ini memang dapat mengubah dan membentuk formasi sosial, ekonomi, dan politik yang sudah ada dan terbentuk. Lyon (1986) mengutarakan bahwa informasi pada era masyarakat informasi memberi kontribusi tersendiri dalam pertimbangan beragam organisasi, perkumpulan, korporasi, hingga pemerintahan, terkait aspek ekonomi yang menjadikan informasi sebagai komoditas. Sementara itu, May (2008) beranggapan bahwa pada era informasi, keterbukaan dan

kepemilikan informasi yang dikumpulkan untuk menjadi sebuah komoditas, menjadi kontestasi yang menarik dan masih menjadi perdebatan yang belum berakhir.

Webster (2005) mencoba mengidentifikasi masyarakat informasi ke dalam beberapa bentuk yang signifikan. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang berbasis inovasi teknologi dalam implementasi bermasyarakat. Webster (2005) menjelaskan bahwa masyarakat informasi lahir sebagai dampak dari adanya inovasi teknologi terbaru pengembangan sistem ISDN (*Integrated Service Digital Network*). Dalam aspek lain, Webster (2005) mengungkapkan gagasan ekonomi terkait dengan masyarakat informasi, yakni adanya industri informasi. Hal ini menjadi penting karena industri informasi memunculkan refleksi sampai tahapan mana masyarakat informasi dalam bentuk *smart city* berada.

Castells (2010) mengonseptualisasikan bahwa masyarakat jaringan dalam masyarakat informasional terbentuk dari jaringan yang dikumpulkan dari seluruh dimensi dalam organisasi sosial dan praktik sosial. Lebih jauh, masyarakat informasional, menurut Castells (2010), tidak semata memainkan peranan informasi sebagaimana masyarakat informasi, melainkan juga menjelaskan atribut dan dinamika dari bentuk organisasi sosial yang terkait dengan sumber daya suatu teknologi terbaru. Hal ini menuntut masyarakat terliterasi secara informasi untuk berkomunikasi dan menjalin relasi antarmasyarakat.

Castells (2010) melihat beberapa kemungkinan baru dari adanya masyarakat jaringan, yakni dinamika antara pemerintah, warga, dan korporasi. Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi akan membentuk ruang-ruang sosial baru. Ruang sosial baru ini berbentuk komunitas virtual yang mengombinasikan eksperimentasi dengan permainan peran. Castells (2010) kembali menekankan komunitas virtual yang menjadi jaringan komunikasi interaktif untuk membagikan informasi terkait kepentingan atau tujuan tertentu, walaupun pada beberapa kasus, komunikasi itu sendiri yang menjadi tujuan untuk mendapat kuasa. Hal inilah yang akan mentransformasi representasi simbolik dalam bentuk fisik dan virtual yang memberi tatanan baru dalam kehidupan manusia.

DARI KOMUNALITAS BERBASIS TERITORIAL HINGGA KEMUNCULAN KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL

Castells (2010) menyatakan bahwa salah satu perdebatan teoretis dalam sosiologi perkotaan adalah hilangnya komunalitas dalam bentuk komunitas di kota. Castells (2010) kemudian membangun preposisi-nya yang menyatakan bahwa masyarakat akan menghindari proses individualisasi dan berusaha mengklaster diri dalam organisasi atau komunitas yang membawa perasaan atau identitas kultural yang sama. Dengan membawa identitas yang sama, menurut Castells (2010), komunitas berbasis teritorial akan membangun komunalitasnya dan membentuk tindakan kolektif yang bersifat resisten terhadap pemerintah lokal. Resistensi ini terkait produksi makna melalui latar belakang historis, konflik kepentingan, dan nilai yang berbeda antaraktor di luar kelompok.

Dalam konteks *smart city*, terdapat hal menarik terkait dua bentuk komunalitas yang berjalan secara paralel, yakni komunalitas berbasis teritorial dan komunalitas berbasis virtual. Komunalitas virtual menjadi menarik karena ekspansi dan rekonfigurasi gagasan menembus jaringan tradisional melalui suatu infrastruktur. Castells (2010) menyadari bahwa sistem komunikasi baru berpengaruh sangat besar dalam tataran masyarakat dengan dimediasi kepentingan sosial, kebijakan pemerintah, dan strategi bisnis yang memberi kultur baru dalam dunia virtual. Infrastruktur teknologi berupa aplikasi menjadi hal yang krusial karena batasan komunalitas berubah dari berbasis teritorial menuju basis virtual yang termediasi. Bentuk komunitas virtual ini sesuai dengan tatanan *space of flows* yang diutarakan Castells (2010) terkait pertukaran informasi antar dan intra komunitas virtual. Hal ini berimplikasi pada keterjangkauan dan keberlanjutan masyarakat jaringan yang terbangun.

Hal menarik, menurut Castells (2010), adalah komunalitas berbasis virtual menawarkan konteks baru mengenai identitas manusia pada era internet yang bisa jadi berbeda dengan identitasnya dalam komunalitas fisik berbasis teritorial. Castells (2010) menegaskan poin penting Wellman mengenai komunitas virtual yang tidak

harus berbentuk komunitas fisik karena berbeda aturan dan dinamikanya. Komunitas virtual ini, menurut Wellman dan Gulia dalam Castells (2010), harus memiliki spesialisasi dan pembeda sebagai bentuk *personal portfolios* yang saling berbagi kepentingan, nilai, dan keanggotaan daring. Komunitas virtual, dalam pandangan Castells (2010), menjadi bagian dari komunitas yang tidak secara fisik hadir mengingat pola komunikasi dan interaksinya berbeda dengan komunitas basis teritorial. Hal ini karena landasan yang berbeda antara komunitas fisik berbasis teritorial dengan komunitas virtual. Komunitas virtual bekerja dalam aturan mainnya sendiri, dalam hal ini menjadi dinamika menarik, layaknya membahas komunitas berbasis teritorial dalam konteks *smart city*.

KOMUNITAS VIRTUAL DENGAN ADANYA IKATAN *CITIZENSHIP*

Kemunculan komunitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City agak berbeda karena ada peranan pemerintah dalam mendorong partisipasi warga. Dorongan partisipasi warga ini, menurut Coleman dan Blumler (2007), dapat diraih melalui komunikasi di internet. Internet dan media baru ini bisa menjadi faktor penarik partisipasi warga (Coleman & Blumler, 2007). *E-democracy* dalam bentuk *smart city* dilakukan melalui mekanisme “kepemilikan” yang dapat meningkatkan partisipasi warga di sebuah kota. Peningkatan ini mengindikasikan masih kuatnya peran pemerintah daerah untuk menarik para warga berjejaring dan membentuk forum kewarga-an yang dimediasi oleh internet. Hal ini dikategorikan sebagai *affective citizenship*, yang menurut Coleman dan Blumler (2007), adalah warga yang memiliki ikatan kewargaan, loyalitas, dan solidaritas yang kuat. Hal ini karena internet menjadi ruang kosong yang sangat bernilai bagi negara dan atau korporasi untuk membangun konstruksi demokrasi.

Citizenship dapat dilihat sebagai alat pemersatu yang hadir untuk mengikat komunitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City. *Citizenship* ini bersifat cair dan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga kota. Hak dan kewajiban ini bersumber dari kesadaran warga

untuk berpartisipasi melalui bentuk *e-democracy* yang berkaitan dengan “kepemilikan” warga akan kota-nya. Karena *smart city* berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, aspek *citizenship* menjadi aspek penting yang mengikat komunitas virtual yang ada dalam konteks *smart city*. Hal ini lagi-lagi menunjukkan masih kuatnya peranan pemerintah yang justru menjadikan hal tersebut sebagai pengikat. Kebanggaan menjadi bagian dari wilayah tertentu dalam label *smart city* menarik warga untuk bergabung dan menjalankan aktivitasnya bersama. Ikatan sebagai bagian dari warga Jakarta sesuai dengan argumen Castells (2010) yang menyatakan bahwa pemaknaan komunitas virtual dapat dibangun melalui basis saling berbagi kepentingan, nilai, dan norma yang dipegang anggota komunitas virtual.

MASYARAKAT INFORMASIONAL DAN DISTRIBUSI KUASA DI DALAM JAKARTA SMART CITY

Konsep *smart city* dalam Jakarta Smart City memiliki beberapa definisi yang saling terkait. Deakin dan Al Waer (2011) mendefinisikannya sebagai alat yang mempertemukan permintaan pasar (warga kota) dengan komunitas dan korporasi dalam menggunakan teknologi informasi sebagai penghubung dalam pengambilan sebuah putusan. Runde (2016) dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggambarkan fungsi *smart city* yang beragam menurut representasi lembaga USAID, World Bank, dan JICA. Lembaga-lembaga tersebut menjabarkan bahwa *smart city* memiliki beberapa fungsi, yaitu melakukan pemerintahan yang baik; menyelesaikan permasalahan kota dengan sumber daya setempat; keterbukaan informasi, perencanaan, dan alokasi yang pintar; penggunaan teknologi informasi untuk pembangunan; pelayanan satu pintu yang efektif dan efisien.

Jakarta Smart City memiliki enam indikator yang menjadi fokus utama pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan, yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart people*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living* (About Jakarta Smart City, 2016, 5). Indikator tersebut membutuhkan perangkat teknologi yang mumpuni. Misalnya, dalam

smart people dan *smart governance*, Jakarta Smart City menggunakan teknologi informasi berupa internet sebagai fondasi berkomunikasi dan aplikasi sebagai motor pertukaran informasi. Informasi yang didapat dan dikumpulkan menjadi sebuah *big data*. Menurut Batty (2013), *big data* ini dapat digunakan untuk memperkaya analisis dan peran masing-masing *stakeholders* terkait bagaimana sebuah kota bekerja dalam konsep *smart city*. *Smart city* dalam praktiknya membutuhkan peranan pemerintahan yang kuat untuk menarik warga berkontribusi dan *standing position* yang jelas untuk mengatur “pasar.” Hal ini karena kapitalisasi informasi terkait informasi dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan bagi dan untuk siapa saja.

Jakarta Smart City menjadi bagian penting dalam masyarakat informasional. Hal ini disebabkan oleh bentuk awal *smart city* merupakan fondasi awal yang memerlukan masyarakat yang memiliki literasi (dalam hal teknologi informasi). Masyarakat informasional menjadi penopang dari terbentuknya masyarakat jaringan. Hal ini sesuai dengan Castells (2010) yang mengemukakan bahwa masyarakat jaringan terbentuk dan dikumpulkan dalam sebuah organisasi dan praktik sosial. Organisasi dan praktik sosial dalam konteks *smart city* menjadi menarik terkait dengan adanya batasan administratif keluasan jaringan dalam praktik mekanisme masyarakat jaringan, yakni di Jakarta dan kota penyangga di sekelilingnya.

Secara implementasi, Jakarta Smart City mengaplikasikan *Citizen Relationship Management* sebagai bentuk respons cepat tanggap terhadap masalah warga Jakarta (Jakarta Smart City, 2016). Metode yang digunakan bersifat *bottom up* sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah DKI Jakarta dan membuka informasi kepada publik. Dalam praktiknya, *Citizen Relationship Management* menggunakan aplikasi dalam bentuk media sosial yang mendukung, yakni Qlue sebagai sumber pengaduan warga dan CROP (Cepat Respons Opini Publik) sebagai tindak lanjut instansi pemerintah terkait laporan dari Qlue (Jakarta Smart City, 2017). Qlue dalam konteks ini menjadi perangkat yang mendukung masyarakat informasional. Melalui

bentuk aplikasi media sosial, Qlue menjadi perangkat penghubung yang mempertemukan noktah-noktah dalam tataran masyarakat. CROP, melalui analisis Castells (2010), dapat merepresentasi atribut kekuasaan terkait sumber daya dari teknologi terbaru yang menjaga noktah-noktah dalam tataran masyarakat melalui Qlue. Melalui Qlue dan CROP, masyarakat jaringan dapat menyambungkan noktah-noktah untuk bekerja melalui bentuk Jakarta Smart City.

Qlue, sebagai salah satu aplikasi media sosial swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dapat membangun ruang sosial baru yang menggabungkan eksperimentasi dengan permainan peran seperti yang diutarakan Castells (2010). Ruang sosial berbentuk forum-forum permasalahan di Jakarta yang berupa foto, video, atau diskusi berupa teks terkait permasalahan di Jakarta yang dapat dikomentari oleh warga, dinas terkait (perwakilan pemerintah), swasta, dan admin yang mengontrol arus forum tersebut. Forum ini dapat diterjemahkan sebagai noktah yang memiliki relasi dan menggambarkan kekuasaan yang terdistribusi. Melalui forum ini, masyarakat sebagai aktor dapat menuntut, melaporkan, dan meminta bantuan aktor lain yang memiliki hak prerogatif (dalam bentuk komunitas virtual) untuk menekan pemerintah dalam tindak lanjut permasalahan yang ada di Jakarta. B (anggota komunitas Qlue, dalam wawancara 21 April 2017) menjelaskan mengenai komunitasnya yang dapat menghapus dan men-dor (mengembalikan laporan yang ditindaklanjuti aparatur pemerintah secara asal) laporan sesuai standar yang disepakati antara komunitas virtual dengan Qlue. Mekanisme tersebut sejalan dengan argumen Castells (2010) mengenai kekuasaan dalam masyarakat jaringan, yang terdistribusi melalui noktah terhubung yang dapat memainkan kekuasaan aktor dalam bentuk Jakarta Smart City.

Warga, dinas terkait (perwakilan pemerintah), korporasi, dan admin forum Qlue memiliki peranan masing-masing. Warga dan dinas terkait membentuk noktah yang membangun masyarakat jaringan. Korporasi memainkan peranannya dalam forum karena pada beberapa kasus, korporasi membutuhkan relasi kuasa dari masyarakat jaringan sebagai pelanggan atau penggunanya.

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi strategi bisnis, seperti yang diungkap SD. SD sebagai *Board of Director Product Qlue* (dalam wawancara 16 Januari 2017) memaparkan mengenai swasta (korporasi) yang membutuhkan pengguna memberi *feedback* untuk kemajuan bisnis korporasi tersebut. Sementara itu, admin berperan menjaga dan mengontrol arus informasi dengan standarisasi yang dibuat Qlue. Dalam konteks Jakarta Smart City, *ISDN* yang dimaksudkan oleh Webster (2005) terjadi dan membangun cirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Castells (2010) mengenai masyarakat jaringan membangun dinamika antara pemerintah, warga, dan korporasi dalam konteks Jakarta Smart City.

Dalam rangka pembangunan sebuah *smart city*, Jakarta Smart City berusaha mengumpulkan dan mengintegrasikan beragam informasi dan data yang didapat secara *crowdsourc*e. Informasi dan data didapat melalui bentuk *Citizen Relationship Management* yang diintegrasikan dan dianalisis menggunakan *big data*, lalu disebarluaskan melalui situs milik Jakarta Smart City. Hal ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data agar lebih ringkas dan mudah dimengerti masyarakat melalui perangkat yang mudah diakses. SD, sebagai *Board of Director Product Qlue* (dalam wawancara 13 Januari 2017), menjelaskan bahwa data yang dianalisis akan ditampilkan dalam sebuah *dashboard* (peta besar pelaporan warga Jakarta yang diperoleh secara *crowdsourc*e) yang menampilkan angka pelaporan warga dalam bentuk statistik dan pemetaan digital. Hal ini sejalan dengan analisis Castells (2010) mengenai noktah-noktah yang saling berhubungan dalam masyarakat jaringan tetap bekerja melalui mekanisme pelacakan dan kontrol yang difasilitasi oleh negara karena tujuan utamanya adalah pembangunan. Pandangan lain mendukung argumen Townsend (2014) mengenai *crowdsourc*e yang menjadi cara menyadap dan mengarahkan warga kota untuk membangun kepedulian bersama di sebuah kota. Melalui *crowdsourc*e, indikasi kepedulian bersama dapat terukur secara kuantitatif melalui jumlah informasi dan data yang didapatkan dalam bentuk angka.

Pengumpulan dan pengintegrasian data ini dapat menjelaskan bagaimana mekanisme masyarakat informasional bekerja. Korporasi secara terbuka dapat memanfaatkan data-data yang diperoleh dari *dashboard* Jakarta Smart City untuk membangun bisnis. Pembangunan korporasi berbasis data dan informasi ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Webster (2005) mengenai gagasan ekonomi terkait masyarakat informasi yang mengindikasikan adanya industri informasi dalam masyarakat informasional, seperti dalam *smart city*. Secara sosiologis, industri informasi memberi makna pada kuatnya masyarakat jaringan sebagai pengumpul sumber daya informasi dalam konteks Jakarta Smart City. Kemudian, data dan informasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat informasional karena mereka yang memiliki literasi informasi dapat menjadikan data-data tersebut sebagai kekuasaan yang terdistribusi melalui masyarakat jaringan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Castells (2010) mengenai masyarakat informasional yang menjadikan informasi sebagai sebuah orientasi nilai (ideologi). Hal ini kemudian diperkuat PA (IT Development Jakarta Smart City dalam wawancara 7 Maret 2017) yang mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan memang dibuka sebesar-besarnya untuk publik dan secara bebas dimanfaatkan untuk apa saja, bahkan untuk mendongkrak finansial pribadi atau kelompok. Hal ini terkait dengan kreativitas dan inovasi yang warga bisa kembangkan dengan data dan informasi yang didapati secara cuma-cuma tersebut.

Masyarakat informasi juga dapat dilihat dari indikasi masyarakatnya sendiri yang memiliki inisiatif dalam mencari, mengolah, dan menerima informasi. Webster (2005) memberi gambaran umum mengenai masyarakat informasi, yakni masyarakat berbasis inovasi teknologi dalam implementasi bermasyarakat. Qlue sendiri dapat menjadi infrastruktur yang menengahi warga Jakarta dengan pemerintah dan korporasi (swasta). Dalam praktiknya, masih dibutuhkan beragam edukasi terkait dengan penggunaan dan pengimplementasiannya. PA (sebagai IT Development Jakarta Smart City dalam wawancara 7 Maret 2017) mengemukakan bahwa upaya meliterasikan masyarakat dilakukan secara digital, misalnya

melalui situs, media sosial, maupun kanal-kanal lain Jakarta Smart City dan rekanannya. I (divisi *Field* Jakarta Smart City, wawancara 17 April 2017) menjelaskan bahwa edukasi pengguna Qlue dilakukan secara langsung kepada lurah dan dinas terkait selaku aparatur pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai suatu bentuk infrastruktur baru yang bisa dimanfaatkan oleh warga dan aparatur pemerintah DKI Jakarta.

Warga, sebagai bentuk dari masyarakat informasional, juga dituntut untuk memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Ketika pemerintah sudah menyediakan infrastruktur, warga sudah seharusnya mencari tahu dan mengedukasi diri dan lingkungannya sendiri melalui beragam fasilitas yang disediakan. Melalui mekanisme Jakarta Smart City, masyarakat jaringan secara organik dapat terbangun dengan syarat memiliki literasi atas informasi yang digunakan. Otonomi warga pun tergambar melalui pilihannya menggunakan atau tidak menggunakan dan terafiliasi atau tidak terafiliasi pada komunitas virtual yang ada di Qlue. Misalnya, M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017), dan AD (non-komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 9 Februari 2017) yang mencari informasi sendiri mengenai Qlue dan *smart city*. Mereka merasa bahwa Qlue dapat menjadi medium yang cocok untuk mengaktualisasi dan melaporkan keluhan mereka terkait permasalahan di Jakarta, seperti banjir, macet, jalan rusak, dan lain-lain. Dalam praktiknya, masyarakat informasional yang tergabung dalam Qlue sudah menjadi bagian dari noktah-noktah yang saling berjejaring. Melalui afiliasinya dengan suatu komunitas, masyarakat informasional mendapatkan peran dan tuntutan yang lebih dibandingkan yang tidak terafiliasi pada suatu komunitas. AD sebagai non-komunitas yang aktif di Qlue (dalam wawancara 9 Februari 2017) mengungkapkan mengenai independensi yang ia junjung dalam masyarakat informasional karena peranannya yang dirasa cukup tanpa harus tergabung dalam komunitas.

Kebutuhan warga akan informasi dan keinginan pemerintah memberikan infrastruktur teknologi informasi tentu perlu dukungan berupa

fasilitas internet yang memadai. Internet berperan sebagai penengah relasi antara warga, pemerintah, dan korporasi (swasta). Penggunaan internet berimplikasi pada pola relasi yang terjalin antara ketiganya dan mengubah suatu tatanan yang ada. Dalam artikel ini, tatanan yang berubah adalah adanya jaringan komunikasi yang intensif dan membentuk sebuah komunalitas dalam sistem relasi ke pemerintahan. Komunalitas justru hadir atas inisiasi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi. Dalam praktiknya, komunalitas virtual melalui mekanisme masyarakat jaringan, membangun *space of flows*. Hal ini, menurut Castells (2010), berimplikasi pada keterjangkauan komunitas virtual dan sirkuit yang terbangun untuk menghubungkan noktahnya. Dalam konteks Jakarta Smart City, bekerjanya masyarakat jaringan memang dibatasi secara administratif hanya DKI Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan noktah yang terhubung berasal dari daerah penyangganya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini kemudian membangun sirkuit penopang dari bekerjanya masyarakat jaringan melalui komunitas virtual dalam konteks Jakarta Smart City.

Castells (2010) memberi konteks baru mengenai identitas dalam komunalitas berbasis virtual yang berbeda dengan komunalitas fisik berbasis teritorial. Hal ini berkaitan erat dengan aturan main dan ciri yang membedakan antara komunalitas dalam komunitas virtual ini dengan komunalitasnya dalam basis teritorial. Isu identitas komunitas yang dibawa awalnya berbasis teritorial, kemudian muncul basis komunitas virtual yang mewarnai dinamika perubahan yang dibentuk melalui mekanisme *smart city*.

KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL DAN ADANYA IDENTITAS VIRTUAL YANG DIHADIRKAN MELALUI MEKANISME SMART CITY

Komunalitas menjadi menarik untuk diulas mengingat adanya jaringan-jaringan dalam masyarakat yang membangun komunitas. *Smart city* menjadi sebuah infrastruktur kebijakan yang mendorong komunalitas antarwarga dalam tataran sebuah kota. Hal ini juga yang mungkin memperkuat suatu gagasan teoretis dalam sosiologi perkotaan

mengenai keberadaan komunalitas yang ada di kota. Menurut Castells (2010), komunalitas adalah tindakan masyarakat kota yang menghindari proses individuasi dan berusaha mengklasterkan dirinya dalam sebuah organisasi berbasis identitas kultural yang sama. Makna mengklasterkan diri menjadi hal yang penting terkait adanya bentuk komunalitas virtual yang lahir dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah berupa Jakarta Smart City.

Sebelumnya, komunalitas dalam studi perkotaan diidentikkan dengan bentuk tindakan kolektif yang bersifat resisten terhadap pemerintah lokal dengan membawa kepentingan dan nilai tertentu (Castells, 2010). Hal ini seperti yang terjadi pada remaja Johar Baru, Jakarta Pusat, yang membangun komunalitas berbasis teritorial dan berusaha menentang pemerintah. Darmajanti dkk (2012) menjelaskan bahwa tawuran antarkampung di Johar Baru merupakan bentuk *civil disobedience* terhadap pemerintah lokal yang mengeksklusi mereka. Tawuran dapat dimaknai sebagai bentuk aktivitas komunalitas yang membangun identitas teritorial yang sama untuk bersifat resisten terhadap pemerintah, hal ini sejalan dengan Castells (2010).

Melalui bantuan inovasi teknologi berupa *smart city*, DKI Jakarta berhasil membangun komunalitas virtual secara organik. Mediasi dalam bentuk kebijakan pemerintah dan strategi bisnis mendorong kemunculan komunitas virtual. Hal ini sejalan dengan gagasan Castells (2010) mengenai pengaruh komunikasi baru melalui mediasi kebijakan pemerintah. *Smart city* sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah daerah memberi implikasi pada lahirnya komunalitas. Bekerja sama dengan korporasi teknologi PT Qlue Performa Indonesia, Qlue sebagai media sosial dianggap sebagai jembatan antara warga, pemerintah, dan korporasi yang bersangkutan. IT dan SD (*Board of Director Product dan Sales and Marketing Qlue*, dalam wawancara 13 dan 16 Januari 2017) menjelaskan bahwa Qlue, sebagai perusahaan teknologi, memiliki ide dan gagasan yang sama mengenai konsep pelaporan warga yang menjembatani pemerintah, swasta (korporasi), dan warga. Dengan rancangan berbentuk *smart city* yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Qlue memberi *dashboard* (peta pelaporan

permasalahan DKI Jakarta) yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Qlue sebagai korporasi.

Qlue, sebagai pihak yang bekerja sama dengan Jakarta Smart City, memainkan peranan yang signifikan terhadap kemunculan komunitas virtual. Dengan jumlah pengguna sebanyak ± 600.000 (Data Internal Qlue, 2017), komunalitas dapat hadir dengan sendirinya melalui bentuk virtual, dipicu kebijakan pemerintah berupa *smart city*. IT (Board of Director Sales and Marketing Qlue, dalam wawancara 16 Januari 2017) memaparkan mengenai kemunculan *user hardcore* Qlue yang berkumpul dan membangun komunalitas. Menariknya, komunalitas ini digagas dengan menyepakati aturan main bersama walaupun tidak pernah bertemu dalam dunia nyata sebelumnya.

Kehadiran komunalitas ini memberi dampak yang cukup signifikan terkait dinamika yang dalam forum virtual tersebut dan di dunia nyata. Identitas baru dapat dibentuk individu di dalam maupun luar komunitas melalui *username* dan avatar yang ditampilkan pada *profile* pengguna Qlue. *Username* yang anonim dapat digunakan sebagai identitas individu dalam dunia virtual. Anonimitas ini kemudian menjadi kontestasi yang menarik. SD (Board of Director Product, dalam wawancara 13 Januari 2017) menjelaskan bahwa anonimitas digunakan untuk melindungi pelapor dari ancaman seseorang yang dilaporkan. I (Divisi Field and Operational Jakarta Smart City dalam wawancara 17 April 2017) kembali menegaskan bahwa anonimitas warga dalam dunia virtual di kanal pelaporan digunakan untuk menghindari intimidasi dan rasa takut si pelapor dari pihak luar yang tidak menyukainya. Anonimitas melalui *username* dan avatar (dengan harus memperoleh poin-poin tertentu untuk mendapatkannya) penting dalam forum Qlue untuk mendapat *personal portfolios* seperti yang diutarakan Castells (2010).

Gamification menjadi faktor penarik keterlibatan warga menggunakan Qlue. Dengan sistem ini, pengguna dapat membangun *personal portfolios* berupa avatar yang hanya dapat ditukarkan dengan level dan poin-poin tertentu, seperti dalam gagasan Castells (2010). Dengan banyaknya laporan yang diunggah dan ditindaklanjuti, seorang pengguna dapat dengan mudah naik level,

yakni dari *newbie-citizen-elders-town leader-ambassador*. AD (pengguna aktif Qlue yang tidak tergabung di komunitas, dalam wawancara 9 Februari 2017) mengungkapkan bahwa dengan metode ini, ada rasa penasaran yang dibangun untuk selalu aktif melapor dengan tujuan meningkatkan level. Setelah level meningkat, dengan kualitas laporan yang kecenderungannya baik, beberapa pengguna direkomendasikan oleh komunitas yang aktif di Qlue (seperti Kopas, Polis, dan Neo) untuk bergabung dan terlibat dalam ikatan komunitas virtual. M, F, dan B (anggota aktif komunitas Qlue, dalam wawancara 3, 15, dan 21 April 2017) mengungkapkan bahwa perekrutan yang dilakukan komunitas ini bersifat sangat tertutup dan hati-hati. Hal ini dilakukan karena banyak identitas dan informasi dalam grup internal komunitas virtual ini yang bersifat rahasia dan tidak boleh tersebar ke publik. Hal ini yang kemudian menjadi *personal portfolios* lain terkait kepentingan, nilai, dan keanggotaan daring komunitas virtual ini seperti yang digagas Castells (2010).

Tergabung dalam komunitas virtual menjadi kebanggaan dan prestise tersendiri bagi pengguna dalam forum Qlue. Identitas dalam bentuk avatar, *username*, dan hak prerogatif merupakan hal yang diinginkan pengguna yang ingin tergabung di dalamnya. Hak prerogatif, seperti dapat menghapus *post* seseorang dan *men-dor* (mengembalikan laporan yang sudah ditindaklanjuti berwarna hijau ke laporan yang belum ditindaklanjuti berwarna merah) menjadi hal spesial yang dimiliki anggota komunitas Kopas dan Polis dalam forum Qlue. Hal ini kemudian menjadi dinamika dan kontestasi menarik terkait komunalitas di sebuah kota yang terbentuk dari jaring-jaring yang menghubungkan dan diinsiasi oleh kebijakan pemerintah berupa *smart city*.

IT (Board of Director Sales dan Marketing Qlue dalam wawancara 16 Januari 2017) mengungkapkan bahwa kemunculan mereka merupakan indikasi yang baik karena bersifat organik dan sangat peka dengan kondisi Jakarta. Hal ini didukung oleh I (Divisi Field and Operational dari Jakarta Smart City, dalam wawancara 17 April 2017) yang menyatakan bahwa kemunculan mereka menjadi indikasi yang baik karena sangat

aktif melaporkan, mengadukan, dan melakukan *monitoring* terhadap segala bentuk pelaporan dalam forum Qlue. Hal ini mengindikasikan bahwa Jakarta Smart City memberi ruang baru bagi warga untuk aktif dan terlibat dalam permasalahan kotanya sendiri. Dalam praktiknya, hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan Castells (2010) mengenai komunitas virtual yang tidak secara fisik hadir mengikuti pola komunikasi dan interaksi komunitas berbasis teritorial.

CITIZENSHIP SEBAGAI PENGIKAT DARI SEBUAH KOMUNALITAS BERBASIS VIRTUAL

Komunalitas berbasis virtual, dalam konteks Jakarta Smart City, tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam mendorong partisipasi warga. Melalui mekanisme *smart city*, warga sebagai pihak yang diajak berpartisipasi dalam membangun kota merasa diwadahi dan diberikan kesempatan untuk bersuara. Hal ini seperti yang diungkapkan M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017), dan AD (non-komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 9 Februari 2017) yang aktif dalam forum-forum virtual di Qlue sebagai penengah dalam berkomunikasi dengan pemerintah untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coleman dan Blumler (2007) mengenai partisipasi warga yang dapat didorong melalui komunikasi di internet dan media baru, yakni Qlue. Hal ini juga dapat diukur melalui jumlah pengguna ± 600.000 (Data Internal Qlue, 2017), jumlah pelapor tertinggi di angka 10.000 pelapor/bulan, dan jumlah laporan terbanyak 55.000 laporan per/bulan (Data Jakarta Smart City, 2017) sampai awal tahun 2017.

E-democracy, yang diusung melalui bentuk Jakarta Smart City, juga menjadi faktor yang menarik warga untuk berpartisipasi di sebuah kota. Rasa “kepemilikan” yang tinggi dalam *citizenship* melalui *e-democracy* menghasilkan keterikatan warga yang tergabung dalam komunalitas virtual. Mekanisme demokrasi virtual dengan partisipasi digital yang diberikan oleh pemerintah, memberi tempat tersendiri bagi terbangunnya komunalitas virtual dalam struktur masyarakat informasional. Hal ini sejalan dengan gagasan Coleman dan

Blumler (2007) tentang *citizen belonging* melalui *e-democracy*, yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam tataran sebuah kota. Dalam konteks Jakarta Smart City, hal ini diungkap M, F, B (anggota komunitas yang aktif di Qlue, dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017) dan AD (non-komunitas yang aktif di Qlue dalam wawancara 9 Februari 2017) yang ingin berpartisipasi lewat mekanisme *e-democracy*.

Adanya komunalitas warga dalam bentuk komunitas virtual menjadi faktor lain yang menarik warga untuk aktif dan berkontribusi dalam dunia virtual. Ikatan *citizenship* yang kuat, membuat mereka berkumpul, berdiskusi, dan membangun forum-forum yang membahas masalah di Jakarta dan solusi yang ditawarkan. M, F, dan B (anggota komunitas yang aktif di Qlue dalam wawancara 3 April 2017, 15 April 2017, dan 21 April 2017) memaparkan motifnya bergabung dengan komunitas karena ingin menjadi warga yang baik dan peduli terhadap kehidupan berwarganya. Kepedulian ini disalurkan melalui bentuk pelaporan yang mereka lakukan secara sadar, sebagai hak dan kewajiban karena adanya *citizenship* itu sendiri. Hak dan kewajiban berawal dari kesadaran membangun sebuah kota secara individual, hingga membentuk kohesi sosial yang termanifestasi dalam bentuk komunalitas virtual. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *affective citizenship*, dan hal ini, menurut Coleman dan Blumler (2007), terkait ikatan kewargaan, loyalitas, dan solidaritas kuat.

Citizenship dapat menjadi pemersatu yang mengikat komunitas virtual dalam bentuk *smart city* yang digagas Jakarta Smart City. Hal ini mengindikasikan peranan pemerintah yang masih kuat sebagai infrastruktur yang membangun perangkat dan mendorong terbangunnya komunalitas tersebut secara organik. IT dan SD (*Board of Director Product* dan *Sales and Marketing* Qlue, dalam wawancara 13 dan 16 Januari 2017) mengungkapkan bahwa Qlue, sebagai korporasi yang bekerjasama dengan Jakarta Smart City, membutuhkan warga yang peka dan peduli terhadap kondisi kotanya. Hal ini kemudian tergambar dalam keramaian forum-forum di Qlue. PA (*IT Development* Jakarta Smart City, dalam wawancara 7 Maret 2017) mendukung gagasan tersebut

dengan mengungkapkan perlunya partisipasi aktif warga Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kota. Pemerintah, melalui bentuk *smart city*, dapat membangun ikatan *citizenship* yang kuat sebagai upaya penarik keaktifan warga dalam forum-forum virtual yang membahas Jakarta.

Kemunculan komunitas virtual yang saling terhubung menjadi simpul melalui noktah-noktah dari masyarakat jaringan menjadi implikasi dari adanya *affective citizenship* yang telah dibahas sebelumnya. Noktah-noktah yang saling terhubung menjadi semakin menarik karena mewarnai masyarakat jaringan yang justru terikat dengan ikatan *citizenship*. Komunitas virtual, yang bertujuan membangun Jakarta yang lebih baik, menjadi sebuah kepentingan bersama yang dibagikan dan dipegang oleh anggota komunitas virtual ini, lalu disebarluaskan kembali melalui beragam cara. Dalam bentuk *e-democracy*, masyarakat jaringan dapat terbangun melalui mekanisme komunalitas virtual seperti yang digagas sebelumnya.

Dalam konteks Jakarta Smart City, terdapat faktor kultural yang turut mewarnai dinamika *citizenship* yang mengikat masyarakat jaringan. Hal ini memengaruhi peningkatan jumlah pengguna dan partisipasi yang didorong aspek paternalistik dan ketokohan yang dianut warga Jakarta. SD (BOD *Product* Qlue, dalam wawancara 13 Januari 2017) mengungkapkan bahwa inisiatif *smart city*, yang dipublikasikan besar-besaran oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku gubernur pada masa itu, turut memengaruhi peningkatan pengguna Qlue. Kemudian, B (anggota komunitas Qlue, dalam wawancara 21 April 2017) mendukung dengan menyatakan hal serupa, yakni faktor ketokohan dan paternalistik Ahok yang membuatnya semakin aktif dalam forum Qlue dan bergabung dalam komunalitas virtual dalam Qlue. Hal inilah yang luput dalam analisis Castells terkait faktor kultural yang memengaruhi masyarakat jaringan pada konteks tertentu. Tata kelola yang dilakukan dari bawah secara komunal, seperti gagasan Castells (2010), mengalami kegagalan karena otonomi komunalitas virtual ini masih belum sepenuhnya terjadi pada konteks Jakarta Smart City. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap keberlanjutan komunalitas virtual.

Kondisi politik Jakarta yang memanas saat pilkada turut memengaruhi jumlah pengguna dan laporan di Qlue. Hal ini terkait dengan sentimen-sentimen politik karena paternalistik dan ketokohan warga masih ada. Namun, data internal Qlue (2017) membuktikan hal sebaliknya, yakni ada peningkatan pengguna sebesar $\pm 10\%$ per Januari 2017—setelah mengalami fluktuasi.

Kehadiran komunitas virtual tentu memiliki implikasi bagi warga lain dan pemerintah. Implikasi yang paling terlihat adalah munculnya ketidaksukaan aparat pemerintah level dinas atau kelurahan yang terkena dampak langsung adanya komunitas virtual ini. Hak prerogatif yang dimiliki, seperti *door* dan menghapus *post*, seperti yang dijabarkan sebelumnya, tidak disukai pihak tersebut. I (divisi *Field and Operational* Jakarta Smart City, dalam wawancara 17 April 2017) mengungkapkan implikasi dari ketidaksukaan aparat pemerintah yang terkena dampak tersebut terhadap komunitas virtual. Hal ini terkait peranan mereka yang dianggap “berlebihan” dalam memaknai *citizenship* itu sendiri. Namun, pada akhirnya, mereka merasa membutuhkan komunitas virtual yang sangat peka ini untuk memonitor berjalannya mekanisme pemerintahan melalui bentuk *smart city* yang dimediasi Qlue.

Ikatan *citizenship* sebagai warga Jakarta yang masih peduli menjadi faktor yang mengikat komunitas virtual dalam konteks *smart city*. Dalam praktiknya, muncul tantangan terkait dengan batasan, aturan main, dan keberlanjutan komunalitas virtual tersebut. Hal ini menjadi dinamika menarik yang nantinya bisa dinegosiasikan kembali antara pemerintah dengan warga, baik yang tergabung dalam komunitas virtual maupun yang tidak tergabung dalam ikatan komunitas virtual. Negosiasi tersebut digunakan dengan tujuan membangun masyarakat jaringan melalui praktik *smart city* yang ideal.

PENUTUP

Masyarakat informasional dapat membangun noktah-noktah yang saling terhubung menjadi sebuah masyarakat jaringan melalui mekanisme *smart city* yang diusung Jakarta Smart City.

Literasi (dalam hal teknologi informasi) menjadi bagian yang penting sebagai fondasi awal yang menopang masyarakat jaringan. Relasi kuasa yang terdistribusi melalui sistem *crowdsourc* menandakan masyarakat informasional menjadikan informasi sebagai orientasi nilai dalam distribusi kuasa antara warga, pemerintah, dan korporasi, seperti yang diungkapkan Castells (2010). Dapat disimpulkan bahwa Jakarta Smart City membangun masyarakat jaringan melalui masyarakat informasional dengan syarat literasi informasi warga yang sudah terpenuhi dan kuasa yang dapat terdistribusi. Namun, pada konteks ini, masyarakat informasional dalam Jakarta Smart City mengikuti faktor kultural warga Jakarta yang masih melekat pada aspek paternalistik dan ketokohan seseorang. Hal ini menjadi menarik karena studi masyarakat jaringan dan informasional belum ada yang membahas aspek kultural dalam konteks tertentu.

Masyarakat jaringan yang berkumpul dan membangun komunalitas dalam bentuk komunitas virtual menjadi hal menarik karena muncul dari infrastruktur yang diberikan pemerintah melalui mekanisme *smart city*. Hal ini berbeda dengan komunalitas berbasis teritorial yang hadir karena adanya ketidakpuasan dan resistensi terhadap pemerintah. Identitas virtual yang sering berbeda dengan identitas riil, otonomi dalam ketergabungan dengan komunitas virtual, dan aturan main yang berbeda juga menjadi hal penting terkait dengan adanya masyarakat jaringan yang memainkan peranannya dalam dunia virtual. Perbedaan peran dan identitas ditunjukkan melalui *personal portfolios*, menurut Castells (2010), hal ini berupa *username* dan *avatar* yang berbeda dengan basis teritorial dengan syarat literasi informasi.

Ikatan *citizenship* yang kuat menjadi pemersatu masyarakat jaringan yang berkumpul dan mereproduksi makna dari *citizens* itu sendiri. Peningkatan partisipasi warga melalui media baru dan internet menjadi faktor penarik keaktifan mereka, seperti yang diungkap Coleman dan Blumler (2007). Bentuk *smart city* melalui *e-democracy*, memperkuat gagasan “kepemilikan” warga dalam aspek *citizenship* yang kuat terhadap kotanya melalui bentuk hak dan kewajiban warga itu sendiri.

Yang menjadi problem dalam konteks Jakarta Smart City adalah bentuk tata kelola masyarakat jaringan yang masih dipicu oleh pemerintah DKI Jakarta. Keberlanjutan masyarakat jaringan dalam konteks *smart city* dipertanyakan karena masih sangat bergantung pada pemerintah.

Teknologi informasi dan perkembangannya kemudian membangun dinamika menarik antara masyarakat jaringan, terbentuknya komunalitas, dan ikatan *citizenship* yang kuat melalui *smart city*. Namun, dalam praktiknya, masih ada hierarki kelas terkait penggunaan, kepemilikan, dan akses terhadap teknologi informasi yang mendukung komunalitas virtual yang masih luput dalam studi masyarakat jaringan. Hal ini seperti sebuah ungkapan dalam buku *The Internet Galaxy* yang mengomparasi antara era masyarakat informasi dan masyarakat industri.

If information technology is the present-day equivalent of electricity in the industrial era, in our age the internet could be likened to both the electrical grid and the electric engine because of its ability to distribute the power of information throughout the entire realm of human activity (Castells, 2010).

Pada masyarakat informasi saat ini, akses berkumunal dalam masyarakat jaringan berbasis teknologi informasi, membutuhkan perangkat teknologi yang terhubung dengan internet. Sayangnya pada era masyarakat industri, seseorang harus memiliki perangkat listrik untuk menerima jaringan listrik agar dapat mengubah dan membantu aktivitas manusia.

PUSTAKA ACUAN

- About Jakarta Smart City. (2016). Diakses dari pada 4 Januari 2017 dari <http://smartcity.jakarta.go.id/about>
- Batty, M. (2013). Big data, smart cities, and city planning. *Dialogues in Human Geography*, 3(3), 274–279. <http://dx.doi.org/10.1177/2043820613513390>
- Castells, M. (2010). Globalisation, networking, urbanisation: reflections on the spatial dynamics of the information age. *Urban Studies Journal*, 47(13), 2737–3745. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1177/0042098010377365>

- Castells, M. (2001). *Internet galaxy: reflections on the internet, business, and society*. New York: Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of network society. the information age: economy, society and culture* (2nd ed.). Chichester, UK: Blackwell Publisher Inc.
- Castells, M. (2010). *The power of identity. the information age: economy, society, and culture* (2nd ed.). Chichester, UK: Blackwell Publisher Inc.
- Coleman, S. & Blumler, J. (2007). *The internet and democratic citizenship: theory, practice, and policy*. New York: Cambridge University Press.
- Dameri, R.P., & Benevolo, C. (2016). Governing smart cities: an empirical analysis. *Social Science Computer Review*, 34(6), 693–707. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1177/0894439315611093>
- Darmajanti, L, Wirutomo, P., Seda, Francisia SSE., Yasmine, D.I. (2012). Tawuran, kemiskinan, dan eksklusif sosial: suatu studi kasus mengenai konflik horizontal di Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Naskah tidak dipublikasikan. Laporan Akhir Hibah Riset: Utama UI (RU-UI) Universitas Indonesia, Depok.
- Deakin, M., & Al Waer, H. (2011). From intelligent to smart cities. *Intelligent Buildings International*, 3(3), 133–139. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1080/17508975.2011.586673>
- Dirks, S., & Keeling, M. (2009). A vision of smarter cities: how cities can lead the way into a prosperous and sustainable future. *IBM Global Business Services Executive Report*. New York: IBM Global Services. Diakses pada 7 Mei 2017 dari <http://aec-id.com/wp-content/uploads/2015/03/IBV-Paper-A-Vision-of-Smarter-Cities.pdf>
- Fuchs, C. (2012). Capitalism or information society? the fundamental question of the present structure of society. *European Journal of Social Theory*, 16(4), 413–434.
- Gabrys, J. (2014). Programming environments: environmentality and citizen sensing in the smart city. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32, 30–48. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1068/d16812>
- IISMEX. (2017). Diakses pada? 23 Januari 2017 dari <http://www.iismex.com/>
- Jakarta Smart City. (2017). *Data jumlah laporan dan pelapor per Januari 2016–Januari 2017*. Tidak Dipublikasikan.
- Klauser, F., Paasche, T., Söderstöm, O. (2014). Michael Foucault and the smart city: power dynamics inherent in contemporary governing through code. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32, 869–885. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1068/d13041p>
- Lim, A. (2002). Culture of technology of Singapore. *Brill Asian Journal of Social Science*, 30(2), 271–286.
- Lyon, D. (1986). From ‘post-industrialism’ to ‘information society’: a new social transformation? *Sociology*, 20(4), 577–588.
- May, C. (2008). Opening other windows: a political economy of ‘openness’ in a global information society. *Review of International Studies*, 34, 69–92. <http://dx.doi.org/52.118.24.10>
- Meijer, A., & Bolivar, M.P.R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *Administrative Science*, 82(2), 392–408. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Qlue. (2017). Data jumlah pengguna dan laporan per Januari 2016–Januari 2017. Tidak Dipublikasikan.
- Rule, J.B., & Besen, Y. (2008). The once and future information society. *Springer Theory and Society*, 37(4), 317–342. <http://dx.doi.org/10.1007/s11186-007-9049-6>
- Runde, D.F. (2016). What constitute smart cities? Diakses pada 3 Januari 2017 dari <https://www.csis.org/analysis/what-constitutes-smart-cities>
- Sumanjeet. (2006). E-Governance: an overview in the Indian context. *Indian Journal of Political Science*, 67(4), 857–866.
- Thompson, E.M. (2016). What makes a city ‘smart’? *International Journal of Architectural Computing*, 14(4), 358–371. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1177/1478077116670744>
- Topak, Ö. E. (2013). Governing Turkey’s information society. *Current Sociology*, 61(5-6), 565–583. Diakses pada? dari <http://dx.doi.org/10.1177/0011392113486633>
- Townsend, A. M. (2014). *Smart cities: big data, civic hackers and the quest for new utopia*. New York: W. W. Norton.
- Webster, Fr. (2005). *Theories of the information society*. New York: Routledge.

RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS

Ibnu Nadzir

*Research Center for Society and Culture, Indonesian Institute of Sciences
(P2KK-LIPI)*

ibnu.nadzir@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.

Kata Kunci: *daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet*

ABSTRACT

This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.

Keywords: *online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet*

INTRODUCTION

Previous researchers (Miller & Slater, 2001; Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis, & Tacchi, 2015; van Dijk & Hacker, 2018) have shown that social and cultural phenomena which persist on Internet are not separated from previous values that has been developed offline. Their findings demonstrate that different societies from different part of the world use the same technology in different ways. Those differences are developed from the pre-existing values that has been developed prior the emergence of Internet as technology. However, this does not mean that pre-existing values and norms have deterministic relationship toward the use of Internet or vice versa. Rather, there is back and forth interactions between online and offline practices that borrowing the term proposed by Postill and Pink (2012) we could define as “messy web”.¹ In this regard, the case of Internet use among Indonesian exiles could be beneficial to discuss the complexities of such an instance.

Indonesian exiles in this article is referring to a group of people who were departed from Indonesia to communist countries, such as China, USSR, Albania, Vietnam, and others during Soekarno’s era. At that time, Indonesia developed close relationship with those countries that was not limited to political and diplomatic relationship but also on education and cultural programmes as well (Hill, 2014; Liu, 2006). Therefore, people who went to those countries came from various professional backgrounds, such as students, diplomatic representative, and artists. After the 30th September 1965 event, Indonesian military led by Soeharto persecuted and detained anyone perceived to be affiliated with communism. In consequence, those people who lived in communist countries are demanded to pledge their allegiance toward Soeharto. Amidst the uncertainty of political situation in Indonesia, many people chose not to obey such a demand. Soeharto’s regime then punished the refusal with the revocation of their citizenship status, thus made this group of people to become exiles.

¹ Messy is the term I borrowed from Postill and Pink (2012) that they used to describe unstructured and complex dynamics of interaction in social media. I choose to use the same term to show the parallel between these two interactions.

Most of these exiles continue to live their lives in each respective host countries until around late eighties when during political turmoil they moved to Western European countries, such as Sweden, Germany, France, and Netherlands. The group that resides in latter country are the one that is discussed in this article, particularly because this community is the one with the largest population in comparison with similar community in other countries (Hill, 2008, 2). Although not necessarily about the case in the Netherlands, the study of Indonesian exiles has been conducted by many researchers before. The topics has also touched various issues such as exilic literature (Schaefer, 2011; Setiawan, 2010), exiles in USSR (Hill & Dragojlovic, 2010), exiles in Cuba (Hearman, 2010), academic’s perspective on this subject (Hill, 2008), exiles in Netherlands (Mudzakkir, 2015), transnational activism (Hearman, 2016), Balinese exiles (Dragojlovic, 2010), and collective memories (Dragojlovic, 2012; Sipayung, 2011).

Despite differences on the subject, the discussion on the displacement memories persisted in many of these research. Particularly, on how the experienced of being displaced has become the most important narrative among the community over the years. Hence, it is not an exaggeration to say that the shared experienced of being displaced from their homeland is the bond of the community. It is important to note that this notion of identity based from the displacement is not an exclusive phenomenon of Indonesian exiles. Other studies from different group of exiles such as Iranian (Graham & Khosravi, 2002), Eritrean (Bernal, 2006), Palestinian (Aouragh, 2008), and other groups has demonstrated similar attitude as well. Nevertheless, the discussion on the dynamics within Indonesian exiles community still is important to contribute on the subject of exilic community. To be more specific, this article will discuss how Indonesians engage their ideals with current Indonesia by using Internet.

The existence of Internet practices among Indonesian exiles has been mentioned by previous scholars, e.g. Hearman (2010) and Hill (2008). Nevertheless, the discussion has been relatively brief thus leaving an absence on how the use of

this technology affects the community, particularly their displaced identity. In this context, this article will elaborate how their use of Internet pushed their collective memories to engage with the current notion of Indonesia. Furthermore, through their offline and online engagement, Indonesian exiles are enabled to grasp the sense of being Indonesian despite being separated from the country in the physical sense. To elaborate these arguments, I will discuss two important events exercised by Indonesian exiles. First, the IPT 1965 (International People's Tribunal 1965) and its related events where Indonesian exiles fluidly employed online and offline activism to mobilized their cause. Second, the *Diskusi Forum* (forum discussion) event where information received from online and offline practices were rearticulated and reinterpreted through storytelling activities.

INTERNATIONAL PEOPLE TRIBUNAL (IPT) 1965 AND THE LONG PURSUIT OF JUSTICE

During my presence in the Netherlands, IPT 1965 and its aftermath events was the most important topic among Indonesian exiles in the Netherlands. The initiative was started in 2013, after the screening of documentary film, *The Act of Killing*, in the Netherlands. When this documentary was launched publicly, many scholars and human rights activists considered it important because it had great impact raising international and domestic awareness about communist persecution in Indonesia during 1965–1966. Realizing this momentum, several activists and scholars in the Netherlands worked to create a movement to pursue the Indonesian's government responsibility, including sociologist Saskia Wierenga² and Nursyahbani Katjasungkana.³ After a series of discussions among the initiators, they came up with idea of organizing a people's tribunal.

The idea for a people's tribunal on the 1965 case was developed from the precedents of other tribunals including the *Russell Tribunal*⁴ and *Biak*

Tribunal.⁵ The initiators were aware that this kind of tribunal could not execute any legal sanctions, but could only provide moral sanctions. However, this was still considered an important progress since its result could be used as a legal basis to pursue justice from the Indonesian government regarding persecution in 1965/1966.⁶ Previously, there were several other initiatives that aimed to bring justice for these people, particularly after the fall of the New Order.

During the presidential period of Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur, for example, there was a talk to bring exiles that he described as “orang-orang *klayaban*”⁷. Gus Dur already interacted with Indonesian exiles long before he became president. Therefore, he understood the situation of these people and sent his Minister of Justice, Yusril Ihza Mahendra, to assess the possibilities of returning this community to Indonesia. Yusril came to Netherlands and met several exiles to listen their opinion about the plan. Some held great expectations that their long aspiration would finally be realised after this meeting. However, there was no continuation of this effort after Gus Dur was impeached in 2001.⁸

During the presidential term of Susilo Bambang Yudhoyono, there was also an effort to return citizenship to these exiles. The representation of Indonesian embassy in Netherlands met several Indonesian exiles and proposed to give them a new Indonesian passport. To process the passport, Indonesian exiles were formally viewed as Indonesian citizens who had failed to extend their passport. While a few accepted this

the same name was created to investigate other state crimes.

⁵ A tribunal initiated to conduct an investigation of the Indonesian government's crimes in Biak, West Papua.

⁶ As manifested on their website, <http://www.tribunal1965.org/id/about/faq-ipt-65/>, accessed on December 12th, 2016

⁷ Literally translated as wanderers, referring to the fact that exiles were forced to move around countries after being prevented from returning.

⁸ Interview with Sarmaji on June 30th, 2016. Sarmaji did not elaborate further on how the talks of this effort failed. However, he implied that he questioned the sincerity of Yusril on his effort to talk with exiles. The discontinuation of government's effort, in his opinion proved that at the start Yusril never really has any intentions to bring exiles back to Indonesia.

² Dutch scholar, focuses on gender and women issues.

³ Indonesian human rights' lawyer.

⁴ A private body initially organized to investigate American war crimes in Vietnam. Later a similar tribunal using

offer, most of them refused and chose to keep their Dutch citizenship instead. The proposal was turned down because it did not address the fundamental demand of Indonesian exiles, namely an acknowledgement by the Indonesian government that it had committed injustice in the past. The Indonesian government, represented by the embassy, could not meet this demand, so the talks were discontinued.⁹

For Indonesian exiles, an acknowledgement from the Indonesian government that they are victims of the state's action is more important than formal documents restoring their Indonesian citizenship. Jackson (2013, 73) explains the importance of acknowledgement for a group of people who experienced trauma or loss in the past. He argues that a demand for acknowledgement from some ultimate authority is not merely an effort to seek material retribution. Much more than that, it is a symbolic gesture to regain a loss by demanding the authority to forfeit some of its power. In this regard, a public apology is an act of acknowledgement of "the truth of the experience of the powerless" (Jackson, 2013, 72). Therefore, it is understandable that most Indonesian exiles refused the offer of a new passport, as that offer did not provide acknowledgement of the experience that forced them to become exiles. A passport is 'merely a paper' or 'document', as my informants said, and so could not be seen as a meaningful gesture from the Indonesian government to meet the exiles' demand.

In 2012, Komnas HAM (National Commission of Human Rights) did research on killings and persecution of alleged communists perpetrated by the government in 1965. In that process, one of the representatives went to Netherlands and met several exiles to discuss the issue in general and the situation of exiles in particular. Komnas HAM then held a press conference in which they announced their conclusion that the execution of alleged communists in 1965/1966 was a severe human rights' violation. Nevertheless, the final report did not include exiles as part of the victims.¹⁰ Some of my informants

⁹ Interview with Andreas, June 16th, 2016.

¹⁰ For many exiles, the question on why Komnas HAM did not include exiles testimony as part of the report is also a baffling issues. However, on *Diskusi Forum* meeting

expressed their disappointment about this because they had high expectations about this initiative beforehand.¹¹ Komnas HAM also reported its findings to the Indonesian government but there was no follow-up.

IPT 1965 was initiated with a hope to create a 'different kind of effort' from other initiatives related to 1965 done in the past. From a very early stage, several representatives of Indonesian exiles were involved. Their involvement was considered crucial for the committee because one of their goals was to give a voice to victims¹² and represent their experiences as best as possible as stated by Lea.¹³

"Exiles are the first party that was needed to be heard, because we prioritize the voice of the victims. Meanwhile people who are involved in the arrangement were coming from various backgrounds... Their voices are the priority, we only helped to reflect those experiences into more practical testimony."

The delicate matter of conveying experiences to other people who did not share similar experiences is not an easy task. As Jackson (2013, 84) pointed out, there is an unbridgeable gap between the one who experienced a certain situation and others who did not. He added that this 'experience exacerbates the feeling of being isolated' and rendered the victim as speechless (Jackson, 2013, 84). In this regard, the role of Indonesian exiles is essential. As victims of the New Order regime themselves, they have the capacity to understand feelings and suffering experienced by other victims who experienced abuse and torture first-hand. Through this understanding, Indonesian exiles bridged these experiences to non-victim committee members to help make the tribunal sensitive to their feelings. Aminah and

¹¹ It is important to note that on one discussion, an exile suggested that the absence of acknowledgment toward exiles as victims was their own responsibility, because many of them did not allow their data to be included within the report.

¹² As manifested on their website, <http://www.tribunal1965.org/id/about/concept-note-on-international-peoples-tribunal-on-crimes-against-humanity-in-indonesia-1965/> accessed 12 December 2016

¹³ Interview with Lea Pamungkas, coordinator of Media and Communication of IPT 1965, June 16th 2016.

Andreas, for example, were consulted by other committee members and were asked to attend meetings for tribunal preparation.

The tribunal itself was held for four days, on November 10–13th 2015. Apart from its status as ‘legal city’, The Hague was chosen to be a place for tribunal because many Indonesian exiles who are 1965 victims live in the Netherlands.¹⁴ The whole process involved hundreds of volunteers filling different roles from various backgrounds, including academics, activists, victims, and students. They were also come from different nationalities, e.g. Zak Yacoob, the head judge, is a citizen of South Africa, Todung Mulya Lubis, one of the prosecutors, is Indonesian, while Saskia Wierenga, one of the expert witnesses, is a Dutch citizen. During the event, Indonesian exiles were involved in different activities. Some helped to provide accommodation for people who live abroad, while Aminah and one other exile testified during the trial.

One of the things that differentiate IPT 1965 from previous initiatives regarding the 1965 incident is the dominant use of the Internet. The Internet was utilized from very early in the tribunal preparations. The committee mainly used the Internet to communicate with their network all around the world through mailing lists, video calls, and social messenger platforms like WhatsApp. IPT 1965 also launched a website to disseminate all information related to this initiative. Finally, the whole trial was streamed online on *YouTube*, so people who could not be present could still monitor the trial in real time, including some of my informants. To some extent, the use of various Internet platforms helped IPT 1965 receive more public recognition, particularly in Indonesia.

The court process received plenty of news coverage from Indonesian media, some of which even sent their reporters to The Hague. This exposure then led representatives of the Indonesian government under President Joko Widodo to make a response. Around this time, the stance taken by the Indonesian government was generally defensive. The Indonesian vice president, Jusuf Kalla, said that since the IPT was

¹⁴ Ibid.

a ‘pseudo-tribunal’, there was no need for the Indonesian government to respond¹⁵, while Luhut Pandjaitan, Coordinator Minister of Politics, Justice, and Defence, accused the committee of IPT 1965 of being a group of people whose ‘thinking is no longer Indonesian’.¹⁶ Nevertheless, several months after the tribunal, the Indonesian government held a symposium to discuss the problem of alleged communist persecution in 1965/1966. This kind of event was unprecedented in Indonesia. Even until recently, many discussions related to communism or Marxism had to be cancelled, under pressure from police officials or vigilante organizations.

At the symposium in April 2016, many speakers from different groups articulated their thoughts about the event, from academics, victims, and representatives of the military considered responsible for the killings. Despite the reluctance of the military to acknowledge the systematic killings¹⁷, the general tone of the symposium was closer to the aspirations of the victims than dominant narratives regarding communism in Indonesia. The symposium gave recommendations that acknowledged the role of the state in the alleged communist killings in the past.¹⁸

A few days after the symposium, the Indonesian president Joko Widodo visited the Netherlands on bilateral business. The IPT 1965 committee and several exiles organized a public demonstration demanded truth-finding as part of the reconciliation process. They also aspired to give those written demands directly to Joko Widodo. This was perceived as an important act to respond to the statement from Luhut at the symposium that the government did not have any intention to apologize.¹⁹ Despite the maximum security, Francisca, one representative of the exiles,

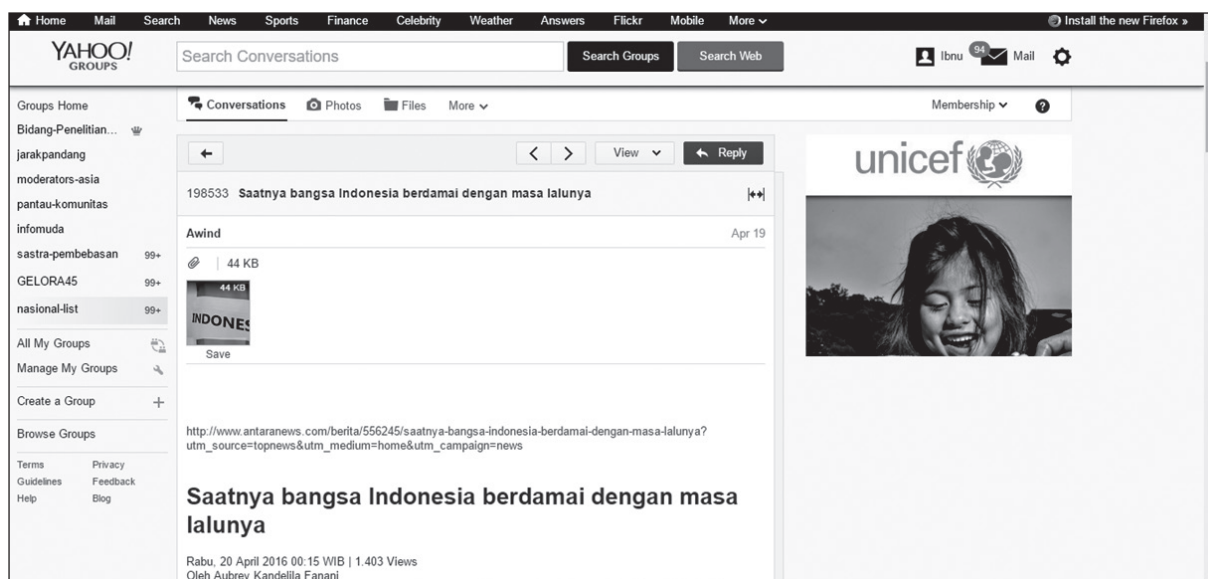
¹⁵ Hasibuan, “Jusuf Kalla soal sidang rakyat 1965: Itu pengadilan semu.”

¹⁶ BBC News Indonesia, “Luhut: Penyelenggara IPT 1965 ‘pikirannya bukan Indonesia lagi’.”

¹⁷ Affar, “Penyangkalan pembunuhan massal di Simposium 1965.”

¹⁸ Atharini, “Apa isi rekomendasi tim perumus Simposium Tragedi 1965?”

¹⁹ Theo, “Wanita yang serahkan surat tuntutan rekonsiliasi ‘65 kepada Jokowi.”



Sources: Nasional-list (20 April 2016)

Picture 1. Display of Mailing List Posting

managed to slip through and give the demand letters directly to the Indonesian president, who replied “I know”.²⁰

The enthusiasm of Indonesian exiles about these series of events could also be seen in their online activities. Their enthusiasm was expressed through news snippet they posted on mailing lists. After the symposium, Esti for example posted news from *Antara* online portal entitled “It is time for Indonesia to make peace with its past.”

Chalik Hamid, an exile, responded to this post with the following comment (Nasional-list, 20 April 2016).

“Hopefully recommendations from the symposium could heal the old wounds; hence it will not become a burden for our descendants in the future. With a legal way of resolution, let’s build Indonesia with a new face, which includes the rights’ rehabilitation for those who still wander abroad because their passports were forcefully revoked by the New Order regime. Without any effort to unify every strength of Indonesia as a nation, Indonesia will always be negatively perceived in the eyes of the world, as a state who could not resolve severe human rights’ violations within its own country.

Drawing comparison with Anderson’s notion on imagined communities, Appadurai (1996) argues that although movement of people

²⁰ Ibid

such as refugees is hardly a new phenomenon, the emergence of electronic media has an unprecedented influence. Electronic media allows displaced people to imagine their homeland through a “rapid flow of mass-mediated images, scripts, and sensations” (Appadurai, 1996, 4). In the case of Indonesian exiles, as exemplified by interactions between Esti and Chalik, news is treated as a partial representation of the current Indonesia. It is partial because they do not merely act like passive readers. They engage the information about the symposium with their hopes and aspirations developed from their experiences as exiles. Therefore, comparable to Chinese political writer (Yongming, 2005, 786), Indonesian exiles’ agency lies in the use of their own framework for curating and interpreting information they receive from the Internet.

Appadurai (1996) also discussed the role of imagination as one of the most important forces in this current globalized world. When he discussed imagination, he specifically separated this concept from fantasy. While he considered the latter as mostly private, imagination has what he called a “projective sense” (Appadurai, 1996, 7). This quality enables imagination to be translated into actions. In this regard, while Indonesian exiles interpret information based on their ideals, information from the Internet also shapes their ideas about themselves and Indonesia

as a homeland. On the post above, for instance, Chalik's comment demonstrated the negotiation between his ideas about Indonesia in the past where the government had committed human rights' violations, with present-day Indonesia in which he could put his hopes. Thus, in these practices, there is a constant negotiation between past and present. This kind of engagement with homeland would be unthinkable without the use of the Internet. While their collective imagination as exiles has long been an important drive of their political engagements, online practices bring a new dynamic.

These engagements show that Indonesian exiles are not only concerned about things that happened in the past, but also about the present situation. This interest is relatively distinct, particularly considering their status as an elder. For comparison, Khvorostianov, Elias, and Nimrod (2012, 595) shows that older Russian Jewish migrants in Israel prefer to use the Internet to look about the past in Russia. Unlike the younger migrants, they do not have any interest in the current situation in Russia.

The involvement of Indonesian exiles in this series of events also shows that their online engagements were exercised parallel to their offline activism. One example of this simultaneous engagement on these two platforms could be seen in the case of the verdict's announcement. To grasp the kind of activities engaged by exiles in this event, I would present an excerpt from my field notes.

"In a cloudy morning on 20 July 2016, I attended the verdict announcement of the International People's Tribunal 1965 (IPT 1965) held at the UvA library in Amsterdam. For many exiles, this announcement had been the most anticipated event for months. There was a great hope that this announcement would provide them with some justice they had been longing for decades. I was not very early, but not late either. Some Indonesian traditional snacks were served around the table, while Lea Pamungkas, IPT committee member, greeted other guests. The event was held in a long hall with a wooden floor. Most of the seats were already filled in a room where the big white screen seemed in contrast with the decorative posters that depicted life during colonial era. There was a sense of enthusiasm among the audi-

ences. They smiled and talked to each other while waiting for the start. I picked a seat on the left side of the hall, at the back. Sitting across from me were several familiar faces I have met before. I smiled and nodded to Andreas²¹, who was sitting in that group. Chalik, another exile, came to me and said, "Come with me, I will introduce you to Esti." During my previous interview with Chalik, he had suggested that I should talk with Esti since the name mentioned is one among few exiles who is very active on Internet.

Then I went back into room and sat on my chair. An Indonesian woman sat next to me and introduced herself as a law student who studied human rights for her doctorate in Netherlands. We talked a little about this verdict and the discussion regarding 1965 event, which at that time was also an important subject in Indonesia. "Aren't these (matters) still sensitive in Indonesia?" she asked. It sounded more like a rhetorical question, which is quite common to be found in discussions among Indonesian regarding 1965 incident. It was a reminder that for many Indonesians, it is still hard to acknowledge that the New Order regime led by Soeharto systematically persecuted their own citizens without even a fair trial.

Our conversation was interrupted when the light dimmed, signalling that the event was about to start. A pre-recorded video of Zak Yacoub, the head judge, reading the verdict in *Braille*, was screened. Alongside his statements, the video also showed an old footage of the communists' persecution in Indonesia. Everyone paid attention to that video and several people made some notes. The verdict took a strong stance against the crime and demanded the Indonesian government to be responsible for the victims. There was one exile who looked overwhelmed by the verdict; her colleague then patted her back. After the screening, the committee turned the light on again and people clapped as token of appreciation to the verdict.

After the screening, the committee asked several people to give a speech about the verdict. Among people who presented a speech was the exiles' representative, Sarmadji. He gave a speech in Indonesian that was translated into Dutch by an interpreter. "For me it (the verdict) is necessary to be disseminated among Indonesian people. It is very important because until today there have been a lot of manipulations regarding (30th September) 1965 incident," he said. Other speakers

²¹ The chairman of Persaudaraan, an Indonesian exiles community in Netherlands.

then emphasized how this verdict could be dealt with an international organization like the UN, and the necessity to push the Indonesian government by Indonesian society from within country. Those speeches concluded the event that morning. Yet many people were still eager to talk with each other, to share their thoughts and opinions about the verdict.”

As described above, Indonesian exiles were present at this event. Whether to observe, document the event, or present a speech, they enthusiastically participated in this offline event. Shortly after the event, there were many posts related to the verdict announcement on the Internet. In one secret Facebook group²² of IPT 1965 for example, one exile posted news about the Indonesian government’s response to the IPT 1965 verdict. To this news, he added his comment, “The government has started to feel besieged.”²³ With this post, this exile implied that the verdict had a significant pressure to the government. There were also posts created on mailing lists. Esti, for example, commented on the government’s refusal to work on this verdict.

“...the greatest deception was the one that Soeharto did with his military. This deception still rules over most brains in Indonesia. Soeharto’s deceptions alongside ABRI have sacrificed millions of innocent Indonesian citizens, alongside its natural resources. Now, the one who is referred as Reformation government is still trying to deceive the Indonesian people. Will Indonesia continue to live with deceptions? Read the conclusion of the IPT that was held in The Hague in 2015, that was announced on 20 July 2016 in Amsterdam.”

AA (GELORA 45, 21 April 2016)

In this post, Esti connected the recent information regarding IPT 1965 with older knowledge and ideals about Indonesia in the past. Esti addressed the past by writing about Soeharto’s deception. He then elaborated the past even further as some sort of original sin when he said that act of deceptions had taken a toll on Indonesia that was still affecting the general

²² As mentioned before, it is a feature of Facebook that means the group could not be found or accessed by other users unless they added into the group by its founder/moderator.

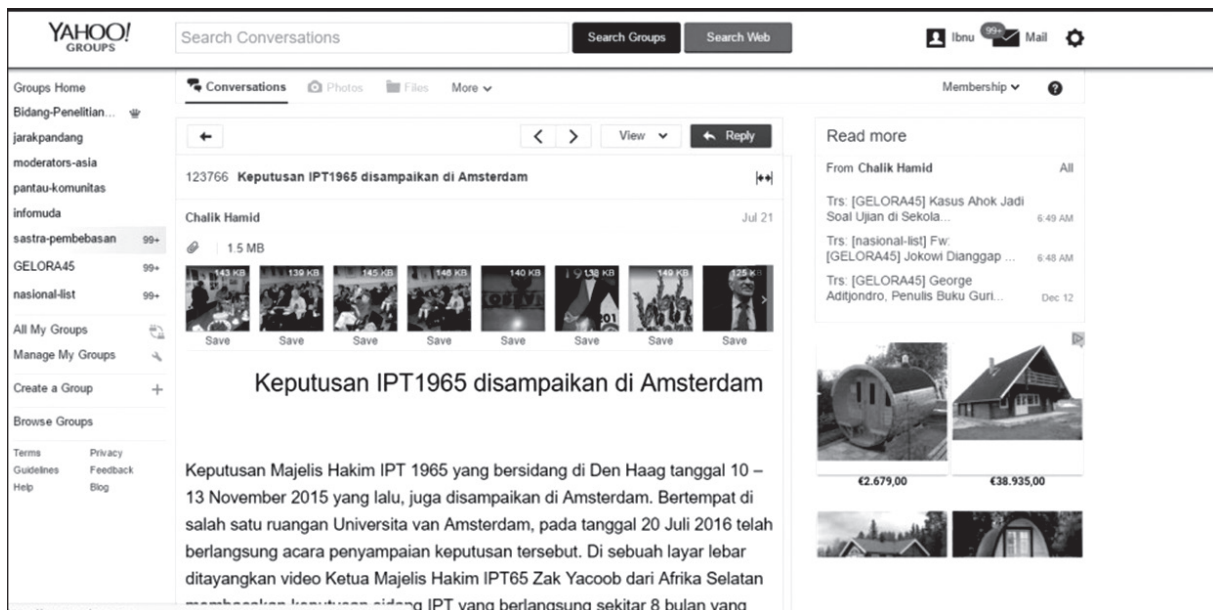
²³ Posted on 22 July 2016

society today. In the last part of his argument, he made the connection between the Indonesia in the past and present when he asserted that the current regime reproduced similar deceptions. He also stated that the conclusion of IPT 1965 should be taken as a reference to expose the deception.

When Esti talked about IPT 1965, this was not an event he referred in a distant past. The initiative is also not something he learned about only through online platforms like Facebook. Rather it is something he was personally involved with, alongside many other exiles in the Netherlands. Therefore, Esti was making online posts while at the same time performing offline activism. He has performed these kinds of activities since the mid-1990s. He joined multiple organizations in the Netherlands to oppose Soeharto, and at the same time, he was also active in *Apakabar*. These two forms of activism were performed simultaneously, thus influencing each other. The activities of his organizations became a reference for his posting. On the other hand, the information he received from *Apakabar* informed the kind of actions made by his organizations.

Chalik’s case is similar to this. He attended many of the events related to IPT 1965. He also documented those events with his camera, wrote reports, and posted these documentations on a mailing list. The documentation then became a reference to other members of mailing lists which included Indonesian exiles, thereby informing their online and offline actions.

These two forms of activism should not be seen as something separated, as they influence each other. The accounts showed that both Esti and Chalik purposely performed their activism both online and offline in a flexible way to mobilize their cause. Thus the line between online and offline activism is blurred. This kind of engagement affirms the notion discussed by Miller and Slater (2001) that a complete separation between online and offline is no longer relevant. Another case that is also important to understand this dynamic is *Diskusi Forum* offline meetings. At this event, Indonesian exiles rearticulated the information they gathered from Internet through story telling.



Source: Sastra Pembebasan (21 July 2016)

Picture 2. Documentation of IPT 1965 Verdict Announcement by Chalik

EXPERIENCING INDONESIA ON *DISKUSI FORUM*

After the fall of Soeharto in 1998, many Indonesian activists as well as students visited the Netherlands. Some of them later even decided to stay on in the Netherlands. This influx of people provided information to Indonesian exiles about the current situation in Indonesia. Knowing the situation, Ana, Asih²⁴, and several other friends believed that it was important to gather information from them to know ‘the truth about the current situation’ of Indonesia.²⁵ Thus, around 1998–1999, they initiated a discussion group as a place for exchange of information.

From the beginning, this discussion group utilized email to arrange offline meetings. Later, they created their *Diskusi Forum* mailing list to do this process, which is still used until today. The *Diskusi Forum* meetings do not have any given schedules, but are arranged ad hoc based on a certain interest of issues or informants that happen to come to the Netherlands. Once, for instance, they arranged a meeting because Asvi Warman Adam, Indonesian historian, was visiting the Netherlands. Other occasions, like the one I attended, were arranged because many exiles were interested in discussing the impact of the

1965 symposium. As stated in the previous section, it was also a topic that became an important discussion on the Internet. At some point in the past, there were offline meetings once every two months. In every meeting, the numbers of participants would vary between twenty and fifty people. In recent years, the number of participants has declined mostly because some members have passed away.

My participation in a *Diskusi Forum* event was triggered by one interview with an informant. Knowing that I was interested to find out about the use of the Internet among Indonesian exiles, she suggested for me to contact Asih, a co-founder of this forum. Several days later, I met her and she invited me to come at their next meeting. We then interacted through emails, in which she also explained the general agenda of the meeting:

“Please bring your friend. This is not a closed meeting. (It is) a free event. We will talk about the 65 symposium, for which until today there has not been any follow-up. (We will also talk) about the governor elections of DKI, and the government’s policy in handling its ocean to become a maritime country. There are also friends of the Forum that will present impressions from their visit to Indonesia. Thus, the schedule is quite tight...” (Asih’s email, 2 August 2016)

²⁴ Pseudonym

²⁵ Interview with Ana, August 17th, 2016

Based on that email, it is clear that this forum does not discuss only a single topic, rather multiple topics mostly issues that were considered relevant in contemporary Indonesia. The meeting was located in Zeist, in a small common room surrounded by apartments. *Diskusi Forum* does not always use this place as a location. For past events with fewer participants, the meetings were held at Ana's or Asih's place. When I arrived, there were already several participants that talked to each other. By the time the event started, several minutes after eleven, around thirty participants were present in that room. Most of the participants were exiles, and there were approximately the same number of men and women in the venue. Asih opened the event by explaining the agenda to the other participants. She suggested to allocate the time into two sections. The first section was the presentation by several exiles who had recently visited Indonesia. They were expected to talk about their impressions of the current situation in Indonesia. The second section was a discussion on political issues that were mentioned previously in Asih's email. Before the meeting started, I introduced myself and asked their permission to record the discussion. Some participants objected to being recorded, while others did not mind. Therefore, it was decided by the forum that the participants who objected would express their objection before they talked. In this article I use pseudonyms to refer to anyone apart from the informants I interviewed personally.

Ana was the first presenter. During her visit to Indonesia, she had the opportunity to talk and interact with what she referred to as the 'young generation'. She said that from these interactions she learned a lot of information about current political and social issues in Indonesia. To other participants in the *Diskusi Forum*, she conveyed that despite having good political intentions, Indonesian president Joko Widodo was still facing many great problems. Ana said that one of the most important problems is how many new laws give too much freedom for foreign investment. On a more positive note, she then talked about the progress of Jakarta under the current governor, Basuki Tjahaja Purnama. In her opinion, the progress made by him could be seen from various aspects, from better transportation and clean

rivers to less corruption from public officials. Ana also added that she grew up in Jakarta and had visited this city several times since she moved to the Netherlands, but had never seen this kind of progress in the past. Therefore, she hoped that the current governor could be re-elected in the next election.

The rules stated by Asih at the beginning mentioned how the questions should be asked after presentation. Nevertheless, in reality the participants made comments or asked questions during Ana's presentation. Kartaprawira, for instance, corrected Ana on her statement that Basuki had eradicated corruption. He said that Basuki did not eradicate corruption, since it is another government body's responsibility. However, Basuki implemented bureaucratic reform that minimized the chance of corruption. Farida, who recently had also visited Jakarta, verified several points made by Ana. Aside from her impressions about Indonesia's development, Farida also told the forum about how different the acceptance she received from family and relatives this time. Despite her background as an exile, her family gave her a warm welcome. This was contrasted to her visit to Indonesia eighteen years ago, when many people ignored her. Farida believed that it was part of the positive developments in Indonesia.

The discussion on the first session was not all about social and political issues, some presenters emphasized their trip more as part of their leisure activities. Chalik, for instance, presented his road trip with his family to several cities in Sumatera. His stories presented a contrast between the problems he faced, such as bad infrastructure or bad ethics of civil servants, with the beautiful scenery of places he visited. Another participant, Hidayat²⁶ also talked more about the trip as a holiday experience. He expressed curiosity about how the guard of one tourism site could recognize his foreign citizenship from body language. Hidayat also visited Soekarno's burial, where he proudly identified himself as "Soekarno's fan" to the officer of the burial. He quite surprised himself that he felt safe enough to present his identity to that stranger. In this regard, he agreed with Farida that in general he also felt much safer than on previous trips.

²⁶ Pseudonym

After the lunch break, the second session started, again with Asih as the moderator. She gave the first opportunity to talk to Kartaprawira as the head of LPK65²⁷. He was requested to comment on the suggestion to initiate dialogue between the Indonesian government and exile community, just like the one they did during Gus Dur's presidency. At the beginning of his talk, Kartaprawira said that he did not go to the IPT 1965 verdict announcement due to illness. Nevertheless, he followed the announcement through online streaming. Kartaprawira also stressed how he spread the link of that live stream to his blog and several mailing lists that could reach thousands of members. He continued his presentation by praising Joko Widodo for his good track record, as public officials can be monitored for various aspects of development such as education, health, and infrastructure. Even more important for this community, he posited that Widodo has promised to solve cases of past human rights' violations. This promise, Kartaprawira said, can be regarded as a debt that can only be collected at the end of his term. Therefore, he suggested monitoring this presidency first before demanding the 'payment' of that debt.

For Kartaprawira, the symposium is the start of that promise's fulfilment. Nevertheless, there are still many people in Indonesia who oppose this effort, particularly from the military. They even created their own symposium to counter the first symposium. Since the results from both symposiums had already been given to the president, he suggested waiting for the follow up of this situation. At the end of his talk, Kartaprawira praised the IPT 1965. Although this initiative could not give legal sanctions, it helps to prove to the international public that there were severe human rights' violations in Indonesia. Moreover, he reminded others that IPT 1965 managed to address exiling people as part of human rights' violations when previously this categorization was failed to be included on the report made by Komnas HAM. At the end, he did not really address the question started by Asih, but the topic he discussed was relevant to the one suggested at the beginning of the meeting.

²⁷ *Lembaga Perlindungan Korban 1965*, a foundation initiated by exiles in Netherlands to advocate victims related to 1965 event.

Similar to the first session, other participants were also given opportunity to respond to Kartaprawira's presentation. Speaking pessimistically, Hidayat considered efforts to solve human rights' violations in Indonesia as suffering a setback. This could be seen from the rise of anti-communist movements in Indonesia, and the placement of human rights' violators in strategic government positions. In a similar tone, Andreas praised the importance of IPT 1965, but reminded others not to expect too much. His opinion was based on the observation that the president took an ambiguous position toward solving human rights' violations. On the other hand, IPT 1965 does not have the function to punish the perpetrators. However, given the circumstances, and judging from people's responses, Andreas considered that IPT 1965 was quite successful.

As one of the participants, I was also requested to give my opinions on this matter. I started my opinion by saying that I grew up during the last decade of New Order regime, where its control toward society was not as strong as it used to be. Hence, though my generation still experienced some of propaganda against communism, we also had more access to other information regarding the same subject. This fact was also addressed by many other participants at this event, that is also the one of the reason they asked me to talk which was to represent younger generations' opinion on these matters. I stated that I agreed with many points discussed before. I mentioned that despite the strong re-emergence of the anti-communist movement in Indonesia, the fact that more people currently engage with Marxism through publications or activism shows that the situation in Indonesia is not completely negative. Rather it is a democratic arena where there is a contestation of ideas regarding the issue.

Similar to several exiles, Esti then shared his concern regarding government's intention to solve human rights' violations. Additionally, he pointed out how the exile community might have some responsibility for not being included in the Komnas HAM report. Other participant, Sarmadji, added another interesting point on these topics. He argued that the exile community has the resilience to keep on struggling for justice.

In his case, this struggle is reflected in his daily activities collecting various publications related to communism and the 1965 incident in Indonesia. Sarmadji also believes that exile's spirit of struggle will be inherited by younger generations. Around half past four, the event was ended because the room was rented and there is time limit for the use. At the end of the discussion, Asih stated that this forum had been initiated so they could hear each other's opinions. Although there were many different opinions, it was important to discuss them freely so they could use these as a reference for their own consideration.

In reality, the interactions were even messier²⁸ and more spontaneous than this description. During each presentation, for example, there were many interruptions made to respond to some points made by presenters. Aside from the main topics, there were also smaller topics that were discussed in between the presentations. For example, some participants talked about the length of stay permit in Indonesia as a foreigner. Others dwelt on very particular subjects like the quality of Indonesian trains. In this regard, the messiness and spontaneity resemble similar form of discussions that are performed online, especially on mailing lists.

On mailing lists, the interactions are usually started by postings from some members. Postings are created by forwarding news considered relevant onto the list. On rare occasions, members produced their own written piece about certain issues. Other members then respond to these posts, most of the time with short commentaries. The continuation of the interactions depends on how controversial the topic is or the response from the members of the mailing list.

Similar interactions took place at this event. The discussions were started with presentations from several participants. The other participants responded to the main presenters, sometimes in the middle of their presentation. Hence, the stories presented by these presenters were constantly affirmed or refuted during the presentations. This pattern of interactions made the discussions really hard to have any kind of consensus. Asih is completely aware of this nature of *Diskusi*

Forum. Therefore, she never tries to draw any kind of conclusion for each discussion. In this regard, she portrays this forum as a place where people exchange ideas freely to each other. As discussed above, activities on mailing lists also have a similar freedom and flexibility and eventually produce more dissonance than consensus. These similarities are not a coincidence, since it is clear that both activities, on two different platforms, always inform one another.

Despite the similarities, there is fundamental difference between interactions on mailing lists and *Diskusi Forum*, namely the distant between participants. Generally, there is an assumption that on mailing lists there is a clear distance between members. People can write anything and do not have to deal with the direct consequences that might happen because of that writing. This sense of security is even stronger if the member uses a pseudonym that does not refer to their offline identity. This privilege enables people to act freely on mailing lists. On the other hand, there is no distance between participants in the *Diskusi Forum*. Each participant can respond directly to other participants' ideas. People could also monitor each other's reactions toward certain ideas brought up by participants. Therefore, despite many different opinions, none of them were delivered in a harsh manner.

However, in the case of Indonesian exiles, the participation on mailing lists does not automatically translate to anonymity or immunity from consequences. There are cases where online interactions could actually have affected their personal relations in offline events. These consequences are enabled to persist because members among Indonesian exiles mailing lists usually are not total strangers. Even if they use pseudonyms, most members knew the identity behind those make up names. Hence, anyone who posted or initiated harsh comments is never really safe from the consequences. Nonetheless, the consequences do not really effective to prevent harsh debates and open conflict from being performed on a mailing list. Even with its limitations, apparently for some exiles the platform still provides some sort of safe distance that is not available in offline event such as *Diskusi Forum*.

²⁸ See explanation on the "messy" term in the first foot note

If event such as *Diskusi Forum* resembles interactions performed on the Internet minus the limitations, why would Indonesian exiles still eager to meet at this offline event? To explain this, I would like to bring the discussion brought by Michael Jackson (2013) on the role of storytelling. Through Arendt's concept of 'subjective in between', Jackson argues that people never tell stories merely to voice their mind, but also to shape their experiences to relate with others (Jackson, 2013, 15). Moreover, since storytelling is a collective process, while shaping their own experiences, storytellers are at the same time shaping "collective identity and solidarity" (Jackson, 2013, 16).

Asih stated clearly that *Diskusi Forum* was initiated because of the need for Indonesian exiles to exchange ideas with each other. It was considered important because many of them had already accessed different kind of information from the Internet, and according to her it is sometimes disconcerting to keep opinions to oneself. In this account, we can see that for exiles having their own perspectives on certain issues in Indonesia is not enough. There is a strong need to create a meeting where they can relate their own thinking to collective thinking on certain issues. To do that, as shown in the above description, the participants on *Diskusi Forum* were encouraged to exchange their stories.

As Jackson (2013) pointed out, to be able to relate one's experience with others, the form of the stories are important. The stories need to be presented in a way that other participants can relate to. Ana, for instance, presented her experience with young generations which she considered were critical to old frames of thinking established by New Order. Given their age, it is natural for this community to consider most people that happened to visit this event as the young generations. More than that, the sentiment of seeing the young generations as a people who bring hope is something that most of the participants could relate to. A similar sentiment could also be heard from the way Asih requested me to share my opinion on the event. By presenting her story using a shared sentiment, Ana invited other participants to engage with their own expe-

riences. These interactions happened through the course of the event, which in turn moulded these individual experiences into the group collective.

The transformation of personal experiences into collective meaning could also be seen from the choice of topics discussed in this event. As described before, both sections talked about the current situation in Indonesia with different specific topics. The first section of this event relied on first-hand experience of speakers about Indonesia. Therefore, the presented stories were dependent from personal interactions of these participants with their surroundings during their time in Indonesia. When Chalik talked about the work ethics of civil servants, it was based on his experience seeing civil servants that spent time outside during office hours. Farida's narrative, where she felt much better accepted in Indonesia today, was also based on her personal interactions with her family. Despite coming from personal accounts, these stories are not free from information garnered from the Internet. Many parts of their stories, particularly their evaluations of the government, were presented with information they learned from mailing lists. These multiple personal stories were then accepted or refuted by other participants, yet in a larger context these interactions became an important part of collective imagination about Indonesia. On the other hand, for those who presented their stories, Jackson (2013) see it as a 'restorative praxis' where private meaning is transformed into public meaning, and an individual is looking to be a part of larger collective entity.

The second section of this event involved a different kind of stories. While first-hand experiences were still present, the stories relied more on the interpretation of information about Indonesia found online. These stories then presented as an interplay of multiple sources of information. The talk by Kartaprawira, for example, was partly his personal experience, partly online information, and partly shared knowledge among the exile community. It was hard to separate which part came from which source of references, particularly because despite the distant, he told the story as if he is not separated from Indonesia. Moreover, Kartaprawira presented himself as an

active figure within the large struggle of finding justice aspired by Indonesian exiles. This was demonstrated for instance at the beginning of his story when he said he circulated the link of live streaming on several mailing lists. In other part he presented himself as a subject with significance when he stated his institution's official support to IPT 1965. By doing this, Kartaprawira performed the second role of storytelling which is "a vital human strategy for sustaining a sense of agency in the face of disempowering circumstances" (Jackson, 2013, 34). On this matter, the clear separation between personal opinion and facts is no longer relevant, since most of the things discussed are a part of—and also become—the shared knowledge of other participants.

For this community, a big part of their life was determined by external circumstances which they could not control. They were not able to return to their homeland out of the fear of being captured and persecuted by their own government. This made them lose not just the connections with their homeland, but also the sense of freedom as a subject to determine their own course of life. In this regard, storytelling at events helped the Indonesian exiles to reclaim their sense of agency. By telling stories about the current situation in Indonesia and how they played a role in the situations, they had the sense that they were not really separated from Indonesia and still hold on to their Indonesian-ness. To participate in online activities is thus really important for Indonesian exiles, since many of them still consider themselves as Indonesian. As Asih put it, "Because, (I) can't escape from the feeling as Indonesian, though we are not acknowledged by the (Indonesian) government." The use of the Internet in this regard allowed them to overcome the gap between those feelings and their actual situation. Nevertheless, as discussed throughout this chapter, offline interaction such as participation in IPT 1965, or meetings like *Diskusi Forum*, is still considered really important because physical meetings reinforce the feeling of individual exiles being part of a community of Indonesian exiles.

CONCLUSION

This article is started by an elaboration of the importance regarding online and offline interactions to understand how the use of Internet affecting society and vice versa. In this context, the use of Internet among Indonesian exiles is presented to show the dynamics of activism and back and forth interactions engaged on those two arena. These instances have been demonstrated by looking into two events that are important among the community which are IPT 1965 and *Diskusi Forum*.

Series of events related to IPT 1965 demonstrated the culmination of activism performed by Indonesian exiles to pursue their rights. In doing so, they engaged through offline activities such as mass rally, participated as committee, and also provided testimonials during tribunal. At the same time, they performed similar kind of engagements on Internet. Those who could not participated at offline meeting would monitor the events through streaming facilities. They also spread the news regarding the event to mailing list with expectations to raise awareness on this cause. In doing so, the offline and online engagements are also affecting one another. Furthermore, pre-existing values and ideals were used by these exiles to evaluate the current development in Indonesia regarding the event.

While the Internet provides these exiles many information and opportunities to develop their lifelong cause, offline event is still very much relevant for this community. It has been shown on the IPT 65 events, but it is demonstrated even more clearly during *Diskusi Forum*. This event was specifically initiated because most of these exiles needed to related the information they receive on Internet with one another. During the event, the participants will present stories which usually a mixture of their own experiences and information they received on Internet. The other participants then joined the conversation by agreeing or refuting the stories presented before. Borrowing the framework of Jackson (2013) these practices then could be seen as 'restorative praxis'. When they shared each other the stories they have at that moment they transformed the individual into the collection. It does not only important for them to sustain their shared identity

as a displaced community, but also to reclaimed their sense being Indonesian which formally was already taken from them since decades ago.

As closing remarks, it is important to note that this article also has many limitations. Among the questions that have not been properly addressed is how will the use of technology helped the community to sustain their cause in the future, particularly if most of them are elderly? This kind of questions hopefully could be useful to initiate further research on this subject.

REFERENCES

- Affar, H. (2016). "Penyangkalan pembunuhan massal di Simposium 1965." Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160418_indonesia_simposium1965 on December 8th, 2016.
- Aouragh, M. (2008). *Palestine online: Cyber intifada and the construction of a virtual community 2001–2005*. (PhD Thesis, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Amsterdam Institute for Social Science Research) <https://doi.org/10.1177/1745691612459060>.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization* (7th ed., Vol. 53). Minneapolis: University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Atharini, I. (2016). "Apa isi rekomendasi tim perumus Simposium Tragedi 1965?" Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65 on December 8th, 2016.
- BBC News Indonesia. (2015). "Luhut: Penyelenggara IPT 1965 'pikirannya bukan Indonesia lagi'." Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut on December 7th, 2016.
- Bernal, V. (2006). Diaspora, cyberspace, and political imagination: The Eritrean diaspora online. *Global Networks*, 6(2), 161–179. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2006.00139.x>
- Dragojlovic, A. (2010). 'Sukarno' s students': Reconfiguring notions of exile, community and remembering. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(1), 53–81.
- Dragojlovic, A. (2012). Materiality, loss, and redemptive hope in the Indonesian leftist diaspora. *Indonesia and the Malay World*, 40(117), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.683670>
- Graham, M. & Khosravi, S. (2002). Reordering public and private in Iranian cyberspace: Identity, politics, and mobilization. *Identities*, 9(2), 219–246. <https://doi.org/10.1080/10702890212204>
- Hasibuan, N. A. (2015). "Jusuf Kalla soal sidang rakyat 1965: Itu pengadilan semu." Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151111181158-20-91088/jusuf-kalla-soal-sidang-rakyat-1965-itu-pengadilan-semu> on December 7th, 2016
- Hearman, V. (2010). The last men in Havana: Indonesian exiles in Cuba. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(1), 83–109.
- Hearman, V. (2016). Letter-writing and transnational activism on behalf of Indonesian political prisoners: Gatot Lestario and his legacy. *Critical Asian Studies*, 48(2), 145–167. <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1157954>
- Hill, D. T. (2008). *Knowing Indonesia from Afar: Indonesian exile and Australian academics* (pp. 1–13).
- Hill, D. T. (2014). Indonesian political exiles in the USSR. *Critical Asian Studies*, 46(4), 621–648. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960710>
- Hill, D. T. & Dragojlovic, A. (2010). Indonesian exiles: Crossing cultural, political, and religious borders Introduction. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(1), 1–7.
- Jackson, M. (2013). *The politics of storytelling* (2nd Ed.). Copenhagen: Museum Tusulanum Press.
- Khvorostianov, N., Elias, N., & Nimrod, G. (2012). "Without it I am nothing": The internet in the lives of older immigrants. *New Media & Society*, 14(4), 583–599. <https://doi.org/10.1177/1461444811421599>
- Liu, H. (2006). The transnational construction of national allegory China and the cultural politics of postcolonial Indonesia. *Critical Asian Studies*, 38(3), 179–210. <https://doi.org/10.1080/14672710600869632>
- Miller, D. & Slater, D. (2001). *The internet: An ethnographic approach*. Oxford: Berg Publishers. [https://doi.org/10.1016/S0737-0806\(98\)80274-8](https://doi.org/10.1016/S0737-0806(98)80274-8)
- Mudzakir, A. (2015). Hidup di pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda. *Masyarakat & Budaya*, 17(2), 171–184.
- Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2015). Ethnography in a Digital World. In *Digital Ethnography: Principles and Practice*, 0–18. London: Sage.
- Postill, J. & Pink, S. (2012). Social media ethnography: The digital researcher in a messy web. *SAGE Journals*, 145(1), 123–134.

- Schaefer, D. (2011). In memoriam Hr Bandaharo. *Indonesia and the Malay World*, 39(114), 171–195. <https://doi.org/10.1080/13639811.2011.575618>
- Setiawan, H. (2010). Some thoughts on Indonesian exilic literature. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(1), 9–20.
- Sipayung, B. A. (2011). *Exiled memories: The collective of Indonesian 1965 Exiles*. The Hague, Netherlands: International Institute of Social Studies.
- Theo, R. (2016). “Wanita yang serahkan surat tuntutan rekonsiliasi ’65 kepada Jokowi.” Retrieved from <http://www.rappler.com/indonesia/130511-perjuangan-francisca-serahkan-surat-rekonsiliasi-jokowi> on December 12th, 2016.
- van Dijk, J. A. G. M. & Hacker, K. L. (2018). *Internet and democracy in the network society*. Abingdon: Routledge Taylor Francis & Group Ltd. Retrieved from <https://www.routledge.com/Internet-and-Democracy-in-the-Network-Society/Dijk-Hacker/p/book/9780815363026>
- Yongming, Z. (2005). Living on the cyber border: Minjian political writers in Chinese cyberspace. *Current Anthropology*, 46(5), 779–803. <https://doi.org/10.1086/432453>

HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

Triyono Lukmantoro

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro

E-mail: triyonolukmantoro@gmail.com

ABSTRACT

At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is *Postmetro*. This article is a textual review of various hoax titles displayed by *Postmetro*. The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.

Keywords: *hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear*

ABSTRAK

Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.

Kata kunci: *hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan*

PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2016, muncul kabar yang sedemikian menakutkan bagi bangsa Indonesia. Sebanyak sepuluh juta, atau bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal Tiongkok menyerbu negeri ini. Pemerintah dianggap lamban, tidak segera tanggap, dan malah terkesan sengaja memberikan peluang agar orang-orang asing itu sengaja menguasai negara yang berdasarkan Pancasila ini. Bagaimana mungkin hal yang sangat serius serta membahayakan ini

diabaikan begitu saja oleh pemerintah? Bukankah kehadiran TKA dari Tiongkok akan menggeser tenaga kerja domestik yang tidak lain anak-anak bangsa sendiri? Bukankah TKA dari Tiongkok itu hanya menyelesaikan jenis-jenis pekerjaan kasar yang dapat ditangani oleh pekerja dari dalam negeri? Tidakkah banjir tenaga kerja dari Tiongkok menjadikan negara ini sekadar bagian dari wilayah Tiongkok?

Presiden Joko Widodo segera menampik kabar angin itu. Jokowi mengatakan bahwa jum-

lah tenaga kerja dari Tiongkok yang masuk dan keluar Indonesia sebanyak 21.000 orang. Itu pun, demikian Jokowi menegaskan, sifatnya membantu berbagai hal yang belum mampu ditangani pekerja dalam negeri. Tidak mungkin pula TKA dari Tiongkok sudi datang ke negeri ini karena secara logika, tegas Jokowi, upah yang diterima di negara mereka jauh lebih banyak. Upah mereka di Indonesia pada kisaran Rp1,5juta sampai Rp3juta. Sementara itu, di negara mereka sendiri, upah yang diterima mencapai Rp5juta. Jokowi mengatakan bahwa kabar kedatangan sepuluh juta atau dua puluh juta TKA ilegal asal Tiongkok adalah fitnah yang tidak boleh dipercayai begitu saja (Soepardi, 2016). Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan bahwa jumlah sepuluh juta orang yang dimaksud itu adalah target wisatawan dari Tiongkok yang akan berkunjung ke Indonesia. Karena kabar puluhan juta TKA dari Tiongkok sudah meresahkan masyarakat, Jokowi meminta kepolisian mengusut siapa penyebar berita bohong itu (Ihsanuddin, 2016). Namun, berita bohong atau hoaks itu telanjur tersebar ke mana-mana dan tidak ada seorang pun yang ditangkap polisi karena menyebarkannya. Dari kasus itu, istilah hoaks pun semakin populer.

Hoaks tidak sekadar berarti berita bohong. Hoaks adalah kebohongan itu sendiri. Berita bohong merupakan sebuah jenis penipuan sehingga layak pula untuk dikategorikan sebagai hoaks. Jika ditelusuri secara etimologis, hoaks berasal dari kata *hocus* yang berarti memainkan sebuah tipuan atau menipu, yang muncul dalam bahasa Inggris pada 1675. *Hocus* sendiri merupakan kependekan dari *hocus pocus* yang telah ada pada 1694 sebagai parodi *hoc est corpus meum* yang bermakna “inilah tubuhku.” Frasa ini ada dalam sakramen Ekaristi, dan merujuk pada roti sebagai tubuh Kristus. Mempraktikkan hoaks menjadi fenomena Pencerahan saat ilmu pengetahuan dan teknologi mengolok-olok iman lama dan pengetahuan baru (Fredal, 2014, 73–74). Dengan demikian, hoaks pada awalnya hanyalah tipuan yang dimaksudkan untuk bermain-main, bercanda, dan mencibir.

Namun, hoaks bukan sekadar olok-olok biasa, lumrah, dan apa adanya. Terdapat empat karakteristik hoaks. Pertama, hoaks merupakan

bentuk pengelabuan yang bersifat publik. Ada bentuk tipuan yang bercorak privat dan personal, dan hoaks dicirikan oleh watak publisitas dan kejahatannya. Kedua, hoaks tidak sekadar berisi berbagai teks, melainkan juga kejadian-kejadian yang “dipanggungkan.” Jadi, hoaks bukan sebagai penegasan dari aneka pernyataan palsu. Ketiga, hoaks mempunyai target khalayak tertentu yang dijadikan sebagai objek tertawaan. Keempat, hoaks berkembang dalam budaya persaingan. Budaya persaingan adalah kultur yang mendukung bentuk-bentuk publik kompetisi dan penegasan diri, khususnya keterampilan verbal individual yang bersifat tertulis atau oral yang dihargai sebagai medium interaksi kompetitif (Fredal, 2014, 76). Jadi, dalam konteks itu, hoaks memang bukan kebohongan biasa.

Hoaks kedatangan sepuluh juta atau dua puluh juta TKA asal Tiongkok mudah pula diidentifikasi karakteristiknya. Pertama, hoaks itu bersifat publik karena dilontarkan sebagai isu khusus bagi masyarakat melalui situs-situs pemberitaan tertentu. Hoaks itu bukanlah gosip yang bersifat personal seperti yang muncul dalam aneka acara *infotainment* di layar kaca. Kedua, hoaks itu berhasil “memanggungkan” persoalan yang begitu sensitif bagi rakyat, yakni kehadiran orang-orang dari Tiongkok yang berposisi “istimewa” dianggap membawa problematika. Ketiga, objek yang menjadi sasaran hoaks ini adalah sejumlah pihak, yakni pemerintah yang dianggap tidak serius mengatasi persoalan dan rakyat yang dipilih sebagai kaum awam yang ditakut-takuti. Keempat, hoaks ini memerlukan keterampilan khusus karena ada fiksi yang dikemas sebagai berita yang dianggap sungguh-sungguh ada.

Salah satu situs yang gencar menampilkan hoaks tentang kedatangan TKA dari Tiongkok adalah *Postmetro*. Dengan memasukkan kata kunci “TKA China” ke bagian pencarian situs *postmetro.info*, didapatkan sebanyak 160 pemberitaan. Materi yang dihadirkan situs ini memang sekilas mirip berita, dan boleh jadi, peristiwanya memang ada. Hanya saja karena banyak bagian yang ditambah-tambahi serta ada aspek lain yang sengaja dihilangkan, apa yang dipresentasikan ialah hoaks. Selain itu, berdasarkan kajian Komunitas Masyarakat Anti Fitnah

Indonesia, *Postmetro* merupakan sebuah situs hoaks yang dikendalikan oleh dua mahasiswa di Sumatra (Bohang, 2016). Namun, klaim atau tuduhan dari komunitas itu dapat saja dibantah oleh pembuatnya.

Dari penelusuran media lain, diketahui bahwa ada sosok bernama Abdul Hamdi Mustapa yang menggerakkan *Postmetro*. Mustapa menuturkan bahwa yang dia dan kawan-kawannya lakukan adalah “memoles” konten dengan memanfaatkan momen yang sedang menjadi sumber kegaduhan dalam masyarakat, misalnya kedatangan TKA dari Tiongkok. Supaya konten semacam itu menjadi cepat viral, dia menggunakan akun khusus dan mengikuti akun orang lain yang memiliki banyak pengikut (Hidayat, 2016). Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengemukakan bahwa *Postmetro* adalah salah satu portal berita yang mempropagandakan isu membanjirnya TKA asal Tiongkok. Dengan begitu, *Postmetro* telah diawasi oleh kepolisian (*Tempo* edisi 2–8 Januari 2017, 38–39). Karena mendapat pengawasan dari kepolisian, nama situs atau domain *Postmetro* pun sering berganti-ganti, misalnya *postmetro.com*, *postmetro.co*, *pos-metro.com*, *pos-metroinfo.blogspot.co.id*, dan *postmetro.info*.

Apa yang ditampilkan *Postmetro* memang sekilas seperti berita yang dihasilkan dari praktik jurnalisme yang ketat. Namun, yang dijalankan pengelola situs ini, sebagaimana mereka akui sendiri, tidak lain sekadar “memoles” konten dari berbagai pemberitaan media lain. Saat momentum tertentu dianggap menarik untuk jenis hoaks tertentu, seperti isu kedatangan sepuluh juta atau dua puluh juta TKA dari Tiongkok, mereka pun menggelontorkan hoaks itu dengan deras. Selain itu, berbagai hoaks yang dihadirkan situs ini secara naratif memang seperti berita sebagai karya jurnalisme. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang layak disoroti. Pertama, *mimesis*, yang berarti membangkitkan realitas dengan memanggungkannya. Sebagaimana dalam pertunjukan teater, naratif mempunyai momentum-momentum yang mengarah pada representasi yang bercorak mimetik (tiruan). Kedua, *diegesis*, yang bermakna meringkas aneka kejadian dan percakapan. Narator memiliki peran penting untuk mewarnai kejadian-kejadian yang dinarasikannya (Herman & Vervaeck, 2005, 14–16).

Hal paling menarik dalam berbagai hoaks tentang TKA dari Tiongkok yang ditampilkan *Postmetro* adalah bagian judul (*headline*). Dalam jurnalisme, judul merupakan bagian yang paling menentukan di hadapan pembaca. Ada dua fungsi judul dalam kaitannya dengan manipulasi kata-kata. Pertama, judul menyampaikan pesan yang ringkas, yakni “bacalah aku.” Kedua, mengakomodasi karakter (huruf) yang telah disediakan oleh tata letak. Dengan begitu, kata-kata yang dijadikan judul haruslah jelas dan memiliki dampak yang kuat (Burns, 2002, 133–134). Karena berfungsi menarik perhatian pembaca, judul diibaratkan sebagai “senjata paling ampuh dalam gudang amunisi” yang dimiliki jurnalis (Schaffer, McCutcheon, & Stofer, 2009, 336). Dengan kata lain, judul merupakan daya tarik pertama yang harus memikat pembaca. Jika dipahami seperti itu, hoaks pun dipenuhi aneka judul yang lebih provokatif, terlebih kalau itu memang sengaja dipakai untuk menyerang pemerintah atau menciptakan kecemasan berlebihan di masyarakat.

Contoh judul hoaks yang dihadirkan *postmetro.info* adalah *Jokowi Mulai Berlagak Pikun dan Pura-Pura Amnesia, Berlagak Tak Tahu Penyebab TKA China Serbu Indonesia* (edisi 29 Desember 2016); *Wow, BUMN Diduga Fasilitas Ratusan TKA China Kerja di Gresik* (edisi 17 Desember 2016); *143 TKA Tiongkok Hendak Kerja di Pabrik, Diamankan Imigrasi Malang karena Tak Ada yang Punya Paspor* (edisi 30 Desember 2016); *Tenaga Kerja Ilegal asal China Jadi Isu Keamanan yang Serius* (edisi 1 Januari 2017); *Sip Mantap, Papua Barat Akan Tindak Pekerja Cina Ilegal* (edisi 18 Agustus 2016); *“Pemerintah saat ini lebih pro pekerja asing, padahal banyak rakyat yang susah mendapatkan pekerjaan”* (edisi 6 Maret 2016); atau *Gangguan Kedaulatan Sudah Tercium, Presiden Diminta Jangan Hanya Bantah Soal Jumlah TKA China* (edisi 25 Desember 2016). Tentu saja, banyak judul yang memiliki nada (*tone*) serupa.

Jadi, judul bukan sekadar bermakna teknis untuk mengajak pembaca lekas menyimak suatu pokok persoalan yang ditampilkan dalam berita atau pun hoaks. Lebih dari itu, judul menunjukkan pula bias (kecenderungan atau pemihakan) yang dilakukan oleh institusi media tertentu. Kecen-

derungan itu bisa mengarah pada gagasan ke kanan atau ke kiri, dan menjadi sumber pengaruh dalam pembentukan opini publik (Groseclose & Milyo, 2005, 305–314). Dengan begitu, judul memang secara sengaja mengarahkan khalayak untuk berpikir berdasarkan orientasi gagasan tertentu, misalnya memihak atau memusuhi pemerintah dan bisa menerima ataupun sama sekali menolak kehadiran pekerja dari Tiongkok. Terlebih lagi, isu TKA dari Tiongkok telah beredar kuat sebagai serbuan kekuatan asing yang begitu massal untuk menguasai Indonesia.

Berkenaan dengan keberadaan berbagai situs pemberitaan di internet, judul berperan vital dalam mempromosikan isi (*content*) web melalui mesin pencari dan situs-situs media sosial. Menelusuri judul-judul itu bisa dilakukan dengan memasukkan aneka kata kunci tertentu (Meraz, 2015, 37–53). Aspek lain yang terdapat pada judul ialah muatan ideologi yang disodorkan kepada pembaca. Dalam kajian terhadap berbagai judul dalam tiga surat kabar Yunani dan dua surat kabar Prancis sebelum Referendum Yunani 2015, diketahui bahwa sekalipun berbagai surat kabar itu memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda, institusi-institusi media itu berkonvergensi pada sebuah konstruksi diskursif dan emosional yang mendukung nilai-nilai dominan pasar bebas dan doktrin kehati-hatian (Serafis & Herman, 2017). Jadi, judul tidak sekadar berfungsi secara teknis, melainkan juga mengungkap aspek filosofis.

Dalam rumusan yang lebih eksplisit, judul menunjukkan bagaimana sebuah isu atau kejadian dibingkai dalam perspektif tertentu. Melalui judul itu pula, aneka praktik pembingkai (*framing*) dapat dilacak. Pembingkai dapat diartikan sebagai mensimplifikasi, memprioritaskan, dan menstrukturkan alur naratif peristiwa (Norris, Kern, & Just, 2003, 10–11). Peristiwa yang kompleks dikemas secara lebih sederhana. Isu-isu yang bertumpang tindih diberikan urutan penanganan. Penceritaan disampaikan dalam alur yang lebih mudah dipahami. Di samping itu, *framing* merupakan teknik bagi media dalam menekankan perspektif ideologi tertentu dan memanipulasi hal-hal menonjol yang mengarahkan orang pada gagasan tertentu seraya mengabaikan gagasan-gagasan lain (Kendall, 2011, 5). Demikian pula

beberapa judul dari berbagai hoaks yang ditampilkan *Postmetro* memiliki orientasi ideologi dan *framing* tertentu.

Kajian terhadap hoaks TKA dari Tiongkok yang ditampilkan *Postmetro* ini dimaksudkan untuk mengetahui dua hal. Pertama, keberadaan hoaks sebagai produk “jurnalisme tambal sulam” yang bisa menjadi viral dalam *cyberculture*. Kedua, hoaks TKA dari Tiongkok sebagai bentuk kecemasan berlebihan yang sengaja dibingkai untuk menciptakan kepanikan moral dan kehadiran sosok musuh bersama yang harus diperangi, diusir, dan bahkan dilenyapkan.

“JURNALISME FRANKENSTEIN”

Pada era digital ini, monster Frankenstein menunjukkan kehadirannya. Bukan dalam wujud yang menyeramkan, melainkan dalam praktik-praktik jurnalisme yang dijalankan kalangan wartawan. Istilah “jurnalisme Frankenstein” tentu saja merujuk pada sosok Victor Frankenstein yang ambisius ingin merangkai bagian-bagian tubuh yang telah mati menjadi sosok yang hidup. Praktik yang dilakukan Frankenstein menggunakan bagian-bagian tubuh manusia dan binatang untuk membentuk makhluk yang dikehendaknya. Demikian pula langkah-langkah yang ditunjukkan kalangan jurnalis, yakni merangkai berbagai pernyataan dari sumber-sumber di media sosial yang meragukan. Ada dua persoalan penting yang menjadi pertanyaan berikutnya bagi jurnalisme, sebagaimana yang dihadapi monster Frankenstein. Pertama, bagian-bagian tubuh itu berasal dari mana saja? Kedua, jenis kehidupan apa yang dijalannya? Konsekuensi dari “jurnalisme Frankenstein” ialah jurnalis hanyalah melakukan replikasi terhadap apa yang telah dijalankan orang lain. Di ruang pemberitaan digital, jurnalis memainkan peran Tuhan dengan mempraktikkan reanimasi berita-berita dari pihak kedua untuk diberi sudut pandang dengan kehidupan yang baru (Duffy, Tandoc, & Ling, 2017, 1–15). Jadi, “jurnalisme Frankenstein” adalah cemoohan yang telak bagi kalangan jurnalis pemalas yang dimanjakan teknologi digital.

Praktik-praktik produksi hoaks yang dilakukan *Postmetro* itulah yang jauh lebih tepat dianggap sebagai menjalankan “jurnalisme

Frankenstein.” Tanpa bersusah payah melakukan reportase, orang-orang yang bekerja di balik situs hoaks ini sekadar mengambil belaka dari berita-berita yang dibuat oleh para jurnalis lain. Mereka tidak lebih sebagai “tukang poles” bagi berita-berita yang telah ada. Mereka menghidupkan bagian-bagian tubuh pemberitaan untuk menjadi kemasan yang terkesan baru, yang tidak lain adalah hoaks. Lebih tepat jika dikemukakan bahwa hoaks merupakan praktik parasitis terhadap genre lain yang telah ada, sebagaimana dikemukakan Walsh (2006). Serupa dengan benalu yang hidup subur pada tubuh tanaman induk yang disedot sari pati gizinya, itulah pula yang dilakukan hoaks. Para pembuat hoaks tidak mampu hidup tanpa mendapatkan nutrisi dari berita-berita yang dihasilkan para jurnalis lain. Hoaks tidak bisa dilepaskan dari berita-berita arus utama (*mainstream*) yang telah ada. Hoaks hanya mengikuti agenda pemberitaan yang dijalankan oleh jurnalis yang sebenarnya.

Figur Frankenstein memang sesuai sebagai metafora bagi aksi-aksi yang serupa dengan monster itu. Frankenstein merupakan penguatan metafora yang memberikan peringatan tentang norma-norma manusia, produksi estetika, kuasa ilmiah, dan aneka visi tentang masa depan (Botting, 2003). Jadi, hoaks ialah realisasi “jurnalisme Frankenstein” yang paling vulgar. Proses produksinya adalah merangkai sejumlah potongan dari hasil mutilasi tubuh berita atau apa saja yang dianggap layak sebagai berita. Hasil dari hoaks diarahkan untuk menciptakan perasaan ngeri, takut, dan serba meneror. Lain halnya dengan sinema. Jika Frankenstein itu diolah sebagai rangkaian film horor yang sekadar mengejar nilai-nilai komersial, efek menakutkan yang ditimbulkannya akan membosankan. Orisinalitas Frankenstein pun lenyap (Dixon, 2017). Namun, tidak demikian halnya dengan “para Frankenstein” yang memproduksi hoaks yang menyaru sebagai produsen karya-karya jurnalisme. Mereka terus memberi efek menakutkan dan kengerian dalam hoaks. Sebabnya adalah hoaks ini secara kontinu mengikuti isu-isu aktual di masyarakat.

Berikut ini sejumlah judul hoaks yang ditampilkan *Postmetro* untuk menunjukkan betapa mengerikannya TKA dari Tiongkok. Isu

itu bahkan dikaitkan pula dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pejabat publik beretnis Tionghoa dan non-muslim, yang ketika itu menjadi target demonstrasi massa dalam isu penodaan agama. Judul-judul hoaks tersebut adalah *Benang Merah Masuknya Ribuan TKA China dengan Arogansi Ahok yang Semakin Di atas Angin* (edisi 25 November 2016); [Video] *Terkait Migrasi TKA Asal China. Belajarlah pada Nasib Angola Saat ini, Dikuasai dengan Alasan Investasi & Infrastruktur* (edisi 17 September 2016); [Video] *Oalah, Menu Warung Makan di Morosi Sulawesi Tenggara Gunakan Huruf China* (edisi 4 Januari 2017); atau *Beredar Video Pekerja China Ajak Berantem dengan Pekerja Lokal* (edisi 15 Desember 2016). Aneka judul yang memberi efek monster Frankenstein adalah hoaks yang bahannya diambil dari mana-mana, misalnya status panjang di Facebook, pemberitaan stasiun televisi, dan rekaman yang dipungut dari situs tertentu.

Sekalipun sumbernya tidak jelas dan semuanya sekadar jahitan dari berbagai bagian tubuh yang dimutilasi, hoaks semacam itu menjadi viral. Secara sederhana, viral (*going viral*) adalah penyebaran yang begitu cepat dari konten tertentu di internet. Hal ini secara epidemiologis mengacu pada virus tertentu yang menginfeksi lebih dari satu subjek, kemudian ditularkan kepada subjek lainnya (Lister, dkk., 2009, 200–202). Yang terjadi pada hoaks juga seperti itu. Ketika sebuah hoaks berhasil menginfeksi sebuah akun tertentu di media sosial, akun itu segera memberi tanda menyukai dan sengaja menyebarkannya kepada pihak lain dalam hitungan yang sebegitu cepat. Itulah yang dinamakan pesan tertentu menjadi viral. Hoaks sangat mungkin menjadi viral ketika tema yang disajikan menciptakan suasana penuh kegentingan, serba memberikan rasa penasaran, dan terdapat situasi yang mencekam akibat kehadiran pihak lain yang selama ini dianggap sebagai penyakit mematikan.

Hal itu berbeda dengan kasus yang terjadi di Norwegia. Kajian yang dilakukan di Norwegia terhadap Facebook dan Twitter, memperlihatkan bahwa berbagai komentar untuk berita dengan tema yang lebih “lembut” ternyata lebih sering dibagikan daripada tema-tema berita yang lebih

“keras.” Dalam hal ini, berita yang sensasional dan berkaitan dengan selebritis memiliki efek viral yang kuat (Kalsnes & Larsson, 2017). Tentu saja fenomena ini berlainan dengan persoalan yang terjadi di Indonesia. Negeri yang makmur dan nyaman pasti menghadapi problem yang berbeda dengan negeri yang masih diliputi persoalan kesenjangan penghasilan. Hal lain yang dapat dikemukakan adalah negeri yang toleran dan tidak memiliki ketakutan dengan kehadiran pihak lain (asing), sementara dengan negeri yang tidak toleran akan serba curiga dengan apa yang diposisikan asing. Kajian lain memperlihatkan bahwa konten yang menimbulkan perasaan positif yang tinggi (keterpesonaan) atau emosi-emosi negatif (kemarahan atau kecemasan), ternyata memang lebih mudah menjadi viral. Hal ini karena viralitas tidak hanya ditentukan secara psikologis, melainkan juga secara fisiologis (Berger & Milkman, 2011). Mengapa kasus-kasus hoaks yang menunjukkan karakter monster Frankenstein menjadi viral? Hal ini karena konten yang ditampilkan ialah unsur-unsur yang mendorong kemarahan dan kecemasan.

Aspek oposisional hoaks yang bercorak monster Frankenstein adalah hoaks yang jenaka dan mengolok-olok berbagai pihak dalam sepakbola. Selain menjadi viral dan populer, yang menjadi fenomena dalam hoaks ini adalah bahwa lembaga media ternama, seperti BBC, pun ikut terkena. Hoaks tersebut terjadi pada 2008 saat Masal Bugdov, yang disebut sebagai pemain sepakbola berusia 16 tahun dari Moldova, berhasil mewujudkan mimpinya di dunia sepakbola. *The Times* dari London menempatkannya pada peringkat ke-30 *Football's Top 50 Rising Stars* dan dia dilaporkan akan dikontrak Arsenal, sebuah klub dari Inggris. Bugdov bahkan digambarkan selevel dengan Wayne Rooney dan sosoknya menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia sepakbola.

Hoaks itu berhasil dibongkar karena pembuatnya memasukkan beberapa petunjuk dalam laporan yang dibuat-buat itu. Petunjuk pertama adalah nama Masal Bugdov sendiri. Nama itu berasal dari cerita pendek yang berjudul *M'Asal Beag Dubh* karya penulis Irlandia, Pdraic O'Conaire. O'Conaire berasal dari Galway, yang diperkirakan sebagai Galwaygooner, daerah asal

Bugdov. *M'Asal Beag Dubh* berasal dari bahasa Irlandia yang berarti *My Little Black Donkey* dan cerpen ini mengisahkan tentang seseorang yang tertipu karena membayar harga mahal untuk keledai yang di bawah standar. Laporan palsu tentang Bugdov sebagai pemain hebat pertama kali muncul di surat kabar Moldova, *Mo Thon*. Dalam bahasa Irlandia, *Mo Thon* diterjemahkan sebagai *my arse* atau pantatku. Tim yang paling diasosiasikan, tentulah, Arsenal. Itulah sejumlah petunjuk yang bisa dipakai untuk membongkar hoaks tersebut (Burroughs & Burroughs, 2011). Hoaks itu memang dimaksudkan sebagai cara untuk mencemooh, mengolok-olok, dan menertawakan para penggemar sepakbola.

Hoaks yang menyaru sebagai berita serius yang ditayangkan stasiun televisi terjadi saat La Une, kanal pertama penyiaran publik RTBF berbahasa Prancis di Belgia, menginterupsi program reguler pada 13 Desember 2006, untuk menayangkan “akhir dari Belgia seperti kita mengetahuinya.” Tujuan utama hoaks itu adalah memancing reaksi komunitas Walloon (*in-group*) sehingga memantik debat publik tentang masa depan Belgia. Apa yang bisa dilihat ialah pencampuran representasi fiksi dan kehidupan nyata untuk mengungkapkan bagaimana penyiaran yang dibuat Walloon menyamakan konstruksi identitas Flemish (*out-group*).

Gambaran yang tersaji pada hoaks itu adalah identitas Flemish dikonstruksikan sebagai “nasional,” dan identitas Walloon sebagai “regional.” Flemish dihadirkan sebagai pihak yang memiliki hasrat kuat untuk pendirian negara merdeka, yang didasarkan kesamaan sejarah budaya dan kesamaan bahasa. Mereka berkomitmen membangun dan mengendalikan kekuasaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, Walloon direpresentasikan sebagai entitas regional; apakah sebagai bagian dari Prancis atau “Belgia residual.” Walloon berakar pada *folklore* lokal. Kesetiannya pada masyarakat dan bahasa merupakan hal yang utama, dan dasar rasional diekspresikan dalam perhatiannya pada ekonomi di depan kebudayaan (van Drom, 2010). Hoaks ini adalah sebetulnya provokasi politik yang secara sengaja memercikkan isu-isu nasionalisme untuk memperlihatkan bahwa Walloon lebih baik dan Flemish buruk.

Bagaimana mungkin para jurnalis terlibat menyebarkan hoaks dan sengaja sudi dibohongi hoaks? Jurnalis memang selayaknya dan seharusnya menunjukkan sikap kecurigaan tanpa henti. Itulah yang disebut sebagai skeptisisme praktis atau verifikasi-silang. Hal ini bukan sekadar salah satu alternatif cara untuk memperoleh pengetahuan, melainkan hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan (Godler & Reich, 2015). Skeptisisme berarti tidak sekadar percaya begitu saja dengan siapa pun yang menceritakan kejadian tertentu. Skeptisisme juga berlaku untuk menghadapi tulisan yang berformat berita sekalipun. Ketika jurnalis percaya begitu saja dengan berbagai situs pemberitaan atau ensiklopedia umum, seperti Wikipedia, kemungkinan untuk dibohongi pun masih tetap ada.

Gejala yang unik adalah ternyata media sendiri memiliki tradisi menggulirkan hoaks. Hal ini lazim dijalankan jurnalis pada peristiwa tahunan April Mop. Pada momentum itu, jurnalis yang menjadi wasit kebenaran secara sengaja membohongi khalayaknya (Smith, 2009). Apa yang terjadi dalam kejadian itu adalah jurnalis memang bermaksud ingin bermain-main dengan fakta. Tentu saja jurnalis secara terbuka mendeklarasikan bahwa dia sengaja membohongi khalayaknya. Maksud yang terkandung di balik itu semua adalah bercanda, bergurau, dan memang berorientasi untuk mengolok-olok khalayak. Jadi, wajar jika ada dugaan bahwa selain pada kejadian April Mop, jurnalis telah menjalankan hal serupa, tetapi sengaja disembunyikan di hadapan para pihak yang berkepentingan dengan fakta yang ditampilkan media.

Jika permainan kebohongan itu terjadi, pasti akan terbongkar juga—sekalipun yang melakukannya adalah media besar yang sudah terkenal dan begitu dipercayai khalayak. Kebohongan justru akan menghancurkan reputasi mereka. Hal yang selalu dipertaruhkan dalam bisnis jurnalisisme adalah sikap jujur dan terbuka terhadap fakta. Jika selama ini jurnalis dianggap sebagai garda terdepan yang menjaga fakta agar benar-benar suci, tentu reputasi itu harus terus dipertahankan. Ketika jurnalis menjalankan fabrikasi (menciptakan karangan/fiksi untuk dijadikan fakta), artinya jurnalis itu sengaja menghancurkan

kan kredibilitas yang selama ini telah dibangun. Jurnalis yang dengan sengaja mencampurkan berbagai fakta tanpa menjalankan pengecekan ke lapangan—walaupun hanya sekali dilakukan—pasti akan terendus juga. Hal ini karena jurnalis yang menjalankan tindakan-tindakan lancung tersebut akan membuat pengakuan kepada pihak lain di luar komunitas jurnalis itu sendiri.

Harus dimengerti bahwa jurnalisisme tidak berkenaan dengan fakta secara telanjang. Maksudnya, jurnalisisme bukanlah wacana deskriptif, melainkan wacana performatif. Jurnalisisme bukan sekadar melukiskan kejadian-kejadian, melainkan lebih pada menampilkan kejadian-kejadian (Broersma, 2010). Ada yang mengatakan bahwa “fakta itu suci” sehingga tidak bisa dan memang tidak boleh dipertainkan. Objektivitas dan netralitas menjadi jargon yang diusung untuk membenarkan dalil tersebut. Persoalannya, ketika jurnalis memilih fakta-fakta tertentu, bukankah jurnalis telah “menistakan” fakta itu dengan tendensi-tendensi tertentu, baik atas nama kepentingan publik maupun atas nama jurnalisisme itu sendiri? Lebih tepat jika dikemukakan bahwa ketika jurnalis mengklaim mampu menuliskan fakta sebenarnya, seketika itu pula jurnalis sudah memberikan penilaian terhadap kejadian yang diklaim faktual itu sendiri. Fakta tidak bisa dilepaskan dari nilai. Deskriptif pasti mengandaikan performatif.

Kasus hoaks Masal Bugdov dan hoaks yang menyamar sebagai berita televisi tentang Walloon versus Flemish di Belgia tentu saja berbeda dengan *Postmetro* yang secara sengaja memproduksi hoaks. Melampaui itu semua, *Postmetro* sendiri telah dianggap sebagai situs penyebar hoaks. Jika para pengelola *Postmetro* menolak keras dianggap sebagai produsen hoaks, pasti mereka segera menjalankan kewajiban jurnalis memperlihatkan akurasi, menampilkan kredibilitas, dan bertindak jujur (Lowe, 2012). Hoaks yang demikian deras diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi hanya mungkin terjadi pada konteks *cyberculture*. Sebelum era digital, sulit untuk menghasilkan, mendiseminasikan, dan mencerna hoaks karena ditentukan oleh reproduksi mekanis. Pada era digital, semakin cepat suatu karya dihasilkan, semakin banyak pula salinannya direproduksi

(Bruce, 2000). Akibatnya, orisinalitas dan kejujuran tidak lagi menjadi perhatian. Berita benar atau hoaks dianggap serupa belaka karena semuanya adalah keterampilan memilin kata-kata saja.

Cyber culture dimaknai sekadar sebagai ketersediaan ruang publik yang kondusif bagi jaringan-jaringan progresif dan gerakan-gerakan sosial alternatif yang menentang pemegang otoritas (Norris, 2001, 195–216). Sikap asal melawan kekuasaan, dengan cara apa saja, termasuk menyebarkan hoaks, dianggap sebagai militansi di dunia virtual. Sebenarnya, *cyberculture* adalah “... sebuah cara berpikir tentang bagaimana manusia dan teknologi-teknologi digital berinteraksi” (Bell, 2007, 5). Namun, harus diakui bahwa *cyberspace*, sebagai nama lain dan bagian dari *cyberculture*, dikhawatirkan meningkatkan kemungkinan untuk menjalankan pengelabuan. Artinya, aksi-aksi penipuan dan hoaks terjadi akibat semakin surutnya interaksi secara langsung atau *face to face* (diringkas sebagai F2F) (Bell dkk, 2004, 68). Apabila itu yang terjadi, mungkin saja makin banyak orang yang bertindak layaknya Victor Frankenstein pada era digital. Hal ini serupa dengan berbagai hoaks *Postmetro* yang merupakan reanimasi potongan-potongan tubuh pemberitaan dari media apa saja yang memang sengaja diarahkan untuk menciptakan ketakutan.

KEDATANGAN PARA PENGANCAM

Banyak judul yang ditampilkan *Postmetro* menunjukkan bahwa TKA asal Tiongkok merupakan bahaya yang serius bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, secara eksplisit judul-judul *Postmetro* memosisikan TKA dari Tiongkok sebagai pengancam yang datang untuk meminggirkan tenaga kerja dalam negeri. Cara yang dilakukan *Postmetro* adalah dengan memberi penekanan langsung pada problematika yang sedang menjadi sorotan dan memuat pernyataan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas. Beberapa judul yang dimaksud adalah *Waspada! TKA Ilegal, Imigrasi Madiun Pantau Pekerja Cina di Proyek Nasional* (edisi 26 Juli 2016); *Merasa Terancam dengan TKA China, KSPI Minta DPR Bentuk Pansus* (edisi 16 Januari 2017); *Guru Besar UI: Pemerintah Juga*

Perlu Evaluasi TKA Legal China yang Posisinya Bisa Dikerjakan Pekerja Lokal (edisi 8 Januari 2017); *DPRD Kaltim: Warga Di sini Banyak yang Menganggur, Kenapa Malah Datangkan TKA Cina* (edisi 24 Desember 2016); *Bebas Visa kepada Cina Lebih Banyak Mudharatnya* (edisi 25 Desember 2016); *Fadli Zon: Banjir TKA Asal China Harus Diwaspadai, Apakah Visa Mereka Visa Kerja atau Visa Turis* (edisi 17 Oktober 2016); *Marak TKA Ilegal Hingga Narkoba ‘Made In China’, Komisi IX: Jika Diperlukan Dewan Gunakan Interpelasi* (edisi 24 Desember 2016); *Soal Pekerja Kasar Asal Cina, Ketua PBNU: Kita saja Banyak Pengangguran, Kok Orang Asing Disuruh Kerja* (edisi 30 Desember 2016); atau *Komisioner Ombudsman: TKA Cina Bisa Bawa ‘Invisible Mission’ Porak-Porandakan Kedaulatan RI* (edisi 22 Desember 2016).

Berbagai judul yang ditampilkan *Postmetro* menandakan penggunaan bahasa moral yang demikian eksemplifikasi untuk memperlihatkan situasi kepanikan moral (*moral panics*). Dalam situasi kepanikan moral, ekspresi yang muncul adalah bahasa kewargaan, komunitas, dan “pertanggungjawaban warga” atau bahasa yang memberi penekanan pada tatanan moral yang lebih berisi kewajiban daripada hak. Gejala itu disebut “proyek linguistik” untuk meredefinisikan bentuk kesadaran warga, yang memuat kecemasan publik (Hunt, 1997). Berbagai judul itu boleh jadi merupakan jeritan perasaan masyarakat bawah yang mengalami pemiskinan. Persoalannya, mengapa jeritan itu harus meminjam mulut sejumlah narasumber yang diklaim mewakili publik? Apa yang digulirkan *Postmetro* ialah penciptaan kepanikan moral dengan menghadirkan isu TKA asal Tiongkok. Keberadaan pihak asing yang dianggap berlebihan itu dianggap sebagai ancaman.

Bagaimana kepanikan moral secara konseptual relevan untuk mengungkap *hoax* yang diproduksi secara deras oleh *Postmetro*? Kepanikan moral, sebagaimana diuraikan Cohen (2002), pada awalnya adalah kerangka berpikir untuk menyoroti budaya kaum muda (*youth culture*) yang secara sosial dianggap mengancam tatanan yang telah mapan. Pada 1964, terdapat dua kelompok pemuda yang terlibat dalam pertikaian. Kelompok pertama adalah The Mods

yang mengendarai Vespa. Kelompok kedua adalah The Rockers yang mengendarai sepeda motor. Liputan media massa yang begitu luas dan berlebihan menghadirkan ketakutan bagi publik sehingga melahirkan kepanikan moral. Kelompok-kelompok pemuda itu dipandang telah melakukan penyimpangan sosial (*social deviation*) yang serius. Hal yang ditakutkan adalah perilaku mereka yang tidak senonoh itu akan menjalar kepada kelompok-kelompok sosial lainnya. Selain itu, aturan-aturan sosial yang telah memberikan kemaslahatan dikhawatirkan akan mengalami goncangan.

Cohen menegaskan bahwa masyarakat sekarang atau nanti akan menjadi subjek kepanikan moral. Kepanikan moral sendiri, menurut Cohen, adalah:

...sebuah kondisi, episode, orang, atau kelompok orang yang muncul untuk didefinisikan sebagai sebuah ancaman bagi nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan masyarakat; biasanya dihadirkan dalam gaya yang distilisasikan dan stereotipikal oleh media massa; barikade-barikade moral diawaki oleh para editor, para uskup, kaum politisi dan orang-orang yang berpikiran-kanan; kalangan pakar yang diakui secara sosial mengemukakan diagnosis-diagnosis dan solusi-solusi mereka; cara-cara mengatasi masalah dikembangkan atau (sering kali) dipaksakan; kondisi tersebut kemudian hilang, tenggelam atau memburuk dan menjadi gampang dilihat (Cohen, 2002, 1):

Konsep kepanikan moral tidak saja digunakan dalam kehidupan kaum muda, melainkan juga dalam perpolitikan. Dalam hal ini, isu yang digunakan untuk kepanikan moral adalah membajirnya TKA dari Tiongkok dan pemerintah yang dianggap mengabaikan, bahkan berpihak terhadap orang-orang asing yang didudukkan sebagai pengancam serius itu.

Hal lain yang dapat dikemukakan adalah kepanikan moral tidak datang secara otomatis. Kepanikan moral bisa direkayasa dan bahkan sengaja dibuat dengan agenda yang penuh muatan kepentingan. Melalui sudut pandang ini, Goode dan Ben-Yehuda (2009) mengemukakan tiga model kepanikan moral. Pertama, model akar rumput (*grassroots model*). Dalam model ini, kepanikan lazim muncul dalam kehidupan publik karena keprihatinan publik dapat dirasakan

secara luas. Sekalipun boleh jadi keliru, telah muncul perasaan bahwa nilai kemasyarakatan sedang berada di bawah ancaman. Aneka ekspresi keprihatinan hadir secara lebih terorganisasi atau terspesialisasi pada sektor-sektor tertentu (media, politisi, kelompok-kelompok aksi politik, penegak hukum) untuk menampilkan manifestasi keprihatinan yang meluas. Kedua, model yang direkayasa elite (*elite-engineered model*). Artinya, pihak elite yang sedang berkuasalah yang menyebabkan, menciptakan, merekayasa, atau mengorkestrasikan kepanikan moral. Anggota-anggota kelompok yang paling kaya dan paling berkuasa secara sadar melakukan berbagai kampanye untuk menimbulkan dan menjaga keprihatinan, ketakutan, dan kepanikan publik. Namun, isu-isu yang diembuskan dipandang tidak membahayakan bagi publik secara keseluruhan. Ketiga, teori kelompok kepentingan (*interest-group theory*) yang menunjukkan bahwa kepanikan moral atas sebuah isu tertentu dikemukakan oleh kelompok kepentingan tertentu. Kepentingan publik mungkin saja mendapatkan momentum yang tepat dalam wilayah ini. Namun, tidak demikian halnya dengan kalangan elite yang berkuasa. Pertanyaan dalam kepanikan moral yang diembuskan oleh kelompok kepentingan adalah siapakah yang akan mendapatkan keuntungan. Siapa yang menjadi pemenang jika isu tertentu diperkenalkan sebagai ancaman bagi masyarakat? Siapa pula yang tetap akan kukuh berdiri untuk memetik hasilnya?

Pada kasus hoaks yang dihadirkan *Post-metro*, model kepanikan moral yang digunakan adalah teori kelompok kepentingan. Jika dilihat dari aneka judul yang ditampilkan, kelompok ini menyerang pemerintah secara agresif. Bila kelompok ini dikatakan sebagai penyuar golongan akar rumput, hal itu tidak tepat. Pihak yang terlibat dalam pembuatan hoaks ini adalah sejumlah mahasiswa yang memang sengaja menempatkan diri sebagai pihak oposisi terhadap rezim Jokowi. Jadi, isu apa saja, tidak terkecuali TKA asal Tiongkok, akan dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintah. Jika kelompok ini menyuarakan aspirasi golongan akar rumput, hal itu sekadar pembener untuk menentang kebijakan-kebijakan elite yang sedang berkuasa. Selain itu, bahasa moral yang mereka gunakan

memperlihatkan aneka diksi yang spesifik digunakan oleh kelompok kepentingan.

Kelompok ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menebarkan hoaks. Harus diberikan penegasan bahwa kehadiran media baru (*new media*) memberi peluang yang besar bagi kelompok tertentu untuk menyerang siapa saja yang tidak disukai dan dikehendaki. Budaya memermalukan adalah ekspresi kepanikan moral akibat kekecewaan yang mendalam secara politis. Aspek lain yang bisa dikemukakan ialah kelompok ini juga memiliki kesadaran secara politis yang mengkarakterisasikan kehidupan kontemporer (Ingraham & Reeves, 2016). Jadi, kelompok mahasiswa ini harus diberikan apresiasi karena kritis dalam isu-isu politis. Hanya saja, karena teknik yang digunakan untuk menyerang pemerintah adalah menebarkan hoaks di media digital, cara-cara kotor pun dibenarkan. Inilah kontradiksi etis yang sulit diterima.

Kepanikan moral kontemporer yang terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi Web 2.0 memberi kemungkinan bagi orang awam sekalipun untuk memproduksi berita. Lebih dari itu, hubungan antara produsen dan konsumen berita pun mengalami kekaburan (Hughes dkk, 2011). Itu pula yang dijalankan orang-orang yang berada di balik *Postmetro*. Mereka tidak pernah melakukan reportase sebagaimana lazimnya jurnalis bekerja mengemas fakta untuk dijadikan berita. Apa yang mereka lakukan, sekali lagi, sekadar melakukan “polesan-polesan” terhadap berita-berita yang telah diproduksi oleh media arus utama. Kemampuan *Postmetro* untuk mengendus isu-isu aktual menjadikan kepanikan moral yang ditampilkan memiliki nilai jual. Jadi, terdapat sisi lain dari dilejtkannya kepanikan moral dalam isu tertentu, yakni aspek ekonomi politik. Dalam hal ini, ada pertautan kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, yakni jalinan antara kekuasaan, kepentingan material, dan kebudayaan (Cricher, 2011). Kenyataan ini terlihat saat situs *Postmetro* mendapatkan banyak limpahan iklan. Hal ini berarti berbagai hoaks, terlebih lagi yang berkenaan dengan isu peka tentang membanjirnya TKA dari Tiongkok, diakses oleh banyak pemakai internet.

Awal kehadiran internet di Indonesia memang menimbulkan kepanikan moral tersendiri. Lim (2013) yang cara membaca secara kritis

buku-buku yang membahas tentang internet, mengungkap bahwa pertumbuhan internet dan media sosial tidak sekadar mengubah secara radikal cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi satu dengan yang lain, melainkan juga???. Pada abad ke-21, internet telah beredar selama lebih dari satu dekade di Indonesia. Lebih dari 45 juta orang (saat itu), terutama kalangan muda, telah mengakses internet. Kepanikan moral terjadi manakala internet dikaitkan dengan *cyberporn*, *cybercrime*, dan “sisi-sisi gelap” lainnya. Hal ini lebih disebabkan kalangan muda memakai internet untuk menantang norma-norma yang telah mapan dari kelompok-kelompok dan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, bagi kalangan muda, internet menyediakan kegembiraan, peluang, harapan, dan, kadang-kadang, sensasi. Namun, setelah kajian literatur tersebut, bukan masyarakat yang mengalami kepanikan moral akibat kehadiran internet, melainkan segelintir orang menampilkan kepanikan moral dengan memproduksi hoaks.

Salah satu elemen kepanikan moral yang berhasil ditampilkan *Postmetro* adalah kedatangan para pengacau yang dianggap telah melenceng dari ikatan-ikatan tradisional yang ideal tentang kebangsaan (David dkk, 2011). Itulah gambaran atau imajinasi buruk tentang makin banyak orang Tiongkok yang ingin menguasai kekayaan Indonesia. Keadaan masyarakat yang serba terbuka pada satu sisi, dan keberadaan media pada sisi lain, menjadikan media tidak mungkin terlepas dari masyarakat. Dalam konteks itu, realitas sosial dialami melalui bahasa, komunikasi, dan citraan. Makna-makna sosial dan perbedaan-perbedaan sosial, tak terhindarkan lagi, terikat dengan representasi (McRobbie & Thornton, 1995). Apa yang terjadi kemudian adalah makna-makna sosial tentang membanjirnya pengacau dari negeri asing dan kesenjangan hidup di antara warga yang miskin dengan warga yang kaya dikemas sebagai kepanikan moral.

Siapa pun pihak yang mencuatkan ketakutan, memahami benar bahwa kepanikan moral akan selalu hadir dalam masyarakat risiko (*risk society*). Hal ini karena dalam masyarakat yang makin termodernisasi terdapat persoalan produksi kekayaan dan bagaimana mendistribusikannya. Semakin masyarakat mengalami

modernisasi, semakin tinggi pula risiko yang diproduksi masyarakat tersebut, dan anggota masyarakat semakin menyadari risiko yang bakal terjadi (Thompson, 2005, 21–22). Hal yang perlu mendapat sorotan adalah mengapa problem produksi dan distribusi kekayaan selalu terkait dengan manusia yang berasal dari Tiongkok. Mereka seakan-akan menjadi kekuatan sosial yang sedemikian agresif menyedot kekayaan alam orang lain. Sosok sosial ini bahkan dianggap mengeksploitasi sesama warga Indonesia. Dalam situasi demikian, muncul retorika para pejabat negara yang berpikiran sempit, etnosentristik, dan memperlihatkan watak xenophobia. Mereka mengatakan bahwa persoalan itu hanya dapat diatasi kalau wujud sosial yang asing (dan “aseng”) itu dilenyapkan saja.

Dengan merujuk pada gagasan Critcher (dalam Allan, 2005, 177–187) melihat keterkaitan jurnalisme dengan kepanikan moral, berbagai hoaks yang ditampilkan *Postmetro* menunjukkan bagaimana kedatangan TKA dari Tiongkok dianggap sebagai menimbulkan masalah karena dinilai sebagai pengancam bagi rakyat Indonesia dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, TKA dari Tiongkok itu diberi label pendatang ilegal yang mempunyai agenda atau misi terselubung menghancurkan Indonesia. Agenda yang ditampilkan dalam judul dari aneka hoaks itu ialah pemerintah harus segera menghentikan kedatangan TKA dari Tiongkok. Hal yang paling menonjol adalah *Postmetro* sengaja menampilkan aneka pernyataan dari kalangan yang diposisikan mempunyai otoritas, misalnya aktivis buruh, dosen, tokoh keagamaan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memberikan kecaman keras bagi pemerintah yang membiarkan kedatangan para pengancam itu.

MELAKNAT SETAN RAKYAT

TKA dari Tiongkok pada akhirnya tidak hanya diposisikan sebagai pengancam yang menakutkan, melainkan juga sebagai setan rakyat (*folk devil*). Cohen (2002) menggambarkan setan rakyat secara ringkas sebagai anggota masyarakat yang memang harus dihindari. Setan rakyat merupakan sosok pengingat yang terlihat jelas dan kita tidak boleh menjadi seperti figur yang buruk itu.

Namun, hasil studi yang memperlihatkan bahwa tidak setiap kepanikan moral memunculkan setan rakyat. Setan rakyat bisa saja muncul, meskipun tidak terjadi kepanikan moral. Setan rakyat merupakan nama untuk sosok yang dianggap jahat (Hayle, 2013). Hanya saja, harus dimengerti bahwa pada setiap era pastilah terjadi kepanikan moral. Sosok setan rakyat muncul berganti-ganti sesuai keadaan pada setiap zaman. Mereka bisa saja bersosok sebagai kalangan pembunuh, pelaku pedofilia, dan lain-lain (Marsh & Melville, 2011). Sosok yang diposisikan sebagai setan rakyat itu bisa saja orang-orang yang terlibat dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yakni mereka yang bekerja di perusahaan besar (Levi, 2008). Dalam masyarakat yang masih begitu dibelit persoalan lapangan pekerjaan, figur setan rakyat paling mudah dituduhkan kepada mereka yang sama-sama sebagai pekerja. Posisi mereka adalah buruh juga.

Beberapa judul yang ditampilkan oleh *Postmetro* yang menunjukkan bahwa TKA asal Tiongkok dipandang sebagai setan rakyat adalah *TKA Asal China Mau ‘Ngerampok’ Kekayaan Alam Indonesia* (edisi 23 Desember 2016); *#IndonesiaKu, Sama-Sama Buruh Kasar; Buruh China Digaji 15juta, Pekerja Lokal Anak Negri Sendiri 2Juta Sebulan!* (edisi 3 Agustus 2016); *“Investasi Komunis Cina Bermasalah, karena 84% Rakyat RI Tolak Komunis Secara Absolut”* (edisi 8 Januari 2017); *Di Bali. Kerja Sama-sama Kuli, Buruh China Impor Digaji Rp200rb/hari, Buruh Lokal Hanya 60rb* (edisi 5 Februari 2016); *Apa Maksud WN China Tanam Cabai Mengandung Bakteri Berbahaya di Bogor?* (edisi 9 Desember 2016); *Tenaga Kerja Asal China Terancam Pidana* (edisi 18 Agustus 2016); *Angka Pengangguran Meningkat, Serbuan TKA China Ancam Perekonomian Bangsa* (edisi 5 Januari 2017); *Perusahaan Penyalur PSK Impor Dari China Harus Ditindak Tegas* (edisi 4 Januari 2017); *TKA China Ilegal Jadi Ancaman Kaum Buruh* (edisi 2 Mei 2017); *TKA Asal China Merangsek Hingga Desa Gempol di Cirebon* (edisi 6 Januari 2017); *Tukang Las Lokal Rp3 Juta Per Bulan, Tukang Las Impor Digaji Rp1,2 Juta per Hari* (edisi 3 Januari 2017); *“Sarjana Indonesia Kerja di China Digaji Rp7 Juta, Sedang Buruh China Kerja di Indonesia Digaji Rp 15 Juta”* (edisi 7

Agustus 2016), “Melamar kerja dituntut punya KTP, ijazah, SKCK, dll. China Ilegal datang tanpa paspor langsung kerja dapat gaji 15 juta” (edisi 6 Agustus 2016), atau DPR Sidak Sarang TKA Cina di Batam, PTnya Bilang Perbandingan Karyawan Pribumi-Cina 3:1, nyatanya 50:50 (edisi 23 Juli 2016).

Berbagai judul hoaks itu memperlihatkan bahwa TKA dari Tiongkok benar-benar layak dianggap sebagai setan rakyat. Tindakan yang telah dan akan dilakukan setan rakyat adalah melakukan “perampokan,” yang dapat dimaknai secara konotatif sebagai aksi merebut lahan pekerjaan warga Indonesia. Setan rakyat tidak hanya menguasai berbagai industri di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau daerah pedesaan. Isu pribumi dan asing (non-pribumi) dimunculkan sebagai penanda persoalan lama yang sengaja dibangkitkan kembali. Secara nasional, kedatangan TKA dari Tiongkok itu bahkan membuat perekonomian nasional terganggu. Hal yang paling jelas terlihat adalah TKA dari Tiongkok mendapatkan perlakuan yang sedemikian istimewa. Tanpa membawa persyaratan yang rumit dan dengan status sebagai buruh, mereka mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada tenaga kerja Indonesia. Itulah berbagai judul yang dimaksudkan untuk melaknat dan mengutuk setan rakyat yang berasal dari negeri Tiongkok itu.

Sebagai setan rakyat, TKA dari Tiongkok digambarkan sebagai sekelompok orang yang kemungkinan besar menjadi kekuatan yang demikian mengacaukan bagi masyarakat. Lebih dari itu, mereka didudukkan sebagai musuh yang diatribusikan dengan sejumlah stereotip perilaku yang jahat. Keberadaan TKA dari Tiongkok menyebabkan tatanan sosial mengalami kegoncangan. Wajar saja jika mereka dipersalahkan untuk aneka persoalan yang terjadi dalam masyarakat (Flores-Yeffal, Vidales, & Plemons, 2011). Penggunaan kata-kata penuh kecaman dan kutukan memperlihatkan bahwa TKA dari Tiongkok telah mengalami demonisasi (*demonisation*) (Flinders, 2012). Demonisasi merupakan proses menempatkan kelompok tertentu sebagai pengancam keutuhan sosial. Mereka dianggap seperti iblis yang harus diusir jauh-jauh dari ruang lingkup

kehidupan masyarakat yang normal. Hasil demonisasi itu disebut setan rakyat. Sosok-sosok jahat itu tidak bisa disembuhkan dengan terapi, melainkan harus diusir sejauh mungkin.

Demonisasi yang dijalankan *Postmetro* telah menciptakan budaya ketakutan (*culture of fear*). Dapat dikemukakan bahwa *Postmetro* menjadi penyebar ketakutan dengan melakukan teknik-teknik naratif melalui berbagai judul yang sangat provokatif. Terdapat tiga teknik menebarkan ketakutan, yakni mengukuhkan insiden-insiden sebagai kejadian yang dianggap sebagai tren (kecenderungan), melakukan pengulang-ulangan (*repetition*), dan menunjukkan arah yang salah atau *misdirection* (Glassner, 2004). Peristiwa kedatangan TKA Tiongkok ke Indonesia merupakan insiden belaka. Peristiwa ini pun tidak merata terjadi di seluruh penjuru negeri. Jumlah TKA dari Tiongkok yang datang pun dalam angka yang wajar, bukan jutaan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh *Postmetro*. Ada repetisi yang sengaja terus diembuskan dengan cara menampilkan kesenjangan dalam hal pengupahan antara buruh dari Tiongkok dengan Indonesia. Dengan komparasi semacam itu, seolah-olah terjadi diskriminasi yang luar biasa bagi kalangan pekerja dari negeri sendiri. Pada akhirnya, ada kesengajaan untuk mendorong cara berpikir yang salah arah dengan mengemukakan bahwa TKA dari Tiongkok ingin menginvasi Indonesia dan bahkan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bagian Tiongkok.

Postmetro menciptakan budaya ketakutan dengan sengaja menonjolkan keyakinan yang tidak beralasan, yakni kemanusiaan bangsa Indonesia sedang dihadap-hadapkan pada kekuatan destruktif yang mengancam keberadaan bangsa. Budaya ketakutan itu membenturkan satu manusia dengan manusia lain. Budaya itu juga melahirkan kecurigaan terhadap bangsa yang masyarakatnya dibawa untuk saling berhadapan (Furedi, 2002). Apa yang dilakukan *Postmetro* pun demikian, yakni mencuatkan lagi masalah pribumi versus non-pribumi. Pihak pribumi adalah anak-anak bangsa asli yang mengalami diskriminasi sehingga mengalami penderitaan berkepanjangan. Sementara itu, pihak non-pribumi dianggap sebagai pendatang haram yang mendapat berbagai keistimewaan.

Perspektif lain yang dapat digunakan adalah memandang budaya ketakutan sebagai relasi yang bercorak komunikasional. Akibatnya, relasi itu dipenuhi kontradiksi, antagonisme, dan dinamisme antar-subjektif. Dalam level yang paling lazim, ketakutan dan dampaknya merembes dalam jalinan sosial dalam bentuk-bentuk yang bersifat langsung maupun tidak langsung, misalnya tindak kekerasan, pemaksaan, intimidasi, dan bujukan (Jeffries, 2012). Jadi, dapat pula ditegaskan bahwa *Postmetro* memang mendorong pemerintah dan elemen-elemen masyarakat (dalam hal ini buruh) untuk menjalankan aksi pengusiran fisik terhadap TKA dari Tiongkok. Mereka dianggap sebagai kekuatan asing yang akan menganggangi kedaulatan Indonesia. Mereka harus diusir keluar dari negeri ini dengan cara apa saja, bahkan kekerasan pun dibolehkan.

Persoalan yang menarik diungkap ialah mengapa *Postmetro* sedemikian gigih menunjukkan kebencian yang mendalam terhadap TKA dari Tiongkok. Hal ini karena terdapat kecurigaan bahwa TKA dari Tiongkok itu memiliki jalinan yang erat, dan bahkan kekerabatan, dengan etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara yang sah. Dalam pandangan *Postmetro*, siapa saja yang dianggap orang dari Tiongkok adalah sama saja. Situs hoaks ini tidak memedulikan bahwa entitas sosial Tionghoa memiliki aneka suku atau pun marga. Hal ini menunjukkan bahwa *Postmetro* memperlihatkan kebencian rasial yang luar biasa. Siapa saja yang dilabeli Tionghoa, dari mana pun datangnya, apa pun jenis pekerjaannya, dan dari suku atau marga mana kelahirannya, dianggap sama saja. Jadi, Tionghoa itu memang satu dan tunggal. Begitulah cara berpikir rasialistik ala *Postmetro*. Tionghoa telah menjadi setan rakyat yang begitu sempurna untuk dilaknat sampai tandas.

Tidak aneh jika pola-pola pemikiran usang dan picik masih ditunjukkan situs hoaks yang dikelola para mahasiswa itu. Pemikiran dikotomistik yang sebegitu menyesatkan tentang pribumi versus non-pribumi masih sedemikian kuat mendekam dalam kesadaran anak-anak generasi milineal itu. Padahal, pemikiran itu merupakan hasil konstruksi yang dijalankan

kolonialis Belanda ketika menempatkan warga Tionghoa sebagai pihak yang memiliki spirit dan etos yang dekat dengan pihak penjajah. Sang penjajah memandang bahwa jika warga Tionghoa membaaur dengan pribumi, akan menjadi ancaman besar bagi kolonialis. Sejak 1830, pemerintahan kolonial menerapkan restriksi pergerakan bagi warga Tionghoa dalam bentuk sistem perlintasan (*pass system*) dan sistem zona (*zoning system*). Hal itu terus diperlakukan sampai akhir pemerintahan kolonial sekalipun dengan aneka modifikasi (Ju Lan, 2012). Pemberlakuan sistem yang serba membatasi warga Tionghoa sengaja diterapkan rezim kolonial supaya tidak tercipta kerja sama dan solidaritas dengan warga lain yang mendapat label sebagai kaum pribumi. Jadi, pribumi dan non-pribumi itu tidak lain konstruksi ideologi yang ditancapkan rezim kolonial.

Tentu saja, anak-anak muda yang lihai memainkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi itu tidak sudi memedulikan berbagai kerumitan historis semacam itu. Kalangan muda yang melek teknologi tapi dungu histori itu berpikir bahwa dikotomi pribumi dan non-pribumi itu adalah kehendak Tuhan dan telah menjadi hukum alam. Kelompok pemuda itu ialah pewaris setia pemikiran penjajah dan rezim fasisme Orde Baru (1966–1998). Rezim opresif yang dikendalikan Soeharto berpikiran bahwa etnis Tionghoa sengaja mendukung kelompok Komunis. Akibatnya, selama Soeharto berkuasa, etnis Tionghoa mendapat perlakuan diskriminatif. Etnis Tionghoa pun dipisahkan secara kategoris sebagai non-pribumi. Rezim politik itu menjalankan asimilasi yang memaksa etnis Tionghoa menanggalkan identitas mereka, berperan serta dalam sekolah, serta mengganti nama mereka. Berbagai kelompok dan lembaga yang berafiliasi dengan Tiongkok begitu dibatasi dan bahkan diberangus, termasuk bahasa, budaya, dan agama (Da Silva, 2010). Orang-orang yang lihai membuat hoaks itu tidak peduli dengan sejarah kelam semacam itu.

Terdapat konsekuensi paling buruk yang harus dipikul warga Tionghoa ketika pola-pola pemikiran gaya kolonialisme Belanda dan fasisme Orde Baru tetap menancap kuat dalam kesadaran masyarakat. Fenomena itulah yang disebut sebagai kambing hitam (*scapegoat*). Dalam

tradisi Yahudi, sekali dalam setahun, dilakukan ritual membuang kambing ke belukar. Hal ini dimaksudkan untuk membuang dosa komunitas. Jadi, dosa-dosa komunitas dibebankan kepada si kambing yang dibuang ke belukar. Setelah itu setan akan menjauh dan orang-orang pun leluasa menjalani kehidupan dengan lembaran yang bersih. Hal serupa juga dijalankan komunitas lain yang merasa terinfeksi iblis. Mereka menyingkirkan iblis itu dengan ritual pengambinghitaman (Dorr, 2010).

Kambing hitam juga terjadi secara politis. Peristiwa itu muncul ketika ada warga yang dijadikan objek pengorbanan. Padahal, warga itu bukanlah pihak yang bersalah. Polarisasi kolektif yang menjadikan warga tidak berdosa itu sebagai kambing hitam dalam situasi politik tertentu (Girard, 1986, 39–40). Praktik kambing hitam terjadi di Indonesia terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 (*Law and Policy*, 1998). Siapa saja yang berstatus minoritas dapat menjadi kambing hitam, misalnya kaum muslim di Myanmar (van Klinken & Aung 2017; McCarthy & Menager, 2017). Akhirnya, *Postmetro* melalui aneka hoaks yang penuh kebencian itu menghadirkan TKA dari Tiongkok sebagai kambing hitam yang beridentitas khusus untuk semakin menegaskan tentang “siapa kita dan siapa mereka dan siapa yang memiliki hak untuk hidup di mana” (Weedon, 2004, 2).

PENUTUP

Berbagai hoaks tentang invasi TKA ilegal dari Tiongkok yang diproduksi oleh *Postmetro* merupakan realisasi “jurnalisme Frankenstein.” Sebagaimana halnya monster Frankenstein yang hadir ke dunia karena rakitan sejumlah organ tubuh makhluk yang telah mati, hoaks pun dipraktikkan dengan cara-cara serupa. Hoaks itu diambil begitu saja dari berbagai pemberitaan media arus utama. Selanjutnya, bagian-bagian pemberitaan sengaja direkayasa untuk memberikan daya tarik bagi khalayak. Judul merupakan bagian utama yang sengaja dipoles untuk menimbulkan provokasi. Prinsip yang digunakan *Postmetro* dalam membuat berbagai judul hoaks tersebut ialah semakin provokatif, semakin baik.

Hal itu disukai khalayak dan bisa meluapkan amarah massa. *Postmetro* menganggap teknik itu sebagai strategi yang tepat untuk melawan rezim politik yang berkuasa.

Hoaks memang bukan bohong biasa. Namun, berbagai hoaks yang diproduksi *Postmetro* memperlihatkan bahwa bohong itu biasa, terlebih ketika material hoaks itu adalah kedatangan TKA ilegal dari Tiongkok. Kepanikan moral sengaja diciptakan untuk meluapkan suasana yang demikian mencekam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Postmetro* sengaja menyebarkan hoaks itu dengan agenda tertentu, yakni menampilkan para TKA ilegal dari Tiongkok sebagai pengancam. Hal itu merupakan cara untuk memformulasikan kepanikan moral sehingga masyarakat makin tidak menyukai dan bahkan membenci siapa saja dan apa saja yang dianggap Tiongkok. Inilah model kepanikan moral yang memang sengaja ditampilkan oleh kelompok kepentingan tertentu, dalam hal ini kelas menengah terpelajar, untuk terus memusuhi pemerintah dan mengobarkan xenofobia (ketakutan terhadap orang asing, dalam hal ini adalah TKA ilegal dari Tiongkok).

Pada akhirnya, kalangan buruh dari negeri jauh itu diposisikan sebagai setan rakyat yang harus dilaknat. TKA dari Tiongkok dalam konteks ini dianggap memiliki keserupaan dengan etnis Tionghoa yang telah lama menjadi kambing hitam dalam perpolitikan di Indonesia. Siapa pun dan apa pun yang dianggap berkaitan dengannya harus diusir sejauh-jauhnya dari negeri ini. Itulah praktik-praktik politik kambing hitam yang menempatkan kaum minoritas, dalam hal ini etnis Tionghoa yang telah lama hidup di Indonesia, sebagai pihak yang pantas diikutsertakan menjadi objek cercaan ketika hoaks kedatangan TKA ilegal dari Tiongkok demikian merebak. Dengan demikian, untuk apa saja yang berlabel Tiongkok (apalagi yang kafir) boleh dikutuk semau-maunya. Itulah hoaks penuh kebencian yang diproduksi *Postmetro*.

PUSTAKAACUAN

Bell, D. (2007). *Cyberculture theorists: Manuel Castells and Donna Haraway*. London dan New York: Routledge.

- Bell, D., dkk. (2004). *Cyberculture: the key concepts*. London dan New York: Routledge.
- Berger, J., & Milkman, K.L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205. DOI: 10.1509/jmr.10.0353.
- Botting, F. (2003). Metaphors and monsters. *Journal for Cultural Research*, 7(4), 339–365.
- Broersma, M. (2010). The unbearable limitations of journalism: on press critique and journalism's claim to truth. *The International Communication Gazette*, 72(1), 21–33.
- Bruce, B. C. (2000). The work of art in the age of digital reproduction. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 44(1), 66–71.
- Burns, L. S. (2002). *Understanding journalism*. London: Sage Publications.
- Burroughs, B., & Burroughs, W. J. (2011). The Masal Bugdud hoax: football blogging and journalistic authority. *New Media & Society*, 14(3), 476–491. DOI: 10.1177/1461444811420270.
- Cohen, S. (2002). *Folk devils and moral panics: the creation of the mods and rockers (3rd edition)*. London dan New York: Routledge.
- Critcher, C. (2011). For a political economy of moral panics. *Crime Media Culture*, 7(3), 259–275. DOI: 10.1177/1741659011417605.
- Critcher, C. (2005). Mighty dread: journalism and moral panics. Dalam S. Allan (ed.), *Journalism: critical issues* (pp. 177–187). Berkshire: Open University Press.
- Da Silva, F. (2010). The Chinese minority in Indonesia. *Hohonu*, 8, 61–63.
- David, M., dkk. (2011). The idea of moral panic—ten dimensions of dispute. *Crime Media Culture*, 7(3), 215–228. DOI: 10.1177/1741659011417601.
- Dixon, W.W. (2017). The ghost of Frankenstein: the monster in the digital age. *Quarterly Review of Film and Video*, 34(6), 1–11. DOI: 10.1080/10509208.2017.1313030.
- Dorr, D. (2010). The scapegoat. *The Furrow*, 61(2), 92–97.
- Duffy, A., Tandoc, E.C., & Ling, R. (2017). Frankenstein journalism. *Information, Communication, & Society*, 21(10), 1–15. DOI: 10.1080/1369118X.2017.1313884.
- Flinders, M. V. (2012). The demonisation of politicians: moral panics, folk devils and MP's expenses. *Contemporary Politics*, 18(1), 1–17. DOI: 10.1080/13569775.2012.651263.
- Flores-Yeffal, N.Y, Vidales, G., & Plemons, A. (2011). The Latino-cyber moral panic process in the United States. *Information, Communication, & Society*, 14(4), 568–589. DOI:10.1080/1369118X.2011.562222.
- Fredal, J. (2014). The perennial pleasures of the hoax. *Philosophy and Rhetoric*, 47(1), 73–97.
- Furedi, F. (2002). *Culture of fear: risk-taking and the morality of low expectation*. London dan New York: Continuum.
- Girard, R. (1986). *The Scapegoat*, (terj) Yvonne Frecero. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Glassner, B. (2004). Narrative techniques of fear mongering. *Social Research*, 71(4), 819–826.
- Godler, Y., & Reich, Z. (2015). Journalistic evidence: cross-verification as a constituent of mediated knowledge. *Journalism*, 18(5), 558–574. DOI: 10.1177/1464884915620268.
- Goode, E., & Ben-Yehuda, N. (2009). *Moral panics: the social construction of deviance (2nd Edition)*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Groseclose, T., & Milyo, J. (2005). A social-science perspective on media bias. *Critical Review*, 17(3–4), 305–314. DOI: 10.1080/08913810508443641.
- Hayle, S. J. (2013). Folk devils without moral panics: discovering concepts in the sociology of evil. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 6(2), 1125–1137.
- Herman, L., & Vervaeck, B. (2005). *Handbook of narrative analysis*. Lincoln dan London: University of Nebraska Press.
- Hughes, J., Rohloff, A., David, M., & Petley, J. (2011). Foreword: moral panics in the contemporary world. *Crime, Media, Culture*, 7(3), 211–214. <https://doi.org/10.1177/1741659011417600>
- Hunt, A. (1997). 'Moral panic' and moral language in the media. *The British Journal of Sociology*, 48(4), 629–648.
- Ingraham, C., & Reeves, J. (2016). New media, new panics. *Critical Studies in Media Communication*, 33(5), 455–467.
- Jeffries, F. (2012). Mediating fear. *Global Media Communication*, 9(1), 37–52. DOI: 10.1177/1742766512463039.
- Kalsnes, B., & Larsson, A.O. (2017). Understanding news sharing across social media. *Journalism Studies*, 19(11), 1669–1688. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1297686.

- Kendall, D. (2011). *Framing class: media representations of wealth and poverty in America (2nd edition)*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Soepardi, H.S. (2016, Desember 27). Jokowi sebut isu “serangan” tenaga kerja China sebagai fitnah. *Kompas.com*. Diakses pada 27 Desember 2016 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/27/12214001/jokowi.sebut.isu.serangan.tenaga.kerja.china.sebagai.fitnah>
- Ihsanuddin. (2016, Desember 23). Jokowi minta polisi tindak penyebar isu 10 Juta tenaga kerja China. *Kompas.com*. Diakses pada 23 Desember 2016 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/23/11535991/jokowi.minta.polisi.tindak.penyebar.isu.10.juta.tenaga.kerja.china>
- Bohang, F.K. (2016, Desember 2). Dua situs penyebar *hoax* di Indonesia. *Kompas.com*. Diakses pada? dari <https://tekno.kompas.com/read/2016/12/02/15030027/dua.situs.penyebar.hoax.di.indonesia>
- Ju Lan, T. (2012). Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as ‘foreign subjects.’ *Asian Ethnicity*, 13(4), 373–387. DOI: 10.1080/14631369.2012.710075.
- Law and policy*. (1998). Reproductive health matters, 6(12), 168–174. DOI: 10.1016/S0968-8080(98)90038-6.
- Levi, M. (2008). Suite revenge? The shaping of folk devils and moral panics about white-collar crimes. *The British Journal of Criminology*, 49(1), 48–67.
- Lim, M. (2013). The internet and everyday life in Indonesia: a new moral panic? *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 169, 133–147.
- Lister, M., dkk. (2009). *New media: a critical introduction (2nd Edition)*. London dan New York: Routledge.
- Lowe, H. (2012). An online hoax reminds journalists to do their duty. *Journal of Mass Media Ethics*, 27(1), 62–64. DOI: 10.1080/08900523.2012.644146.
- Marsh, I., & Melville, G. (2011). Moral panics and the British media—a look at some contemporary ‘folk devils.’ *Internet Journal of Criminology*, Vol? 1–21. ISSN: 2045-6743 (Online).
- McCarthy, G., & Menager, J. (2017). Gendered rumours and the Muslim scapegoat in Myanmar’s transition. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 396–412. DOI: 10.1080/00472336.2017.1304563.
- McRobbie, A., & Thornton, S. L. (1995). Rethinking ‘moral panic’ for multi-mediated social worlds. *The British Journal of Sociology*, 46(4), 559–574.
- Meraz, S. (2015). Quantifying partisan selective exposure through network text analysis of elite political blog networks during the U.S. 2012 presidential election. *Journal of Information Technology & Politics*, 12(1), 37–53. DOI: 10.1080/19331681.2014.974119.
- Norris, P, Kern, M., & Just, M. (2003). Framing terrorism. Dalam Norris, P., Kern, M., & Just, M. (eds.), *Framing terrorism: the news media, the government and the public* (pp. 3–23). New York dan London: Routledge.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: civic engagement, information poverty, and the internet worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schaffer, J., McCutcheon, R., & Stoffer, K.T. (2009). *Journalism matters*. Columbus, Ohio: McGrawHill-Glencoe.
- Serafis, D., & Herman, T. (2017). Media discourse and pathos: sketching a critical and integrationist approach—Greek and French headlines before the Greek referendum of 2015. *Social Semiotics*, 28(2), 184–200. DOI: 10.1080/10350330.2017.1291139.
- Smith, M. (2009). Arbiters of truth play: media April fools’ day hoaxes. *Folklore*, 120(3), 274–290.
- Thompson, K. (2005). *Moral panics*. London dan New York: Routledge.
- Modal jempol dan akun anonim (2017, Januari 2–9). *Tempo*, 38–39.
- Hidayat, R. (2016, Desember 16). Cerita di balik situs Postmetro dan Seword. *Tirto.id*. Diakses pada? dari <https://tirto.id/cerita-di-balik-situs-postmetro-dan-seword-b9WN>
- van Drom, A. (2010). ‘Perhaps this is not fiction’: the discursive construction of national and regional identities in Belgium’s public television broadcast hoax on Flemish independence. *European Journal of Cultural Studies*, 13(1), 81–97. DOI: 10.1177/1367549409352967.
- van Klinken, G., & Aung, S.M.T. (2017). The contentious politics of anti-Muslim scapegoating in Myanmar. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 353–375. DOI: 10.1080/00472336.2017.1293133.
- Walsh, L. (2006). *Sins against science: the scientific media Hoaxes of Poe, Twain, and others*. New York, Albany: State University of New York Press.
- Weedon, C. (2004). *Identity and culture: narratives of difference and belonging*. New York: Open University Press.

KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL¹

Nina Widyawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)

Email: widyawati11@yahoo.com

ABSTRACT

Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.

Keywords: *digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy*

ABSTRAK

Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirnya masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.

Kata kunci: *budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu*

¹ Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah dipublikasikan.

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi komunikasi berdampak terhadap perilaku masyarakat. Ketika teknologi *audio visual* berkembang, perilaku masyarakat juga berubah. Komersialisasi televisi yang terjadi pada 1920-an dan diperkenalkan di Indonesia pada 1962 membuat akses terhadap informasi global terbuka. Televisi yang memiliki sifat *audio visual* mampu menyebarkan pesan secara massa dalam waktu yang bersamaan sehingga disebut sebagai media massa atau media lama. Era ini menandai lahirnya masyarakat massa atau *mass society* dan melahirkan budaya massa atau *mass culture*. Budaya massa melahirkan produk yang sifatnya massa dan standar yang disebut dengan *mass production*.

Pada era masyarakat massa, penonton televisi bisa mengetahui kejadian yang ada di belahan lain dunia, tetapi sifatnya belum *real time*. Televisi membuat masyarakat terkoneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pada 1962, McLuhan menyebut dunia sudah menjadi satu atau tanpa batas, kemudian dikenal dengan nama desa global atau *global village*. Pada saat internet mulai berkembang, televisi menghadirkan siaran *real time*. Perkembangan berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menghasilkan *world wide web (www)*. Pada era ini, dunia benar-benar tanpa batas dan saling terkoneksi dan disebut sebagai *global village reborn* (Baran & Davis, 2000, 8, & 287–290).

Revolusi TIK diikuti oleh berkembangnya berbagai *platform* media sosial. Hal tersebut berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial dan industri. Pada era ini, pesan yang tadinya bersifat massa berubah menjadi *mass-self*. Stimulus yang sifatnya *mass-self* berpengaruh pula terhadap struktur masyarakat yang tidak lagi bersifat masyarakat massa. Pada era *mass-self*, produk industri media dan industri lainnya berkembang menjadi lebih tersegmentasi. Segmentasi pesan pada media sosial membuat selera masyarakat lebih bervariasi. Akibatnya, pengguna media yang sifatnya *mass-self* lebih menyukai produk yang sifatnya *custom* (Castells, 2010, xxx).

Sebutan media baru mengacu pada sifatnya yang berbeda dengan media lama. Ada empat sifat media baru yang membedakannya dengan

media lama. Sifat pertama adalah digitalisasi. Semua bentuk informasi (teks, suara, gambar) dalam bentuk kode biner 0–1 sehingga informasi menjadi lebih banyak. Sifat kedua adalah konvergensi. Pada media baru terjadi penggabungan teknologi informasi, telekomunikasi dan media. Sifat ketiga adalah interaktivitas. Pada media baru, pengguna memiliki pilihan terhadap akses sistem informasi baik sumber informasi maupun kontrol terhadap hasil dari penggunaan sistem dan pilihan sumber. Sifat keempat adalah jaringan. Kapasitas untuk membawa informasi dalam jumlah besar yang sifatnya interkoneksi (Flew, 2004, 8–15). Dengan demikian, media baru identik dengan media digital.

Sifat-sifat media baru tersebut membuat kemunculannya digadang-gadang sebagai ruang publik. Ruang publik, dalam pengertian Habermas, adalah pembicaraan yang tidak berada di bawah tekanan yang berorientasi pada penyampaian hal yang sifatnya pragmatis. Tekanannya adalah adanya emansipatori. Felski, seorang feminis, memaknai ruang publik sebagai perpanjangan dari diskusi politik oleh seluruh individu yang tertindas (Poster dalam Porter 1997, 208).

Biaya untuk akses informasi melalui TIK rendah, tetapi memiliki banyak akses informasi. Oleh karena itu, kemunculan media baru diharapkan mampu menciptakan demokrasi. Cornfield dkk (2007) mengharapkan media baru (dalam kasus ini *blog*) berkembang menjadi pilar keempat demokrasi. Dalam pengertian lama, keempat pilar tersebut adalah: 1) penyelenggara negara, yaitu pemerintah, partai dan kelompok advokasi; 2) penguasa pengetahuan; 3) warga yang populer; 4) pers. Hasil studi Cornfield (tanpa menyertakan pilar kedua atau penguasa pengetahuan) menunjukkan bahwa *blog* biasa digunakan untuk menyampaikan *buzz*.² Terdapat kedekatan hubungan antara pembuat *buzz* pihak yang berkampanye, media, *blogger*, dan warga internet. Hal senada juga ditemukan dalam studi yang menjelaskan bahwa media baru mengubah kepemimpinan politik (Widyawati, 2014, 226). Melalui media baru, pemimpin politik dan konstituen bisa berkomunikasi secara langsung.

² Buzz adalah suara di publik di mana banyak orang membicarakan hal yang sama di saat yang sama.

TIK menandai perubahan epos menuju masyarakat dinamis dan kontemporer yang ditandai dengan lahirnya struktur sosial dan ekonomi baru. Struktur baru ini memiliki ciri digitalisasi, konvergensi, dan jaringan yang menyatu dengan struktur ekonomi yang sifatnya global dan *knowledge-based*. Interaksi ini memungkinkan terbentuknya konstruksi identitas dan komunitas baru. *Knowledge-based* dan *service based economy* mengubah bentuk budaya, salah satunya adalah transformasi industri media karena tantangan digital (Flew, 2004, 224–225).

Untuk memahami perubahan perilaku masyarakat akibat revolusi teknologi, terlebih dahulu harus memahami cara kerja teknologi itu sendiri. Pada akhir abad ke-21, ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang cepat, media baru bekerja dengan cara berbeda dengan media lama. Dalam era ini, masyarakat hidup pada interval sejarah yang ditandai oleh transformasi budaya material karena ada paradigma teknologi baru, yaitu teknologi informasi (Castells, 2010, 28). Revolusi teknologi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Teknologi menembus seluruh segi kehidupan manusia, terutama pembentukan aktivitas sosial yang tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga membentuk produk baru. Revolusi teknologi kali ini merujuk pada teknologi proses informasi dan komunikasi (Castells, 2010, 29–30).

Kranzberg dan Mokyō (dalam Castells 2010, 30–31) membagi revolusi industri dalam tiga tahapan. Revolusi industri pertama sifatnya tidak *science-based*, penggunaan informasi yang ekstensif, dan menggunakan serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Revolusi industri kedua terjadi setelah tahun 1850. Di sini peran ilmu dalam pengembangan inovasi cukup besar. Lahirlah *research and development* pertama dalam industri kimia Jerman akhir abad ke-19. Revolusi teknologi sekarang fokusnya bukan pengetahuan dan informasi, tetapi aplikasi untuk peningkatan pengetahuan dan proses informasi atau perangkat komunikasi untuk umpan balik inovasi dan penggunaan inovasi.

Revolusi teknologi ini berbeda dengan revolusi teknologi sebelumnya. Ilustrasi penggunaan teknologi telekomunikasi baru dalam dua dekade

terakhir dibagi dalam tiga tahap, yaitu otomasi tugas (*automation of task*), pengalaman dalam penggunaan (*an experimental of uses*), dan rekonfigurasi aplikasi (*reconfiguration of application*). Tahapan pertama dan kedua dilakukan dengan cara belajar sambil menggunakan (*learning by using*). Pada tahap ketiga, *users* mempelajari teknologi melalui *doing* dan diakhiri dengan membentuk jaringan serta aplikasi baru.

Pada era media baru, *users* juga berfungsi sebagai *doers*. Teknologi informasi baru bukan sekadar peralatan, tetapi prosesnya dikembangkan oleh *users* dan *doers* dalam waktu yang sama atau berbeda. *Users* dapat mengontrol teknologi (internet). Berikut ini contoh yang paling mudah dipahami. Pada era media lama, ketika individu mengadopsi teknologi televisi, individu tersebut melakukan pembelajaran dalam posisinya sebagai *users*. Ketika televisi menyala, individu tersebut bertindak sebagai *users* atau *consumer*. Cara kerja ini berbeda dengan media baru. Ketika individu mengadopsi media baru, misalnya media sosial, individu bertindak lebih dari sekadar *users*, tetapi juga melakukan tindakan (*doers*) produksi, misalnya produksi pesan di media sosial atau mengunggah foto. Sebagai *doers*, individu memiliki pengalaman dalam berjejaring. Hal inilah yang disebut dengan *users experience*. Dalam teknologi baru, *users* dimungkinkan untuk bertindak sebagai *doers*. Artinya, konsumen sekaligus bisa bertindak sebagai produsen sehingga melahirkan terminologi baru, yakni produsen konsumen (*prosumer*).

Istilah *prosumsi* menurut Williams dan Marquez (2014) pertama kali diperkenalkan oleh Alvin Toffler (1980), kemudian dikembangkan oleh Ritzer, Dean, dan Jugerson (2012) yang mengatakan bahwa media sosial telah mengubah cara *prosumsi* menjadi *prosumsi* massa sebagai pengalaman sehari-hari. Sementara itu, definisi *prosumsi* menurut Williams (2014) adalah proses produksi dan konsumsi (*prosuming*) atau pengalaman yang dibangun dan memungkinkan orang lain untuk berbagi pengalaman.

Studi terdahulu tentang *prosumsi* dilakukan oleh Williams dan Marquez (2014) dengan judul *The Lonely Selfie King: Selfies and the Conspicuous Prosumption of Gender and Race*. Studi ini

membahas *selfie* sebagai fenomena sosial yang menarik karena telah menjadi bagian dari pengalaman media sosial. Setelah memproduksi *selfie*, pengguna akan mengonsumsinya. Kini *selfie* berkembang menjadi artefak sosial yang digunakan untuk menyampaikan pesan sosial. Pesan ini bisa dinegosiasikan oleh budaya yang menghasilkannya. Sebagai sebuah artefak budaya, gender dan ras memainkan peran penting dalam membaca pesan sosial dalam analisis produksi dan konsumsi *selfie*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama proses *selfie*, gender memainkan peran penting. Saat pengguna memposting *selfie* di *platform* media sosial, hasil posting bisa dibedakan berdasarkan gender. Laki-laki dan perempuan menggunakan bahasa yang berbeda untuk mendeskripsikannya, dan identitas rasial juga berpengaruh. *Selfie* pada laki-laki sering kali menunjukkan identitas maskulinitas yang aktualisasinya berbeda pada tiap ras. Perempuan dan laki-laki kulit putih memiliki keengganan ber-*selfie*, sedangkan perempuan dan laki-laki kulit hitam serta Latin umumnya menyukai *selfie*. Responden kulit hitam dan Latin menghasilkan *selfie* dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibanding yang berkulit putih.

Teknologi digital telah mengubah kebiasaan seseorang. Carr (2008) dalam tulisannya yang terkenal, *Is Google Making Us Stupid? What the Internet is Doing to Our Brain*, menyebutkan bahwa kebiasaan individu dalam mengonsumsi bacaan menjadi kurang mendalam. Waktu yang digunakan untuk membaca juga lebih pendek. Studi yang dilakukan oleh peneliti dari University College London tentang perilaku pengunjung perpustakaan menunjukkan bahwa pengunjung umumnya membaca beberapa artikel sepanjang 1–2 halaman dengan cepat, barulah memilih artikel panjang. Tidak diketahui apakah artikel tersebut kemudian dibaca atau tidak.

Stimulus pendek ini disebabkan karakteristik media sosial yang hanya bisa memuat pesan pendek. *Twitter* sejak didirikan hanya menyediakan ruang menulis 140 karakter, baru pada 2017 ditambah menjadi 280 karakter. *YouTube* memang tidak memiliki batasan durasi untuk video yang diunggah. Namun, rata-rata durasi

menonton video tidak lebih dari dua menit. Meningkatnya penggunaan media sosial memunculkan tiga kontroversi. Pertama, teknologi komputer memengaruhi cara berpikir. Pengaruh tersebut meliputi kemungkinan melakukan kegiatan secara bersamaan atau *multitasking*. Pengguna menjadi mudah bereaksi terhadap stimuli visual sehingga kurang kritis. Kedua, media sosial berpengaruh terhadap hubungan sosial. Kini individu lebih tertarik bergabung dalam komunitas virtual dibanding dengan komunitas riil dalam lingkungan fisik yang lebih dekat. Ketiga, apakah betul teknologi bisa meningkatkan produktivitas mengingat investasinya besar (Wood 2011, 325–332)?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z, serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Generasi Y adalah individu yang lahir pada 1981–1995. Generasi Y akrab dengan *platform Facebook, Twitter* serta aplikasi pesan singkat, seperti *Line*. Generasi Z adalah individu yang lahir pada 1995–2010. *Platform* media sosial yang digunakan oleh generasi Z masih mirip dengan generasi Y. Perbedaannya adalah kemahiran dalam mengoperasikan berbagai aplikasi secara bersamaan atau *multitasking*. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *focus group discussion (FGD)*.³

PROSUMSI: SAYA MENONTON DIRI SAYA

Sifat prosumsi dimungkinkan karena media sosial memfasilitasi pengguna untuk memproduksi konten. Hal tersebut membuat individu bisa bertindak sebagai *users* sekaligus *doers*. Sebagai *users*, individu memiliki akses untuk memproduksi konten, contohnya konten *selfie*. Ketika individu memproduksi *selfie*, individu tersebut bertindak sebagai produsen. Tahap berikutnya adalah individu produsen mengunggah hasil *selfie* ke media sosial. Artinya, individu tersebut melakukan tindakan distribusi atau sirkulasi. Pengguna media

³ FGD dilakukan pada 3 April 2017.

sosial sebagai konten kreator ikut menikmati hasil *selfie* yang diproduksi. Di sini individu tersebut bertindak sebagai konsumen dari produksinya sendiri. Selama melakukan aktivitas tersebut, individu memiliki pengalaman berjejaring di media sosial. Selain menikmati produksinya sendiri, individu juga mengonsumsi konten yang tidak jauh berbeda dengan karakternya, misalnya individu yang menyukai *traveling* atau jalan-jalan akan mengonsumsi konten sejenis. Rangkaian kegiatan itu disebut dengan *users experience*.

Studi ini ingin melihat *users experience* dan perilaku prosumsi di Indonesia dalam praktik keseharian. Hasil studi menunjukkan bahwa perilaku prosumsi banyak dilakukan oleh generasi muda. Seluruh informan penelitian yang merupakan generasi Y dan Z yang aktif menggunakan media sosial. Bahkan, ada seorang informan yang sudah sejak tahun 2004 menggunakan media sosial. Beberapa media sosial yang digunakannya juga sudah ditutup, yaitu *Friendster*, *Myspace*, dan *mIRC*. Kini informan tersebut aktif berjejaring melalui *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*; serta menggunakan *blog* dan aplikasi pesan singkat *Line*. Aktivitas di media sosial meliputi proses produksi dan konsumsi. Konten yang diproduksi tidak jauh berbeda dengan konten yang mereka konsumsi, dan konten yang dikonsumsi adalah konten yang mencerminkan dirinya. Seorang peserta FGD menjelaskan, "...konten yang menarik adalah konten yang gue banget, memilih konten sesuai dengan apa yang kita sukai. Jadi menurut saya menarik itu relatif. Mungkin ada konten yang bagi saya menarik, tetapi ternyata tidak bagi teman-teman yang lain."

Konten yang diproduksi umumnya tentang keseharian kehidupan produsen, yakni foto atau cerita tentang diri atau kegiatan produsen. Produksi konten yang dilakukan oleh produser dalam media sosial merupakan komodifikasi kehidupan pribadi dirinya atau kehidupan orang lain yang menjadi selebritas di media lama maupun di media baru. Beberapa peserta FGD mengatakan bahwa dalam sehari paling tidak sekali mengunggah foto pribadi atau foto kebersamaannya dengan teman-teman. Konten lain yang diproduksi adalah cerita dan *caption*. Cerita tentang jalan-jalan atau *traveling* merupakan konten favorit.

Konten terkait dengan makanan juga favorit untuk di-*posting*. Makanan yang dibuat sendiri di rumah atau yang disajikan di rumah makan besar sampai warung pinggir jalan merupakan komoditas menarik untuk dibagikan di media sosial. Beberapa peserta FGD sering melakukan aktivitas ini. Kegemaran individu untuk menikmati kuliner memunculkan profesi baru, yakni *blogger* bidang kuliner (*food blogger*). Referensi *blogger* cukup efektif membuat seseorang datang ke sebuah tempat makan. OK, informan penelitian yang hobi memasak, sering mengunggah kegiatan masak-memasaknya di *YouTube*.

Dunia sosial politik juga menarik bagi warga internet (*netizen*). Oleh karena itu, kegiatan *posting* pendapat mengenai sosial politik melalui *Twitter* banyak dilakukan netizen. Melalui media sosial, kini individu bisa menyalurkan ekspresi sosial politiknya. Tema yang banyak dibicarakan di antaranya marginalisasi terhadap kelompok atau individu dan perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat. Tidak jarang liputan tersebut berujung pada pengumpulan dana, misalnya dalam kasus Saeni.⁴ Hadirnya media sosial memperkuat fungsi media sebagai pengawas lingkungan atau *watchdog*.

Pada era media lama, untuk mengekspresikan pendapat terkait masalah sosial politik, individu harus mengirim artikel opini ke surat kabar. Artikel yang dikirim belum tentu dimuat karena harus melalui proses *gate keeping*. Seiring dengan berjalannya waktu, media lama juga mengubah *platform* menjadi media digital. Sebagai contoh, harian *Kompas* memiliki versi daring dengan nama *Kompas.com* yang memiliki fasilitas *sharing* dan *connecting*. Situs ini menyediakan rubrik *citizen media*, yakni *Kompasiana*; di sini individu bisa berkontribusi menyumbangkan tulisannya. Kepiawaiannya individu dalam menganalisis masalah sosial politik sering kali tidak berhenti di media sosial saja. Sebuah media alternatif di Yogyakarta, *Mojok.Co*, mengangkat status media sosial yang berisi pendapat sosial politik. Status

⁴ Saeni adalah pedagang warung makan di Banten yang terkena razia aparat karena warungnya buka saat bulan puasa. Dagangan Saeni saat itu dirampas oleh aparat. Melihat kejadian tersebut, seorang netizen berinisiatif melakukan pengumpulan dana untuk mengganti dagangan Saeni.

terpilih setelah melalui proses editing kemudian diangkat untuk menjadi artikel *Mojok.Co*. Beberapa penulis status yang artikelnya banyak diangkat di *Mojok.Co* kini ada yang menjadi kolumnis ternama.

Sosial media juga bisa digunakan sebagai media diseminasi informasi. Informan yang aktif di komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan anak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kegiatan komunitas dan mempromosikan acara. Kegiatan sehari-hari biasanya diunggah di *Instagram* dan *tumblr*.⁵ Tulisan-tulisan yang dimuat bentuknya pengalaman keikutsertaan dalam komunitas sosial.

Pertanyaannya, siapakah yang akan mengonsumsi postingan-postingan kehidupan pribadi tersebut? Selain dirinya, komunitas sang produsen merupakan konsumen yang prospektif. Beberapa informan menyatakan bahwa salah satu kegiatannya di media sosial adalah mengintip akun-akun pribadi orang lain. Konsumsi kehidupan pribadi semacam ini tidak bisa dilakukan pada era media lama karena memang tidak ada *platform* yang memfasilitasi. Kini, berbagai *platform* media sosial bisa menjadi ruang pameran kehidupan pribadi seseorang. Implikasinya adalah tidak ada pemisahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik. Bahkan kini beberapa individu dengan sengaja mengkomodifikasikan kehidupan pribadinya, seperti Awkarin.⁶ Kegiatan semacam ini bisa menjadi profesi yang menjanjikan penghasilan yang tinggi.

Kehidupan pribadi orang terkenal merupakan komoditas yang cukup laku di media sosial. Salah satu akun ternama yang piawai dalam mengungkap kehidupan pribadi orang terkenal adalah Lambe Turah⁷. Mahasiswi peserta *FGD* senang mengonsumsi konten *Instagram Lambe*

Turah di akun *Instagram* yang privat. Untuk diterima oleh admin *Instagram Lambe Turah* tidak mudah, harus ada referensi dari akun yang sebelumnya sudah menjadi *followers*. Kalau tidak ada referensi, tidak bisa menjadi *follower*. Informan tersebut mengakui bahwa meskipun beritanya nyeleneh, *Lambe Turah* bisa membeberkan fakta dalam bentuk berita dan gambar sehingga berita tersebut bisa dianggap realita, bukan hoaks. Rubrik *infotainment* di televisi sering menggunakan *Lambe Turah* sebagai sumber berita dan sumbernya ditulis dalam tayangan televisi dengan kata-kata “*source by Lambe Turah*.” Dibanding dengan akun lain atau *infotainment* di televisi, informan dalam penelitian ini lebih suka *Lambe Turah* karena informasinya lengkap. Fenomena ini menandai adanya pergeseran sumber berita. Kini agenda media lama sering kali didikte oleh media sosial, demikian juga agenda masyarakat. Hal ini berbeda dengan era media lama. Pada waktu itu, agenda masyarakat mengikuti agenda media atau *agenda setting* (McCombs & Shaw, 1995, 153–162).

Sangat menarik adalah kisah mahasiswi produsen video yang aktif di *Instagram*, dan *Video Blog (Vlog)* untuk menyebarkan karyanya berupa video yang terdiri atas dua tema, yaitu *#aroundtheworldwithlintang* yang berisi lagu-lagu dari seluruh belahan dunia dan *#singinwitlintang* untuk menyebarkan lagu lama yang belum tentu dikenal oleh generasi sekarang. Informan tersebut membuat *cover* lagu⁸ diiringi ukulele yang dimainkannya, kemudian memperkenalkan lagu tersebut melalui media sosial. Teknik produksinya sederhana, yakni hanya menggunakan *handphone*. Pada masa mendatang, sang informan ingin bekerjasama dengan teman yang memiliki keahlian sinematografi.

Hobi membuat *cover* lagu dilakukan sang informan sejak kelas 6 Sekolah Dasar. Waktu itu dia mengunggah dua video ke *YouTube*. Awalnya, belum banyak orang yang melihat videonya. Ketika menginjak bangku SMP, kegiatan *cover* lagu dilakukan dengan lebih serius. Saat dia membuat *Vlog*, barulah banyak yang kagum. Kegiatan di media sosial membuat dirinya mulai

⁵ *Tumblr* adalah platform mikroblog dan situs jejaring.

⁶ Awkarin adalah selebritas mikro atau selebritas media sosial.

⁷ *Lambe Turah* merupakan akun gosip ternama di Indonesia, *platform Instagram*-nya memiliki lima juta *followers*. Akun *Lambe Turah* adalah akun anonim, yang artinya identitas admin sebenarnya tidak dikenal masyarakat. Mereka menyebutnya dengan ‘minceu.’ Meskipun anonim, akun ini mendeklarasikan diri sebagai anti-hoaks. Artinya, gosip yang ditampilkan didasarkan fakta, bukan hoaks. Bahasa yang digunakan jenaka sehingga akun ini banyak digemari masyarakat.

⁸ *Cover* lagu adalah menyanyikan ulang lagu yang sebelumnya pernah dirilis secara komersial.

banyak dikenal, kemudian sering diundang untuk mengisi berbagai acara *offline*. Popularitasnya di media sosial membuat seorang produser tertarik dan menawarinya untuk produksi video musik secara komersial.

Kegiatan *cover* lagu juga dilakukan oleh OK. Menyanyi memang menjadi hobinya sejak kecil. Ketika duduk di bangku SMA di Probolinggo, hampir setiap minggu OK menyanyi di kafe bersama teman-temannya. Ketika lulus SMA, dia memilih melanjutkan studi di Yogyakarta, sedangkan teman-teman satu grup menyanyi berpencar di seluruh Jawa. Dia ingin bergabung ke komunitas baru, namun ternyata tidak mudah. Muncullah ide untuk memproduksi video *cover* lagu. Awalnya video diunggah di *Instagram*, kemudian atas saran teman-temannya, OK mengunggah ke *YouTube*. Kegiatan ini membuat OK mendapat tawaran untuk bekerja sama. Namun, karena kesibukannya kuliah, hobinya menyanyi belum dikembangkan menjadi profesi.

Konten yang menarik untuk dikonsumsi pada umumnya terkait dengan hobi dan pekerjaan. Bagi pecinta musik, menonton konten musik di *YouTube* sangat berguna dan menghibur. Seorang peserta *FGD* menyukai video Erix Soekamti.⁹ Menurutnya, video Erix Soekamti bisa memberi referensi untuk pekerjaannya. Kecintaannya pada Erix Soekamti mengantar sang mahasiswa menulis skripsi tentang Erix Soekamti. Erix Sukamti adalah salah satu personel band Endank Soekamti yang merupakan band dengan genre *hip-hop* ternama di Yogyakarta. Erix Soekamti menginisiasi *Diary of Erix Soekamti* atau *DOES University*. Dalam *diary*-nya, Erix memberi pelajaran gratis tentang animasi, dan seri *diary* ini disebut sekolah animasi. Menurut Erix, sekolah tersebut mengajak *audience* mengerjakan sesuatu yang disukai, kemudian dijadikan profesi (Yanuar, 2018).

Hal yang sama juga dilakukan oleh pecinta jalan-jalan. Seorang informan penelitian sering mengakses *YouTube channel*, baik yang

diproduksi oleh *YouTuber* ternama, seperti Arief Muhammad, ataupun pengguna *YouTube* lainnya. Referensi jalan-jalan juga bisa didapat dari *Instagram* atau *blog*. Sebelum melakukan perjalanan, informan biasanya mengakses artikel tempat wisata yang akan dituju. Artikel *blog* dinilai lebih menjanjikan karena informasinya detail, misalnya mengenai akses transportasi, jenis bus yang tersedia, apakah bus tersebut dilengkapi dengan fasilitas AC atau tidak, dan kondisi jalan mulus atau bergelombang. Informasi yang dibuat oleh *blogger* sering diperbarui. Oleh karena itu, pengguna media sosial merasa informasi dari *blogger* seperti riil. *Blogger* sangat membantu pecinta jalan-jalan untuk mencapai tempat wisata. Hal ini berbeda dengan portal milik pemerintah yang sifat informasinya tidak detail dan jarang diperbarui. Oleh karena itu, portal milik pemerintah dianggap tidak terlalu banyak membantu.

Seorang mahasiswa yang memiliki profesi sebagai kreator konten mengidolakan Arief Muhammad.¹⁰ Konten video yang diunggah Arief Muhammad dianggap menarik karena terkait dengan pekerjaannya. Jadi, video Arief Muhammad bisa dijadikan referensinya dalam bekerja. Sementara itu, informan lain yang memperdalam periklanan lebih menyukai konten-konten yang tidak ada di Indonesia, di antaranya drama-drama yang dilarang di Indonesia. Untuk mendukung pekerjaannya, seorang informan sering menggunakan *i-Flick*, yaitu aplikasi untuk menambahkan file video ke *iTunes*. Informan lain juga menggunakan media sosial sebagai referensi untuk *start-up* yang dirintisnya. Keunikan media sosial yang diaksesnya digunakan untuk pengembangan bisnisnya.

PERGESERAN POLA KONSUMSI

Pada era media baru, konsumsi media sifatnya personal, bukan massa. Sifat personal ini dibaca oleh pengusaha media sehingga muncul industri portal berita yang bisnisnya menyaring berita dari berbagai media, kemudian menyuguhkannya

⁹ Erix merupakan tokoh ternama di dunia virtual. Memiliki berbagai *platform* media sosial, yaitu *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, dan *Blog*, serta aktif mengunggah video di *YouTube channel*. Erix Soekamti juga memiliki akun *Instagram* erixsoekamti yang memiliki 242.000 *followers*, sementara akun *Twitter*-nya memiliki 113.000 *followers*.

¹⁰ Arief Muhammad adalah penulis yang memiliki nama pena Poconggg. Arief Muhammad juga dikenal sebagai selebriti di *Twitter*, *YouTube*, dan *blog*. *Video blog*-nya telah dikunjungi lebih dari 7 juta orang, videonya di *YouTube* pada 2017 sudah tayang lebih dari 82 ribu kali dan memiliki lebih dari 600 ribu *subscriber*.

kepada pembaca yang prospektif. Remaja adalah salah satu segmen pasar dari portal berita seperti ini. Portal berita *Line Today* menyajikan berita-berita yang sesuai dengan para penggunanya yang mayoritas generasi muda. Portal berita lain yang diakses peserta FGD di antaranya *Tirto.id*, *Kumparan.com*, dan *Vice Indonesia*. Seorang peserta FGD mengatakan, “Kalau media saya suka bukan berita, tetapi semacam portal yang mengulas sesuatu yang lucu, misalnya *Kumparan.com*, *Tirto.id*. Itu primadona saya dalam mencari informasi.” Ketika dikonfirmasi mengenai kredibilitas berita yang disajikan oleh portal berita tersebut, informan merasa yakin akan kredibilitas konten yang disajikan.

Hal senada disampaikan oleh EL yang memiliki kebiasaan mengonsumsi berita melalui *Line Today*. Keuntungan membaca *Line Today*, selain mendapat informasi, juga bisa menjadi bahan pembicaraan dengan teman-temannya. FL menyukai *Vice Indonesia*. Menurut FL, generasi milenial lebih menyukai kemasan berita seperti yang ditampilkan oleh portal berita. Di *Vice Indonesia*, berita berat dikemas dengan ringan sehingga generasi Z yang tidak paham dengan bahasa-bahasa berat bisa mengikuti berita yang serius karena bahasanya lebih mudah dipahami.

Media baru juga memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang dari apa? menuju *e-commerce*. Hal ini disebabkan internet memiliki kemampuan membuat manusia berkumpul dan membentuk sebuah grup. Oleh karena itu, internet cocok digunakan untuk mengembangkan bisnis dengan cepat (Brunson, 2015, 39). KN yang berpengalaman menjadi admin (sering juga disebut mimin) toko *online* menceritakan pengalaman menarik terkait perilaku konsumen. Banyak pemesan yang lebih senang bertanya kepada mimin tentang sesuatu yang terkait transaksi padahal semua keterangan sudah tertera. Jadi, bertransaksi di toko *online* dianggap seperti belanja di warung dunia nyata. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* di *Facebook* memunculkan kejahatan model baru. Hal ini diungkap seorang informan yang aktif di forum jual beli di *Facebook*. Suatu hari, ada seseorang

ingin membeli barang yang ditawarkan informan ini dengan harga Rp400.000,00. Pembeli mengirim bukti transfer, tetapi tidak ada uang yang masuk ke rekening. Namun, pembeli tersebut meminta barang segera dikirim dengan alasan sudah membayar. Ia marah-marah ke akun penjual dan menyebarkan berita ke teman-temannya bahwa si penjual belum mengirim barang yang sudah dibayar. Artinya, penjual difitnah sebagai penipu dan hendak dilaporkan kepada yang berwajib. Karena uang belum ada di rekening, informan dan teman-temannya patungan untuk membayar “kerugian” pembeli sejumlah Rp400.000,00. Akhirnya, oleh admin, informan dipertemukan dengan pembeli. Setelah bertemu, barulah diketahui bahwa pembelinya adalah pelajar SMP. Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa bukti transfer yang dikirimnya palsu dan ia dapatkan dari seorang karyawan bank pemerintah. Informan merasa kasus seperti ini belum ada solusinya karena sistem *e-commerce* di *Facebook* belum sebagus *Lazada* atau *Tokopedia*. Solusi sementara ialah *cash on delivery (COD)*. *COD* merupakan bentuk transisi *e-commerce*; teknologi informasi komunikasi hanya sebagai ruang pemesanan, tetapi masih diperlukan tatap muka dalam proses transaksi.

FLEKSIBILITAS RUANG DAN WAKTU

Teknologi informasi komunikasi (TKI) menjanjikan fleksibilitas ruang dan waktu. Hal ini ternyata berdampak pada dunia kerja yang kini juga menunjukkan adanya fleksibilitas tersebut. Sebelum TIK berkembang, berbagai jenis pekerjaan dilakukan di ruang kantor dengan jam tertentu, misalnya pukul 08.00–17.00. Kini, ruang kerja bisa bergeser ke dunia virtual yang memiliki fleksibilitas ruang dan waktu. Individu bisa melakukan lebih dari satu kegiatan, contohnya banyak peserta FGD sudah mulai berkarier ketika studi belum selesai. BR, seorang informan yang berstatus mahasiswa semester akhir, menekuni profesi sebagai *production officer*. Tugasnya mengatur produksi *social media image expose* di sebuah agensi digital. PDT, seorang informan yang berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir, menjajaki karier sebagai *junior content strategist*.

Informan lain, DV, bekerja sebagai pengolah data dan KN, seorang mahasiswi, yang menjadi admin sebuah toko *online*. Para mahasiswa tersebut bekerja pada perusahaan yang dimiliki orang lain. Namun, ada juga informan yang bekerja mandiri, seperti HS yang memiliki digital *start-up* yang bergerak di bidang kuliner dan RY yang bekerja sebagai penjual item *game*. Fleksibilitas ruang dan waktu ini menimbulkan profesi baru sebagaimana dilakoni oleh mahasiswa-mahasiswa ini.

Selama ini pandangan yang muncul adalah bahwa fleksibilitas ruang dan waktu itu menguntungkan, terutama bagi perempuan. Hal ini karena fleksibilitas ruang dan waktu memungkinkan adanya *multitasking*. Namun, tidak semua informan memiliki pandangan yang sama. EL, mahasiswi jurusan jurnalistik, agak sedikit khawatir dengan media baru. Seorang jurnalis bisa bekerja di rumah, tetapi dituntut bekerja selama 24 jam sehari. Seorang teman EL yang magang di sebuah portal berita harus bekerja tujuh hari dalam seminggu, bahkan Sabtu dan Minggu pun masuk kerja. EL masih ingin bekerja di kantor meskipun harus keluar rumah setiap hari; yang penting, batas antara hari kerja dan hari libur jelas. Media baru berakibat pada tuntutan aktualitas lebih tinggi dibanding media lama. Oleh karena itu, pada hari libur pun jurnalis harus tetap bekerja. AL beranggapan bahwa adanya media baru ada sisi menguntungkan, tetapi ada juga kurang menguntungkan, salah satunya adalah waktu kerja.

Menanggapi pergeseran waktu kerja, GR sebagai informan menuturkan bahwa nantinya banyak pekerja kantoran dengan memiliki jam kerja tertentu, yang mempunyai pekerjaan lain di sela-sela jam kerja mereka, biarpun sekadar menulis *blog*. Pekerjaan berdasarkan hobi diprediksi akan *booming*. GR sendiri tidak ingin memiliki pekerjaan yang mengikat dan terkungkung dalam suatu ruangan. Salah satu pekerjaan yang memiliki fleksibilitas ruang dan waktu adalah *travel blogger*. Pekerjaannya menyenangkan dan bisa membantu orang lain. Pekerjaan lain yang memiliki fleksibilitas ruang dan waktu adalah membuat konten media sosial, seperti yang dilakukan oleh DV. DV sudah nyaman dengan pekerjaan di agensi digital yang sudah

dilakoninya selama 2 tahun karena di sana dia bebas berkreasikan. Tujuannya bekerja sambil kuliah adalah belajar sesuatu yang tidak didapatkan di bangku kuliah sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Rencananya, ia ingin menjadi corong merek dalam mengomunikasikan melalui dunia digital.

Transisi menuju jam kerja yang fleksibel belum bisa diterima sebagian orang. Menanggapi hal ini, informan pada umumnya tidak peduli. BR mengatakan, "...cuek dengan orang lain karena saya tidak hidup dari omongan orang lain. Rencananya saya akan bekerja di bidang agensi digital." BR menambahkan bahwa kurikulum perkuliahan saat ini belum menunjang. Mahasiswa Komunikasi seharusnya mendapat pelajaran teknologi informasi. Sementara itu, AD mengatakan bahwa komentar orang tentang dunia kerja yang memiliki kebebasan waktu masih membebani pikirannya, tetapi AD tetap ingin berkarier di bidang yang membuatnya bertemu dengan orang banyak.

Fleksibilitas ruang dan waktu juga memengaruhi kebiasaan seseorang mengonsumsi media. Pada era media lama, bila seorang mengonsumsi sebuah produk hiburan, ruang dan waktu ditentukan oleh produsen atau distributor. Misalnya, menonton acara Hitam Putih di Trans TV harus pada hari Senin–Jumat pukul 18.30–19.45. Pada era media baru, konsumen cukup dimanjakan oleh fleksibilitas ruang dan waktu. Kemewahan tersebut dinikmati oleh BR yang suka menonton *The Comment* di Net TV. Ketika acara itu tayang pukul 21.30, BR tunduk pada ruang dan waktu yang disediakan oleh Net TV. Namun, ketika jam tayang pindah ke sore hari, BR tidak bisa mengikuti siaran langsung dari Net TV karena bekerja. Oleh karena itu, BR memindahkan ruang dan waktu menontonnya. Dengan menggunakan *streaming*, BR bisa menonton acara kesukaannya saat istirahat dari pekerjaan kantor. Ia menonton *streaming* melalui telepon pintar.

RUANG PUBLIK?

Media baru menghadirkan dua sisi mata uang, yaitu adanya kebebasan berekspresi atau sebaliknya. Jelaskan sebaliknya itu apa. FL adalah informan yang sadar betul bahwa media baru

bisa menjadi bumerang buatnya. Oleh karena itu, ia memilih menjadi pengguna pasif, tidak terlalu banyak komen walaupun menyukai komen yang ada di media sosial. Berbeda dengan AY yang menggunakan media sosial dan aplikasi pesan singkat sebagai sarana mengekspresikan pendapat. AY pernah dikeluarkan oleh admin sebuah grup aplikasi pesan singkat karena status yang ditulisnya.

AY menuliskan opini dan pengalamannya di *Line* terkait dengan aksi demonstrasi 212 di Jakarta. Waktu demo terjadi, dirinya terjun langsung di lokasi dan melihat situasi yang ada. Menulis status panjang dilakukannya karena melihat rujukan informasi kawan-kawannya pada umumnya berupa informasi yang pendek. AY bermaksud mengklarifikasi informasi yang beredar dengan cara menyajikan fakta lapangan. Waktu itu terdapat 200 *share* dan 700 *like*, namun postingan tersebut dihapus oleh admin. Dengan perasaan penuh tanda tanya, AY mem-posting lagi dan postingan-nya sempat bertahan tiga hari. Jumlah *share* dan *like* hampir sama dengan postingan pertama, dan secara substansi, komen yang diberikan pun hampir sama. Namun, postingan tersebut dihapus lagi. Sebelum dihapus, AY melihat ada komen-komen yang kurang mendukung tulisannya, tetapi banyak anggota grup membelanya dengan mengatakan bahwa tulisannya tidak memihak dan cukup netral. Mungkin ada anggota yang kurang suka dengan tulisannya, melaporkannya ke admin, kemudian admin menghapus tulisan tersebut. AY berpendapat bahwa tidak mudah menceritakan kebenaran ketika ada benturan dengan admin. Kalau mengalami kejadian seperti ini, AY menyarankan bahwa sebaiknya pembaca media sosial membaca tulisannya sebagai referensi. Mungkin pembaca belum siap menerima perbedaan pendapat sehingga yang dilakukan adalah menghapus pendapat tersebut.

Media baru menjanjikan adanya transparansi dan akuntabilitas, tetapi ternyata hal itu tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Pengalaman buruk berkaitan dengan hal tersebut menimpa seorang informan. Pada waktu masih duduk di bangku SMP, informan terpilih sebagai admin di grup pesan singkat sekolah yang menaungi pendidikan SMP dan SMA. Grup dibuat agar

siswa yang belajar di institusi pendidikan yang bernaung dalam satu yayasan saling kenal. Pada suatu saat, informan mengkritik guru yang sering memberi nilai jelek tanpa alasan yang jelas karena ia ingin mengetahui letak kesalahannya. Guru tersebut dianggap pemilih; hanya senang dengan siswa dari kalangan berada. Menurut informan, seorang guru sebaiknya dekat dengan semua siswa. Kritikan informan sempat viral, banyak yang memberi *like* dan *comment*.

Informan berani melakukan kritik karena grup dianggapnya sebagai ruang publik. Informan mengatakan bahwa pendapatnya mewakili opini teman-teman lainnya. Teman-teman banyak yang mendukung informan, tetapi tidak dapat membantu informan keluar dari ancaman skorsing. Situasi tersebut diperburuk oleh komentar guru sekolah lain di media sosial. Yang terjadi kemudian bukan guru tersebut yang diminta introspeksi, malah siswa yang diskors. Pernah dalam satu hari terdapat 300 siswa yang diskors. Beberapa orangtua mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut karena malu anaknya diskors satu hari. Informan mendapat sanksi sosial di lingkungan sekolahnya, diminta menghapus postingan-nya, dan tidak mengungkit masalah itu lagi. Harapan informan adalah pada zaman media sosial seperti sekarang ini, literasi digital diberikan bukan hanya pada dewasa, tetapi juga kepada siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Informan sangat prihatin dengan anak kecil (usia 5 tahun) sudah memiliki akun *Instagram* dengan komen yang kurang mendidik. Literasi ini bisa diberikan melalui orangtua dan guru. Menurut informan hal tersebut penting agar jangan sampai hal yang dialami informan terjadi kepada orang lain.

AUDIENCE AKTIF VS AUDIENCE PASIF

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa implikasi. Pada era ini, jumlah informasi yang tersedia melimpah. Perilaku prosumsi mengakselerasi produksi informasi. Digitalisasi membuat informasi yang diproduksi dan didistribusikan melimpah karena pada dasarnya media digital memiliki lima karakteristik. Pertama, media digital bisa

dimanipulasi (diubah, diadaptasi, dikreasi, disimpan, dikirimkan dan digunakan). Kedua, media digital bisa berjejaring. Artinya, informasi dapat dibagikan dan dipertukarkan di antara sejumlah besar pengguna secara simultan melewati jarak yang sangat jauh. Ketiga, media digital bisa dipadatkan. Maksudnya, informasi digital dalam jumlah besar dapat disimpan dalam tempat yang secara fisik kecil, contoh CD. Keempat, media digital bisa dikompresi. Ini berarti informasi digital dalam jaringan dapat dimampatkan. Kelima, media digital tidak memihak. Informasi yang dibawa melalui jaringan sifatnya acuh tak acuh (*indifferent*) terhadap yang direpresentasikan, pemilik, dan kreator konten (Flew, 2004, 8)

Prosumsi informasi yang sifatnya pribadi, yaitu foto dan status pengguna media sosial yang kontennya terkait kegiatan individu, sangat berlimpah. Produksi konten yang sifatnya publik, yaitu komen terhadap masalah sosial politik, juga melimpah. Dilihat dari konsumsinya, pengguna media sosial merupakan pengguna aktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta *FGD* umumnya adalah konsumen aktif dalam mengonsumsi informasi dari akun-akun pribadi. Mengintip-intip akun kawan, selebritas *Instagram* (selebgram) atau individu yang populer di dunia virtual merupakan kebiasaan media pada era TIK.

Temuan penelitian juga menunjukkan sifat paradoks pengguna media sosial. Konsumsi informasi yang sifatnya publik yang diproduksi oleh institusi media menunjukkan perilaku agak pasif. Dalam kasus ini, sifat *information seeking* kurang diperlihatkan oleh konsumen. Konsumsi informasi yang sifatnya publik dan berita biasa didapatkan dari portal berita. *Audience* pasif mengacu pada perilaku *audience* yang tunduk pada informasi pilihan portal berita.

Konsumsi portal berita yang menyajikan berita pilihan yang ringan sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nicolas Carr bahwa *audience* kini lebih suka dengan stimulus yang sifatnya pendek dan ringan (Car, 2008, 1–5). Namun, asumsi ini sedikit menyimpang dari karakteristik media digital yang sifatnya tidak memihak sebagaimana dikemukakan Flew (2004). Pemilihan berita oleh portal berita mirip dengan proses *gate keeping* pada era media lama.

Tingginya konsumsi akun pribadi dan rendahnya konsumsi akun institusi media memunculkan beberapa hal yang perlu didiskusikan. Akun pribadi sifatnya lebih banyak opini dibanding dengan fakta empiris karena akun pribadi jarang yang melakukan liputan langsung. Media sosial menyajikan liputan langsung, tetapi jumlahnya tidak banyak. Liputan langsung pada umumnya dilakukan secara kebetulan. Sebagai contoh, seorang netizen kebetulan melewati Jl. M.H. Thamrin ketika terjadi bom pada 2016, mem-posting liputan langsungnya di akun media sosialnya. Liputan langsung yang dilakukannya belum tentu memenuhi standar jurnalistik, salah satunya *cover both side*.

DEMOKRASI MEDIA, KOMUNITAS OTORITARIAN

Penelitian terkait media baru pada umumnya memiliki asumsi bahwa media baru membawa harapan adanya ruang publik. Sifat imparial atau tidak memilah-milah konten yang diproduksi dan siapa aktor di balik produksi konten memang ideal. Adanya karakteristik tersebut juga membuat media baru diharapkan meningkatkan demokrasi. Berbagai riset menunjukkan bahwa ketersediaan akses informasi melalui media baru telah membawa berbagai negara mengubah sistem politiknya dari negara otoritarian ke negara demokrasi, contohnya Arab Spring. Peningkatan penggunaan media sosial dan pembentukan masyarakat jaringan asumsi-asumsi tersebut perlu didiskusikan dan dikaji secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku produksi menjamin terciptanya demokrasi. Media sosial memungkinkan individu memproduksi teks tanpa melalui institusi. Oleh karena itu, peserta *FGD* bisa mengekspresikan pendapatnya, baik masalah politik sebagaimana yang dilakukan AY, maupun masalah sosial sebagaimana dilakukan L. Media baru memberi ruang bagi AY dan L untuk berpendapat. Media baru bisa dikatakan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan hal ini akan berujung pada meningkatnya iklim demokrasi. Namun, sirkulasi konten melalui media sosial melibatkan masyarakat jaringan. Pertukaran informasi dalam masyarakat jaringan tidak seindah mimpi para ahli yang mendambakan

media baru sebagai ruang publik yang sifatnya egaliter. Teknologi memang tidak berpihak, tetapi masyarakat penggunaannya memihak.

Kasus AY menunjukkan adanya ambiguitas sifat media baru dan masyarakat jaringan. Komunitas dalam jaringan AY tidak bisa menerima pendapat AY karena pendapatnya tidak *mainstream*. Akurasi informasi dan netralitas yang diberikan tidak menolong AY terhindar dari *bullying* dan sanksi sosial oleh komunitas. Hal ini merupakan bentuk otoritarianisme baru yang melekat bukan pada level negara, tetapi pada level komunitas. Otoritarianisme komunitas membawa masyarakat yang terikat dalam komunitasnya untuk memiliki pendapat yang sama dan tidak ada diferensiasi opini.

Kasus AY dan informan lain yang cenderung berperilaku sebagai *audience* pasif sangat menarik untuk dianalisis dengan menggunakan teori pengaruh media. Harold Innis dan Marsall McLuhan pada 1970-an sudah meramalkan bahwa TIK akan berkembang dan para akademisi diminta berpikir ulang tentang sifat *audience* serta pengaruh media. TIK menjanjikan *audience* aktif menggunakan konten media untuk menciptakan pengalaman yang berharga. Pada era ini, teori-teori efek media bangkit lagi, tetapi dengan asumsi efek yang moderat karena pengaruhnya memerlukan waktu yang lama (Baran & Davis, 2000, 17–19).

Kasus L menunjukkan bahwa media baru belum menjanjikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan transparansi yang disampaikan L belum bisa menjadi kenyataan. Perlakuan yang diterima L menunjukkan bahwa masyarakat belum menerima kaidah masyarakat jaringan, yakni adanya interaktivitas dan sifatnya setara atau egaliter. Dialog antara pihak sekolah terhadap L berlaku sebagaimana masyarakat konvensional, di mana ada pihak yang dominan dan ada pihak yang subordinat. Studi yang dilakukan Widyawati dkk (2011) dengan judul *Cyberdemokrasi Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan Presiden 2009* menemukan hal yang serupa. Perempuan masih dianggap kelompok subordinat sehingga pendefinisian tentang pemimpin perempuan di *Facebook* masih bias gender. Bahasa yang digunakan juga seksis. Posting

yang berpendapat bahwa pemimpin perempuan bisa diterima jumlahnya terbatas.

Temuan tersebut berbeda dengan sifat anonimitas dalam komunitas virtual. Wilson mengatakan bahwa partisipan dalam komunitas virtual bisa menanggalkan identitas dirinya sehingga bisa melepaskan diri dari hubungan tidak egaliter dari segi ras, jenis kelamin, atau ketidakadilan sosial lainnya (Wilson 1997, 149). Tidak adanya diskriminasi pada kelompok sosial tertentu membuat anggota komunitas virtual dalam masyarakat jaringan bersifat egaliter.

Otoritarianisme yang dilakukan anggota komunitas juga diperlihatkan oleh konsumen *e-commerce* yang menyebarkan informasi bahwa si penjual belum mengirim produk yang dipesan padahal sudah mengirim bukti transfer (palsu). Pembeli berpikir penipuan yang dilakukannya tidak bisa ditelusuri karena transaksinya melalui *online*. Padahal dunia virtual bukanlah ruang hampa yang membuat identitas seseorang tidak dapat ditelusuri. Dalam kasus tersebut, admin-lah yang bertindak sebagai mediator antara penjual dan pembeli. Anonimitas dalam dunia virtual bukan berarti tidak bisa ditelusuri di dunia nyata. Scott McNeally menyebut jejak tersebut sebagai *digital fingerprint* (Winder, 2008, 236). Penelusuran dalam komunitas virtual dimungkinkan karena setiap objek atau data yang di-posting, termasuk ketika individu melakukan penelusuran melalui mesin pencari, akan disimpan atau diarsipkan (Beer, 2013, 166).

PRIVAT VS PUBLIK

Di satu pihak, perilaku prosumsi menjanjikan kemudahan individu dalam mengembangkan kariernya. Postingan kegiatan pribadi yang menunjukkan kemampuan individu dalam bidang musik, menyanyi, menulis, animasi, kegiatan sosial, atau bisnis kadang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspose diri melalui media sosial membuat informan mendapat tawaran untuk mengembangkan karier, di antaranya tawaran rekaman. Pada era digital, pengembangan karier makin terbuka. Selain tawaran langsung dari *viewers /followers*, kini hadir media sosial yang memfasilitasi ekspose kehidupan pribadi,

seperti *LinkedIn*. Di pihak lain, prosumsi kehidupan pribadi bisa menimbulkan kerugian. Berbagai referensi mengaitkan antara keterbukaan data pribadi dengan kriminalitas.

Kehidupan pribadi kini menjadi komoditas yang laku dijual ke publik dan telah mengubah cara pandang manusia tentang nilai dan hubungan sosial. Pada era media lama, ekspose kehidupan pribadi lebih banyak atas persetujuan tokoh yang dieskpose, misalnya kisah kehidupan keluarga seorang artis yang diangkat dari hasil wawancara. Kini, kehidupan yang sangat privat, seperti pertengkarannya suami dan istri, tidak lagi tabu untuk dieskpose, bahkan dikomersialisasi sebagaimana dilakukan oleh akun Lambe Turah.

Nilai mengenai privat juga mengalami pergeseran. Hal ini bisa dilihat dari ekspose hal yang sifatnya privat dilakukan secara sukarela, bahkan menjadi bisnis. Pada era media lama, hanya privasi seorang tokoh yang punya nilai berita. Namun kini privasi orang biasa juga menjadi objek untuk dikonsumsi. Menganalisis fenomena ini, Solovo (2007) mengatakan bahwa tidak ada lagi hal yang dinamakan privat karena dunia sudah *overexposed*. Privasi yang secara tradisional bersifat biner, yaitu publik dan privat, sudah sulit dibedakan. Hal yang sudah diperkenalkan di publik bukan lagi privasi. Namun, privasi sebaiknya diproteksi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang atau redefinisi.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku generasi Y dan Z sudah mengarah pada budaya digital yang ditunjukkan oleh sikap-sikap yang *flexi times* dan *multitasking*. Perilaku ekonominya juga mengarah pada budaya digital yang ditunjukkan pada pilihan pekerjaan terkait dengan *e-commerce*. Perilaku prosumsi secara individu subjek penelitian tidak jauh berbeda dengan ramalan para ahli, yakni lebih banyak mengonsumsi sesuatu yang *custom* yang sesuai dengan kepribadiannya dan informasi yang dikonsumsi sifatnya instan. Sifat instan juga diperlihatkan dalam mencari informasi. Kemudahan akses membuat subjek penelitian menjadi *audience* aktif untuk mencari informasi terkait dengan kebutuhan pribadi, misalnya tugas kuliah atau

pengembangan karier. Untuk informasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung, subjek penelitian cenderung menjadi *audience* pasif. Informasi yang dikonsumsi didapat dari komunitas dan portal berita. Sisi positifnya adalah *multitasking* mampu meningkatkan produktivitas. Dalam kasus ini, kuliah sambil kerja.

Budaya digital yang terjadi baru pada tahap transisi. Perilaku komunitas belum kompatibel dengan karakteristik budaya digital. Masyarakat masih belum bisa menerima perbedaan pendapat. Antara kelompok dominan dan subordinat hubungannya belum egaliter. Guru dengan murid belum melakukan diskusi secara terbuka. Perbedaan pendapat mengenai masalah sosial politik masih belum bisa diterima. Media baru atau media digital masih belum sepenuhnya menjadi ruang publik.

Transisi menuju budaya digital juga ditunjukkan oleh perilaku konsumen *e-commerce* yang belum bersifat melayani diri sendiri. Kemudahan bertransaksi melalui *e-commerce* sebenarnya menjanjikan individu konsumen melakukan pemesanan produk hanya dengan mengklik telepon pintar, lalu barang langsung diantar di depan pintu. Namun masih banyak individu konsumen yang memilih pertemuan tatap muka dengan sistem *cash on delivery (COD)*.

Perubahan paling nyata dalam budaya digital adalah pergeseran nilai-nilai terkait dengan privasi. Hukum biner dalam privasi yang memisahkan antara ruang privat dan ruang publik makin kabur karena dunia sudah *overexposed*. Ekspose ruang privat ini dilakukan secara sukarela.

PUSTAKA ACUAN

- Baran, S., & Dennis K. D. (2000). *Mass communication theory. Foundations, ferment, and future*. Ontario: Wadsworth Thomson Learning.
- Beer, D. (2013). *Popular culture and new media, the politics of circulation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Brunson, R. (2015). *Dotcom secrets, the underground playbook for your company online*. New York: Morgan James.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society (second edition with a new preface)*. West Sussex: Wiley-Blackwell.

- Cornfield, M., Carson, J., Kalis, A., & Simon, E. (2007). Buzz, blogs, and beyond: the internet and the national discourse in the fall of 2004. Dalam Nagrine, Ralph & James Stanyer, *The political communication reader*. London: Routledge
- Flew, T. (2004). *New media: an introduction (second edition)*. Melbourne: Oxford University Press.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1995). The agenda setting function of mass media. Dalam Boyd-Barret, Oliver & Chirs Newbold (eds), *Approaches to media, a reader*. London: Arnold.
- Poster, M. (1997). Cyberdemocracy: internet and the public sphere. Dalam David Porter, *Internet culture*. London: Routledge.
- Solove, D. J. (2007). *The future of reputation: gossip, rumour, and privacy on the internet*. London: Yale University Press.
- Widyawati, N. (ed). (2010). *Cyber demokrasi, wacana emansipatoris dalam pemilihan presiden 2009*. Jakarta: P2KK-LIPI.
- Widyawati, N. (2014). Etnisitas dan agama sebagai isu politik, kampanye JK-Wiranto pada pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wilson, M. (1997). Community in The Abstract "A Political and Ethical Dilema? Dalam D. Holmes(ed.), *Virtual politics, identity and community in cyberspace*. London: Sage Publications.
- Wood, J. T. (2011). *Communication mosaics: an introduction to the field of communication*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Williams, A.A., & Marquez, B.A. (2015). The lonely selfie king: selfies and conspicuous prosumption of gender and race. *International Journal of Communication*, 9, hal?.
- Winder, D. (2008). *Being virtual: who you really are online*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Surat Kabar /Majalah

- Carr, N. (2008, Juli/Agustus). Is Google making us stupid? What the internet is doing to our brain. *Atlantic Monthly*.
- Yanuar, H. (2018, Februari 7). Erix Soekamti punya 11 mahasiswa di *DOES University*. *Liputan 6.com*. Diakses pada 25 Mei 2018 dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3265875/erix-soekamti-punya-11-mahasiswa-di-does-university>

JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN

Dian Tri Hapsari

Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

Email: hapsaridian@gmail.com

ABSTRACT

During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept of spiral of slince. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.

Key Words: *Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence*

ABSTRAK

Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunaannya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.

Kata Kunci: *Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.*

LATAR BELAKANG

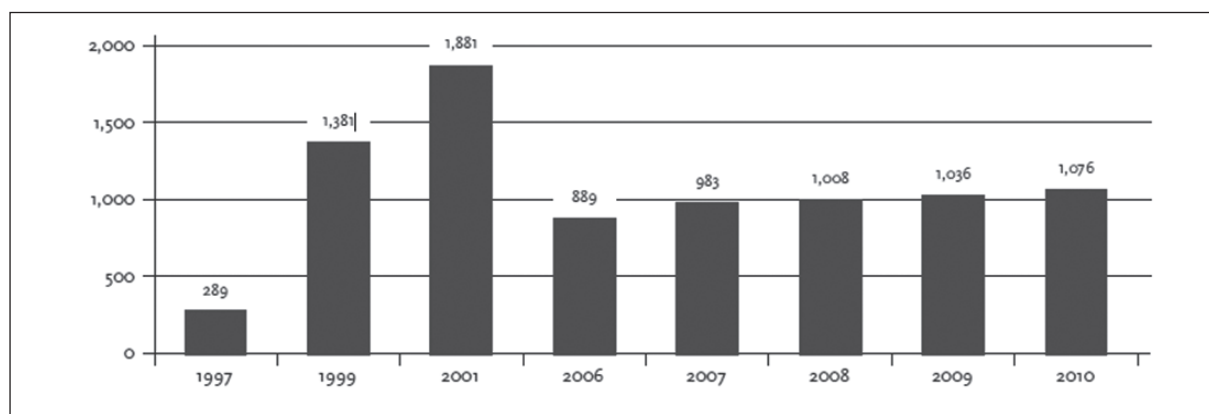
Jurnalisme selalu terpengaruh oleh perubahan teknologi. Alexander Graham Bell, ilmuwan penemu telepon, tidak hanya mengubah cara komunikasi secara luas, tetapi juga membuat seorang jurnalis bertransformasi dalam mengumpulkan dan melaporkan berita. Kebaruan itu, misalnya, melakukan wawancara narasumber melalui telepon atau melaporkan berita kepada khalayak dengan menggunakan telepon. Selain itu, cara khalayak menggunakan media massa juga berubah. Digitalisasi dan Internet telah mempermudah masyarakat dalam menggunakan media massa untuk mencari hiburan atau informasi. Telepon genggam tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun telah dilengkapi berbagai fitur media baru.

Masa depan jurnalisme dan media baru ini sangat relevan untuk dibahas dalam artikel ini, terlebih momentumnya memang tepat. Sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak di Indonesia memutuskan tutup dan beralih ke media digital. Dua yang paling besar adalah koran *Sinar Harapan* dan *Jakarta Globe*. Yang terbaru adalah *Majalah Rolling Stone Indonesia*. Setelah 12 tahun terbit, majalah yang menasar penggemar musik dan anak muda itu membuat pengumuman yang mengejutkan pada awal 2018. Lewat situs webnya, rollingstone.co.id, majalah ini mengumumkan penghentian terbitan media cetak mulai 1 Januari 2018. Sebagian besar penyebab tutupnya sejumlah media cetak hampir serupa, yakni pendapatan menurun di tengah meningkatnya pertumbuhan media daring.

Di tengah meningkatnya pertumbuhan konsumsi Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga termasuk media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis fokus membahas bagaimana radio sebagai media tradisional dapat bertransformasi menjadi media baru pada era digital.

Dalam konteks demikian, teknologi bisa memengaruhi jurnalisme dalam empat hal. *Pertama*, cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi. *Kedua*, sifat konten berita. *Ketiga*, struktur organisasi media di dalam ruang redaksi. *Keempat*, sifat hubungan antara media, reporter dengan sejumlah publik seperti khalayak (*audience*), kompetitor, sumber berita, sponsor, serta regulasi yang dapat mengendalikan pers (Pavlik, 2010, 229). Pendapat Pavlik tersebut menarik untuk disimak. Terkait dengan artikel ini, penulis akan fokus pada pendapatnya tentang pengaruh teknologi terhadap perubahan hubungan audiens, kompetitor, sumber berita, serta regulasi yang dapat mengendalikan pers, terutama jurnalisme radio. Artikel ini mengajukan pertanyaan, bagaimana perubahan teknologi, khususnya Internet, memengaruhi perkembangan teknologi radio di tanah air dalam aspek-aspek yang diuraikan oleh Pavlik tersebut?

Tidak saja membahas pengaruh teknologi terhadap jurnalisme radio, artikel ini juga menyoroti aspek lain dalam tantangan yang dihadapi radio di tengah perkembangan teknologi, yakni konsepsi *spiral of silence*. Konsepsi *spiral of silence* menunjukkan dominasi wacana mayoritas



Sumber: Ambardi (2014)

Gambar 1. Grafik Circulation of Print Media Titles, 1997, 1999, 2001, 2006–2010

terhadap suara kelompok minoritas dalam acara interaktif *talkshow* di radio. *Spiral of silence* menyoroti sisi lain dari perluasan akses berita yang hadir sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi, yakni keterpinggiran kelompok suara minoritas. Di satu sisi, penelitian ini melihat adanya perluasan akses publik terhadap pembuatan berita. Di sisi lain, perluasan akses tersebut belum memberikan ruang yang berimbang bagi kelompok suara minoritas yang berkembang di jurnalisme radio kontemporer. Dengan menggunakan konsep *spiral of silence*, artikel ini mengajukan pertanyaan lanjutan, bagaimana kondisi dominasi wacana mayoritas atau *spiral of silence* di dalam siaran radio kontemporer?

Guna menjawab dua pertanyaan itu, artikel ini akan memulainya dari mengupas konsepsi radio sebagai komunikasi massa dan *spiral of silence* sebagai kerangka konseptual utama artikel ini. Artikel ini kemudian memaparkan mengenai radio dan internet, jurnalisme radio pada era digital, dan bagian pentingnya adalah *spiral of silence* dalam acara opini publik yang dianggap sebagai jurnalisme interaktif di radio. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder dari sejumlah penelitian terdahulu dan deskripsi analisis atas data-data tersebut. Penelitian ini berupaya membangun argumen dengan mengembangkan deskripsi pengaruh teknologi dan regulasi terhadap jurnalisme radio serta melihat dampak wacana dominan dari perkembangan yang ada. Artikel ini berargumen bahwa pengaruh teknologi telah mengubah posisi radio dan jurnalisme radio di tengah era digital dengan memosisikan radio sebagai media dengan akses dan audiens yang relatif besar. Selain itu, persoalan *spiral of silence* merupakan fenomena yang menjadi tantangan bagi awak radio untuk menjembatani dinamika wacana dalam menjalankan misi jurnalismenya.

KONSEPSI RADIO MEDIA KOMUNIKASI MASSA

Radio dikategorikan sebagai media komunikasi massa. Saat ini, radio yang dikenal sebagai media massa paling tua dapat bertransformasi sebagai media baru karena keunikannya. Untuk menjelaskan fenomena radio yang masuk dalam kategori

media baru, terlebih dulu penulis memaparkan konsepsi yang menguatkan peran radio pada era digital ini.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai radio sebagai salah satu media komunikasi massa, penulis akan menjelaskan mengenai komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa adalah perangkat institusi media di mana media organisasi mengirim pesan dengan dimediasi oleh berbagai saluran. Misalnya, surat kabar, majalah buku, film, radio, dan televisi yang dapat mendukung industri mereka melalui iklan dan hubungan masyarakat (Chaffee & Metzger, 2009, 366). Menurut Baran (2002), teori komunikasi massa juga terbuka terhadap perubahan paradigma yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan munculnya media baru. Keadaan ini dapat mengubah situasi komunikasi massa secara fundamental (Morissan, 2013, 503).

Lebih dari sembilan puluh tahun setelah stasiun radio pertama di dunia didirikan, radio masih menjadi media massa yang paling banyak dinikmati, paling luas jangkauannya, dan fleksibel. Di perdesaan, radio bahkan sering kali menjadi satu-satunya media massa yang tersedia. Keunggulan lainnya adalah rendahnya biaya produksi dan distribusi membuat radio dapat menjangkau dunia dari perspektif lokal dan dapat merespons kebutuhan akan informasi lokal. Dibandingkan dengan media massa lainnya, radio berbicara dalam bahasa dan dengan aksen masyarakat lokal. Programnya mencerminkan kepentingan lokal dan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan budaya, ekonomi, dan komunitas lokal itu sendiri.

Radio telah menunjukkan potensi luar biasa untuk mendorong pembangunan suatu peradaban. Oleh karena itu, radio yang menarik dan interaktif sangat relevan untuk menjadi medium suara dan partisipasi demokrasi bagi komunitas yang telantar. Hal ini akan bermuara pada peningkatan standar hidup komunitas tersebut (Girard, 2003, 5). Artinya, media radio dapat mendorong partisipasi dan kesadaran diri komunitas melalui proses komunikasi. Radio komunitas mendorong partisipasi individu (dalam masyarakat) dengan menyediakan forum diskusi, analisis, dan pertukaran ide. Melalui forum seperti itu, individu

akan mampu mengembangkan sudut pandang komunal, dan mulai bertindak bersama. Menurut UNESCO, pembangunan tidak bisa berjalan jika didasarkan pada persepsi individual karena yang dibutuhkan adalah persepsi bersama terhadap realitas lokal dan perbaikan keadaan. Di Indonesia, radio komunitas disebut “radio gerilya.” Radio komunitas di sini berfungsi sebagai alternatif untuk kekuatan budaya dominan, yakni negara dan kapital, yang masing-masing menguasai radio publik dan radio swasta (Jurriens, 2003, 117–119).

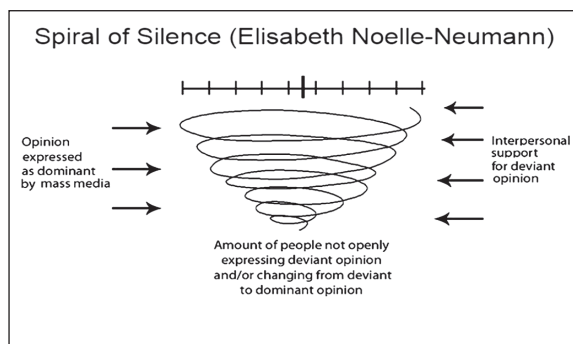
Menurut Bruce Girard dalam artikel yang berjudul *Radio and the Internet: Mixing media to bridge the divide*, ada empat karakteristik terpenting yang berkontribusi terhadap pengembangan kesuksesan radio sebagai media, yaitu (1) daya tembusnya, (2) sifat lokalnya, (3) fakta bahwa penyampaian informasi adalah lisan, dan (4) kemampuannya untuk melibatkan komunitas dan individu dalam sosial interaktif sebagai proses komunikasi. Julian Newbi dalam buku *Inside Broadcasting* menyebutkan, “radio is the birth of broadcasting” (radio adalah rahim dunia penyiaran). Radio adalah suara. Suara merupakan modal utama terpaan radio ke khalayak dan stimulasi yang dikoneksikan padanya oleh khalayak. Secara psikologi, suara adalah sensasi yang terpersepsikan ke dalam kemasam auditori. Pada 1906, seorang promotor bernama Lee De Forest menciptakan *audio tube* (alat yang memungkinkan transmisi suara) yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke udara (*on air*). Pada tahun tersebut, Reginald Fessenden juga menyiarkan beberapa lagu Natal menggunakan operator nirkabel di laut lepas.

Suara dalam radio adalah sebuah kombinasi tekanan emosional, perseptual, dan fisik yang berasal dari suatu suara yang termediasi oleh teknologi, kemudian menimbulkan sebuah gabungan imajinatif dalam benak para pendengar. Setiap suara memiliki komponen visual yang mampu menciptakan reka visual. Dalam iklan radio, misalnya, musik, kata, dan efek suara lainnya akan memengaruhi emosi pendengar hingga seolah-olah berada di lokasi kejadian yang dikomunikasikan. Hal itu dikenal dengan istilah *the theatre of mind* (Masduki, 2001).

Radio memiliki sejumlah fungsi, seperti mentransmisikan pesan, mendidik, membujuk, dan menghibur. Dalam buku *Jurnalisme Radio Teori dan Praktik*, Astuti (2017) menjelaskan kekuatan radio, yakni dapat mendidik khalayak yang spesifik. Artinya, radio memiliki kemampuan berfokus pada kelompok demografi tertentu. Selain itu, untuk mengubah segmentasi, radio lebih fleksibel daripada media komunikasi lainnya. Radio bersifat *mobile* dan *portable*. Orang bisa menjinjing radio ke mana saja. Sumber energinya pun kecil. Radio bisa menyatu dengan fungsi alat penunjang kehidupan lainnya, misalnya mobil, telepon genggam, dan senter. Harga radio juga relatif lebih murah dibandingkan media lain. Radio bersifat intrusif, artinya memiliki daya tembus yang tinggi hingga seluruh pelosok. Radio bersifat fleksibel, artinya mudah menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan segera, dan secepatnya dapat membuat perubahan. Terakhir, radio lebih sederhana jika dibandingkan dengan perangkat media massa lainnya. Sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya, dan sederhana isinya.

TEORI SPIRAL KEHENINGAN

Berbicara mengenai peran media dalam opini publik tentu tidak lepas dari teori komunikasi massa spiral keheningan (*spiral of silence*). Dalam konteks radio sebagai media komunikasi yang aksesnya tetap meluas, konsepsi ini sangat relevan dan penting. Ilmuwan politik asal Jerman, Elisabeth Noelle-Neumann, menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan media berjalan bersama dalam perkembangan opini publik (Littlejohn & Foss, 2008, 429). Menurut teori spiral keheningan, orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik mewakili pandangan mayoritas cenderung mengemukakan pendapatnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang percaya bahwa pendapatnya mewakili suara minoritas cenderung menahan diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Mereka yang memiliki pandangan minoritas biasanya cenderung berhati-hati dalam berbicara atau bahkan diam saja, seperti yang tergambarkan dalam Gambar 2.



Sumber: comindwork (2017)

Gambar 2. Konsep Spiral of Silence

Noelle Neumann mendefinisikan opini publik sebagai “*Attitude or behaviors one must express in public if one is not to isolate oneself; in areas of controversy or change public opinion are those attitudes one can express without running the danger of isolating oneself*”—Sikap atau perilaku yang harus dikemukakan seseorang di depan publik jika ia tidak ingin dirinya terisolasi; dalam wilayah kontroversi atau perubahan, opini publik adalah sikap yang dapat ditunjukkan seseorang tanpa bahaya isolasi terhadap dirinya (Morissan, 2013, 527). Dengan demikian, opini publik mengacu pada perasaan bersama suatu populasi atas suatu masalah tertentu. Sering kali media yang menentukan masalah apa yang penting atau menarik bagi masyarakat dan media juga sering kali menciptakan kontroversi terhadap suatu topik.

Neumann menyatakan bahwa salah satu kekuatan teori spiral keheningan adalah opini publik akan menentukan apakah orang akan berbicara atau tidak (Taylor, 1982, 311). Di Amerika Serikat, tempat teori ini sering diuji dan di Jerman, tempat teori berasal, demokrasi adalah konsep penting dan pendapat umum dipertimbangkan. Argumen kuat dan musyawarah publik adalah ciri proses demokrasi. Orang tidak hanya akan menyatakan pendapat mereka, tetapi akan menggunakan bukti pendukung yang logis. Jika tidak setuju dengan pendapat pihak lain, mereka berkewajiban untuk menghormati kekuatan penalaran (logika) dalam argumen lawan bicaranya tersebut (Hopkins, 2015).

Spiral keheningan merupakan gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi personal dan komunikasi melalui media. Media

berfungsi menyebarkan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Tentang mengapa media memberikan pengaruhnya terhadap opini publik, Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki pandangan terbatas dan sempit mengenai realitas.

Media massa memiliki tiga sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik. Pertama, sifat ubikuitas (*ubiquity*) yang mengacu pada fakta bahwa media merupakan sumber yang sangat luas karena terdapat di mana saja. Karena terdapat di mana saja, media menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan, dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha mendapat dukungan dari publik dan memiliki pandangan yang ingin disampaikan. Jadi, selama itu pula pandangan atau pendapat ada di mana-mana. Kedua, kumulatif (*cumulativeness*) media yang mengacu pada proses pengulangan apa yang disampaikannya. Pengulangan terjadi di sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, baik yang sejenis maupun tidak. Neumann (1993) menyebut hal ini sebagai pengaruh timbal balik dalam membangun kerangka acuan. Ketiga, sifat konsonan yang mengacu pada persamaan, kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut media massa. Neumann menyatakan bahwa konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat media itu sendiri dan menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah berasal dari masyarakat (Morissan, 2013, 531).

Ketiga karakteristik tersebut memberikan pengaruh besar terhadap opini publik. Media massa memberikan kontribusi terhadap munculnya *spiral of silence* karena memiliki kemampuan menentukan dan menyebarkan pandangan-pandangan yang dinilai dapat diterima umum. Dengan kata lain, mereka yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan khalayak akan lebih sulit mendapat tempat di media massa. Teori ini juga mengungkapkan bahwa pandangan minoritas cenderung dijadikan kambing hitam oleh media massa. Tantangan perkembangan teknologi dan efeknya terhadap

spiral keheningan dalam jurnalisme radio kontemporer menjadi hal penting yang dibahas dalam artikel ini.

RADIO INTERNET DI INDONESIA

Radio Internet adalah layanan audio digital yang dikirimkan melalui Internet. Penyiaran di Internet biasanya disebut *webcasting* karena tidak ditransmisikan secara luas melalui sarana nirkabel. Radio internet dapat digunakan sebagai perangkat yang berdiri sendiri melalui Internet atau sebagai perangkat lunak yang berjalan melalui satu sistem komputer (Kiraly, 2002). Radio sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa merambat lewat ruang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium atau pengangkut (Romli, 2009).

Radio Internet melibatkan *streaming* media. Pendengar secara langsung dapat mendengarkan aliran audio melalui Internet secara berkelanjutan, sama seperti pendengar menikmati media penyiaran tradisional (terrestrial). Aliran audio tersebut juga tidak dapat dihentikan atau diputar ulang. Hal ini berbeda dengan penyajian *file on-demand* atau *podcasting*. Untuk menikmati siaran *file on-demand* atau *podcasting*, pendengar harus mengunduh *file* rekaman terlebih dahulu. Dalam *streaming*, pendengar hanya harus menekan tombol “putar” dan layanan langsung bisa dinikmati.

Layanan radio Internet pertama kali diluncurkan pada 1993 oleh Carl Malamud dengan program “Internet Talk Radio.” Program ini membahas perkembangan teknologi komputer dengan mewawancarai para ahli komputer setiap minggunya. Di Amerika Utara dan Eropa, banyak stasiun radio menawarkan program radio Internet menggunakan perangkat lunak *streaming*, seperti Real Audio dan Windows Media Player. Saat ini, terdapat lebih dari 2.500 tautan *streaming audio* seluruh dunia. Banyak stasiun radio menggunakan Internet untuk memperluas jangkauan pemancarnya secara geografis. Selain itu, inovasi menggunakan interaktivitas Internet juga meningkatkan komunikasi sosial interaktif radio (Girard, 2003, 6).

Komunikasi sosial interaktif inilah yang menjadi jembatan antara radio dan Internet. Pada Internet, pengguna dapat berinteraksi dengan situs web melalui email atau layanan *chat* lainnya. Radio juga menawarkan kemungkinan ini, yang disebut sebagai jurnalisme interaktif. Bentuk jurnalisme ini memberi peluang bagi pendengar untuk terlibat dalam proses siaran informasi. Pendengar bukan lagi sekadar penikmat, melainkan aktif memberikan informasi layaknya reporter. Pada era digitalisasi dan internet, pendengar radio tidak hanya berpartisipasi melalui sambungan telepon, tetapi juga melalui akun media sosial, seperti twitter atau aplikasi pesan singkat Whatsapp. Pada 1995, Ted Bolton, Direktur Bolton Research Corporation dan penerbit Radio Trends, mengejutkan pekerja radio dengan pernyataannya tentang matinya pemberitaan tradisional (*the death of traditional news*). Pernyataan tersebut menyadarkan para pekerja pemberitaan radio bahwa masyarakat sedang bergerak ke arah perubahan (Jonathans, 2000, 33).

Penelitian pola konsumsi media yang dilakukan terhadap sekelompok dewasa usia 25–49 tahun melalui metode focus group discussion (FGD) menyimpulkan bahwa masyarakat kini memasuki proses konsumsi informasi mandiri. Menurut Ted Bolton, 20 tahun lalu informasi yang didapat masyarakat atau khalayak pendengar radio tergantung dari media yang menyajikan. Namun, sekarang merekalah yang aktif mengakses informasi dari berbagai sumber. Pola konsumsi informasi menjadi sangat personal sejak pertumbuhan *cable broadcasting* dan Internet (Jonathans, 2000, 34).

Kenyataannya, pertumbuhan pengguna Internet justru menguatkan eksistensi radio. Hasil temuan Nielsen Radio Audience Measurement pada 2016 menunjukkan bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari Generasi Z dan Millennials atau para konsumen masa depan. Saat ini, 4 dari 10 orang pendengar radio mendengarkan radio melalui perangkat yang lebih personal, yakni telepon genggam. Konsumen yang mendengarkan radio dari perangkat telepon genggam berada di kota Makassar (69%), Medan (44%), dan Jakarta (38%). Data Nielsen Radio Audience Measurement (2016) menunjukkan bahwa waktu

mendengarkan radio per minggu, meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, pendengar radio hanya menghabiskan waktu mendengarkan radio 16 jam per minggunya. Jumlah ini meningkat pada 2015 (16 jam 14 menit per minggu) dan pada 2016 (16 jam 18 menit).

Di Indonesia, terdapat dua jenis layanan yang dapat disuguhkan oleh radio *online* melalui internet *broadcasting*, yaitu *on-demand* dan *live*. Layanan *on-demand* biasanya menyiarkan *file* media yang telah direkam sebelumnya. Stasiun radio yang menyiarkan layanan *on-demand* misalnya siaran radio BBC edisi bahasa Indonesia yang dapat didengar di situs <http://www.bbc.co.uk/indonesian>. Internet *broadcasting* yang *live*, atau dikenal dengan istilah *livecasting*, menyiarkan *file* media ketika suatu kejadian tengah berlangsung (*real time*). Salah satu stasiun radio Indonesia yang menggunakan teknologi *livecasting* adalah radio Elshinta Jakarta, yang siarannya dapat didengar *streaming* melalui situs <http://elshintaid.radio.net/>. Sebagai lembaga penyiaran publik era digitalisasi, RRI meluncurkan program *Digital Audio Broadcasting Plus* (DAB+) pada 2016. Melalui program tersebut, khalayak dapat menikmati siaran audio secara visual melalui radio internet yang dapat diakses secara *streaming*. Jadi, secara bersamaan khalayak dapat menikmati siaran digital melalui video, teks, dan audio. Hal ini disebut studio konvergensi media (Simatupang, 2016).

Jauh sebelum internet memopulerkan gagasan konvergensi media dan telekomunikasi, stasiun radio lokal sudah memainkan peranannya sebagai “telepon komunitas” dengan beberapa jam sehari yang disediakan untuk menyiarkan pesan-pesan pribadi, misalnya berita kelahiran dan berita kematian, undangan pesta, memesan makanan, meminta bantuan medis, bahkan menerima saran dari dokter setempat. Banyak stasiun radio yang bekerja sebagai multimedia sebelum istilah itu populer karena sejak dahulu radio berfungsi sebagai penghubung komunitas (*community-hub*) dan aktivitas komunikasinya termasuk memproduksi video (Gilard, 2003, 4).

Sementara itu, tradisi radio Internet di Indonesia baru mulai setelah kehadiran institusi

Kantor Berita Radio 68H pada 1999 atau tidak lama setelah berakhirnya rezim Soeharto yang otoriter. Pada awalnya, KBR hanya memproduksi berita-berita pendek berdurasi 30 hingga 60 detik. Berita-berita tersebut kemudian disebarluaskan melalui Internet. Produksi berita dan penyuntingan sudah dilakukan secara digital menggunakan komputer dan program peranti lunak pengolah suara. KBR juga melibatkan reporter radio jaringan di daerah untuk mengikuti pelatihan produksi berita radio secara digital.

Namun, infrastruktur internet dan telepon Indonesia pada saat itu masih belum merata mengingat tantangan geografis Indonesia dengan populasi sebanyak 200 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau. Rendahnya kualitas dan kecepatan internet saat itu menghambat proses pengiriman berita dari KBR ke radio jaringan. Proses mengunduh berkas suara berita radio berlangsung lambat, bahkan hingga delapan jam. Berita pun menjadi usang untuk ukuran radio yang mengandalkan kecepatan.

Problematika ini menjadi tantangan insan radio untuk memproduksi siaran yang berusaha mengerucutkan segmentasi pendengar, format siaran, dan fokus materi pemberitaannya. Salah satu solusi yang dilakukan oleh insan radio ialah memproduksi berita *feature*. Jenis berita ini tidak terlalu membutuhkan kecepatan berita, melainkan memainkan perasaan kedekatan emosi pendengar setia sehingga kurang baiknya infrastruktur internet bukan menjadi halangan bagi insan radio dalam memproduksi siaran yang tetap bersaing dengan media lainnya.

Peningkatan kualitas internet dalam siaran radio sudah dimulai oleh Kantor Berita Radio 68H. Pada 2000, KBR mulai menerapkan teknologi satelit dalam penyebaran informasi radio. KBR mendapat kanal di saluran Satelit Palapa C2 yang belum terpakai. Radio-radio yang berminat mendapatkan informasi dari KBR cukup menggunakan antena parabola dan peralatan penerima. Cara semacam ini juga dipakai radio-radio asing, seperti VOA, BBC, Radio Nederland, dan Deutsche Welle. KBR menggunakan satelit domestik yang hingga saat ini bisa dinikmati juga melalui *streaming*.

JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL

Sejarah di radio di Indonesia menunjukkan bahwa media ini mempunyai peran besar dalam berdirinya republik ini. Gema Proklamasi ditangkap di seantero Nusantara melalui gelombang radio yang berpusat di Bandung, tepatnya di Palasari, Dayeuhkolot. Naskah proklamasi dibacakan pada pukul 19.00 tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sakti Alamsjah, didampingi oleh Sam Amir, R.A. Darya, dan Ny. Odas Sumadilaga.

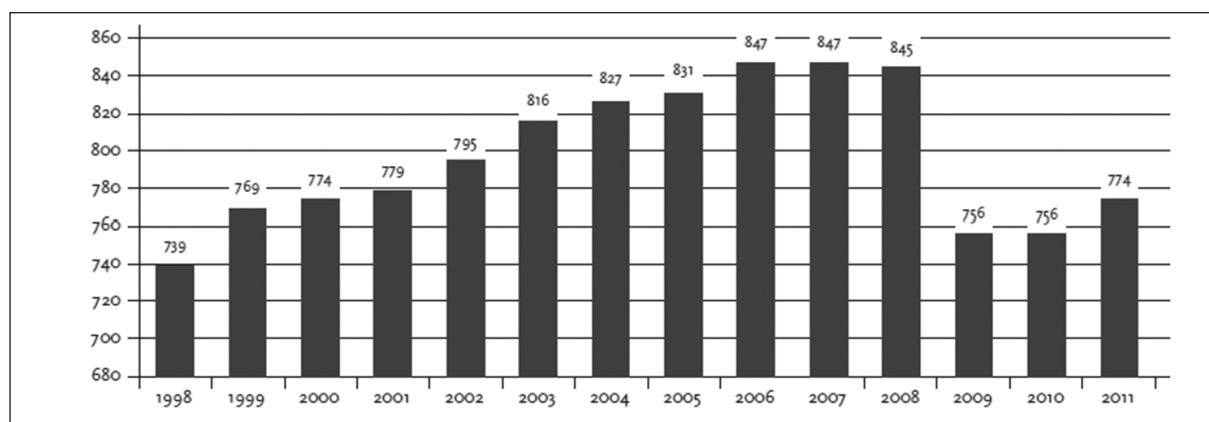
Penghapusan Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum perubahan radio dari milik pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI pada 7 Juni 2000. Saat ini, RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri dengan didukung oleh 8.500 karyawan. Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam tiga program yaitu, Programa daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, Programa Kota (Pro II) yang melayani masyarakat di perkotaan, dan Programa III (Pro III) yang menyajikan berita dan informasi (*news chanel*) kepada masyarakat luas (Pusdatin RRI, 2012).

Fungsi jurnalisme radio yang dipraktikkan oleh RRI adalah bagian dari tanggung jawab sosial. RRI mengemban fungsi yang sangat strategis, yakni menjadi bagian dari pendidikan massa

dan pemersatu bangsa, serta menghibur (Astuti, 2008, 57). Berkaca pada sejarah, radio Indonesia pada pra dan awal kemerdekaan Indonesia, sarat dengan informasi perjuangan dan propaganda nasionalisme. Kemudian, pada masa orde baru, radio menjadi media hiburan sekadar teman melepas lelah.

Pasca-reformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti pertumbuhan jumlah informasi radio, dan hal ini dinilai sebagai perubahan ekspresi. Pada 1999, di Indonesia terdapat sekitar 700 radio swasta, di luar radio milik pemerintah. Namun, banyak aturan pemerintah yang menghambat perkembangan radio-radio swasta, terutama dalam penyebaran informasi yang independen. Radio-radio di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto, wajib menyiarkan berita versi pemerintah 18 kali sehari. Oleh karena itu, masyarakat hanya mendapat informasi sepihak dan satu versi saja dari pemerintah (Santoso, 2006, 3).

Program berita di radio juga perlahan-lahan memperoleh tempat yang kuat dalam preferensi konsumen. Selama era Suharto, hanya Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai corong pemerintah yang diizinkan untuk menyiarkan berita. Stasiun radio swasta diminta untuk menyampaikan program berita RRI dan afiliasinya di tingkat lokal. Ketika periode demokrasi dimulai, peraturan menteri (SK No. 134/SK/Menpen/1998) menyatakan bahwa stasiun radio swasta diminta untuk menyampaikan program berita RRI hanya



Sumber: Ambardi (2014).

Gambar 3. Grafik Jumlah Stasiun Radio 1998–2011

Keterangan: Jumlah stasiun radio di atas mengacu pada data yang dimiliki oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

empat kali sehari. Persyaratannya berakhir ketika UU Penyiaran diadopsi pada 2002. Sejak itu, stasiun radio swasta telah menghasilkan program berita mereka sendiri (Ambardi, 2014, 19).

Reformasi 1998 memberi berkah bagi dunia radio. Pra dan pasca-reformasi, *talk show* radio menjamur di mana-mana dan digemari masyarakat. Masyarakat menjadikan acara semacam itu sebagai katarsis untuk meledakkan kemarahan pada rezim orde baru (Masduki, 2000). Namun, tren program *talk show* pada masa reformasi mengembalikan fungsi radio untuk membangun daya kritis masyarakat.

Konsep *radio for society* sangat ideal jika digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan jurnalisme radio di tanah air. Ada empat hal penting dalam konsep *radio for society*. *Pertama*, radio sebagai media penyimpanan informasi dari satu pihak ke pihak lain. *Kedua*, radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik untuk memengaruhi kebijakan. *Ketiga*, radio sebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat berbeda untuk mencapai solusi bersama yang saling menguntungkan. *Keempat*, radio sebagai sarana untuk mengikat tali kebersamaan dalam semangat kemanusiaan dan kejujuran (Masduki, 2000).

Selama masa reformasi, media berita Indonesia berlomba-lomba menghadapi warisan budaya Orde Baru dengan menggunakan komunikasi teknologi terbaru, membangun atau memperkuat ikatan dengan organisasi media internasional, dan mendefinisikan ulang jurnalisme pembangunan atau mengembangkan konsep serta praktik jurnalistik alternatif. Pada masa ini, mulai bermunculan organisasi penyiaran berita dengan tautan internasional, seperti Kantor Berita Radio 68H, *Internews*, dan *Friedrich Naumann Stiftung*. Perbedaan mencolok sebelum 1998 adalah penerimaan sumber informasi asing itu yang tidak lagi dikuasai oleh RRI sebagai pengendali informasi dan kerja sama jurnalistik internasional dengan lembaga swadaya masyarakat lokal mulai terjalin. Media berita sekarang secara resmi diterima sebagai bagian terintegrasi dari ruang publik yang dibuka kembali di Indonesia (Jurriens, 2009, 56).

Tulang punggung jurnalisme radio adalah berita *news*. Pada dasarnya, karya jurnalistik

media cetak, seperti berita, *feature*, opini, hingga reportase juga dapat diproduksi oleh media radio dengan pendekatan yang berbeda. Dengan karakteristiknya, radio mempunyai kelebihan untuk menyampaikan segala informasi dengan medium suara.

Ketika hampir semua stasiun radio di Indonesia pasca-reformasi menawarkan aneka hiburan dengan genre tertentu, Elshinta justru tidak sekalipun memutar lagu selama 24 jam siaran. Radio yang mengudara di 90,0 Mhz ini menjadi satu-satunya stasiun yang khusus menayangkan berita dan informasi. Elshinta bahkan menggaet para pendengar untuk menyampaikan keluhan dan informasi tentang berbagai hal, dari kriminal hingga kerusakan jalan secara langsung atau *on air* (Mubarak & Soelaeman, 2009).

Elshinta memberikan wadah yang sesuai dengan minat pendengar. Pendengar yang senang menjadi reporter, setiap saat dapat masuk dalam program “Info dari Anda.” Pendengar yang punya hobi berinteraksi dan berkomentar terhadap permasalahan aktual saat ini diwadahi dalam acara “Diskusi Interaktif dan Komisi Anda (Komentar-Opini-Solusi Anda)” yang disiarkan mulai pukul 23.00 hingga 05.00. Mereka memang diundang untuk berinteraksi atau berbicara *on air* secara langsung dengan narasumber (presiden, menteri, anggota DPR, pejabat, dan lain-lain) yang tentunya merupakan kesempatan langka. Hal Ini yang membuat mereka tertarik untuk berinteraksi dan akhirnya menjadi pendengar yang loyal.

Apa yang menyebabkan radio menjadi pilihan utama pendengarnya ketika mencari berita? Hal ini tidak terlepas dari konsep *radio personalized the news*. Artinya, lewat para komentator, radio membuat informasi faktual menjadi sesuatu yang pribadi, tepatnya ketika opini-opini subjektif mulai terbentuk (Dominick, 2002). Selain itu, radio membawa peristiwa ke dalam ruang-ruang pendengar, membuat mereka seolah berada di sana (Vivian, 2006, 163).

“There they you go. Do you hear them shout? I can see their chutes going down now. Everyone clear. They’re dropping just beside a little windmill near a church, hanging there very gracefully. They seem to be completely relaxed like nothing so much as the khaki dolls hanging beneath a green lamp shade...”

(Mereka mulai bergerak. Apakah Anda mendengar teriakan mereka? Bisa saya lihat parasut-parasut mulai berjatuhannya semua tampak jelas. Mereka berjatuhannya satu persatu di samping kilang kecil dekat gereja, mendarat dengan anggun. Tampaknya mereka begitu rileks seperti boneka-boneka berwarna khaki yang bergelantungan di bawah bayang-bayang lampu hijau...) (Vivian, 2006, 167).

Itulah kutipan reporter kawakan radio Edward R. Murrow ketika menyiarkan berita Perang Dunia II saat peristiwa pendaratan pasukan Sekutu di Belanda. Kekuatan Murrow terletak pada reportase yang tajam, berwarna, dan terperinci. Bagi yang pernah menonton film *Saving Private Ryan* yang dibintangi oleh Tom Hanks, adegan-adegan pendaratan pasukan sekutu dikonstruksi sesuai dengan ilustrasi Murrow.

Ada karakteristik lain yang tak kalah penting, yakni interaktivitas. Sebagai media komunikasi massa, radio bersifat sangat interaktif. Radio ketika bersiaran memiliki ruang yang terbuka untuk berinteraksi dengan pihak lain pada saat bersamaan (Astuti, 2008, 56).

Di samping *news*, radio dengan ciri jurnalisme radio yang kental juga menyajikan siaran-siaran berbasis *talk*. Bentuknya bisa dalam program wawancara yang melibatkan dua orang atau lebih dalam membahas isu atau peristiwa tertentu. *Talk show* merupakan wujud forum diskusi interaktif yang sangat istimewa karena melibatkan presenter, narasumber, dan khalayak pendengar. Di media cetak, forum diskusi hanya bisa dihadirkan melalui tulisan. Wujudnya berupa perang opini atau polemik seputar isu kontroversial yang disampaikan secara bergantian oleh kubu yang berseteru. Perang opini di media cetak bisa berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu, tergantung frekuensi terbit media cetak terkait.

Hal ini berbeda dengan perang opini yang berlangsung di udara. Forum diskusi radio berada dalam waktu yang sama meski pihak yang berdiskusi tidak selalu berada di tempat yang sama. *Interactive live show* memiliki nilai aktualitas yang tinggi, lebih istimewanya lagi, khalayak dapat berpartisipasi atau berkomentar secara langsung. Khalayak bisa menyimak pendapat

dan argumen yang disampaikan pada waktu yang sama sekaligus bisa terlibat di dalamnya. Hal inilah yang membuat radio menjadi media yang sangat dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL DAN TEORI SPIRAL KEHENINGAN

Perkembangan teknologi seperti yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya, telah membukakan akses khalayak ramai terhadap radio. Secara bersamaan, pembukaan akses tersebut mendorong adanya wacana dominan yang menyingkirkan kelompok suara minoritas dalam produksi berita. Hal inilah akan dianalisis dalam bagian ini dengan melihat sejumlah kasus produksi berita atau acara *talkshow* yang muncul. Perluasan produksi berita dan akses terhadap berita yang terjadi berkat deregulasi pasca-reformasi tidak serta merta mengubah jurnalisme radio menjadi lebih demokratis. Hal ini terindikasi dari produksi berita radio yang mengompromikan antara popularitas berita dengan pembobotan berita oleh tim redaksi.

Teori seputar dampak media massa terhadap *audience* yang dibahas dalam artikel ini adalah spiral keheningan yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle-Neumann pada 1973. Penulis melihat ada gejala *spiral of silence* dalam opini publik di radio sebagai media interaktif. Hal ini karena peran media massa di tengah masyarakat yang pada dasarnya memang memiliki keterbatasan. *Spiral of silence* mengendalikan empat fungsi media massa, yaitu adanya pengaturan agenda oleh media massa untuk ruang opini publik, mengarahkan khalayak ke sudut pandang tertentu, menyediakan informasi tentang iklim opini, dan memberikan ruang argumentasi untuk debat publik (Roessing, 2017, 1).

Dalam penelitian dampak media, terutama dalam penelitian *spiral of silence*, setidaknya ada dua sumber data yang diperlukan, yaitu data tentang konten media dan data tentang pendapat orang-orang dan kesediaan mereka untuk menyuarakan atau menampilkan mereka di depan publik. Sayangnya, analisis konten dan survei panel untuk meneliti isu tersebut terbilang mahal dan sulit untuk dilakukan. Hal ini yang menjadi

alasan mengapa penelitian tentang media dengan menggunakan dua kombinasi metode yang sangat kuat ini sulit dilakukan (Roessing, 2017, 2). Sebagian besar penelitian mengenai media massa hanya membahas posisi media massa. Seperti diketahui, dalam kondisi masyarakat plural seperti di Indonesia, media berfungsi sebagai pemelihara tatanan sosial.

Teori *spiral of silence* tidak dibuat untuk menjelaskan fenomena publik yang kecil, tetapi untuk menjelaskan isu-isu nasional yang berkembang di tengah masyarakat. Opini publik yang berkembang di media massa merupakan persepsi selektif mengandaikan bahwa orang yang beropini di media sesuai dengan sikap yang sudah terbentuk sebelumnya. Apabila opini media tidak sesuai dengan opini publik atau tidak diperdebatkan atau didiskusikan, publik cenderung mengabaikannya. Dengan kata lain, sebuah isu yang tidak disentuh publik lama-lama akan hilang dan gagal memengaruhi keputusan politik. Hal ini merupakan konsekuensi jangka panjang dari persepsi publik terhadap media dalam proses komunikasi massa (Astuti, 2017, 18).

Radio Elshinta menjadi fenomena radio interaktif di tanah air karena menyuguhkan ruang dialog opini publik yang disiarkan secara langsung selama 24 jam melalui teresterial 90,0 Mhz atau *streaming* di situs <http://www.radioonline.co.id/elshinta/>. Keterlibatan pendengar muncul sejak format radio ini berubah. Sebelumnya, stasiun radio yang berdiri pada 1968 ini mengunsung musik jazz. Momen kerusuhan Mei 1998 menjadi titik tolak radio ini mengarah ke radio berita, hingga resmi memosisikan diri sebagai satu-satunya radio yang khusus menyajikan berita dan informasi selama 24 jam.

Sebelumnya, istilah keterlibatan pendengar bukan digunakan untuk strategi bisnis horizontal, melainkan *citizen journalism*, yang mengadopsi keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lainnya. Dengan *citizen journalism*, Elshinta memberikan kesempatan kepada seluruh pendengarnya untuk menjadi reporter. Para pendengar setia Elshinta umumnya melaporkan hal yang sederhana, tetapi terkait dengan kepentingan publik, misalnya kemacetan lalu-lintas, jalan berlubang, listrik PLN

mati, air PAM mati, sambungan telepon rusak, yang semuanya sebatas hal yang mengganggu kenyamanan sang pelapor. Setelah dilaporkan pendengar secara *on air* di Elshinta, ada perhatian dan jawaban nyata dari pihak yang berkompeten. Acara yang bertajuk “Info dari Anda” ini pun makin meluas, Bobotnya bukan sebatas info yang menyangkut kepentingan pribadi, tetapi mulai meningkat menjadi info kebakaran, orang bunuh diri, kereta tabrakan, banjir, longsor, dan berita ringan lain yang memiliki nilai berita yang tinggi.

Antusiasme masyarakat makin tinggi begitu merasakan dampak nyata setelah memberikan informasi kepada Elshinta, yakni info dari masyarakat tersebut diteruskan ke pihak-pihak terkait. Instansi tersebutlah yang justru kerepotan. Positifnya, Elshinta melihat instansi pemerintah pusat ataupun daerah telah menerapkan prinsip *customer satisfaction oriented*. “Info dari Anda” disiarkan sewaktu-waktu berdasarkan laporan yang masuk dari pendengar, tanpa melihat jadwal acara. Perkembangan teknologi membawa perubahan model radio interaktif karena selama 24 jam hanya ada acara Elshinta “News and Talk” yang merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi aktual, baik itu dari pendengar, reporter Elshinta sendiri, maupun dari mitra kerja Elshinta selama ini. Meskipun dalam memberikan informasi merupakan inisiatif pendengar sendiri, Elshinta tetap mengelolanya dengan penuh perhatian. Misalnya, pelayanan bagi yang memberikan laporan, pendataan agar memudahkan penerimaan laporan bagi pendengar yang telah memberikan laporan sebelumnya, dan pemberian apresiasi bagi para pendengar yang melaporkan informasi dengan kriteria tertentu (Mubarak & Soelaeman, 2009).

Di Indonesia, ada 1.300 stasiun radio, sebanyak 800 di antaranya merupakan radio resmi yang tentunya memperebutkan hal yang sama, yakni loyalitas pendengar. Perubahan yang dibawa radio Elshinta ternyata berbuah manis. Stasiun radio dengan slogan citra “Elshinta News and Talk” ini mampu berada di peringkat keempat acara berita non-dangdut dengan meraup 2,09 juta pendengar. Pemasang iklan rela antre sampai berbulan-bulan untuk mendapat jatah slot siar. Bahkan, ada produsen yang memasang iklan untuk lima tahun (Mubarak & Soelaeman, 2009).

Keterlibatan aktif pendengar juga lebih mengefisienkan proses produksi. Sebagai stasiun radio yang bisa didengar di seantero wilayah Indonesia dan berafiliasi dengan jaringan radio di berbagai daerah—setidaknya ada sekitar 60 mitra stasiun radio yang merelai siaran Elshinta di setiap daerah, bahkan yang terpencil—Elshinta tidak memerlukan reporter khusus karena pendengar berperan sebagai penyiar kontributor. Menurut Chief Editor Elshinta, Iwan Haryono, ada sekitar 150 ribu responden yang tercatat aktif sebagai kontributor Elshinta.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kecenderungan publik untuk berbicara atau tetap diam hanyalah sebagian dari pendekatan teoretis yang sangat luas yang mencoba menjelaskan bagaimana opini publik memengaruhi kehidupan dan perilaku orang lain. Keterlibatan khalayak dalam opini publik juga memperlihatkan bagaimana media berfungsi sebagai pemeliharaan tatanan sosial serta berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan.

Penulis menilai interaktif opini publik di radio Elshinta berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan secara tidak langsung menjamin tatanan sosial suatu peradaban masyarakat. Elshinta mengemas program dengan isu-isu kepentingan publik sehingga dapat melibatkan masyarakat luas dengan mengesampingkan isu-isu pluralitas yang sensitif. Dalam kaitannya dengan *spiral of silence*, hal ini menunjukkan bahwa masalah atau kontroversi yang memicu *spiral of silence* merupakan ancaman yang sangat besar terhadap tatanan sosial. Dalam kasus ekstrem, *spiral of silence* memuncak saat topik tertentu hanya bisa disinggung menggunakan kosakata tertentu (kebenaran politik) atau tidak bisa disebutkan sama sekali (tabu) karena merupakan “titik-titik rentan.” Dengan kata lain, isu-isu yang mengancam tatanan sosial muncul di masyarakat yang berbeda.

Aturan mengenai kebenaran politik atau tabu bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Di Jerman, semua masalah yang terkait langsung atau tidak langsung dengan nasional-sosialis (Nazi) Jerman merupakan hal yang sensitif. Di Amerika Serikat, isu sensitif berlaku untuk masalah ras (Noelle-Neumann & Petersen, 2004,

350). Di Indonesia, ukuran publisitas (*publicness*) dalam konteks digital masih perlu diukur lebih mendalam. Hal ini memerlukan penelitian lain dengan metode survei untuk mengukur norma publisitas kontemporer pada era digital. Dalam konteks yang lebih kekinian, saat politik identitas dan keriuhan pesta demokrasi berkelindan, penelitian yang menghasilkan “norma publik” yang berguna bagi penyiaran dapat juga menjadi sumbangsih media, khususnya radio, bagi demokratisasi di Indonesia.

PENUTUP

Berbeda dengan media cetak, radio masih dianggap sebagai media alternatif di tengah meningkatnya arus digitalisasi. Perkembangan teknologi baru justru memperluas kemampuan radio sebagai media massa dalam menjangkau khalayak. Teknologi *streaming* pada radio Internet memperluas jangkauan pemancar mereka secara geografis. Selain itu, inovasi menggunakan interaktivitas internet juga meningkatkan komunikasi sosial interaktif radio.

Komunikasi sosial interaktif inilah yang menghubungkan radio dan Internet sebagai perangkat teknologi baru. Pada internet, pengguna individu dapat berinteraksi dengan situs web melalui email atau layanan *chat* lainnya. Radio juga menawarkan kemungkinan ini, yang disebut sebagai jurnalisme interaktif, baik secara *on-air* maupun *online*. Bentuk ini memberi peluang khalayak pendengar untuk terlibat dalam proses siaran informasi. Pendengar bukan lagi sekadar penikmat, tetapi aktif sebagai pemberi informasi layaknya reporter.

Pada era modern ini, kesederhanaan radio menjadi salah satu alasan media massa ini masih banyak diminati dan dipilih khalayak. Di samping sebagai alat komunikasi, radio juga dapat dijangkau dengan harga yang murah sehingga masyarakat menengah ke bawah dapat menikmatinya. Radio telah menunjukkan potensi luar biasa untuk mendorong pembangunan suatu peradaban. Radio yang menarik dan interaktif memungkinkan komunitas yang telantar untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Proses demokratisasi melatarbelakangi studi perkembangan radio di Indonesia. Setelah

lengsernya rezim Soeharto, interaktifitas radio menjadi populer. *Talk show* radio menjamur di mana-mana dan digemari masyarakat. Masyarakat menjadikan acara semacam itu sebagai katarsis untuk meledakkan kemarahan pada rezim orde baru (Masduki, 2000). Selain itu, tren program *talk show* pada masa reformasi mengembalikan fungsi radio untuk membangun daya kritis masyarakat.

Keunggulan inilah yang menguatkan peran radio pada era digital. Digitalisasi justru membuat radio lebih mudah dan murah dibandingkan dengan perangkat teknologi lainnya, terutama di Indonesia yang infrastruktur internet dan teleponnya belum merata. Tantangan geografis Indonesia dengan jumlah populasi sebanyak 200 juta orang tersebar di 17.000 pulau mengingatkan pentingnya peran radio bersanding dengan media baru dalam mewujudkan kesenjangan informasi di tanah air.

Partisipasi masyarakat yang disebut sebagai opini publik juga menarik untuk dibahas. Berbicara mengenai peran media dalam opini publik tentu tidak lepas dari teori komunikasi massa *spiral of silence theory*. Ilmuwan politik asal Jerman, Elisabeth Noelle-Neumann, menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan media berjalan bersama dalam perkembangan opini publik. Noelle-Neumann menegaskan bahwa dari pemberitaan media, masyarakat mendapatkan gambaran tentang opini dominan terkait suatu masalah publik. Dari situ, masyarakat bisa menyimpulkan opini yang bisa diterima publik dan yang tidak bisa diterima. Teori *spiral of silence* lahir di Jerman, dilatarbelakangi oleh kekuatan propaganda Nazi Jerman dalam memengaruhi opini public. Teori ini kemudian diuji di Amerika Serikat yang iklim demokrasinya yang lebih baik. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia yang dianggap sebagai negara yang terus memantapkan dan memantapkan proses demokrasi? Penulis menilai interaktif opini publik di radio Elshinta berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan secara tidak langsung menjamin tatanan sosial suatu peradaban masyarakat. Insan media di Elshinta secara sadar mengemas program dengan isu-isu kepentingan publik sehingga dapat melibatkan masyarakat luas dengan mengesampingkan isu-

isu pluralitas yang sensitif. Elshinta cenderung mengafirmasi “pandangan mayoritas” agar mereka tidak kehilangan khalayak yang diasumsikan sebagai mayoritas.

Dalam *spiral of silence*, masalah atau kontroversi yang memicu *spiral of silence* merupakan ancaman yang sangat besar terhadap tatanan sosial. Dalam kasus ekstrem, *spiral of silence* memuncak saat topik tertentu hanya bisa disinggung menggunakan kosakata tertentu (kebenaran politik) atau tidak bisa disebutkan sama sekali (tabu) karena merupakan “titik-titik rentan.” Dengan kata lain, isu-isu yang mengancam tatanan sosial muncul di masyarakat yang berbeda.

Neumann menyatakan bahwa salah satu kekuatan teori ini adalah opini publik akan menentukan apakah orang akan berbicara atau tidak. Demokrasi adalah konsep penting dan pendapat umum dipertimbangkan. Argumen kuat dan musyawarah publik adalah ciri proses demokrasi. Orang tidak hanya akan menyatakan pendapat, tetapi akan menggunakan bukti pendukung yang logis. Jika tidak setuju dengan pendapat pihak lain, orang tersebut berkewajiban menghormati kekuatan logika atau penalaran pihak yang bertentangan dengannya. Di tengah maraknya politik identitas dan ketegangan terhadap tradisi kebhinekaan di Indonesia, penelitian mengenai ukuran publisitas (*publicness*) bagi penyiaran menjadi penting.

PUSTAKA ACUAN

- Ambardi, K. (2014). Mapping digital media: Indonesia a report by The Open Society Foundations.
- Astuti, S.I. (2017). *Jurnalisme radio teori dan praktik*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Chaffee, S.H., & Metzger, M. J. (2001). The end of mass communication?. *Mass Communication and Society*, 4 (4), 365–379.
- Girard, B. (2003). *The one to watch radio, new ICTs and interactivity*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Hopkins, A.E. (2015). Effects of the spiral of silence in digital media. *Inquiries Journal/Student Pulse*, 7 (09). Diakses pada? dari <http://www.inquiriesjournal.com/a?id=1104>
- Jonathans, E. (2000). Jurnalistik radio. Dalam Rainer Adam dkk., *Politik dan radio: buku pegangan bagi jurnalis radio*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.

- Jurriens, E. (2003) Radio komunitas di Indonesia new brechtian theatre di era reformasi? *Antropologi Indonesia*, 72, hlm?. School of Asian, African, and Amerindian Studies, Leiden University.
- Littlejohn, S.W., & Foss, K.A. (2009). *Teori komunikasi theories of human communication*. Jakarta: Salemba
- Masduki. (2000). *Jurnalistik radio: menata profesionalisme reporter dan penyiar*. Jakarta: Gramedia
- Morissan. (2014). *Teori komunikasi individu hingga massa*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, M. H., & Soelaeman, H.T. (2010). Radio Elshinta: melesat di tengah kepegangan pesaing. *Majalah Swa*, 05 Maret 2009. Diakses pada 7 Mei 2018 dari <http://radioelshinta.blogspot.co.id/2010/01/artikel-tentang-radio-elshinta-di.html>
- Noelle-Neumann, E., & Petersen, T. (2004). The spiral of silence and the social nature of man. Dalam Lynda L. K. (ed.), *Handbook of political communication research*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Roessing, T. (2017). Spiral of silence: general and individual media tone. Dalam Patrick Rössler dkk., *The international encyclopedia of media effects*. Malden, MA: Willey Blackwell.
- Romli, A.S.M. (2009). *Dasar-dasar siaran radio: basic announcing*. Nuansa Cendekia: Bandung
- Santoso, (2006). *Waves of freedom: Radio News Agency KBR 68H*. Jakarta: KBR 68H.
- Vivian, J. (2006). *The media of mass communication*. Boston: Pearson Education

Internet

- Darwin, W. (2011, Oktober 27). Survey MarkPlus Insight: pengguna internet di Indonesia 55 juta, mobile internet 29 juta. Diakses pada 10 April 2018 dari <http://marketeers.com/survey-markplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-jutamobile-internet-29-juta/>
- Pusdatin RRI. (tanpa tahun). RRI dari masa ke masa. Diakses pada 13 April 2018 dari <http://pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/RRI%20Dari%20Masa%20Ke%20Masa.pdf>
- Lubis, M. (2016, 7 November). Radio masih memiliki tempat di hati pendengarnya. Diakses pada 10 April 2018 dari <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/RADIO-MASIH-MEMILIKI-TEMPAT-DI-HATI-PENDENGARNYA.html>
- Simatupang, G. (2016, Maret 28). RRI Luncurkan Radio Visual. *Tribunnews*. Diakses pada? dari <http://wartakota.tribunnews.com/2016/03/28/rri-luncurkan-radio-visual>
- Spiral of Silence (Elisabeth Noelle-Neumann). (2017). Diakses pada? dari <http://www.comindwork.com/weekly/2017-02-20/productivity/spiral-of-silence-elisabeth-noelle-neumann>

TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Ahmad Helmy Fuady

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: elhelmy@yahoo.com

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICT development and economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neighbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.

Keywords: *digital technology, inequality, disruption, ICT development index*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.

Kata Kunci: *teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK*

PENDAHULUAN

“To have information is to be powerful. In our society the gaps between those with power (economic and political) and those without are great. Information technology could be used to mediate and bridge the gap by providing access to information” (Ghosh, 1983, 235).

Dalam delapan tahun terakhir, jumlah pengendara motor dengan jaket dan helm hijau yang bertuliskan Go-jek atau Grab terlihat terus bertambah. Para pengemudi angkutan ojek *online* tersebut terlihat di hampir semua sudut wilayah Jakarta. Di jalanan Jakarta yang macet, angkutan ojek *online* yang murah dan mampu menerobos kemacetan

merupakan tawaran yang sulit diabaikan oleh warga ibu kota. ‘PENGHIJAUAN’ Jakarta yang dilakukan oleh pengembang layanan *ride-sharing* tersebut merupakan bentuk pasar digital yang mewujud dan terlihat dalam realitas keseharian. Dalam dunia digital sendiri, berbagai aplikasi *e-commerce*, seperti Alibaba.com, Ebay, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada terus membesar dan membentuk ekologi tersendiri (Kasali, 2017, 43–56). Interaksi melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Youtube, dan Twitter sudah bukan menjadi hal yang asing. Selain itu, berbagai layanan teknologi keuangan (*financial technology* atau disebut *fintech*) juga semakin banyak digunakan.

Perkembangan teknologi telah membentuk pasar digital yang mempertemukan penyedia jasa dengan penggunaanya dalam hampir semua aspek kehidupan, misalnya bidang perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan sebagainya. Teknologi digital membantu meningkatkan kecepatan, ruang lingkup, dan efisiensi informasi serta komunikasi (Jurriens & Tapsell, 2017, 3). Berbeda dengan inovasi teknologi masa lalu yang sering memengaruhi industri tertentu (misalnya alat mesin otomatisasi hanya melibatkan produksi manufaktur), teknologi informasi bersifat serbaguna dan memengaruhi banyak hal dalam hampir setiap kategori pekerjaan (Aghion, Howitt, & Violante, 2002, 317). Telah terjadi transformasi ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri melalui pengenalan teknologi dan proses baru (Deloitte, 2018). Perkembangan teknologi digital dinikmati tidak hanya oleh para ahli IT (*information and technology*), namun juga masyarakat kebanyakan. Berbagai kemudahan yang diciptakan oleh aplikasi dan platform digital telah memungkinkan semakin luasnya pengguna teknologi, dari orang-orang kantor hingga orang-orang lapangan, dari orang tua hingga anak-anak. Hal ini juga didukung dengan semakin mudah dan murah gawai, seperti *smartphone*, di pasaran. Jaringan internet dan berbagai infrastruktur pendukung yang terus berkembang juga menyebabkan penggunaan teknologi digital terus meluas.

Penggunaan teknologi digital yang semakin luas memberikan harapan akan berkurangnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan teknologi digital menghasilkan realitas baru berupa *disruption* yang memunculkan banyak pemain baru yang menantang pemain-pemain lama dalam perekonomian. Kemungkinan masuknya pemain-pemain baru dalam perekonomian menumbuhkan optimisme bagi terciptanya inklusivitas sosial. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital ini diharapkan, misalnya, untuk dapat membantu usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) memperoleh fasilitas akses kredit dan informasi pasar, serta memudahkan koneksi antarpelaku pasar. Hal ini dipandang dapat membantu pertumbuhan ekonomi UMKM sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi yang menjadi masalah besar, baik dalam skala

global maupun nasional di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Deloitte (2018) terhadap para eksekutif juga menunjukkan bahwa mayoritas mereka (87%) percaya bahwa Industri 4.0 akan mengarah pada kesetaraan dan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Teknologi dianggap sebagai *equalizer* yang akan memberikan lebih banyak akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pembiayaan di berbagai geografi dan kelompok sosial yang berbeda (Deloitte, 2018, 4).

Optimisme ini juga terlihat dalam sektor industri. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, meluncurkan Making Indonesia 4.0 pada awal 2018. Visi tersebut berisi keyakinan bahwa industri 4.0 merupakan *game changer* bagi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam periode ini, sektor manufaktur Indonesia memang sedang mengalami perlambatan, dan pemulihannya merupakan suatu keharusan bila ingin ada peningkatan lapangan kerja. Investasi asing langsung (FDI) yang masuk juga mengalami stagnasi pada kisaran 28,5 miliar US\$ atau 3,1% dari tahun 2013 hingga 2016. Pada 2016, pertumbuhan PDB Indonesia sebagian besar ditopang oleh pengeluaran konsumen (4,3%), sementara net ekspor menyumbang 0% untuk pertumbuhan PDB tersebut (Kementerian Perindustrian, 2018). Industri 4.0 diharapkan secara langsung dapat memulihkan sektor produksi sehingga Indonesia memperoleh kembali posisinya sebagai net eksportir. Secara tidak langsung, hal tersebut akan meningkatkan kekuatan finansial negara sehingga meningkatkan belanja pemerintah, meningkatkan investasi, dan membangun perekonomian yang kuat, yang berarti juga kondisi pasar tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, terdapat juga pesimisme tentang bagaimana perkembangan teknologi digital dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Walaupun perkembangan teknologi diharapkan dapat menghilangkan kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi sosial, kenyataannya ketimpangan dan eksklusi sosial terus mengalami peningkatan (Bach, Shaffer, & Wolfson, 2013). Perkembangan teknologi justru dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi. Menurut penelitian IMF, faktor utama yang mendorong peningkatan ketimpangan di berbagai negara adalah kemajuan teknologi (Jau-motte, Lall, Papageorgiou, & Topalova, 2007).

Menurut mereka, faktor teknologi menjelaskan sebagian besar peningkatan Gini Ratio dari awal 1980-an. Hal ini mendukung pandangan bahwa teknologi baru di negara maju dan berkembang meningkatkan nilai keterampilan sehingga cenderung terjadi penggantian tenaga kerja kurang terampil. Menariknya, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa di antara negara-negara berkembang, pengaruh kemajuan teknologi lebih kuat di Asia daripada di Amerika Latin. Hal ini mungkin disebabkan oleh pangsa manufaktur intensif teknologi yang lebih besar di Asia.

Pengaruh teknologi terhadap tingkat ketimpangan ini penting untuk dicermati di Indonesia. Gambaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan bahwa antara tahun 1990 dan 2010, ketimpangan pendapatan di negara berkembang meningkat lebih dari 10%. Artinya, orang miskin menjadi lebih miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya. Di Indonesia, ketimpangan juga berkembang pesat. Indonesia merupakan negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur dalam periode 1999–2012, dengan Gini Ratio yang meningkat dari 0,32 pada 1999 menjadi 0,41 pada 2012 (The World Bank, 2014). Walaupun pada 2018 Gini Ratio telah turun menjadi 0,39, ketimpangan yang ada harus ditanggapi secara serius karena bukan hanya menyangkut persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga stabilitas sosial dan politik. Di Indonesia, ketimpangan yang tinggi telah mengurangi soliditas sosial dan politik serta menghambat pertumbuhan ekonomi (The World Bank, 2014).

Selama ini, telah ada beberapa penelitian yang secara eksplisit menunjukkan hubungan antara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan ketimpangan ekonomi (misalnya Hyytinen & Toivanen, 2011; Jaumotte, Lall, & Papageorgiou, 2013; Kim, 2012). Dengan menggunakan data panel 51 negara selama periode 23 tahun dari 1981 hingga 2003, Jaumotte, Lall, dan Papageorgiou (2013) menunjukkan bahwa dibandingkan globalisasi perdagangan dan keuangan, kemajuan teknologi memiliki dampak yang lebih besar terhadap ketimpangan ekonomi. Hyytinen dan Toivanen (2011) menunjukkan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dengan difusi awal telepon geng-

gam di negara berkembang tahun 1985–1998. Sementara itu, Kim (2012) yang menggunakan analisis Schumpeterian menunjukkan bahwa pada awalnya kemajuan teknologi menurunkan tingkat ketimpangan, tetapi pada tahapan selanjutnya akan meningkatkan ketimpangan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menunjukkan hubungan antara TIK dengan ketimpangan di Indonesia.

Untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pertanyaan yang hendak dijawab oleh penelitian ini adalah: “Bagaimana hubungan kemajuan TIK dengan distribusi pendapatan antarkelompok pendapatan? Bagaimana hubungan antara kemajuan TIK dengan pendapatan yang diterima tenaga kerja terampil dan kurang terampil?” Hubungan antara TIK dengan ketimpangan di negara sedang berkembang ini penting untuk dieksplorasi karena analisis yang ada selama ini cenderung menganggap sama karakteristik perkembangan teknologi di negara maju dan sedang berkembang. Padahal dengan karakteristik perkembangan yang berbeda, teknologi yang dihasilkan juga akan memberikan dampak terhadap ketimpangan ekonomi yang berbeda. Bagi negara yang lebih banyak menjadi pengguna daripada inovator, teknologi cenderung lebih menguntungkan pemilik modal.

ANTARA TEKNOLOGI DAN KETIMPANGAN

Dalam literatur ekonomi klasik, David Ricardo merupakan pelopor yang mengeksplorasi tentang hubungan antara perkembangan teknologi dengan masalah pemerataan. Dalam *Principles* bagian *On Machinery*, Ricardo (1821) menunjukkan pengaruh teknologi terhadap tiga kelompok yang terlibat dalam kegiatan produksi, yaitu tuan tanah, pemilik modal, dan pekerja. Menurutnya, penggunaan teknologi baru akan menggantikan atau mengurangi peranan modal dan tenaga kerja.

Terdapat ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh tuan tanah dan kelompok pemodal di satu sisi, dengan kelompok pekerja yang mengalami kerugian di sisi yang lain. Tuan tanah akan mendapatkan keuntungan karena

harga-harga komoditas akan turun, sementara pendapatannya dari sewa tanah tetap. Kelompok kapitalis atau pemilik modal juga menjadi kelompok yang diuntungkan. Hal ini karena sebagai penemu atau pengguna pertama, kelompok ini mendapat keuntungan tambahan dari turunnya biaya produksi. Namun, keuntungan kelompok pemilik modal ini akan terus menurun seiring dengan tingkat kompetisi yang akan menurunkan harga.

Kelompok pekerja juga akan diuntungkan karena harga relatif barang-barang lain akan turun, sementara mereka mendapat tingkat upah yang sama jika mereka memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pemilik modal. Namun, menurut Ricardo (1821), kenyataannya kelompok pekerja tidak selalu memiliki daya tawar yang kuat. Penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin atau teknologi baru akan sangat merugikan kelompok pekerja.

Sementara itu, Kuznets (1955) dalam *Economic Growth and Income Inequality* juga melihat bagaimana pengaruh teknologi terhadap ketimpangan pendapatan. Kuznets menunjukkan bagaimana ketimpangan yang dialami sebuah bangsa pada awal industrialisasi akan mengalami peningkatan, namun akan menurun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, atau yang dikenal dengan kurva 'U' terbalik. Pada fase awal, kemajuan teknologi mengarahkan pada *economic of scale* sehingga memberikan nilai yang lebih terhadap sektor industri di perkotaan, berbeda dengan sektor pertanian di perdesaan. Hal ini menyebabkan Ketimpangan ekonomi yang meningkat pada awal industrialisasi.

Perkembangan teknologi juga berperan penting pada fase menurunnya tingkat ketimpangan ketika masyarakat sudah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Dengan tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, teknologi semakin berkembang dan akumulasi dari asset dari industri lama akan menurun secara proporsional karena pertumbuhan yang sangat cepat dari industri yang lebih baru (Kuznets, 1955, 10). Menariknya, menurut Kuznets, hal ini terjadi hanya jika kelompok industri lama tidak mengalihkan asetnya ke bidang-bidang baru atau bergabung dengan para entrepreneur baru dalam industri yang lebih menguntungkan (Kuznets, 1955, 10).

Analisis lain yang menarik tentang peranan teknologi adalah pemikiran tentang model inovasi yang dikembangkan oleh Schumpeter. Breschi, Malerba, dan Orsenigo (2000) menunjukkan bahwa pengaruh inovasi dan perkembangan teknologi dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu Schumpeter Tahap I dan Schumpeter Tahap II. Teknologi atau inovasi, dalam pandangan ini, memberi pengaruh yang berbeda dalam tahapan yang berbeda. Berdasarkan pandangan ini, teknologi akan menurunkan tingkat ketimpangan, namun kemudian akan meningkatkan ketimpangan.

Schumpeter Tahap I ditandai dengan adanya *creative destruction*. Inovasi dan teknologi baru akan membuka peluang lebih besar kepada pemain-pemain baru untuk memasuki pasar dan menantang para pemain lama sehingga terjadi perluasan (*widening*) kesempatan (Breschi dkk., 2000). Teknologi baru memunculkan berbagai inovasi pengembangan produk dan proses baru. Nilai monopoli dan hambatan teknologi dari inovasi yang dilakukan pemain lama akan turun sehingga keunggulan kompetitif perusahaan yang telah mapan akan terkikis. Dalam proses ini, teknologi membantu memfasilitasi pemerataan (Kim, 2012).

Schumpeter Tahap II ditandai dengan *creative accumulation*. Dalam fase ini, perusahaan atau pemain baru telah semakin mapan sehingga mampu mengakumulasi keuntungan yang diperoleh dari inovasinya. Selain itu, terjadi investasi besar-besaran yang dilakukan para pemain atau perusahaan besar dalam hal teknologi atau inovasi sehingga menjadi hambatan bagi pemain baru. Dengan akumulasi pengetahuan dan teknologi, kompetensi R&D, kemampuan produksi, distribusi dan sumber daya keuangan yang besar, perusahaan-perusahaan besar akan mampu menciptakan hambatan bagi para pemain baru (Breschi dkk., 2000; Kim, 2012). Oleh karena itu, dalam fase ini kemajuan teknologi akan justru meningkatkan ketimpangan.

Kajian-kajian tentang hubungan teknologi dengan ketimpangan ekonomi masih di seputar analisis pengaruh teknologi terhadap pergeseran lapangan kerja dan *return* yang dihasilkan teknologi. Kemampuan teknologi melakukan otomatisasi atau kerja-kerja yang sifatnya beru-

lang dapat menjadi alternatif bagi penggunaan tenaga manusia. Dalam pandangan ini, perkembangan teknologi meningkatkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, terutama melalui berkurangnya penggunaan tenaga kerja kurang terampil yang digantikan oleh mesin. Dalam *framework* ini, teknologi dianggap berkontribusi terhadap ketimpangan karena bias terhadap tenaga kerja terampil. Jadi, kemajuan teknologi akan lebih menguntungkan kelompok tersebut. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan nilai atau keuntungan antara kelompok yang menguasai teknologi dengan kelompok yang tidak menguasai teknologi. Selain itu, teknologi berperan dalam meningkatkan intensitas modal sehingga meningkatkan keuntungan pemilikinya (lihat Jaumotte, Lall, & Papageorgiou, 2013, 284).

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA

Teknologi digital bukan lagi sesuatu yang asing bagi penduduk Indonesia. Data digital *landscape* per Januari 2018 menunjukkan bahwa 132,7 juta jiwa atau 50% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial, dan 12 juta jiwa di antaranya mengakses media sosial melalui telepon genggam. Para pengguna internet tersebut rata-rata menghabiskan waktu 8 jam 51 menit untuk melakukan kegiatan dengan terkoneksi internet. Sebagian besar dari mereka (71%) juga cukup optimistis dan percaya bahwa teknologi informasi lebih memberikan peluang daripada risiko bagi penggunaannya. Hal ini jauh berbeda dibandingkan situasi pada paruh kedua 1990-an, ketika internet baru tiba di Indonesia dan pilihan bagi masyarakat untuk mengakses internet awalnya baru melalui warung internet (Jurriens & Tapsell, 2017, 4). Penelitian McKinsey menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap awal digitalisasi dan memiliki paradoks: penghuni digitalnya adalah salah satu yang paling aktif di dunia dan memiliki ekosistem *start-up* yang dinamis, namun secara keseluruhan tertinggal dalam merangkul manfaat teknologi modern (Das, Gryseels, Sudhir, & Tan, 2016).

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kapasitas teknologi digital di

Indonesia adalah indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). IP-TIK merupakan ukuran standar pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah yang dibuat oleh BPS, mengikuti perhitungan dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). Penghitungan IP-TIK ini dibuat dengan tiga sub-indeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian. Semakin tinggi IP-TIK menunjukkan tingkat pembangunan yang semakin baik. Indeks ini dapat dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK (BPS, 2018a).

Tabel 1. IP-TIK Negara-negara Asia Tenggara

Negara	2016		2017	
	IP-TIK	Peringkat	IP-TIK	Peringkat
Singapura	7,85	20	8,05	18
Malaysia	6,22	62	6,38	63
Brunei D	6,56	54	6,75	53
Thailand	5,31	79	5,67	78
Vietnam	4,18	108	4,43	108
Filipina	4,52	100	4,67	101
Indonesia	3,85	114	4,33	111
Kamboja	3,24	128	3,28	128
Timor-Leste	3,11	127	3,57	122
Myanmar	2,59	140	3,00	135

Sumber: ITU (2017)

IP-TIK Indonesia berkembang cukup pesat, dari 2,15 pada 2007, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 4,33 pada 2017. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, capaian tersebut terlihat masih tertinggal. Tabel 1 menunjukkan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia masih sangat rendah. Pada 2017, IP-TIK di Indonesia adalah 4,33 dan menempati peringkat 111 dari 176 negara yang diukur oleh ITU. Di Asia Tenggara, IP-TIK Indonesia hanya berada di atas Kamboja, Timor Leste, Myanmar, dan jauh di bawah Singapura (IP-TIK= 8,05, peringkat 18). Nilai IP-TIK Indonesia tahun 2017 bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai IP-TIK Malaysia pada 2010 yang saat itu telah mencapai 4,63 (ITU, 2011).

Tingkat pembangunan TIK yang rendah tidaklah terlalu mengherankan jika melihat posisi dan peran teknologi dalam sejarah kebijakan pembangunan di Indonesia. Pertama, sebagaimana semangat pembangunan di Indonesia, teknologi selalu dihubungkan dengan identitas nasional dan semangat anti-asing. Perusahaan multinasional (MNCs) merupakan saluran utama untuk melakukan transfer teknologi. MNCs atau perusahaan asing sering kali dianggap memiliki kemampuan teknologi yang lebih tinggi daripada perusahaan lokal, sehingga dapat memproduksi secara lebih efisien. Dengan kemampuan modal yang besar, perusahaan-perusahaan multinasional mampu menggunakan teknologi yang lebih maju dibanding dengan perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai salah satu sarana utama transfer teknologi, persepsi dan sikap suatu negara terhadap kehadiran perusahaan asing turut menentukan tingkat teknologi dalam negara tersebut.

Pada awal periode kemerdekaan, dominasi asing dan kedaulatan nasional dianggap sebagai persoalan utama bagi pembangunan ekonomi dan redistribusi di Indonesia. Salah satu perhatian utama pada saat itu adalah dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi penting masih berada dalam kontrol asing, sementara peran perusahaan nasional masih sangat terbatas dalam perekonomian. Pada 1950-an, perusahaan-perusahaan Belanda tetap mendominasi ekonomi modern Indonesia. Pada 1952, sebanyak 50% konsumsi impor didominasi oleh empat perusahaan Belanda, 60% ekspor dilakukan oleh delapan perusahaan. Sementara itu, bank swasta didominasi oleh tujuh bank asing, dan tiga di antaranya bank Belanda (van Zanden & Maarks, 2012, 296). Sementara itu, Kanumoyoso (2001) mencatat keberadaan lima perusahaan asing besar yang mendominasi ekonomi Indonesia, yaitu Jacobson & van den Berg, Internatio, Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves, dan Geo Wehry.

Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menyatakan bahwa kedaulatan politik, ekonomi dan budaya (dikenal sebagai Trisakti) adalah tiga elemen penting dari sebuah negara merdeka. Menurutnya, kedaulatan ekonomi (ekonomi berdikari), konsep berdiri di atas dua

kaki kita sendiri merupakan faktor penting untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Struktur ekonomi yang relatif tidak berubah, dengan perusahaan-perusahaan asing tetap sentral, menimbulkan pertanyaan tentang kemerdekaan dan kedaulatan.

Untuk mengatasi dominasi asing tersebut, setidaknya ada tiga kebijakan penting yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi orang Indonesia untuk berpartisipasi dalam perekonomian, yaitu program Benteng, pendirian perusahaan milik negara (BUMN), dan nasionalisasi. Pertama adalah program Benteng. Dengan adanya program ini pada awal 1950-an, izin impor diberikan kepada orang Indonesia asli (van Zanden & Maarks, 2012, 299). Program ini bertujuan melindungi dan meningkatkan peran masyarakat adat atau pribumi (Chalmers, 1990, 6). Dalam praktiknya, program itu tidak berjalan dengan baik karena banyak penduduk asli menjual lisensi kepada perusahaan-perusahaan asing. Akibatnya, perusahaan-perusahaan “Ali-Baba” muncul ke permukaan. Kedua adalah pendirian perusahaan milik negara (BUMN). Untuk menggantikan dominasi perusahaan Belanda, pemerintah Indonesia mendirikan BUMN, misalnya Perusahaan Perdagangan Pusat (CTC), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Industri Negara (BIN), Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan Usaha Indonesia (USINDO) (Boediono, 2016, 88; Kanumoyoso, 2001, 45, 48). Ketiga, nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda. Pada 1958 dan 1959, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Sebanyak 2300 manajer digantikan oleh personel militer Indonesia selama program nasionalisasi (van Zanden & Maarks, 2012, 307). Perusahaan yang dinasionalisasi adalah De Javasche Bank, Perusahaan Listrik Negara (PLN), kereta api (kemudian menjadi PJKA dan PERUMKA), Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor RI, dan perkebunan (Pusat Perkebunan Negara, PPN) (Boediono, 2016, 88; Kanumoyoso, 2001, 46).

Pada akhir pemerintahan Soekarno, ekonomi Indonesia memburuk. Antara 1959 dan 1965, GDP tumbuh kurang dari 2% setiap tahun,

ekspor turun 24%, dan cadangan devisa tidak cukup untuk membiayai satu bulan impor (Wing, Glassburner, & Nasution, 1994, 24). Biaya hidup pun meningkat secara dramatis dengan tingkat inflasi 650% pada 1965. Dalam situasi politik dan ekonomi yang kacau, Suharto yang berkuasa pada 1965 memulai program stabilisasi dan rehabilitasi untuk mengendalikan hiperinflasi, mengamankan persediaan makanan, dan menjadwalkan ulang utang luar negeri (Hong, 1968, 135; Seda, 2009). Pemerintah juga menganggap investasi langsung asing (FDI) menjadi sangat penting karena tabungan domestik untuk investasi modal sangat terbatas. Pada saat itu, pinjaman luar negeri menjadi sumber dana utama untuk mencapai stabilitas makro ekonomi dan untuk merehabilitasi ekonomi (Sadli, 1993, 43). Undang-Undang Investasi Asing yang baru diluncurkan pada 1967 kemudian menghasilkan dominasi asing. Ada juga jaminan bahwa perusahaan-perusahaan asing tidak akan dinasionalisasi. Pemerintah mengembalikan banyak perusahaan asing, yang telah dinasionalisasi selama periode Soekarno, kepada mantan pemiliknya.

Pada awal 1970-an, semangat nasionalisme ekonomi muncul kembali, seiring dengan naiknya harga minyak (*oil boom*). Peningkatan pendapatan pemerintah dari rezeki nomplok dari minyak dan ketidakpuasan di kalangan kelompok pribumi telah memicu sentimen nasionalisme, yang berujung pada tragedi Januari 1974. Pada saat itu, ratusan mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan banyak penjarah terbunuh sehari kemudian (Robison, 1986, 164–8; Schwarz, 2004, 34). Peristiwa yang biasa disebut sebagai Malari (Malapetaka Januari) ini merupakan serangkaian kerusuhan anti-Jepang berskala besar sebagai protes terhadap dominasi asing (Jepang) dan etnis Tionghoa atas ekonomi.

Pada Januari 1974, pemerintah mengubah kebijakannya tentang investasi asing. Menurut Prawiro (1998), setiap investasi asing harus dalam kerangka usaha patungan dengan mitra pribumi (domestik pribumi). Dalam waktu sepuluh tahun, 51% kepemilikan asing harus dialihkan ke mitra Indonesia, khususnya untuk pribumi. Selain itu, bank-bank milik negara diarahkan untuk memberikan kredit kepada pribumi saja. Pada 1973,

Bank Indonesia memperkenalkan dua skema kredit baru kepada usaha kecil pribumi, yaitu kredit investasi kecil (Kredit Investasi Kecil atau KIK) dan modal kerja permanen (Kredit Modal Kerja Permanen atau KMKP) (Poot, Kuyvenhoven, & Jansen, 1990, 211).

Sejak awal 1970-an, pemerintah mengembangkan industri substitusi impor yang menyebabkan minimnya arus investasi dan teknologi ke Indonesia. Proteksi yang diberikan untuk pengembangan industri substitusi impor telah dimanfaatkan oleh pemburu rente yang menghalangi persaingan domestik (Thee, 2006, 344). Selain itu, keinginan pemerintah mengembangkan industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja menyebabkan pemerintah tidak begitu tertarik pada investasi yang lebih padat modal maupun padat teknologi. Pengembangan teknologi tinggi memang sempat diadvokasi secara kuat oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, namun upaya tersebut lebih fokus pada teknologi tinggi, seperti pesawat terbang, yang pengembangannya membutuhkan proteksi dan subsidi pemerintah. Hal-hal tersebut menyebabkan basis teknologi yang dangkal, kemampuan domestik yang lemah dan sempit untuk menyerap dan meningkatkan teknologi impor yang kompleks, sektor barang modal yang belum berkembang, dan kapasitas teknologi yang relatif lemah (Thee, 2006, 348).

Dalam tulisan ini, analisis hubungan antara teknologi digital dengan ketimpangan ekonomi dibahas dalam tiga dimensi, yaitu ketimpangan antarwilayah, ketimpangan antarsektor ekonomi, dan ketimpangan antarkelompok pendapatan.

KETIMPANGAN ANTARWILAYAH

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan persoalan pembangunan yang belum selesai. Krisis Asia pada paruh kedua tahun 1990-an, menyebabkan reformasi di Indonesia berada pada dimensi baru masalah redistribusi pembangunan. Ada ketimpangan pembangunan antarwilayah yang sebelumnya diabaikan pada masa Orde Baru. Rezim Suharto telah memusatkan pembangunan di Jawa dan mengabaikan pulau-pulau terluar.

Kekuatan politik dan ekonomi berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak menikmati otonomi yang signifikan untuk mengembangkan wilayah mereka. Akibatnya, ketimpangan wilayah atau disparitas regional antara Jawa dan Luar Jawa semakin melebar. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendapatan per kapita, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Ketimpangan regional juga menjadi faktor penyebab Timor Timur (sekarang Timor Leste) memisahkan diri dari Indonesia pada 1999.

Untuk menangani masalah ketimpangan regional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang itu dikeluarkan selama masa kepresidenan Habibie dan menjadi dasar hukum bagi awal desentralisasi di Indonesia. Menurut UU No. 22/1999, pemerintah pusat seharusnya hanya bertanggung jawab dalam sistem peradilan, urusan agama, pertahanan dan keamanan nasional, urusan fiskal dan moneter, serta hubungan diplomatik internasional. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab, misalnya dalam pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan industri, investasi, lingkungan, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja. Sementara itu, UU No. 25/1999 mengatur keseimbangan fiskal yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, UU No. 22/1999 dan UU 25/1999 diubah menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 dengan semangat desentralisasi tetap utuh. Pada era desentralisasi ini, pemerintah daerah diharapkan memainkan peran lebih besar dalam pembangunan sehingga ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi.

Ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden pada 2014, ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Infrastruktur yang tidak memadai dan tidak merata dianggap sebagai persoalan besar bagi ekonomi negara kepulauan ini. Untuk Indonesia, agenda membangun daya saing industri dan bisnis dan memecahkan ketimpangan berarti agenda mem-

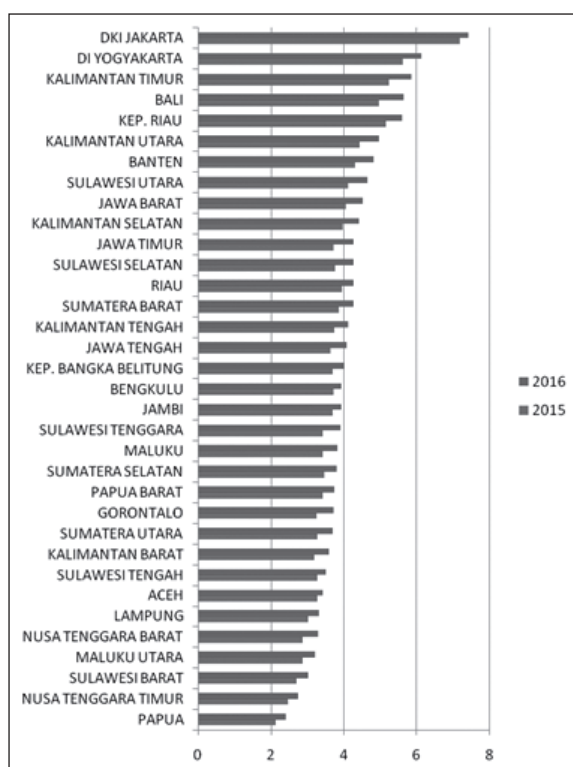
bangun infrastruktur. Bagi pemerintahan Jokowi, infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Masalah infrastruktur terletak pada penyediaan energi dan transportasi.

Menurut Asian Development Bank (2005), listrik sangat bermasalah dan telah mengurangi 4,2% produksi di Indonesia. Selain itu, produksi dan penyediaan listrik terkonsentrasi di Jawa-Bali sehingga membuat industri di luar pulau sulit untuk berkembang. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam menunjukkan bahwa pada 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia sebesar 88%, terutama didukung oleh sistem listrik Jawa-Bali. Rasio elektrifikasi di DKI Jakarta 99% pada 2015, sedangkan di Papua hanya 45% pada periode yang sama. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan untuk membangun 35GW tenaga listrik dalam lima tahun, sehingga pada 2019, rasio elektrifikasi harus mencapai 97%.

Transportasi yang baik dan efisien juga menjadi tantangan penting. Karena infrastruktur transportasi yang buruk, biaya logistik di Indonesia mencapai 14% dari total biaya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di Jepang (<5%) (Adam & Negara, 2010, 17–18). Transportasi jalan raya, kereta api, dan maritim pun perlu dikembangkan dengan cepat untuk mengembangkan pabrik, mengurangi biaya logistik, dan mengurangi kesenjangan harga di banyak wilayah di Indonesia.

Untuk negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, transportasi laut sangat penting. Presiden Joko Widodo mendesain tol laut sebagai salah satu program infrastrukturnya. Membangun tol laut bukanlah membangun jalan raya di laut, tetapi menyediakan kapal-kapal besar untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Tol laut merupakan konsep distribusi melalui laut yang menghubungkan Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priuk (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat). Tol laut diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia memecahkan ketimpangan antarwilayah. Pemerintah juga mulai membangun ribuan kilometer jalan dan jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara untuk membuat Indonesia lebih terhubung dan mengurangi ketidaksetaraan.

Sebagaimana perkembangan infrastruktur energi dan transportasi, perkembangan TIK di Indonesia juga menghadapi persoalan yang sama. Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pembangunan TIK antarwilayah di Indonesia masih sangat timpang. Di Provinsi DKI Jakarta IP-TIK adalah sebesar 7,41 pada 2016, sedangkan di Provinsi Papua hanya sebesar 2,41 pada 2016. Jika dilihat lebih saksama, hanya terdapat sembilan provinsi yang memiliki IP-TIK yang lebih tinggi dari rerata nasional, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa gap digital antarwilayah di Indonesia masih sangat tinggi, dan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tingginya tingkat ketimpangan pembangunan TIK ini, diibaratkan oleh David Hill sebagai gap antara mereka yang memiliki akses Internet dan “*Enter not*” (Hill, 2003, 298).



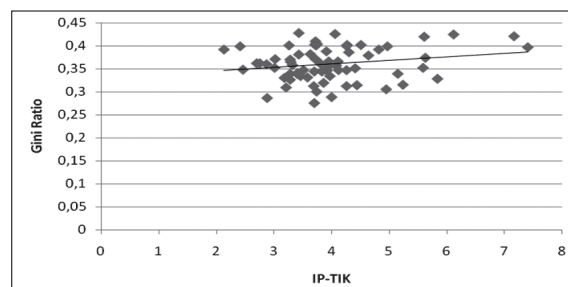
Sumber: BPS (2018a).

Gambar 1. Grafik IP-TIK menurut Provinsi, 2015–2016

Besarnya ketimpangan antarwilayah ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia belum secara merata menikmati kemajuan TIK. Secara geografis, terlihat jelas bagaimana wilayah timur Indonesia, seperti Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur, jauh tertinggal dibanding provinsi-provinsi lain di wilayah barat Indonesia. Perbedaan IP-TIK ini tidak hanya menunjukkan ketimpangan akses terhadap TIK, namun juga perbedaan pola penggunaannya—walaupun perbedaan akses tidak selalu berimplikasi terhadap perbedaan pola penggunaannya (Notten, Peter, Kraaykamp, & Valkenburg, 2009, 551–2). Perbedaan IP-TIK tentunya menghasilkan perbedaan level optimalisasi penggunaan teknologi tersebut. Jika wilayah dengan IP-TIK yang tinggi dapat melakukan akumulasi keuntungan atas teknologi, wilayah itu akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih dibanding wilayah dengan IP-TIK rendah, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan antarwilayah.

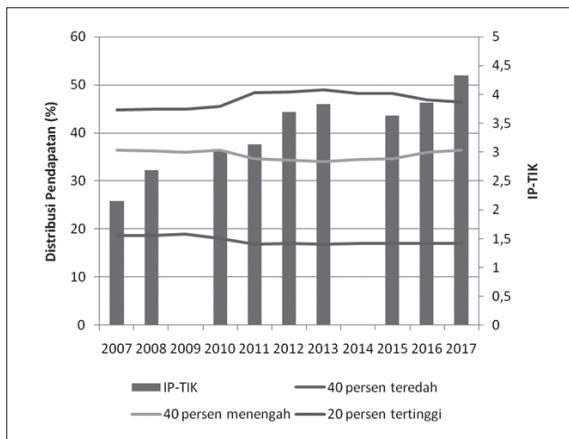
KETIMPANGAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pembangunan teknologi informasi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia, penulis mencoba melihat dengan beberapa indikator. Pertama, melihat hubungan antara IP-TIK dengan Gini Ratio. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara IP-TIK dan Gini Ratio di 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2016 sangat lemah. Nilai koefisien korelasi antara IP-TIK dan Gini Ratio di 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2016 hanya sebesar 0,207. Namun, *trendline* hubungan antara keduanya bernilai positif. Artinya, semakin tinggi nilai IP-TIK, semakin tinggi juga Gini Ratio (lihat Gambar 2).



Sumber: BPS (2018, 2018a) diolah

Gambar 2. Grafik IP-TIK dan Gini Ratio Provinsi di Indonesia, 2015–2016



Sumber: BPS (2015, 2016, 2018b), ITU (2009, 2014, 2016, 2017)

Gambar 3. IP-TIK dan Distribusi Pendapatan Antarkelompok Pendapatan, 2007–2017

Tabel 2. Korelasi antara IP-TIK dengan Distribusi Pendapatan, 2007–2017

Kelompok Pendapatan	Koefisien Korelasi
40 persen terendah	-0,8379
40 persen menengah	-0,3592
20 persen tertinggi	0,6109

Sumber: Diolah berdasarkan data BPS (2015, 2016, 2018b) untuk data distribusi pendapatan, dan ITU (2009, 2014, 2016, 2017) untuk data IP-TIK

Analisis korelasi antara IP-TIK dengan tiga kelompok pendapatan menunjukkan hasil yang lebih detail tentang hubungan antara kemajuan TIK dengan distribusi pendapatan yang dikuasai masing-masing kelompok pendapatan. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis korelasi antara IP-TIK dengan distribusi pendapatan dari 3 kelompok pendapatan (20% tertinggi, 40% menengah, dan 40% terbawah). Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara IP-TIK dengan proporsi pendapatan yang diperoleh kelompok pendapatan 20% tertinggi. Semakin tinggi pembangunan TIK, semakin tinggi juga proporsi yang diperoleh kelompok berpendapatan 20% tertinggi. Sebaliknya, terdapat hubungan negatif yang kuat antara pembangunan TIK dengan proporsi pendapatan yang diperoleh kelompok berpendapatan 40% terendah. Semakin tinggi pembangunan TIK, semakin tinggi juga proporsi yang diperoleh oleh kelompok pendapatan 40% terendah tersebut. Sementara itu, korelasi antara IP-TIK dengan proporsi pendapatan yang diperoleh kelompok berpendapatan 40% menengah adalah negatif namun tidak kuat. Temuan ini

mengindikasikan bahwa IP-TIK berhubungan dengan ketimpangan antarkelompok pendapatan. Hal ini konsisten dengan penelitian Jaumotte dkk (2013) yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

KETIMPANGAN ANTARSEKTOR EKONOMI

Analisis hubungan antara kemajuan teknologi digital dengan ketimpangan antarlupangan kerja dalam tulisan ini didasari asumsi bahwa teknologi memiliki bias terhadap keterampilan (*skill-biased technology*). Seperti diungkapkan Nathalie Greenan, L'Horty, dan Mairesse (2002), di negara-negara maju terdapat kekhawatiran tentang situasi pekerja kurang terampil yang semakin memburuk, baik untuk mendapatkan pekerjaan (seperti di Eropa) maupun untuk mendapatkan upah layak (seperti di Amerika). Konsep bias teknologi pertama kali diperkenalkan dalam analisis ekonomi karena kuatnya kecenderungan proses produksi untuk menjadi lebih intensif modal (*capital intensive*). Hal yang baru dalam perdebatan terakhir seputar bias teknologi, menurut Nathalie Greenan, L'Horty, dan Mairesse (2002), adalah fokusnya pada komposisi keterampilan tenaga kerja. Perkembangan teknologi menyebabkan tenaga kerja terampil memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kesenjangan upah yang lebih besar antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil (Kim, 2012, 35).

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari website BPS, penulis melakukan analisis korelasi antara IP-TIK dengan rata-rata upah bersih sebulan pekerja formal untuk delapan jenis pekerjaan di 34 provinsi di Indonesia dalam periode 2015–2016. Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa IP-TIK berkorelasi sangat kuat dengan rata-rata upah pada empat jenis pekerjaan, yaitu (1) tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, (2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, (3) tenaga tata usaha dan yang sejenis, serta (4) tenaga usaha penjualan. Keempat jenis pekerjaan tersebut biasanya mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Sementara itu, empat

jenis pekerjaan lainnya, tidak memiliki korelasi IP-TIK yang kuat. Analisis tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital lebih menguntungkan bagi mereka yang bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Hal ini mendukung asumsi bahwa teknologi memiliki bias terhadap tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital berkorelasi kuat dengan tingkat ketimpangan pendapatan antarjenis pekerjaan.

Temuan ini selaras dengan Brynjolfsson dan McAfee (2012) yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak secara otomatis menguntungkan semua orang dalam masyarakat, karena pendapatan dan kesempatan kerja menjadi lebih tidak merata. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengunggulkan beberapa kelompok keterampilan di atas yang lain. Penelitian McKinsey menunjukkan bahwa pekerja berketerampilan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipekerjakan dan untuk mendapatkan kenaikan upah (Bughin dkk., 2018). Temuan ini juga menguatkan pendapat Guha bahwa keuntungan revolusi TIK lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang telah mapan, pekerja terampil, profesional, atau pekerja kerah putih (Guha 2000, 2729). Era digital atau revolusi industri keempat membutuhkan tenaga kerja dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan mendalam yang dapat dengan mudah bertransisi

Tabel 3. Korelasi antara IP-TIK dengan Rata-rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Formal

Jenis Pekerjaan	Koefisien Korelasi
Tenaga Profesional , Teknisi dan yang Sejenis	0,7089
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,6095
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	0,6063
Tenaga Usaha Penjualan	0,6128
Tenaga Usaha Jasa	0,3944
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	0,2566
Tenaga Produksi , Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	0,3010
Lainnya	-0,0940

Sumber: BPS (2018, 2018a) diolah

Catatan: Data Rata-rata Upah bersih berdasarkan data Februari 2016 dan Februari 2017, sedangkan IP-TIK berdasarkan data 2015 dan 2016.

ke pekerjaan baru (van Dam, 2018, 25). Tentunya kemajuan teknologi ini akan mengkhawatirkan jika tidak ada peningkatan keterampilan dan penyesuaian institusional dalam masyarakat.

Skill-biased technology tidak hanya terkait dengan perbedaan upah yang diterima tenaga kerja terampil dan tidak terampil, namun juga dapat dilihat pada jenis lapangan usahanya. Jenis lapangan usaha atau sektor ekonomi yang berbeda mensyaratkan teknologi yang berbeda, sehingga pendapatan (*return*) atas teknologi yang diperoleh juga berbeda. Beberapa jenis lapangan usaha memerlukan penggunaan dan penguasaan teknologi yang lebih dibanding jenis lapangan usaha yang lain. Sesuai asumsi ini, sektor ekonomi yang lebih padat teknologi akan memperoleh pendapatan atas teknologi yang lebih besar dibanding sektor ekonomi yang lain.

Tabel 4. Korelasi antara IP-TIK dengan Rata-rata Upah Bersih Sebulan menurut Lapangan Kerja

Lapangan Kerja	Koefisien Korelasi
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	0,1649
Pertambangan dan Penggalian	0,3230
Industri Pengolahan	0,4921
Listrik, Gas, dan Air	-0,0329
Bangunan	0,5905
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	0,6079
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	0,4442
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan atau Tanah, dan Jasa Perusahaan	0,6089
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	0,4752

Sumber: BPS (2018, 2018a) diolah

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis korelasi antara IP-TIK dengan rata-rata upah bersih sebulan menurut lapangan kerja. Data IP-TIK dan rata-rata upah bersih sebulan sembilan lapangan kerja yang digunakan merupakan data 34 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari website BPS. Data rata-rata upah bersih berdasarkan data Februari 2017, sedangkan IP-TIK berdasarkan data 2016. Tabel 4 menunjukkan bahwa IP-TIK berkorelasi kuat dengan tingkat upah pada tiga lapangan kerja, yaitu (1) keuangan, asuransi,

usaha persewaan bangunan atau tanah, dan jasa perusahaan, (2) perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, dan (3) bangunan. Sementara itu, rata-rata upah pada lapangan kerja yang lain tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan pembangunan TIK. Perbedaan tingkat korelasi antara teknologi digital dengan upah rata-rata pada lapangan kerja menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan (*return*) yang diperoleh orang yang bekerja pada sembilan lapangan kerja tersebut. Hal ini mengukuhkan asumsi bahwa pembangunan TIK tidak berkorelasi secara merata terhadap lapangan kerja yang ada di Indonesia.

PENUTUP

Kemajuan teknologi merupakan salah satu pertanda kemajuan peradaban manusia. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat menikmati cara hidup yang lebih mudah. Namun, kemajuan teknologi juga dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang tidak menguasainya. Tulisan ini telah menguraikan hubungan antara perkembangan TIK dengan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perkembangan TIK di Indonesia masih rendah, dan bahkan masih tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana pembangunan infrastruktur, pembangunan TIK antarwilayah provinsi juga masih sangat timpang. Hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan kemajuan TIK belum dapat dinikmati secara merata di negara kepulauan yang sangat luas ini.

Tulisan ini menunjukkan bahwa kemajuan TIK memiliki hubungan positif dengan pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok pendapatan tertinggi, dan hubungan negatif dengan pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok pendapatan terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan TIK lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, dan bukan kelompok miskin.

Selain itu, tulisan ini mengonfirmasi adanya *skill-biased technology*. Teknologi yang berkembang lebih menguntungkan bagi tenaga kerja terampil. Terdapat hubungan positif yang kuat antara perkembangan TIK dengan upah yang diterima pekerja dengan keterampilan lebih

tinggi, dan tidak dengan keterampilan rendah. Hubungan positif yang kuat juga ditunjukkan antara perkembangan TIK dengan upah yang diterima oleh pekerja yang berada dalam sektor-sektor ekonomi atau lapangan kerja yang padat teknologi dan membutuhkan keterampilan tinggi.

Temuan penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya (misalnya Hyytinen & Toivanen, 2011; Jaumotte, Lall, & Papageorgiou, 2013; Kim, 2012) yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berhubungan positif dengan ketimpangan ekonomi. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa kemajuan TIK di Indonesia lebih dinikmati para pemain besar yang berhasil mengakumulasi kemajuan teknologi. Kemajuan TIK di negara yang minim inovasi ini lebih menghasilkan apa yang dalam perspektif Schumpeterian disebut *creative accumulation* daripada *creative destruction* atau disrupsi, sehingga menghasilkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Dibandingkan pemain baru yang menggantikan pemain lama dalam perekonomian, para pemilik modal lebih mampu mengkapitalisasi kemajuan TIK.

Indikasi bahwa perkembangan TIK berhubungan dengan tingkat ketimpangan di Indonesia bukanlah untuk menyarankan penghentian perkembangan teknologi untuk pemerataan. Sebaliknya, dengan kesadaran tentang sifat teknologi yang bias keterampilan, pemerintah harus mendorong kapasitas masyarakat dalam inovasi dan pemakaian teknologi jika ingin mendapat manfaat yang lebih besar dari teknologi.

PUSTAKA ACUAN

- Adam, L., & Negara, S. D. (2010). ASEAN-CHINA free trade agreement: tantangan dan peluang bagi Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36, 1–24.
- Aghion, P., Howitt, P., & Violante, G. L. (2002). General purpose technology and wage inequality. *Journal of Economic Growth*, 7(4), 315–345. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/40216070>
- Bach, A., Shaffer, G., & Wolfson, T. (2013). Digital human capital: developing a framework for understanding the economic impact of digital exclusion in low-income communities. *Journal of Information Policy*, 3(3), 247–266. <http://doi.org/10.5325/jinfopoli.3.2013.0247>

- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- BPS. (2015). *Statistik 70 tahun Indonesia merdeka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016, Agustus 19). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2016 mulai menurun. *Berita Resmi Statistik* 79/08/Th. XIX. Jakarta.
- BPS. (2018). Badan Pusat Statistik. Diakses pada 7 Juli, 2018 dari [https://www.bps.go.id/-->link kurang spesifik](https://www.bps.go.id/-->link_kurang_spesifik)
- BPS. (2018a). *Laporan bulanan data sosial ekonomi Juli 2018*. Jakarta.
- BPS. (2018b, Juli 16). *Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2018 Berita Resmi Statistik* 58/07/Th. XXI. Jakarta.
- Breschi, S., Malerba, F., & Orsenigo, L. (2000). Technological regimes and Schumpeterian patterns of innovation. *The Economic Journal*, 110(463), 388–410. Diakses pada? dari <https://www.jstor.org/stable/2566240>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). Race against the machine: how the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Research brief. MIT Sloan School of Management. Diakses pada? dari http://ebusiness.mit.edu/research/Briefs/Brynjolfsson_McAfee_Race_Against_the_Machine.pdf
- Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Wiesinger, A., & Subramaniam, A. (2018). Skill shift: automation and the future of the workforce (Discussion Paper No. May 2018). Diakses pada? dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce --> laman tidak ditemukan>
- Chalmers, I. (1990). Antara tinggal landas dan demokrasi ekonomi: pembangunan kapitalis dan industri kendaraan bermotor. *Prisma*, 7, 3–18.
- Das, K., Gryseels, M., Sudhir, P., & Tan, K. T. (2016, Oktober). Unlocking Indonesia's digital opportunity. *McKinsey & Company*, 1–28.
- Deloitte. (2018). *The fourth industrial revolution is here—are you ready? Deloitte insights*. Diakses pada? dari https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4364_Industry4-0_Are-you-ready/4364_Industry4-0_Are-you-ready_Report.pdf
- Ghosh, A. (1983). Information technology: issues and choices. *India International Centre Quarterly*, 10(2), 227–235. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/23001647>
- Guha, B. (2000). Economic consequences of micro-electronic and telecom revolution. *Economic and Political Weekly*, 35(31), 2725–2729. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/4409557>
- Hong, L. O. (1968). Indonesia's economic stabilization and rehabilitation program: an evaluation. *Indonesia*, 5(April), 135–174.
- Hyytinen, A., & Toivanen, O. (2011). Income inequality and technology diffusion: evidence from developing countries. *The Scandinavian Journal of Economics Scand. J. of Economics*, 113(2), 364–387. <http://doi.org/10.1111/j -DOI tidak ditemukan>
- ITU. (2009). *Measuring the information society report*. Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU. (2011). *Measuring the information society report*. Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU. (2014). *Measuring the information society report*. Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU. (2016). *Measuring the information society report*. Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU. (2017). *Measuring the information society report*. Geneva: International Telecommunication Union.
- Jaumotte, F., Lall, S., & Papageorgiou, C. (2013). Rising income inequality: technology, or trade and financial globalization? *IMF Economic Review*, 61(2), 271–309. Diakses pada? dari <http://doi.org/10.1057/imfer.2013.7>
- Jaumotte, F., Lall, S., Papageorgiou, C., & Topalova, P. (2007). IMF survey: technology widening rich-poor gap. Diakses pada 30 Mei 2018 dari <http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sores1010a>
- Jurriens, E., & Tapsell, R. (2017). Challenges and opportunities of the digital “revolution” in Indonesia. *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence, 2020* (Pratama 2016), 304.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kasali, R. (2017). *Disruption: tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Perindustrian. (2018). *Making Indonesia 4.0: Indonesia's fourth industrial revolution*. Jakarta.

- Kim, S. Y. (2012). Technological Kuznets Curve? Technology, income inequality, and government policy. *Asian Research Policy*, 3, 33–49. Diakses pada? dari <http://koasas.kaist.ac.kr/handle/10203/103724>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Nathalie Greenan, L’Horty, Y., & Mairesse, J. (2002). *Productivity, inequality, and the digital economy: a transatlantic perspective*. Cambridge: MIT Press.
- Notten, N., Peter, J., Kraaykamp, G., & Valkenburg, P. M. (2009). Research note: digital divide across borders—a cross-national study of adolescents’ use of digital technologies. *European Sociological Review*, 25(5), 551–560. <http://doi.org/10.1093/DOI> tidak ditemukan.
- Poot, H., Kuyvenhoven, A., & Jansen, J. (1990). *Industrialisation and trade in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricardo, D. (1821). *On the principles of political economy and taxation* (3rd ed.). London: John Murray.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: the rise of capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Sadli, M. (1993). Recollections of my career. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 29(1), 35–51.
- Schwarz, A. (2004). *A nation in waiting: Indonesia’s search for stability*. Singapore: Talisaman.
- Seda, F. (2009). Kebijakan ekonomi pada masa peralihan dari sistem ekonomi terpimpin (Orla) ke sistem ekonomi Orde Baru 1966–1968. Tidak diterbitkan.
- The World Bank. (2014). Reducing inequality in Indonesia.
- Thee, K. W. (2006). Policies affecting Indonesia’s industrial technology development. *ASEAN Economic Bulletin*, 23(3), 341–359. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/41316953>
- van Dam, N. H. M. (2018). *The 4th industrial revolution & the future of jobs*. bookboon.com. <http://doi.org/10.1007/978-3-319-62479-2>
- van Zanden, J. L., & Maarks, D. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800–2010*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wing, T. W., Glassburner, B., & Nasution, A. (1994). *Macroeconomic policies, crises, and long-term growth in Indonesia, 1965–90*. Washington, D.C.: The World Bank.

BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS¹

Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto)**

*)*Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada*
Email: marutiahs@gmail.com

**) *Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada*
Email: budiirawanto@yahoo.com

ABSTRACT

The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News's content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and consumption activity only but also distribution and marketization by the users.

Keywords: *content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0*

ABSTRAK

Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News, salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (witness journalism) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.

Kata kunci: *penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0*

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul "Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, internet menjadi sumber penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Adanya peralihan teknologi internet dari Web 1.0 menjadi Web 2.0 mengubah banyak hal, termasuk cara khalayak menggunakan dan memanfaatkan media. Sebagaimana dituliskan Ritzer (2011) dalam *The McDonaldization of Society* 6, Web 1.0 memberikan pengalaman konsumen yang terbatas pada membaca, menjelajah internet, dan mengonsumsi konten *online*, sementara Web 2.0 meningkatkan kemampuannya dengan memungkinkan khalayak ikut menulis dan memproduksi konten. Keterlibatan khalayak tidak lagi hanya sebatas menjadi konsumen, namun juga produsen yang dikenal dengan istilah prosumer. Tulisan ini adalah upaya kritis terhadap praktik-praktik produksi-konsumsi (prosumsi) yang dilakukan oleh masyarakat pengguna internet era Web 2.0, khususnya yang dilakukan oleh para penulis konten dalam platform *news aggregator* UC News yang menjadi objek penelitian ini.

Menurut Ritzer dan Jurgenson (2010), kehadiran Web 2.0 tidak sekadar mengubah wajah media *online* dan pola kerja di dalamnya, tetapi juga menciptakan bentuk kapitalisme baru secara signifikan, yakni kapitalisme prosumer. Jika dahulu bentuk kapitalisme terpisah sebagai kapitalisme produksi dan kapitalisme konsumsi, dengan kaburnya batas antara produksi dan konsumsi, keduanya tak lagi bisa dipisahkan. Di dalam kapitalisme prosumer, kontrol dan eksploitasi memiliki karakter berbeda dengan bentuk kapitalisme yang lain. Manipulasi dan eksploitasi yang terjadi di dalamnya tidak tampak dengan jelas, namun berjalan dengan lebih canggih. Di dalam kapitalisme prosumer, terdapat tren pekerja yang tidak dibayar atau bekerja dengan bayaran rendah. Hal ini terutama banyak dialami oleh pekerja digital. Sebelum masuk pada pembahasan praktik prosumsi dan kaitannya dengan kapitalisme prosumer, peneliti akan memaparkan secara singkat mengenai konteks historis *platform* digital di Indonesia.

Titik tolak kemunculan media digital di Indonesia dirasakan secara besar-besaran sejak 1998, tepatnya setelah terjadi transisi demokrasi.

Sebagaimana disampaikan Hill dan Sen (2000), *e-mail lists*, ICQ *chatgroups*, dan *blogs* adalah media-media yang krusial digunakan pada masa-masa reformasi di penghujung 1990-an itu (dalam Tapsell, 2017, 17). Masuknya produk-produk telepon genggam murah dari Tiongkok pada awal 2000-an dan masuknya Blackberry, memungkinkan masyarakat Indonesia mengakses bentuk media partisipatoris, dimulai dari komunikasi pesan singkat atau *short message system* (SMS) dan selanjutnya melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Penting untuk menekankan pandangan Hill dan Sen bahwa penggunaan internet adalah “aksi simbolis dari perlawanan dan sumber penting dari informasi selundupan.” Saat itu, banyak aktivis yang melihat internet sebagai teknologi baru yang ampuh untuk menyalurkan emansipasi warga.

Namun, menurut Tapsell, era digital di Indonesia secara gencar baru dimulai pada 2004. Sejak 2004, media sosial memulai perkembangannya di Indonesia, terutama yang berbasis di Amerika Serikat, contohnya YouTube (2005), Facebook (2006), Twitter (2008), dan Path (2010). Tahun 2004 juga bertepatan dengan pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung dan demokratis oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian menghasilkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden selama dua periode. Platform media partisipatoris semakin menguat selama masa jabatannya (Tapsell, 2017, 18).

Perkembangan teknologi pada dasarnya memberikan kontribusi bagi keberagaman media. Hingga kini, platform media digital jenisnya semakin beragam. Nasrullah membaginya menjadi 11 jenis media digital, yakni situs (*web site*), *e-mail*, forum di internet (*bulletin boards*), *blog*, Wiki, aplikasi pesan, internet “*broadcasting*,” *peer-to-*, the RSS, MUDs, dan media sosial (Nasrullah, 2013, 30–44). Straubhaar dan LaRose (dalam Nasrullah, 2013, 16) mencatat bahwa ada perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal (*mass production*), distribusi massal (*mass distribution*), hingga efek yang berbeda dengan yang ada di media massa. Peralihan teknologi internet Web 1.0 ke Web 2.0 semakin menegaskan perubahan itu. Audiens tidak lagi diposisikan sebagai konsumen yang pasif, namun konsumen sekaligus

produsen (prosumer) aktif. Teknologi Web 2.0 mensyaratkan partisipasi penggunaannya untuk keberlangsungan media. Contoh yang jelas terlihat pada *Facebook* dan *YouTube*. Pengguna kedua platform tersebut dibiarkan memproduksi konten berupa profil dan status sesuai keinginan mereka, sembari mengonsumsi konten-konten yang dibuat pengguna lain. Hal ini berarti di dalam *Web 2.0* terdapat ledakan dramatis prosumsi (Ritzer, 2010, 19).

Hal itu senada dengan pendapat Jan van Dijk (dalam Nasrullah, 2013, 20) yang mengatakan bahwa pada era media interaktif, khalayak dimungkinkan untuk melakukan umpan balik langsung dan bahkan ada transformasi dari batasan antara khalayak dan produsen informasi; khalayak pada era media interaktif bisa menjadi konsumen dan saat itu juga menjadi produsen dari informasi. Oleh karena itu, membicarakan media interaktif di internet atau media siber tidak sekadar membahas persoalan perangkat, melainkan juga melibatkan aspek-aspek para penggunaannya (Nasrullah, 2013, 21). Tanpa khalayak yang terlibat aktif dalam platform media baru, media tak akan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Platform digital yang mengajak dan membutuhkan keterlibatan masyarakat kini semakin populer dan bervariasi, salah satunya adalah *news aggregator*. *News aggregator* adalah situs atau *software* yang mengumpulkan dan menggabungkan berita dari sumber-sumber lain. Rouse (dalam Saputra, 2016) menguraikan agregator sebagai “*an individual or organization that gathers web content (and/or sometimes applications) from different online sources for reuse or resale.*” Definisi tersebut menitikberatkan pada pengumpulan konten dari situs-situs yang menyediakan teknologi *web services* sehingga pengguna dapat mengakses beragam *website* dalam waktu yang lebih cepat (Saputra, 2016).

Beberapa *news aggregator* memilih platform aplikasi yang konten-kontennya hanya dapat diakses secara lengkap dengan diunduh melalui *smartphone*. Beberapa contoh aplikasi *news aggregator* yang berkembang di Indonesia adalah aplikasi BaBe (Baca Berita), UC News, Baca, dan Kurio. Media alternatif baru dalam membaca

berita tersebut mengumpulkan dan menyajikan berita dari situs-situs berita arus utama. Selain itu, sebagian *news aggregator* juga menyajikan konten-konten (tulisan, video, gambar) yang didapat dari masyarakat biasa yang tertarik menjadi kontributor konten. Nantinya, berita dari media-media lain dan tulisan-tulisan dari kontributor warga tersebut akan muncul di halaman *headline* atau pun halaman rubrik dengan sistem algoritma tertentu pada aplikasi pengguna.

Masyarakat yang ingin menjadi kontributor konten pun dijanjikan sejumlah *reward* materi berupa uang, yang dihitung dengan cara berbeda antara masing-masing platform. UC News, distributor konten UCWeb dari Alibaba Group, menghitung *reward* untuk setiap tulisan berdasarkan poin indeks kontributor. Poin ini dihitung melalui penilaian tertentu, seperti kualitas konten, pengaruh pada pembaca, interaksi, profesionalitas, dan keaktifan. Sementara itu, Baca menghitung berdasarkan *revenue sharing* iklan yang masuk untuk setiap konten. Hal ini berbeda dengan BaBe, misalnya, yang menerapkan harga tetap untuk setiap konten yang dihasilkan. Adanya *reward* dalam bentuk uang ini turut menjadi pemicu utama semakin populernya pekerjaan penulis konten di masyarakat.

Dilansir dari Liputan 6.com (“Alasan Penulis,” 2017), UC News menyatakan bahwa konsumsi konten *online* di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 61% pada 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UC News juga melaporkan bahwa konsumsi konten UC We-Media oleh para penulis, blogger, influencers, atau penulis independen lainnya meningkat enam kali lipat pada Desember 2016 dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya.

Tren meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai pengisi konten dalam platform *online* tersebut ditunjang dengan kemajuan teknologi, akses internet, dan ketersediaan variasi platform yang mendukung masyarakat untuk menorehkan pikiran mereka menjadi tulisan digital. Selain itu, keuntungan berupa materi atau penghasilan yang akan didapatkan para pengisi konten, juga menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat. Di samping itu, waktu kerja yang fleksibel dan dapat dikerjakan di mana saja,

dapat mengasah kreativitas serta wawasan adalah kelebihan tersendiri bagi orang yang memilih bekerja sebagai penulis konten atau *freelancer*. Ditambah lagi, motif *personal branding* semakin mengukuhkan ketertarikan para penulis konten yang mampu memperoleh panggung popularitas melalui media yang diisi olehnya.

Kemudian muncul pertanyaan apakah khalayak benar-benar mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan pihak media tersebut. Apakah pekerjaan sebagai penulis konten mendatangkan keuntungan sesuai ekspektasi? Ataukah sebaliknya, tidak semua penulis konten sukses dalam menjalani pekerjaannya meski sudah berupaya keras? Ritzer menerangkan bahwa eksploitasi muncul dengan lebih ambigu dalam kasus *Web 2.0* (Ritzer 2010, 26). Organisasi (seringnya berupa perusahaan) menjadi pemilik sebagian besar sumber daya pada *Web 2.0*, misalnya Amazon, Wikipedia, dan *Facebook*. Produsen konten memang para pengguna, namun keuntungan—atau setidaknya potensi keuntungan—masih dipegang oleh pihak perusahaan. Mereka memberi para pengguna hanya sebagian kecil dari sumber daya produktif.

Bagaimana praktik yang terjadi pada penulis konten UC News? Seperti apa andil mereka dalam aktivitas prosumsi konten-konten di UC News? Satu hal yang menarik adalah sebagian penulis konten merupakan warga biasa yang tidak memiliki bekal ilmu jurnalisme. Hal ini berbeda dengan situs berita *mainstream* yang mengelola berita dari wartawan profesional. Oleh karena itu, proses produksi tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh penulis konten adalah suatu hal yang menarik untuk diteliti. Tidak bisa dipungkiri bahwa penulis konten bukan hanya berperan sebagai produsen, namun juga sekaligus sebagai konsumen yang menggunakan informasi dari sumber-sumber media lain untuk diolah menjadi tulisan baru. Jadi, praktik produksi dan konsumsi (prosumsi) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian terhadap penulis konten di platform digital.

Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis fenomena pekerjaan pengisi konten dalam platform *news aggregator* UC News. Peneliti melihat adanya praktik prosumsi yang signifikan dalam pekerjaan penulis konten tersebut. Hal ini sejalan dengan Ritzer dan Jurgenson (2010) yang

mengatakan bahwa ledakan penggunaan konten *online* saat ini adalah cerminan dari prosumsi yang semakin meningkat. Tren ini kemudian memunculkan bentuk kapitalisme baru, yakni kapitalisme era prosumer. Dalam kapitalisme prosumer, kontrol dan eksploitasi dilakukan dengan karakter berbeda dengan bentuk kapitalisme lainnya (kapitalisme produksi atau kapitalisme konsumsi). Namun, kapitalisme prosumer tidak hanya menampakkan kegiatan prosumsi dan konsumsi yang dilakukan sekaligus oleh para “pekerja.” Lebih dari itu, sistem kapitalisme prosumer menuntut pula para pelaku atau pekerjanya dalam aktivitas distribusi dan marketisasi. Dengan kecanggihan teknologi yang tidak henti berkembang, sifat hegemoni dalam kapitalisme prosumer berlangsung semakin manipulatif.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode etnografi virtual yang dilakukan kepada enam objek penelitian, yakni penulis konten di UC News. Keenam informan tersebut dipilih dengan variasi tingkat keaktifan menulis konten dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Etnografi virtual diharapkan dapat memperkaya temuan-temuan penelitian karena tak bisa dipungkiri bahwa penelitian ini sangat berkaitan dengan kebudayaan digital atau *cyberculture* yang terjadi di ruang maya. Etnografi virtual dapat mengungkapkan data penelitian yang tidak bisa ditemukan melalui observasi partisipatif dan wawancara *offline*.

Merujuk argumen Hine (dalam Wibowo, 2015, 8) dalam melakukan etnografi yang termediasi internet, internet dilihat sebagai budaya di mana para pengguna memanfaatkan internet untuk keuntungan mereka. Namun, perlu dilakukan dua pendekatan dalam melakukan etnografi ini. *Pertama*, melihat internet sebagai sebuah produk budaya (teknologi yang secara kontekstual diproduksi oleh individu tertentu untuk pemenuhan tujuan dan prioritas tertentu). Selain itu, perlu juga melihat bagaimana teknologi dibentuk, dipasarkan, diajarkan, dan dipergunakan. *Kedua*, internet dilihat sebagai artefak budaya. Hal ini berkebalikan dengan pendekatan yang pertama, yakni melihat teknologi apa yang diproduksi, dan bagaimana produk tersebut secara kultural diproduksi. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan.

Pada tahap pengambilan data, peneliti menyebarkan daftar pertanyaan terbuka berisi 35 pertanyaan kepada masing-masing informan. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan sebagai data awal yang berlanjut pada wawancara lebih mendalam dengan para informan melalui media *WhatsApp*. Dalam penelitian ini, peneliti tidak sekadar mengamati pola praktik penulis konten dalam melakukan prosumsi pada platform *UC News*, namun peneliti juga ikut membuat akun di *UC News* dan memproduksi beberapa tulisan. Tujuannya agar peneliti memiliki pengalaman yang sama dengan informan dan dapat mengikuti aktivitas para informan melalui akun mereka. Data sekunder peneliti dapat dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di *UC News* serta dokumen-dokumen terkait panduan dan peraturan kebijakan yang ditampilkan *UC News* dalam *dashboard* akun bagi kontributornya.

NEWS AGGREGATOR DAN APLIKASI UC NEWS

Sejak dimulainya era *Web 2.0*, konten-konten yang ada di internet terpusat pada pengguna-pengguna (*audiences*) internet itu sendiri. Arus informasi bergerak sangat cepat dalam jumlah yang begitu massif. Dalam satu dekade terakhir, kita telah melihat banyaknya situs-situs jejaring sosial, berbagai platform blog, serta situs-situs untuk saling berbagi foto dan video. Dengan banyaknya informasi tersebut, di satu sisi kita diuntungkan karena banyaknya pilihan yang tersedia. Di sisi lain, banyaknya informasi tersebut memunculkan kebingungan saking banyaknya pilihan. Kehadiran agregator menjadi penting pada era masifnya informasi saat ini dengan fungsinya untuk mengumpulkan data, mengolahnya, dan menyajikannya bagi netizen. Jika tanpa agregator, pembaca atau *audience* internet akan mengalami kesulitan mengatur informasi yang diinginkan. Seperti diungkapkan oleh Nugraha (2010) dalam *teknojurnal.com*, agregator menjadi komponen yang esensial untuk orang-orang yang menggunakan internet sebagai pusat informasi mereka dan membantu mengoptimalkan waktu serta efisiensi dalam menyerap konten-konten yang ada di internet.

Content aggregator dan *news aggregator* membuat pelayanan yang disajikan internet menjadi lebih terpersonalisasi bagi setiap penggunaannya. Hal ini berkaitan pula dengan analisis industri media yang disampaikan oleh Prof. Clayton M. Christensen,² Profesor Administrasi Bisnis dari Universitas Harvard (Haryanto, 2017). Dia menyebutkan bahwa salah satu dari tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam kondisi media saat ini adalah selalu memikirkan kepentingan audience. Ada dua jenis *content aggregator*, yaitu yang hanya mengumpulkan materi dari berbagai sumber untuk situs web mereka dan yang mengumpulkan dan mendistribusikan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka (Prilani, 2017).

Banyak perdebatan yang muncul di antara para pelaku industri media terkait *news aggregator*. Menurut Alejandro (2010), kompetitor nyata media tradisional ialah *news aggregators*. Senada dengan pernyataan itu, CEO sekaligus pemimpin redaksi *gossipnews.com*, Agustinus Edy Kristianto, mengemukakan sebuah persoalan yang menurutnya kurang mendapat perhatian para pengelola media, yakni *content aggregator* (Margianto & Syaefullah, 2012). Menurut Kristianto, *content aggregator* adalah situs yang mengepul aneka informasi dari berbagai situs lain. Situs ini tidak memproduksi, melainkan hanya mengumpulkan. Secara teknis, praktik pengepulan ini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem *Really Simple Syndication* (RSS) dan sejenisnya. Letak persoalannya ialah ketika situs pengepul itu kemudian mendulang bisnis dari sesuatu yang tidak diproduksinya sendiri.

Dalam skala global, beragam *news aggregator* telah lama bermunculan. Yang paling banyak dikenal adalah *Google News* dan *Yahoo*. *Google News*, misalnya, mengumpulkan artikel-artikel dari *homepage*-nya dan membuatnya mampu dibaca dengan fungsi pencarian. Halaman pengepul itu lantas menghasilkan iklan bagi *Yahoo* dan *Google*. Contoh lainnya adalah *huffingtonpost*.

² Majalah *Nieman Reports* dalam edisi Musim Gugur (Fall) 2012, dengan judul besar “Be The Disruptor,” mengangkat laporan utama berupa wawancara dengan Prof. Christensen. Wawancara dilakukan oleh wartawan David Skok, seorang *Nieman fellow* yang juga wartawan *globalnews.ca* asal Kanada.

com dan *thedailybeast.com*, yang menawarkan agregasi dari reportase original dan komentar-komentar. Dalam sebuah kesempatan, bos media, Rupert Murdoch, pernah menyinggung soal ini. Menurutnya, *Google* seharusnya membayar setiap berita yang dicomot dari sejumlah media milik bos *starnews* itu (Margianto & Syaefullah, 2012, 46)

Di Indonesia, beberapa contoh aplikasi *news aggregator* yang berkembang adalah *UC News*, *BaBe* (Baca Berita), *Baca*, *Kurio*, *Flipboard*, *Feedly*, dan *Newsloop*. Seperti dilansir dari *Sindonews.com*, tujuan pembentukan platform *news aggregator* ialah menyederhanakan pencarian berita dan informasi (dalam Lesmana, 2016). Beberapa *news aggregator* menyediakan fasilitas berupa aplikasi yang dapat diunduh dalam *smartphone*. Pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut disuguhkan konten berita dan informasi yang sebagiannya muncul sebagai notifikasi pada layar *smartphone*. Melalui sistem algoritma tertentu, *news aggregator* menampilkan tema-tema konten yang disukai pengguna dan menyaring konten yang tidak menarik bagi mereka.

Sebagaimana dituliskan Kevin Skaggs (2012), pelayanan *news aggregator* bersifat lebih personal dengan adanya kompetisi sistem algoritma dan kurasi editor yang muncul dalam *smartphone* setiap orang secara berbeda-beda. Pengguna dapat mengakses banyak konten, baik berupa tulisan, berita, video, atau *podcasts* dari banyak sumber hanya dengan membuka sebuah platform. Mesin algoritma yang bekerja dan atau rekomendasi editor membuat konten-konten yang muncul adalah yang sesuai dengan kecenderungan masing-masing pengguna, lewat statistik yang terekam dari hasil penjelajahan mereka di internet.

News aggregator berbeda dengan media tradisional jika ditinjau dari sistem produksi konten. Jika media tradisional masih mengandalkan wartawan—dengan pembekalan ilmu jurnalistik, kode etik, dan beragam aturan tentangnya—untuk memperoleh berita, *news aggregator* tidak melakukan hal itu. *News aggregator* ialah sebuah *platform* berupa situs atau *software* yang mengumpulkan konten-konten berita dari sumber-sumber media lain. Beberapa

news aggregator melibatkan masyarakat biasa yang cenderung tidak menempuh pembekalan pengetahuan jurnalistik sebagai kontributornya. Tulisan-tulisan yang diproduksi oleh para penulis konten dalam platform *news aggregator* hampir seluruhnya bukan tergolong karya jurnalistik, melainkan sangat beragam, misalnya tulisan opini dan pengalaman pribadi yang menarik. Namun, sebagian tulisan menyerupai produk jurnalistik karena penulisnya melakukan praktik peliputan.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017,³ terdapat 143,26 juta pengguna internet di Indonesia dari total populasi penduduk sebesar 262 juta orang. Dalam persentase, penetrasi pengguna internet di Indonesia tersebut berjumlah 54,68%. Dari sisi kepemilikan perangkat untuk akses internet, sebanyak 25,72% menggunakan perangkat komputer/laptop. Sementara itu, hampir dua kali lipat lainnya, yakni 50,08%, memiliki perangkat *mobile* berupa *smartphone/tablet*. Layanan yang paling sering diakses berturut-turut dalam tiga besar adalah *chatting* (89,35%), *social media* (87,13%), dan *search engine* (74,84%). Alasan utama pengguna mengakses internet dalam bidang edukasi ialah untuk membaca artikel, yakni sebesar 55,30%. Angka statistik ini turut mendukung semakin tingginya pengguna *news aggregator* di Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan praktik prosumsi yang terjadi pada para penulis konten di salah satu platform *news aggregator*, yakni *UC News*. *UC News* merupakan lini bisnis *news aggregator* dari *UC Browser* (Perdana, 2016). Pemain asal Tiongkok tersebut sebelumnya sudah terkenal dengan aplikasi browser-nya yang konon sudah memiliki pengguna aktif bulanan di seluruh dunia mencapai 420 juta orang. Dalam hal permodalan, *UC News* mendapat investasi 30 juta US\$ (sekitar Rp400 miliar) dari induk perusahaan mereka *UC Web* (Pratama, 2017). Jumlah tersebut masih lebih tinggi dibanding kompetitor *news aggregator* lain yang juga populer di Indonesia, yakni *Baca*. *Baca* mengumumkan investasi sebesar 10 juta US\$ (sekitar Rp130 miliar) untuk mengembangkan *platform* menulis yang mereka miliki, yakni *Nulis*.

³ Data diunduh dari situs APJII (2017).

UC News memiliki keunggulan lain dari sisi banyaknya pengunduh. Dari data yang dirangkum App Annie (2017), dalam publikasi yang diterbitkan pada Januari 2018 tentang peringkat tertinggi aplikasi *mobile* paling banyak diunduh di Indonesia, UC News menduduki urutan kesepuluh. UC News menjadi satu-satunya aplikasi berbentuk *news aggregator* murni—dalam daftar yang sama ada aplikasi Line yang juga memiliki platform *news aggregator*, tetapi fungsi utama Line adalah aplikasi *chatting* dan telepon—dalam peringkat sepuluh besar tersebut. Sementara itu, aplikasi pendahulunya yang masih berada dalam satu induk perusahaan Alibaba Group, UC Browser, berada pada peringkat keempat.

PRODUKSI-KONSUMSI (PROSUMSI)

Konsep prosumsi pertama kali dikenalkan oleh Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* tahun 1980 (Ritzer & Jurgenson, 2010). Sejak masa pra-industri, prosumsi telah dimulai. Toffler menyebutnya sebagai gelombang pertama (*first wave*). Masyarakat agrikultur saat itu mengonsumsi apa yang mereka produksi. Mereka bukanlah produsen ataupun konsumen seperti dalam pengertian kita sekarang karena itu mereka dapat dijuluki “prosumer” (Toffler, 1980,

266). Kemudian, pada tahap gelombang kedua (*second wave*), revolusi industri membuat adanya pemisahan kedua fungsi itu dan melahirkan apa yang sekarang kita sebut sebagai produsen dan konsumen. Pemisahan itu membuat penyebaran yang sangat cepat pada pasar atau jaringan nilai tukar. Pada gelombang kedua, masyarakat memproduksi untuk mendapat nilai tukar dan tidak cukup sekadar dipakai saja. (Toffler, 1980, 266–267).

Hari ini kita melihat gelombang kedua mengalami masa krisis. Semakin lama penguasaan yang progresif antara batas produsen dan konsumen semakin terlihat. Terjadi kenaikan yang signifikan pada prosumer yang dijalankan pada pola-pola pasar dalam kehidupan kita. Contoh prosumsi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah mengisi bahan bakar sendiri di pom bensin, munculnya teknologi perbankan elektronik, atau *self-service* di supermarket. Budaya konsumen pasif telah berubah menjadi prosumer aktif. Akibatnya, perusahaan terkaya dan terbesar dunia pun—untuk alasan teknologi dan ekonomi—melakukan akselerasi peningkatan prosumer (Toffler, 1980, 267–270).

Dalam artikel *Production, Consumption, Prosumption; The Nature of Capitalism in The*



Sumber: App Annie (Januari 2018)

Gambar 1. UC News berada dalam peringkat ke-10 sebagai aplikasi *mobile* paling banyak diunduh di Indonesia

Age of The Digital 'Prosumer,' Ritzer & Jurgenson (2010) mengatakan bahwa prosumsi terdiri dari dua hal, yaitu produksi dan konsumsi, serta hanya berfokus pada salah satu di antara keduanya. Dengan terjadinya ledakan pada penggunaan konten *online* saat ini, dapat disimpulkan bahwa prosumsi semakin meningkat. Dalam kapitalisme prosumer, kontrol dan eksploitasi dilakukan dengan karakter berbeda dibandingkan dengan kapitalisme bentuk lain (kapitalisme produksi atau kapitalisme konsumsi). Tren tersebut memunculkan kapitalisme prosumer baru (Ritzer & Jurgenson, 2010).

Secara lebih konkrit, Ritzer (2011) dalam *McDonaldization of Society 6*, memaparkan bahwa pembaruan teknologi internet *Web 1.0* menjadi *Web 2.0*. *Web 1.0* (misalnya, AOL, Yahoo) lebih bersifat sebagai *provider* daripada *user-generated*. Pengalaman yang diberikan *Web 1.0* pada pengguna internet terbatas pada membaca, menjelajah internet (*browsing*), dan mengonsumsi konten *online*. Sementara itu, *Web 2.0* meningkatkan kemampuannya secara signifikan dalam prosumsi sehingga pengguna internet dapat menulis dan memproduksi konten. Dapat dikatakan bahwa *Web 2.0* merupakan bentuk krusial dalam pengembangan *means of prosumption*. Pada kasus *Web 2.0*, pengguna memproduksi apa yang mereka konsumsi (Ritzer, 2011, 234).

Perkembangan teknologi baru memberikan paradigma yang baru pula terhadap bentuk-bentuk ekonomi. Teknologi informasi, jika dipandang sebagai mesin, memberikan kemudahan dalam transformasi informasi itu sendiri menjadi produk (komoditas) dari sebuah proses produksi "*the products of new information technology industries are information producing devices or information processing itself*" (Castells, 1996, 67). Informasi menjadi komoditas yang diperebutkan, baik oleh pekerja, pemilik perusahaan, maupun melibatkan negara (Nasrullah, 2012, 194).

Begitu pula penelitian yang akan berfokus pada aktivitas para penulis konten dalam platform *news aggregator* ini. Sebagian besar penulis konten merupakan warga biasa yang tidak memiliki bekal ilmu jurnalisme. Hal ini berbeda dengan situs berita *mainstream* yang mengelola berita dari wartawan profesional.

Warga biasa menggunakan informasi yang telah media sediakan sebagai komoditasnya. Para penulis konten UC *News* adalah konsumen aktif konten-konten media, sembari bekerja sebagai kontributor untuk media tersebut. Bagaimana proses produksi tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh penulis konten tersebut adalah hal yang menarik untuk diteliti. Tidak bisa dipungkiri bahwa penulis konten juga sekaligus konsumen yang menggunakan informasi dari sumber-sumber media lain untuk diolah menjadi tulisan baru.

DIGITAL LABOR

Internet merupakan ekstraksi dari nilai-nilai keberlanjutan, pekerjaan yang dapat diperbarui, dan pekerja intensif yang ekstrem. Memproduksi *website* yang bagus saja tidak cukup, *website* tersebut harus terus diperbarui demi menjaga ketertarikan pengunjung dan menghindari kekunoan. Lebih jauh, *website* juga membutuhkan peralatan terbaru (manusia dan mesinnya), yang didorong oleh pekerja kolektif, seperti *programmer*, desainer, dan pekerja lainnya. Hasil pekerjaan desainer dan *programmer* terlihat dari *website* yang sukses, dan itu merupakan hal yang menjaga konsumen tetap kembali (Terranova, 2000, 48).

Dalam perjalanan sejarah, pekerjaan kerap kali menemui batasan secara geografis. Para pekerja dan pekerjaan yang dilakukannya tidak terpisahkan, dan kehadiran para pekerja menjadi faktor yang terpenting dibandingkan faktor lain dalam produksi (Graham, Hjorth, & Lehdonvirta, 2017, 136). Namun, perkembangan penggunaan internet telah mengubah banyak hal. Klien, bos, pekerja, dan pengguna akhir produk dapat berlokasi di sudut-sudut berbeda penjuru planet (Graham dkk, 2017, 136).

Menurut Mark Graham dkk., kebangkitan *digital labor* menghasilkan dua tren. *Pertama*, pengangguran dan kondisi kekurangan pekerja menjadi masalah sosial dan ekonomi yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. The International Labour Organisation (2014) mengestimasi antara 2014 hingga 2019 akan ada 213 juta pekerja pasar baru. *Kedua*, kebanyakan bagian dunia dikarakterisasikan dengan perubahan konektivitas yang teramat cepat. Bila 10 tahun lalu hanya kurang dari 15% umat manusia terkoneksi

dengan internet, hari ini lebih dari 40% dari populasi dunia telah terkoneksi dengan internet.

Lebih jauh, Graham dkk menyebutkan empat hal yang perlu diperhatikan terkait pekerja digital. Pertama, *bargaining power*. Unsur utama platform pekerjaan digital adalah berusaha meminimalisasi regulasi hubungan antara pekerja/karyawan dan pemberi kerja (Graham dkk., 2017, 140). Dalam hal ini, para pekerja diklasifikasikan sebagai kontraktor independen. Kedua, *economic exclusion*. Dalam pasar pekerja yang terbatas secara geografis, beberapa segmen populasi harus dikeluarkan dari pasar karena diskriminasi atau pemisahan jabatan. Sebagai contoh, pekerja dapat terdiskriminasi karena berbeda dari basis agama, etnisitas, kemampuan, atau terpisah ke dalam beberapa segmen pasar dalam basis gender dan etnisitas mereka. Platform *digital labor* dapat secara potensial mengubah dinamika ini ke dalam dua jalan, yakni (1) mempersilakan pekerja mengakses geografis pasar yang jauh di mana menjadi minim diskriminasi dan segregasi; (2) mempersilakan pekerja untuk mengakses pasar lokal melalui tudung anonimitas yang dimungkinkan oleh medium digital sehingga menutupi karakteristik yang dapat memunculkan diskriminasi. Ketiga, intermediasi. Karena interaksi langsung antara pekerja dan klien yang mereka fasilitasi, platform *digital labor* sering kali diekspektasikan memungkinkan pekerja mengelakkan beberapa perantara dan memperoleh akses langsung ke lebih banyak permintaan asing. Keempat, pengembangan keahlian dan kemampuan. Pekerjaan dalam platform digital sering kali diasosiasikan dengan disintermediasi dan hubungan potensial dengan *customer* secara lebih cepat, dan sering kali diekspektasikan menghasilkan peningkatan fungsi dan nilai tambah dalam rantai pelayanan.

PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN UC NEWS

UC News merupakan salah satu *news aggregator* yang berkembang di Indonesia sejak 2016. Dalam bentuk aplikasi *smartphone*, UC News menawarkan platform yang menyatukan penyedia konten tradisional dan *new media* dalam satu wadah. Setidaknya ada 16 kategori konten yang ditawarkan dalam platform UC News, misalnya *history*, hiburan, politik, ekonomi, gaya hidup,

humor, inspirasi, dan lain-lain. Melalui sistem algoritma tertentu dan kurasi editor, UC News melacak dan mencocokkan topik yang sedang hangat di Facebook dan Twitter, menentukan *trending topic* sebelum merekomendasikannya kepada pengguna, serta memungkinkan pengguna mengatur konten berlangganan dan memilih sendiri konten yang ingin dibaca.

Tidak seperti media tradisional, UC News bukanlah media yang memproduksi kontennya sendiri. Namun, sesuai fungsinya sebagai *news aggregator* atau penggabung berita, UC News merupakan wadah yang mengumpulkan konten dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber yang digunakan adalah media *mainstream* dan kontribusi warga yang mendaftarkan diri menjadi *content writer/contributor* UC News. Penelitian ini secara spesifik meneliti praktik prosumsi yang dilakukan oleh kontributor UC News dari kalangan warga biasa. Mereka melakukan aktivitas tersebut melalui hubungan timbal-balik dengan pihak UC News. Dalam hubungan timbal balik ini, kontributor tidak sekadar menyetorkan konten, tetapi juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dijanjikan sejak awal oleh pihak UC News adalah *reward* finansial dan keuntungan tambahan yang berbeda diterima oleh setiap kontributor. Berikut profil singkat keenam informan.

Peneliti menemukan bahwa keenam informan merupakan warga biasa yang tidak memiliki latar belakang jurnalistik, tetapi terdapat kesamaan di antara mereka, yakni memiliki rekam jejak di bidang kepenulisan yang cukup kuat. Dari pola yang peneliti amati, setidaknya ada dua cara informan bergabung dengan UC News. *Pertama*, melalui undangan langsung dari pihak UC News. *Kedua*, tidak secara langsung, misalnya melalui informasi dari teman informan. Pihak UC News pada awal kemunculannya pada 2016 gencar mencari kontributor dari kalangan masyarakat untuk platform mereka. Namun, kalangan yang diundang pun riwayat kepenulisan mereka telah melalui pengamatan lebih dahulu, misalnya blogger, pegiat organisasi kepenulisan, atau mantan jurnalis. Dari sini terlihat adanya upaya UC News sedari awal untuk mencari kontributor yang mampu profesional dengan aktivitas menulis serta dapat bertahan lama.

Tabel 1. Profil Informan Penulis Konten UC News

No.	Nama Informan/Profesi	Jenis Kelamin	Bergabung Sejak	Kategori Tulisan	Jumlah Tulisan yang Diterbitkan
1.	Acep/ Jurnalis <i>Freelance</i>	Laki-laki	Agustus 2017	<i>Lifestyle (travel writing)</i>	875 artikel (per 14 April 2018)
2.	Eva/ Penulis, <i>Owner Penerbit Indie</i>	Perempuan	Oktober 2017	<i>Lifestyle (Fashion)</i>	600 artikel (per 10 April 2018)
3.	Ilham/ <i>Freelancer, blogger</i>	Laki-laki	April 2018	<i>Lifestyle(pariwisata)</i>	10 artikel (per 27 Mei 2018)
4.	Moddie/ Penulis, Editor	Laki-laki	30 Agustus 2017	Sosial dan Politik	21 artikel (per 14 April 2018)
5.	Riawani/ PNS	Perempuan	September 2017	Inspirasi	Di atas 1000 artikel (per 14 April 2018)
6.	Yeni/ Penulis, CEO Penerbitan	Perempuan	Desember 2016	<i>Lifestyle (fashion dan kesehatan)</i>	517 artikel (per 18 April 2018)

Sumber:

Dalam perjalanan sejarah, pekerjaan kerap kali menemui batasan secara geografis. Para pekerja dan pekerjaan yang dilakukannya tidak terpisahkan. Para pekerja menjadi yang terpenting kehadirannya dibandingkan semua faktor lain dalam produksi (Graham dkk., 2017, 136). Namun, perkembangan penggunaan internet telah mengubah banyak hal. Klien, bos, pekerja, dan pengguna akhir produk lokasinya bisa berbeda atau berjauhan (Graham, dkk, 2017, 136). Dengan kondisi ini, UC News pun menerapkan berbagai perangkat aturan bagi para kontributornya. Sebagai contoh, peraturan teknis penulisan konten, penambahan dan pengurangan poin yang berbanding lurus dengan keuntungan penghasilan, sistem penjagaan melalui grup-grup *WhatsApp* penulis konten, dan variasi kegiatan lain yang mengundang penulis konten untuk berpartisipasi.

Partisipasi para penulis konten, melalui aktivitas produksi-konsumsi, sesungguhnya saling berjaln dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penulis konten tidak bisa memproduksi tulisan-tulisannya tanpa melakukan konsumsi dalam platform UC News. Kedua kegiatan ini sering kali dilakukan pada satu saat bersamaan. Mereka berpartisipasi dalam memproduksi apa yang dikonsumsi (Beer & Burrows, 2010). Fuchs (2013) menyatakan bahwa gagasan *digital labour* menandakan bahwa waktu yang dihabiskan di platform-platform *online* bukan sekadar konsumsi atau waktu luang, melainkan waktu produktif yang menghasilkan nilai ekonomi. Menurut argumen tersebut, aktivitas mengakses sebuah

situs atau aplikasi *online* pun sudah termasuk kegiatan produktif, dan tanpa disadari, para pengakses “dipekerjakan” dan menjadi *digital labour* karena mendatangkan profit bagi platform tersebut. Setiap waktu konsumsi yang diluangkan dalam bentuk akses internet juga merupakan waktu produktif.

Praktik konsumsi dan produksi yang tidak dapat dipisahkan tersebut semakin jelas terlihat ketika para penulis konten membuat akun. Pada tahapan tersebut, mereka melakukan **konsumsi** akses pada platform UC We-media sekaligus **memproduksi** data pribadi mereka menjadi *database* bagi pihak UC. Berdasarkan hasil wawancara, para penulis konten melakukan hal tersebut dengan senang hati karena mereka tidak hanya menghasilkan konten, namun juga mendapat penghasilan tambahan dari UC News.

Praktik produksi yang dilakukan para penulis konten UC News semakin menonjol dalam setiap aktivitas yang menghasilkan konten dalam platform UC News, baik berupa konten tulisan panjang/artikel, maupun komentar dan status pada akun media sosial UC News mereka sendiri. Namun, pada saat yang sama, para penulis konten ini pun melakukan konsumsi akses dengan intensitas yang lebih tinggi. Komentar dan status yang ditorehkan penulis konten juga menjadi pertimbangan penting karena aktivitas tersebut ikut berpengaruh dalam sistem penilaian UC News, yakni sistem poin indeks. Poin indeks berbanding lurus dengan keuntungan platform atau *reward* yang didapat kontributor.

Perhitungan poin indeks dipengaruhi oleh lima dimensi, yaitu kualitas, tingkat pengaruh, tingkat interaktif, profesionalitas, dan tingkat keaktifan. Kiriman para kontributor yang berupa komentar dan status akan memengaruhi penilaian tingkat pengaruh dan tingkat interaktif.

Menarik untuk ditelisik lebih jauh bahwa para penulis konten menulis tema-tema sesuai dengan kategori yang telah dipilih saat mendaftar akun. Jika sering melenceng dari kategori, poin indeks akan turun, dan poin indeks ini berbanding lurus dengan pendapatan. Hal ini hampir sama seperti sistem pembagian *desk* kepada para wartawan dalam media tradisional yang tujuannya adalah tuntutan profesionalitas pekerja dalam setiap bidang. Kebanyakan penulis konten mengolah informasi dari sumber-sumber yang dapat diperoleh dari internet maupun buku-buku atau jurnal untuk dikembangkan menjadi tulisan baru. Jadi, sesungguhnya seorang penulis konten dapat bekerja dan menghasilkan sebanyak apa pun tulisan hanya dengan duduk di depan *laptop*.

Praktik tersebut menunjukkan adanya komodifikasi informasi yang dilakukan oleh para pekerja, dalam hal ini penulis konten. Sebagaimana diungkapkan Castells, teknologi informasi seperti mesin yang memberikan kemudahan terhadap transformasi informasi itu sendiri menjadi produk (komoditas) dari sebuah proses produksi “*the products of new information technology industries are information producing devices or information processing itself*” (Castells, 1996, 67). Informasi menjadi komoditas yang diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk pekerja dan pemilik perusahaan. Dalam praktik ini, tak jarang aturan *copyright* menjadi sangat kabur karena setiap konten media lain (tulisan, foto, dan video) dapat disalin tempel dengan mudah.

Namun, praktik produksi para penulis konten tak hanya itu. Sebagian penulis konten yang menjadi informan dalam penelitian ini juga melakukan praktik *witness journalism* dengan melaporkan langsung apa yang mereka alami. Jenis tulisan yang dapat diterima pada platform UC News memang tidak sebatas berita (*news*). Penulis warga bahkan disarankan menampilkan opini dalam setiap tulisan. Salah satu informan,

Acep, bahkan sempat mendedikasikan waktunya untuk menjadi *travel journalist* dengan berkeliling Indonesia. Acep menuturkan, dengan uang yang didapatnya dari UC News, ia mampu singgah ke beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya, catatan dari perjalanan itu ia bagikan lagi dalam akun UC News miliknya. Ditunjang dengan kemampuan fotografi dan pemandangan indah yang didapat selama *travelling*, akunya berhasil mendapat sambutan meriah. Pengalaman berbeda dialami oleh informan Riawani yang mengisi kategori Inspirasi. Riawani menuturkan, tulisannya untuk rubrik tersebut dihasilkan melalui kronologi, yakni pengalaman sebuah peristiwa, perenungan hikmah atas peristiwa tersebut, kemudian pengolahan menjadi tulisan.

Dalam proses produksi, para penulis konten tidak sepenuhnya bebas dan fleksibel menghasilkan tema-tema tulisan. Untuk mendapat *page views* yang tinggi, penulis konten disarankan mengikuti tema-tema rekomendasi yang diperbarui setiap pekan. Tema-tema rekomendasi itu muncul dalam *dashboard* pemilik akun. Di sini peneliti melihat bentuk kontrol perusahaan terhadap pekerja tetap berlaku melalui mediasi internet. Rekomendasi tema ditentukan oleh platform berdasarkan hal yang sedang menjadi tren di masyarakat sebagaimana terlihat di media sosial. Sesungguhnya, tujuan utama dari setiap konten yang dihasilkan *news aggregator* adalah mengejar *traffic*. Perusahaan *news aggregator* pun mengontrol para kontributornya untuk tetap menulis sesuai jalur yang akan menguntungkan *traffic*. Hampir semua proses ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern terintegrasi dengan internet karena setiap manusia kini berlomba-lomba dalam kecepatan dan kepraktisan (Terranova, 2000, 47) Lebih lanjut, menurut Terranova, pekerjaan kalangan *knowledge worker* pun meluas pada berbagai jenis *digital labor* yang membutuhkan keahlian untuk menjalankan bisnis yang termediasikan melalui internet.

MELAMPAUI PRODUKSI DAN KONSUMSI

Dalam fenomena *web culture* yang mengedepankan aspek partisipatoris konsumen, prosumsi

adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Begitu pula yang terjadi pada penulis konten *UC News*, antara produksi-konsumsi saling berkelindan. Pemilik *news aggregator* mendesain agar aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pekerja dapat diambil alih konsumen sendiri. Namun, peneliti menemukan kekhasan dalam konsep *user-generated content* yang diterapkan oleh *UC News* melalui program *UC We-Media* ini. Kekhasan tersebut adalah bahwa *UC News* tidak hanya mensyaratkan kegiatan produksi dan konsumsi para kontributornya, tetapi juga aktivitas distribusi dan marketisasi.

Pada beberapa abad terakhir ini, sistem ekonomi dunia didominasi oleh kapitalisme. Pada tahun-tahun awal kemunculannya, kapitalisme didominasi oleh produksi, terutama dengan dibangunnya pabrik-pabrik. Bertahun-tahun setelahnya, fokus kapitalisme tergantikan oleh konsumsi, misalnya hadirnya *mall* perbelanjaan. Premis yang dibangun oleh Ritzer, ekonomi kapitalis (bahkan sebelum atau ekonomi non-kapitalis) selalu didominasi oleh prosumsi. Seiring kemajuan teknologi, khususnya dengan kemunculan *Web 2.0* dan generasi setelahnya, muncul terminologi kapitalisme prosumer (Ritzer & Jurgenson, 2010, 14).

Sementara itu, Tapscott dan William melihat bahwa prosumer merupakan bagian dari model '*wikinomic*⁴' baru di mana bisnis memosisikan konsumen untuk bekerja (Ritzer & Jurgenson, 2010, 17). Situs *web* telah memungkinkan para pengguna amatir mengakses alat komunikasi kelas dunia dan pasar dunia. Fenomena tersebut agaknya cukup menjelaskan apa yang terjadi pada para penulis konten sebagai bagian dari pekerja digital. Sebagian besar penulis konten *UC News* merupakan pengguna amatir yang bekerja dari jarak jauh sehingga atasan dan pekerja tidak pernah bertemu sebagaimana dalam kantor tradisional.

Namun, hal itu tidak menjadi penghambat mereka memproduksi konten setiap harinya, bahkan ada yang memilih pekerjaan ini sebagai

pekerjaan utama. Dari apa yang peneliti temukan, praktik pekerjaan para penulis konten tidak berhenti pada prosumsi saja, melainkan juga praktik distribusi dan marketisasi secara produktif. Hal ini dapat dipandang sebagai kekhasan yang terjadi pada penulis konten *UC News*. Distribusi dan marketisasi ini dilakukan oleh penulis konten dengan cara membagikan tautan tulisan mereka ke berbagai media sosial selain *UC News*. Mereka dengan sukarela dan senang hati melakukan hal tersebut dengan tujuan meningkatkan *page view* yang tentu berdampak pula pada *traffic* dan monetisasi iklan tulisan mereka.

User-generated content merupakan strategi untuk menghasilkan *traffic* sebanyak mungkin untuk akhirnya mendapatkan keuntungan dari pengiklan berdasarkan aktivitas yang terjadi di ruang siber (Turner, 2010, 129). Dengan sistem poin indeks yang diterapkan *UC News*, terdapat lima dimensi penilaian yang dipersyaratkan bagi para kontributor, dua di antaranya dimensi pengaruh dan tingkat interaktif. Keduanya secara tidak langsung menuntut penulis konten untuk membagikan tautan tulisan mereka seluas-luasnya demi menaikkan kedua poin tersebut. Berikut ini panduan untuk menaikkan kedua poin indeks yang terdapat dalam *dashboard UC News*.

Untuk Pengaruh:

1. Menarik pengguna untuk membaca konten Anda.
2. Mengurus para pengikut Anda, tingkatkan kesetiaan mereka.
3. Jangan menerbitkan konten yang dapat membuat pembaca kecewa.
4. Secara aktif dan berkala menerbitkan konten berkualitas.
5. Konten berkualitas tinggi akan menarik pembaca untuk klik dan membaca.

Untuk Interaktif:

1. Berikan lebih banyak topik untuk menarik perhatian dan diskusi dari pembaca.
2. Secara aktif membalas komentar dan berkomunikasi dengan pembaca.

Sebanyak lima dari enam informan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka aktif menyebarkan tautan tulisan-tulisan dari *UC News*. Kelima informan mengaku selalu membagi tautan tulisan mereka ke media lain yang dapat menggaet lebih banyak pembaca, tetapi dalam

⁴ *Wikinomic* adalah istilah yang dicetuskan Don Tapscott dan Anthony Williams pada 2006 untuk menggambarkan upaya kolaborasi yang lebih murah dan mudah melalui internet. Upaya ini dimungkinkan karena situs *web* membuat pengguna amatir memperoleh akses terhadap alat komunikasi kelas dunia dan pasar dunia.

intensitas yang berbeda. Moddie, contohnya, hanya menyebarkan tautan tulisannya di UC *News* ke akun *Twitter* dan beberapa *WhatsApp* group miliknya. Informan lain, Eva, sangat aktif menyebarkan tautan tulisannya ke berbagai akun media sosialnya, yakni *Facebook*, *Line*, *Google Plus*, *WA story*, dan tujuh *WhatsApp* group yang dia ikuti.

Bagi perusahaan platform *online*, konten memiliki nilai jual yang ditawarkan kepada dua pihak, yakni pembaca dan pengiklan. Aktivitas distribusi konten yang dilakukan para penulis konten tersebut, selain dapat menaikkan poin indeks dan pendapatan mereka sendiri, sudah tentu pula mendatangkan keuntungan yang besar bagi platform UC *News*. UC *News* sebagai platform menciptakan sistem kolaborasi. Sistem tersebut menjadi strategi bagi marketisasi platform mereka secara masif dan cuma-cuma.

Perusahaan media maupun platform *online* telah mempertimbangkan bagaimana khalayak memandang media. Konsumen lama dalam media tradisional akan cenderung diam, lain halnya dengan konsumen baru yang lebih mudah terkoneksi satu sama lain (Jenkins, 2006). Jejaring antarplatform adalah tambang yang sangat luas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Platform *online* dewasa ini pun hampir seluruhnya didesain dengan model media sosial untuk menjangkau seluas-luasnya partisipasi para prosumer aktif.

ANTARA FLEKSIBILITAS DAN EKSPLOITASI

Dalam melakukan pekerjaan sebagai prosumer, para penulis konten mendapatkan fleksibilitas. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu alasan para penulis konten bersedia bergabung menjadi kontributor platform *online*, termasuk UC *News*. Kemudahan kerja dan berbagai keuntungan lain yang mereka dapatkan dari aktivitas menulis di UC *News*, menjadi alasan lain para penulis konten ini bertahan dalam pekerjaannya. Namun, keuntungan finansial yang dihasilkan tidak begitu besar. Informan dengan intensitas menulis satu tulisan setiap hari menghasilkan sekitar 100–200 US\$ setiap bulan, atau Rp1.400.000–Rp2.800.000 setelah mengumpulkan puluhan ribu *follower* UC

News dan setelah melampaui minimal empat bulan aktif menulis di UC *News*.⁵ Pada satu hingga tiga bulan pertama, semua informan mengatakan aktivitas menulis mereka belum menghasilkan pendapatan sedikit pun.

Dalam sistem kerja tradisional, pengalaman para penulis konten mirip dengan sistem kerja magang di perusahaan, yakni para pekerja pemula bekerja tanpa dibayar. Mereka dengan sukarela melakukan hal tersebut demi mendapat batu pijakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Para penulis konten pun mengalami hal tersebut. Praktik yang terjadi adalah sebagian besar penulis konten yang bertahan dimasukkan ke grup *WhatsApp* bersama sejumlah penulis konten lainnya oleh pihak manajemen UC *News* yang juga memasukkan perwakilannya ke grup tersebut. Melalui grup tersebut, pertanyaan-pertanyaan teknis penulis konten dalam menghasilkan karya dapat terjawab. Selain itu, sering kali terjadi praktik transfer pengetahuan saat para penulis senior, yang sudah merasakan pendapatan dari kontribusinya di UC *News*, membagikan pengalaman kepada para penulis pemula dan terinspirasi karenanya.

Hesmondhalgh (2010) mengatakan bahwa banyak usaha dilakukan para pekerja kreatif untuk mendapatkan batu pijakan di dunia industri budaya. Menurut Casilli (2017), pekerja digital adalah rangkaian kesatuan dari tanpa bayaran, bayaran rendah, dan bayaran mengesankan yang didapat dari pekerjaan manusia. Isu yang perlu dimunculkan dalam budaya konsumsi partisipatoris ini, menurut Thrift dalam sebuah publikasi pada 2005, adalah *knowing capitalism* atau mengetahui kapitalisme (Beer & Burrows, 2010, 9). Informasi yang diproduksi oleh konsumsi partisipatoris menghasilkan bentuk transaksi data sehingga perusahaan dapat “memanen” dan “menambang” data yang tersedia tersebut.

Dalam praktik kerja tradisional, para pekerja magang harus memasukkan berkas yang menunjukkan kapabilitasnya (ijazah dan berbagai sertifikat) atau mengikuti tes tertentu. Tidak demikian halnya dengan praktik pekerja digital. Praktik pekerja digital tidak mensyaratkan apa-apa, kecuali kemampuan menggunakan internet

⁵ Pengamatan peneliti terhadap para informan.

dan modal berupa alamat *e-mail* untuk membuat akun. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan kapitalisme prosumer. Sistem kapitalisme mampu menyerap peluang tenaga kerja gratis dari prosumer dalam *Web 2.0*. Kapitalisme mampu mengeksploitasi konsumen dan bahkan dapat menghasilkan profit yang lebih besar daripada mengeksploitasi pekerja yang dibayar (Fuchs, 2010; Ritzer & Jurgenson, 2010). Namun, apakah para penulis konten pantas disebut tereksploitasi? Telah diketahui bahwa mereka melakukan pekerjaannya dengan perasaan senang dan tanpa paksaan. Peneliti pun menanyakan mengenai layak atau tidaknya imbalan yang didapat oleh para penulis selama mereka bergabung di *UC News*, berikut komentar mereka:

Untuk bonus-bonus sekarang makin sedikit, dibilang layak sepertinya dari pandangan saya yang merasakan betapa sulitnya capai target *view*, sudah tidak layak. Saya juga ditawari nulis iklan kerjasama sudah empat kali nulis, tawarannya lumayan, tapi dari awal sampai sekarang belum ada *fee* turun. *Overall* aku masih puas menulis di *UC*, walaupun pendapatan naik turun (Acep⁶).

Lumayan. Lebih terampil menulis cepat. Keterampilan menulis meningkat tajam. Belajar nulis yang dibayar ya di *UC* (Eva⁷).

Kalo aku sih enggak [layak], ya. Tapi beberapa penulis di *UC* ada lho yang merasakan keuntungan. Mereka kemarin bisa sampai 1000 dollar (Moddie⁸).

Saya belum menekuni *UC* secara total... Masih *side job*. Sejauh ini puas. Sistem pembayaran lancar (Yeni⁹).

Komentar-komentar tersebut menunjukkan keragaman pendapat mengenai kelayakan imbalan yang penulis konten dapatkan dari *UC News*—meski sebagian besar mengatakan puas. Ukuran eksploitasi juga perlu dikaji dari

definisi eksploitasi itu sendiri. Hesmondhalgh berargumen bahwa istilah eksploitasi dapat digunakan untuk mengekspresikan keengganan saat seseorang memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya pribadi (Hesmondhalgh 2010, 274). Namun, bila untuk digunakan dalam penelitian, agaknya harus dilakukan pendekatan analitis yang lebih tepat. Dalam publikasinya yang lebih mutakhir, Hesmondhalgh (2015) menerangkan pemahamannya tentang eksploitasi. Gagasannya tentang eksploitasi memiliki dua pokok persoalan. *Pertama*, pemahaman atas ketidakadilan keuntungan. *Kedua*, pemahaman atas kesengsaraan yang dihasilkan darinya. Hesmondhalgh lebih fokus pada persoalan kedua dibanding yang pertama. Tradisi Marxian menawarkan masukan berharga bagi basis sistematis eksploitasi, juga perlu digabungkan dengan gagasan yang lebih biasa dari apa yang benar-benar terjadi pada kehidupan manusia.

Kembali pada persoalan para penulis konten, jika dilihat dari sisi profit, aktivitas yang dilakukan mereka membawa keuntungan bagi pemilik media atau pihak *UC News*. Bukan hanya sebatas melakukan produksi dan konsumsi atas konten, para penulis konten pun dibuat gencar mendistribusikan tautan konten mereka, didukung dengan teknologi jaringan antarplatform digital yang sangat luas. Hal itu menjadi bentuk marketisasi yang tidak memakan biaya dari pihak perusahaan, dan secara tidak sadar, prosumer tereksploitasi untuk keuntungan perusahaan.

Pada satu sisi, tujuan banyak perusahaan *Web 2.0* adalah menciptakan dan meningkatkan kualitas situs mereka. Pada sisi lain, prosumer sangat menyukai aktivitasnya dan tidak merasa dimanipulasi pihak kapitalis (Ritzer & Jurgenson, 2010, 25). Menurut Tapscott dan William, berdasarkan analisis Wikinomics, mengatakan bahwa para prosumer tereksploitasi adalah hal yang berlebihan (Ritzer & Jurgenson, 2010, 26). Namun, benarkah demikian? Eksploitasi pada kasus *Web 2.0* semakin ambigu. Pengguna adalah juga produsen, namun keuntungan, atau setidaknya potensi untuk keuntungan, masih menjadi milik korporasi.

⁶ Wawancara dengan informan Acep melalui *Whatsapp* pada 10 Juni 2018.

⁷ Wawancara dengan informan Eva melalui *Whatsapp* pada 4 Juli 2018.

⁸ Wawancara dengan informan Moddie melalui *Whatsapp* pada 9 Juni 2018.

⁹ Wawancara dengan informan Yeni melalui *Whatsapp* pada 6 Juni 2018.

PENUTUP

Perkembangan internet memberikan kontribusi bagi keberagaman media dan perluasan partisipasi khalayak. Peralihan teknologi internet *Web 1.0* ke *Web 2.0* semakin menegaskan perubahan itu. Pada era *Web 2.0*, khalayak bukan lagi hanya konsumen pasif, namun mereka adalah prosumer yang aktif. Platform digital yang mengajak dan membutuhkan keterlibatan masyarakat di dalamnya kini semakin populer dan bervariasi, salah satunya *news aggregator*. *News aggregator* adalah situs atau *software* yang mengumpulkan dan menggabungkan berita-berita dari sumber-sumber lain. Tulisan ini mengkaji praktik produksi-konsumsi (prosumsi) yang dilakukan oleh khalayak dalam *news aggregator UC News*, yakni para penulis konten.

Berkaitan dengan posisi para penulis konten yang termasuk *digital labor*, aktivitas prosumsi yang mereka lakukan berkaitan erat dengan kapitalisme baru era prosumer. Peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi isu besar dalam praktik prosumsi para penulis konten. Pertama, konsumsi pada platform *online* mensyaratkan partisipasi dan produksi pada saat yang bersamaan sebab waktu yang dihabiskan di platform *online* bukan sekadar konsumsi atau waktu luang, melainkan waktu produktif. Kedua, prosumsi yang terjadi pada penulis konten *UC News* tidak hanya menggerakkan aktivitas produksi dan konsumsi saja, tetapi meluas pada distribusi dan marketisasi. Ketiga, kontrol perusahaan terhadap para penulis konten sepintas seperti tidak tampak, namun tetap ada dan berjalan lebih natural dengan adanya relasi antarsesama penulis konten dalam sebuah grup Whatsapp. Keempat, eksploitasi dan manipulasi yang terjadi kepada para penulis konten tidak berjalan dengan sederhana.

Kontrol yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para kontributor tidak tampak secara nyata, namun sebenarnya tetap ada dan berjalan dengan sifat yang lebih alamiah. Tentang adanya intervensi dari pihak *UC News*, para penulis konten tampak menerima dengan senang hati dan tanpa komplain. *News aggregator* adalah platform berbasis *user-generated content* yang tidak dapat berjalan tanpa adanya partisipasi khalayaknya. Jadi, strategi menarik partisipasi adalah hal utama yang mesti dipikirkan perusahaan. Kontrol yang bersifat menekan tidak akan dilakukan karena

tidak perlu dan justru bisa menurunkan produktivitas konten. Para kontributor pun merasakan fleksibilitas yang cukup tinggi dan mereka bersedia menoleransi rendahnya bayaran, bahkan tanpa bayaran dari apa yang mereka kerjakan.

Para pengguna *Web 2.0* dan setiap prosumer aktif harus memiliki kesadaran dan bersikap kritis terhadap apa yang mereka lakukan di dunia *online*. Setiap waktu yang dihabiskan di platform *online* bukan sekadar konsumsi atau waktu luang, melainkan waktu produktif yang bernilai ekonomi bagi pihak-pihak tertentu. Teknologi digital akan semakin berkembang, *Web 3.0* dan seterusnya kelak akan berbeda dengan sistem kapitalisme dan praktik prosumsi yang terjadi saat ini. Begitu pula bentuk eksploitasi di dalamnya mungkin akan semakin tidak sederhana.

PUSTAKA ACUAN

- Alasan penulis konten digital akan jadi profesi yang menjanjikan. (2017, Januari 20). *Liputan 6.com*. Diakses pada 12 Oktober 2017 dari <http://news.liputan6.com/read/2832866/alasan-penulis-konten-digital-akan-jadi-profesi-yang-menjanjikan>
- Alejandro, J. (2010). *Journ alism in the age of social media*. Reuters Institute Fellowship Paper: University of Oxford.
- APJII. (tanpa tahun). Hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2017. Diakses pada 28 Juni 2018 dari <https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>.
- Beer, D., & Burrows, R. (2010). Consumption, prosumption and participatory web cultures. *Journal of Consumer Culture*, 10(1), 3–12. London: Sage.
- Castells, M. (1996). *The information age: economy, society & culture, vol. 1: the rise of the network society*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Fuchs, C. (2013). Digital prosumption labour on social media in the context of the capitalist regime of time. *Sage Journals*, 23(1), 97–123. Diakses pada 7 April 2018 dari <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961463X13502117>
- Graham, M., Hjorth I., & Lehdonvirta V. (2017). Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. *Sage Journals* no berapa?

- Haryanto, I. (2017, November 16). Kolaborasi, solusi menghadapi disrupsi industri media. *Katadata*. Diakses pada 7 Juli 2018 dari <https://katadata.co.id/opini/2017/11/16/kolaborasi-solusi-menghadapi-disrupsi-industri-media>
- Hesmondhalgh, D. (2010). User-generated content, free labour and the cultural industries. *Ephemera*, 10(3/4), 267–284.
- Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2011). A very complicated version of freedom: conditions and experiences of creative labour in three cultural industries. *Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts*, 38 (1), 4–20.
- Hesmondhalgh, D. (2015). *Exploitation and media labor: The Routledge companion to labor and media*. Routledge. Diakses pada? dari <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203404119.ch3>
- Hill, D.T., & Sen, K. (2000). *Media, culture and politics in Indonesia*. Melbourne: Oxford University Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture where old and new media collide*. New York: New York University Press.
- Lesmana, D. (2016, Desember 23). Baca news aggregator memudahkan pembaca mencari informasi. *Sindonews.com*. Diakses pada 5 Juli 2018 dari <https://autotekno.sindonews.com/read/1165370/133/baca-news-aggregator-mudahkan-pembaca-mencari-informasi-1482498733>
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2012). *Media online: antara pembaca, laba, dan etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Nasrullah, R. (2012). Kontestasi pemanfaatan media jurnalisme warga antara industri media dan khalayak. *Disertasi*. Program Studi Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada.
- Nasrullah, R. (2013). *Cyber media*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nugraha, F. (2010, Juli 21). Kenapa agregator diperlukan di era web 2.0?. *Teknojurnal*. Diakses pada 4 Juli 2018 dari <https://teknojurnal.com/kenapa-agregator-diperlukan-di-era-web-2-0/>
- Perdana, J. (2016, Agustus 31). UC Browser ekspansi bisnis ke ranah distributor berita. *Marketeers*. Diakses pada 15 November 2017 dari <http://marketeers.com/uc-browser-ekspansi-bisnis-ke-ranah-distributor-berita/>
- Pratama, A. H. (2017, Februari 24). Alasan di balik kian maraknya agregator berita yang membuat platform menulis. *Techinasia*. Diakses pada 5 Juli 2018 dari <https://id.techinasia.com/alasan-di-balik-pembuatan-platform-menulis-oleh-para-agregator-berita>
- Prilani. (2017). Content aggregator: problem etis jurnalisme online di Indonesia. *Nomosleca*, 3 (1), 515–525.
- Ritzer, G., & Jurgenson, N. (2010). Production, consumption, prosumption; the nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer.’ *Journal of Consumer Culture*, 10(1), 13–36. USA: Sage.
- Ritzer, G. (2011). The DeMcDonaldization of society. Dalam *The McDonaldization of Society* 6 (pp. 215–239). USA: Pine Forge Press.
- Saputra, D. F. (2016). Agregator sebagai alat pengembangan koleksi perpustakaan berbasis website. *Pustakaloka*, 8 (2), 201–210.
- Skaggs, K. (2012, Juli 17). What’s new in news aggregation? *The Guardian*. Diakses pada 25 Mei 2018 dari <https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2012/jul/17/what-is-new-news-aggregation>
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia*. London: Rowman and Littlefield International.
- Terranova, T. (2000). Free labor: producing culture for the digital economy. *Social Text*, 63 (18), 33–58. Duke University Press.
- Toffler, A. (1980). *The third wave*. USA: Bantam Books.
- Turner, G. (2010). *Ordinary people and the media: the demotic turn*. London: Sage.
- Wibowo, T.O. (2015). Studi prosumption e-book dalam bingkai sirkuit budaya (fenomena e-book gratis dalam situs membacacepat.com). *Tesis*. Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada.

KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

Widjajanti M Santoso¹

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)

Email: widjasantoso@gmail.com

ABSTRACT

Femininity construction is very apparent in Indonesia's women's movement. It can be discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the "Ibuisme" and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group. Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing 'new' definition of women's participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women's movement that need to be reconsidered thoroughly.

Key words: *femininity, virtual public sphere, women's problem.*

ABSTRAK

Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan "ibuisme" pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menghalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan "baru" terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.

Kata Kunci: *femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan*

¹ Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

PENDAHULUAN

Konstruksi femininitas memainkan peran besar pada status dan peran perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia memiliki masalah representasi. Dalam kajian sejarah, gerakan perempuan kurang diangkat karena hanya sedikit sejarawan perempuan (Rahayu, 2007). Peran perempuan dalam sejarah atau dilihat dalam konteks gerakan, tidak banyak dibahas. Memang ada penulis asing yang memberikan porsi besar terhadap perkembangan gerakan perempuan di Indonesia, namun akademisi yang melihat kontribusi gerakan perempuan dari kacamata Indonesia hanyalah Yanti Muctar, dengan tulisannya yang berjudul *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru* (2016). Yang menyedihkan, buku yang berbasis tesis master ini diterbitkan setelah Yanti Muctar berpulang keharibaan-Nya.

Dalam diskusi tentang konstruksi gender, Ingraham (1994) memperlihatkan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh konsep heteronormativitas. Menurut pandangannya, *“The heterosexual imaginary is that way of thinking which conceals the operation of heterosexuality in structuring gender and closes off any critical analysis of heterosexuality as an organizing institution”* (Ingraham, 1994, 203–204). Ingraham menunjukkan bahwa konstruksi gender tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi tentang jenis kelamin. Ingraham menyebut konsepnya sebagai *heterogender* yang melihat konsep gender melalui kritik terhadap sosiologi dari perspektif *feminist sociology*. Menurut pandangannya, *“... it seems to me that we need to question our assumptions about sex and gender and to how they organize difference, regulate investigation and preserve particular power relations, especially those linked to institutionalized heterosexuality”* (Ingraham, 1994, 214).

Feminist sociology mengkritik posisi keilmuan sosiologi yang melihat jenis kelamin sebagai variabel dan mengusulkan gender sebagai konstruksi sosial supaya dapat memproblematikkan gender sebagai subjek yang mandiri. Ingraham menekankan bahwa *feminist sociology* harus lebih mendalam lagi saat menganalisis posisi tersebut dan mengaitkannya dengan konsep heteronormativitas, yakni konsep yang

mengaitkan norma dan nilai hubungan sosial. Di sini konsep hetero melihat posisi laki-laki lebih tinggi dan dominan. Sejauh ini, heteronormativitas dilihat sebagai posisi yang *taken for granted*, tidak dipermasalahkan, dianggap normal, dan biasa saja. Dengan demikian, konstruksi yang terjadi terhadap gender bias heteronormativitas adalah bahwa gender laki-laki lebih penting dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Dengan menggunakan posisi ini dan melihat dalam konteks heterogender, analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan.

HETEROGENDER DI INDONESIA

Berdasarkan paparan teoretis tersebut, kita melihat bahwa imajinasi tentang gender dan proses konstruksi sosial merupakan dasar untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan kepemimpinan, terutama tentang femininitas. Femininitas adalah konsep untuk menunjukkan suatu konstruksi sosial yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan bentuk tentang keperempuanan. Tabel 1 memperlihatkan konstruksi sosial yang berkaitan dengan femininitas yang dapat dilihat dari perbedaan rezim yang ada di Indonesia (Qibtiyah, 2009). Qibtiyah (2009) melihat perbedaan orde sebagai konteks yang penting untuk melihat pengaruh konstruksi heterogender dalam kontinuitas, dan melihatnya sebagai sisi perbedaan organisasi perempuan.

Dengan demikian, *feminist sociology* dapat melihat femininitas dalam konteks kekuasaan dan kuasa. Analisis ini mengangkat perubahan konstruksi sosial tentang keperempuanan. Saraswati Sunindyo (1998) memberikan gambaran tentang perubahan konstruksi femininitas yang mendudukan perempuan sebagai anak. Melalui foto dan lagu, Saraswati Sunindyo memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam revolusi dimarginalkan dengan peran di garda belakang sebagai pendukung revolusi dari sisi domestik. Perubahan dari masyarakat masa revolusi menjadi masyarakat yang stabil, berdampak pada perubahan dalam memosisikan perempuan sehingga menariknya dari ruang publik untuk kembali ke ruang domestik.

Yulia Suryakusuma (1996) melihat peran perempuan masa Orde Baru dan menamakannya

sebagai ibuisme. Dalam program seperti ini, ibu memainkan peran yang besar (Suryakusuma, 1996; Santoso, 2013). Pada masa Orde Baru, terjadi proses penghancuran gerakan perempuan (Wieringa, 1999). Pengaruh terbesar dari penghancuran ini bukan sekadar hilangnya Gerwani sebagai salah satu bentuk kegiatan perempuan, tetapi juga hilangnya suatu ideologi. Terlepas dari keterkaitannya dengan PKI, Gerwani merupakan gerakan perempuan yang berawal dari ideologi.

Pengaruh ini sangat terasa ketika gerakan perempuan belajar bangkit pada 1980-an. Gerakan ini terbantu dengan adanya perkembangan dunia internasional yang menyadari bahwa posisi perempuan terbelakang. *First Conference on Women 1975* menjadi penting sebagai wahana perkembangan isu perempuan dan kemudian menjadi isu gender yang diakui sebagai kepedulian bersama (Santoso, 2016, 49).

Konsep feminitas dipergunakan oleh Carla Jones (2010), yang menceritakan bahwa pada masa setelah kemerdekaan, konstruksi feminitas Barat menjadi norma dan standar yang berkembang. Pada masa Orde Baru, konstruksinya berbasis kelas sosial priayi. Penekanan pada masa kini adalah *“The family principle wove the metaphor of the nation as a family into state programs for families, making domestic management central to a calm developing collectives”* (Jones, 2010, 275).

Secara individual, perempuan perlu percaya diri, hal ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan sekolah kepribadian. Pelatihan ini mampu memberikan standar perilaku yang perlu dikembangkan oleh perempuan supaya bisa beradaptasi dan tidak memalukan.

Perkembangan femininitas seperti ini disebut *state sponsored*. Perkembangan ini diobjektifikasi dan dinaturalisasi sebagai hal yang patut dilaksanakan oleh perempuan.

Perubahan terjadi setelah 1998 karena jatuhnya rezim Orde Baru. Namun, bangunan patriarkis yang menentukan perempuan tidak hilang sehingga menarik untuk diperhatikan. Dalam hal ini, kelompok kelas menengah perempuan merupakan ujung tombaknya. Pertanyaan Jones adalah *“...how much work— it takes to create the illusion of the natural can we see the alternatives that have been silenced in the process”* (Jones, 2010, 279). Tabel 1 menggambarkan konstruksi perempuan di Indonesia.

Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial tentang perempuan. Pada masa awal berdirinya Indonesia, perempuan merupakan partner laki-laki dalam perjuangan. Posisi yang signifikan ini kemudian berubah, dan menurut paparan Saskia Wieringa (1999), terjadi penghancuran gerakan perempuan secara ideologis dengan mengaitkan Gerwani dengan isu komunisme di Indonesia. Selain itu, tokoh perempuan, misalnya Kartini, direduksi sebagai *performance* saat memperingati hari kelahirannya dan tidak menggarap isu-isu penting yang diperjuangkannya atau yang diperjuangkan oleh perempuan. Akhirnya, Orde Baru mengembangkan posisi perempuan di dalam keluarga yang lebih submisif dengan menekankan peran ibuisme. Dalam konstruksi ini, perempuan mendukung aktivitas militer sehingga ibu-ibu dari kalangan militer bergerak sesuai dengan program negara (Sunindyo, 1998).

Tabel 1. Konstruksi Sosial tentang Perempuan Antar-Orde

	Orde Lama	Orde Baru	Orde Reformasi
Konstruksi Perempuan	Perempuan adalah anak revolusi.	Penghancuran ideologi gerakan perempuan.	Perempuan “jahat,” Perda “anti-perempuan.”
Tokoh perempuan	Sarinah sebagai tokoh perempuan ruang domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritual hari Kartini. • Ibuisme. • PKK. 	TKW/TKI bermasalah.
	Herlina sebagai tokoh perempuan anak revolusi.	Konstruksi perempuan bagian dari militer.	<ul style="list-style-type: none"> • Poligami. • Kawin di bawah umur.
Konstruksi alternatif		Konstruksi perempuan alternatif “Marsinah.”	Susi Pudjiastuti sebagai toko <i>wonder women</i> .

Sumber: Kompilasi penulis dari berbagai bahan, perbaikan dari April 2018

Dalam perjalanan Orde Baru, kasus Marsinah mencuri perhatian dunia. Marsinah adalah tokoh perempuan biasa dan ia adalah buruh yang harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan hak-haknya. Kasus Marsinah pun memperlihatkan pengaruh militer dalam penanganannya.

Pada masa Orde Reformasi di bawah Presiden Jokowi, Susi Pudjiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan. Dalam gambar yang beredar di internet, dia adalah representasi dari *the wonder women* di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan lukisan wajah Susi lengkap dengan atribut yang biasa dipakai pahlawan super, Wonder Woman. Susi muncul sebagai perempuan dengan feminitas yang kompleks, yaitu bertato, bergaya tidak protokoler, dan gemar mengenakan sepatu kets. Dalam pekerjaan, dia berani mengambil keputusan dan melaksanakan penenggelaman kapal. Dalam relasinya dengan laki-laki, dia berani bersaing dan tidak gentar menunjukkan jati dirinya, misalnya dalam olahraga air. Namun, dia juga bisa muncul sebagai perempuan cantik dan menarik.



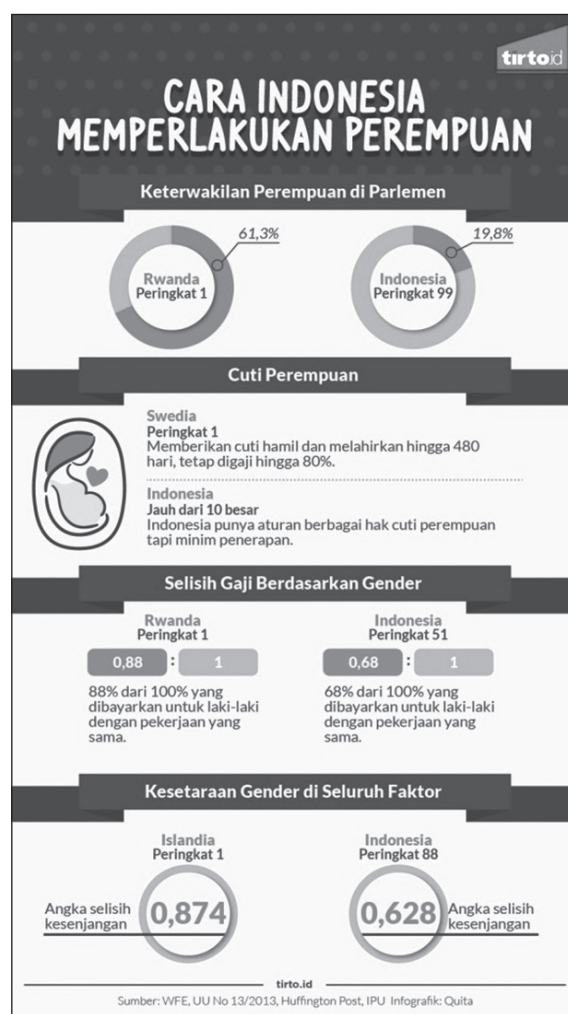
Sumber: Indonesia Imaji (2018).

Gambar 1. Menteri Susi sebagai Wonder Woman

Konstruksi perempuan pada masa Orde Reformasi memang membingungkan karena terdapat kasus ulama yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pada saat perkawinan anak masih menjadi masalah, muncul juga persoalan tentang perempuan pada kasus buruh migran, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mereka. Masalah perempuan menjadi hal yang paradoks karena saat semua lini bergerak menyongsong kebebasan setelah masa pemerintahan otoriter Orde Baru, perempuan

menghadapi serangkaian Perda yang melihat perempuan tidak layak berada di ruang publik, misalnya peraturan tidak boleh keluar malam. Sebagai ilustrasi, Perda Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran (untuk mudahnya akan disebut Perda Anti-pelacuran) yang berdampak pada stigmatisasi perempuan keluar malam. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan adanya 207 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan (Wisnubrata, 2012). Keberadaan Perda semacam ini tidak melihat konteks situasi masyarakat masa kini dan hanya bersandar pada pandangan heteronormativitas tentang perempuan yang tidak sesuai dengan realitasnya.

Pandangan tentang perempuan Indonesia yang beredar di media sosial diwakili oleh gambar 2. Gambar ini menggambarkan posisi perempuan dari sisi keterwakilannya di parlemen



Sumber: Quita dari Tirto.id (2017)

Gambar 2. Perempuan Indonesia dalam Infografis

yang kurang kondusif, masalah pekerjaan yang diwakili oleh aturan tentang cuti, dan penghasilan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Secara nasional, indeks kesetaraan gender di Indonesia juga kurang mencerminkan situasi yang menggembirakan.

Karakter Gerakan Perempuan di Indonesia

Menurut Larasati (2013), perspektif *herstory* harus dikembangkan oleh perempuan melalui pengalaman dan ketubuhannya. Pengalaman perempuan dan sejarah perempuan adalah sesuatu yang harus ditulis sendiri oleh perempuan karena memiliki *standpoint* yang berbeda dari penulisan sejarah pada umumnya. Tanpa usaha penulisan *herstory*, yang terjadi adalah isu *invisibility* perempuan sebagai sumber pengalaman dan perjuangan. Pendekatan yang diangkat oleh Larasati merupakan upaya dekonstruksi pendekatan yang umum. Larasati mengambil contoh kasus Inong Aceh untuk menunjukkan adanya *invisibility* dan melalui kegiatan, mereka mengangkat *invisibility* sebagai upaya penting bagi penteorian perempuan. Jika ini diterima, pengetahuan yang sebelumnya *invisible* dapat diangkat menjadi pengetahuan yang penting.

Menurut Affiah (2014), tantangan gerakan perempuan ada baik secara internal maupun eksternal seperti tertera pada tabel 2.

Namun, terdapat beberapa capaian perempuan dan kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Pendidikan pemilih bagi perempuan;
- 3) Mendorong perempuan untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan dengan mendorong isu kepemimpinan politik perempuan;
- 4) Pemberdayaan perempuan di pedesaan;
- 5) Mendorong akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan;
- 6) Penguatan ekonomi perempuan dalam bentuk koperasi, terutama bagi perempuan pekerja migran dan perempuan eks-prostitusi;
- 5) Mendorong kebijakan pemerintah untuk memiliki anggaran yang memperhatikan keadilan gender (Affiah, 2014).

Qibtiyah (2009) menganalisis organisasi yang berkaitan dengan isu keagamaan dan dikaitkan dengan karakter lain, seperti ciri sekuler dan nasionalis, sampai pada kesimpulan dari karakter gerakan perempuan. Analisisnya sebagai berikut.

1. Gerakan perempuan yang memang muncul dalam dinamikanya dengan organisasi, yang pada umumnya dibentuk oleh para laki-laki.
2. Gerakan perempuan adalah sebagai pendukung, bukan menggarap kepemimpinan gender.

Karakter ini memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap isu makro tentang masyarakat lebih kentara dibandingkan dengan diskusi filsafati tentang perempuan dan gerakannya, atau kepentingan gender perempuan.

Tabel. 2 Tantangan Gerakan Perempuan

Internal	Eksternal
Kemandirian ekonomi kurang dan kesukarelaan lemah.	Keuangan tergantung lembaga donor.
Kaderisasi lemah.	Aparat dan penegak hukum tidak sadar tentang masalah perempuan.
Terdapat banyak faksi sehingga kurang fokus pada aksi dan refleksi terhadap gerakan yang melemahkan gerakan perempuan.	Kekerasan tidak diangkat pada taraf kasus hukum.
Terfokus pada program dan masing-masing kurang berkoordinasi dengan organisasi lainnya.	Kebijakan yang tidak melindungi perempuan “... hingga tahun 2013 berjumlah 342 dengan lebih dari 200 kebijakan berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perempuan.”
	Kebijakan pemerintah pro pasar yang tidak ramah terhadap perempuan.
	Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dan organisasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung poligami.

Sumber:???

Pengalaman masa lalu berkaitan dengan masa kini dan pertanyaan tentang gerakan perempuan untuk masa depan, maka kita bisa melihat bahwa ketiga hal tersebut masih berpengaruh hingga saat ini. Konstruksi sosial tentang gender berperan dalam pengembangan gerakan perempuan dan pertautannya dengan masalah kesejarahan cukup jelas. Konstruksi perempuan berbeda-beda penekanannya, tergantung rezim yang berkuasa. Namun, ada organisasi perempuan yang sejak awal sudah sadar akan adanya perbedaan perspektif dan bergerak berdasarkan ideologi untuk membantu perempuan. Kepentingan perempuan tersegregasi dengan kepentingan lain karena signifikansi kajian perempuan termarginalkan. Dengan demikian, gerakan perempuan perlu memahami tantangan ini dan bergerak bersama menciptakan konstruksi tandingan. Selain itu, masyarakat membutuhkan diskusi tentang hal ini untuk menghindari diri dari konstruksi yang diarahkan oleh kelompok seperti HTI.

IMAJINASI TENTANG PEREMPUAN: BERUBAHKAH?

Bagian ini menangkap beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa konstruksi heterogender berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah imajinasi tentang perempuan itu berubah. Beberapa orang telah mencoba menggambarannya melalui film. Sutradara Lucky Suwandi membuat daur ulang film *Gita Cinta dari SMA* (film yang dibintangi Rano Karno dan Yessi Gusman pada 1979) setelah 38 tahun. Film daur ulang yang dirilis 9 Maret tahun? ini menunjukkan:

Secara kasat mata, polemik-polemiknya memang berbeda. Galih dan Ratna, (gadis) milenial (ini) tak lagi ditentang orangtua karena masalah beda suku, tapi perkara idealisme yang diserempetkan sedikit dengan masalah kaya-miskin. Galih anak tukang katering yang sekolahnya saja mesti dibiayai beasiswa. Sementara, seperti deskripsi pembuka, Ratna adalah keturunan pebisnis kaya. Namun, kalau dilihat lebih cermat, sebenarnya masalah hidup pasangan ikonik Indonesia ini tak berubah-ubah amat (sumber?).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa yang dibahas adalah situasi sosial tentang konstruksi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak

berbeda. Penulis resensi ini sebenarnya memperlihatkan bahwa kurang ada isu-isu baru yang muncul dari situasi sosial yang ada. Yang terjadi adalah serangkaian pelatihan untuk menjadi perempuan yang ideal, seperti diimajinasikan melalui poster tentang domestikasi perempuan pada Gambar 3. Poster yang diperoleh dari grup dalam aplikasi pesan singkat Whatsapp ini berisi imajinasi perempuan ideal dan dukungan mekanisme dalam masyarakat. Kegiatan yang diiklankan dalam poster ini menekankan pada peran baku perempuan dalam perkawinan dan tidak memasukkan isu-isu perempuan, seperti kesetaraan.



Sumber: WA group

Gambar 3. Domestikasi Perempuan

Imajinasi tentang perempuan juga dikembangkan di media sosial, seperti dipaparkan pada tabel 3. Felix Siauw² dipilih berdasarkan tampilannya di grup *Whatsapp*, yang menjadi

² Felix Siauw adalah ustaz muda, mualaf, dan anggota HTI. Akun Instagramnya per 12 April tahun? memiliki 1,9 juta pengikut. Hew (2018) memperlihatkan irisan dakwah dan kegiatannya dengan HTI. Dakwahnya ditujukan bagi anak muda yang kurang terekspose ajaran keagamaan tipe pesantren. Dia menerbitkan banyak buku dan berkegiatan bersama dengan ustaz lain dengan aliran yang berbeda. Banyak orang kurang memahami keterkaitannya dengan HTI, seperti pada postingan ini terdapat fotonya saat berdakwah di Baitul Ihsan, mesjid yang

salah satu ruang publik modern dan dipergunakan untuk mengemukakan pandangan dan pikirannya. Pemikiran yang dikembangkan Felix Siauw merupakan imajinasi tentang perempuan yang berkembang dari sisi kelompok sosial yang berbeda pandangan dengan mereka yang mengembangkan pemikiran kesetaraan gender. Postingan di grup Whatsapp kemudian dikelompokkan dalam empat tema besar, yaitu kaitan pandangannya terhadap keberagaman, pemaknaan kesetaraan gender, kaitannya dengan isme atau aliran, dan kaitannya dengan institusi. Keempat pandangan ini merupakan hasil pembacaan terhadap postingan yang dilontarkan untuk menanggapi isu kesetaraan gender melalui RUU Kesetaraan Gender yang sedang didiskusikan di masyarakat. RUU mengkritik tradisi islami yang berkaitan dengan poligami, kekerasan terhadap perempuan, waris perempuan yang mendapatkan lebih sedikit dibanding laki-laki, serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Tabel 3 memperlihatkan beberapa hal penting yang membuat pandangan Felix Siauw tidak sejalan dengan pemahaman kesetaraan gender. Secara umum, kesetaraan gender dipahami sebagai pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun dalam penjelasannya terdapat dasar pemaknaan yang berbeda. Dasar utamanya adalah kenyataan sejarah bahwa adanya Islam merupakan mekanisme menolong perempuan, yang tentunya didukung oleh Alquran dan Hadis. Isu yang diangkat adalah kritiknya terhadap pandangan bahwa agama merupakan institusi yang mengekalkan pandangan peran tradisional perempuan. Dalam pandangan Felix Siauw, Islam memerdekakan perempuan dan mengangkatnya menjadi mulia. Dalam Islam, peran laki-laki dan perempuan sudah terjabarkan, dan mengikuti pilahan publik dan privat. Lelaki juga diposisikan sebagai pemimpin perempuan untuk mendapatkan surga. Laki-laki boleh memukul perempuan dengan syarat dan ketentuan yang tidak membahayakan perempuan. Posisi laki-laki dan perempuan adalah komplementer terhadap sesama karena saling menolong dan memiliki fungsi berbeda, seperti yang dianalogikan dengan saf laki-laki di depan dan saf perempuan di belakang. Yang menyamakan laki-laki dan

terletak di kantor pusat Bank Indonesia pada September 2016.

perempuan adalah rido untuk mendapatkan kebahagiaan, yang ukurannya adalah bukan materi. Berdasarkan pandangan tersebut, Indonesia tidak memerlukan pemikiran kesetaraan gender, bahkan kesetaraan gender dianggap sebagai upaya yang merusak tatanan yang ada dan menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi.

Felix Siauw mengatakan bahwa sumber pemahaman gender berasal dari cara pikir Yunani dan Romawi, kemudian berkaitan dengan tradisi kristiani. Selain itu, ketertindasan perempuan terlihat sejak *dark ages* di Eropa. Dalam konteks kesetaraan gender, proses tersebut membawa Indonesia ke arah kehancuran, sekularisasi, dan membawa Indonesia ke arah kapitalisme Barat. Pandangan tentang perempuan sebagai dosa asal dan pembawa kegetiran terlihat dalam pemaknaan tentang *witches* yang berbeda dengan *wizard* dan *magician* yang tidak berkonotasi negatif. Pada masa tersebut, perempuan tidak boleh mencari ilmu dan ahli kimia perempuan diperlakukan seperti *witches*, kemudian dihakimi dengan cara dibakar. Perempuan dijadikan objek dapat dilihat dari patung dan lukisan yang telanjang atau tidak berbalut pakaian.

Menurut Felix Siauw, Barat secara umum dan Amerika khususnya, merupakan sumber dari pemaknaan yang buruk dengan menggunakan konsep *taghut*. Dalam pandangan tersebut diperlihatkan cara pemaknaan islami yang bertolak belakang dengan pandangan kapitalis dan liberalis yang ada di balik pandangan tentang gender. Felix Siauw juga memperlihatkan kaitannya dengan pandangan HTI, misalnya pemerintahan khalifah disebutkan memuliakan perempuan.

Berdasarkan pandangan ini, kesetaraan gender didukung oleh pemikiran liberalisme. Pemikiran tersebut dapat dilihat dari beberapa hal penting. Pertama, referensi terhadap Barat dengan ideologi yang dianggap merusak Islam, yaitu demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Kedua, adanya pendukung berupa lembaga donor FF, USAID, dan AUSAID. Pendukung lainnya adalah lembaga di Indonesia, seperti JIL, dan beberapa tokoh, seperti Musdah Mulia, yang mempertanyakan norma Islami tentang waris dan perkawinan melalui *counter legal draft* terhadap UU Perkawinan 1974 (Wahid, 2014), serta gerakan seperti Fikih Lintas Agama (FLA).

Tabel 3. Antitesis terhadap Diskursus Dominan dari Felix Siauw →isi tabel dgn bhs formal

Berkaian dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Alquran dan syariat Islam adalah sumber bias gender (perlakuan tak setara terhadap perempuan).	RUU KKG.	Liberalisme.	Ford Foundation, USAID, AUSAID.
Islam datang, perempuan jauh dimuliakan dibanding hidupnya pada masa yang lalu, dan diangkat derajatnya.	menyamakan hak dan kewajiban antara lelaki dan wanita, membuat semua sama antara lelaki dan wanita.	liberalis mencoba meliberalkan perempuan dari hukum Allah, mensekulerisasi perempuan Muslim, atas nama gender.	JIL, Musdah Mulia, dalam FLA (fikih lintas agama) yang mengusulkan kesetaraan dalam agama Islam.
Islam memandang pria dan wanita berbeda secara jender, namun mendapatkan akses yang sama terhadap kebahagiaan, yaitu rido Allah Swt.	<ul style="list-style-type: none"> • menggugat hak bagi waris lelaki yang dua kali lipat wanita, talak yang ada di tangan lelaki, dan poligami • warisan laki-laki lebih banyak karena harta itu dipakai untuk kepentingan keluarganya, sedangkan warisan bagian wanita untuknya semata. Adil, kan? 	wanita-wanita Barat kapitalis.	<p>Mengapa hanya laki-laki yang boleh boleh?</p> <p>Memangnya perempuan mau punya dikelilingi banyak laki-laki? Fitrahnya tidak seperti itu (memangnya saya wanita apaan)</p>
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (QS9:71).	<p>menggugat kiprah politik perempuan, bolehnya memukul istri dalam syariat Islam, dan mengusulkan aturan-aturan itu dicabut</p> <p>Pemukulan terhadap wanita bukan untuk kekerasan, tapi untuk <i>ta'dib</i> (mendidik) dan pukulan itu juga ada etikanya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bila istri maksiat dan sudah dinasehati, sudah didiamkan, sudah dipisah ranjang, tetapi istri tidak tobat (?) • Pemukulan tidak boleh di kepala, tidak boleh berbekas, dan tidak boleh menyakitkan (?) 	<ul style="list-style-type: none"> • sejarah kemunculan isu feminisme / kesetaraan gender, supaya jelas bagi kita sikapi • <i>dark ages</i> di Eropa, abad pertengahan, yaitu 5–15 M 	tak ada negara yang menerapkan kesetaraan gender lalu benar. Yang ada, tatanan hidupnya rusak. Lihat saja AS, bosnya feminis.
Dalam Islam, perempuan bisa sama bahagia dengan laki-laki, tak perlu isu kesetaraan gender yang menyesatkan.	Laki-laki boleh kerja maka wanita juga, laki-laki boleh berpolitik maka wanita juga, laki-laki boleh senang-senang bercinta, wanita juga. Begitulah isu kesetaraan gender.	Gereja menjadi badan terkuat setelah <i>landlord</i> , agama Katolik menjadi agama negara, dan aturan gereja adalah mutlak.	Sekulerisasi barat yang akhirnya menjadikan standar kebahagiaan terletak pada harta, jabatan, dan kenikmatan dunia.

Berkaian dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Lelaki berlomba saf paling depan, perempuan berlomba saf di belakang, keduanya mendapat rido Allah dan jalur masing-masing sudah tetap.	Gender setara? Rusaklah tatanan hidup, angka perceraian meningkat, dan AS kampiun dalam hal perceraian dan angka <i>single parent</i> yang meroket.	Menganggap gender wanita sebagai aib yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga, <i>container of satan</i> .	Lahirilah gerakan feminisme di Barat, sekali lagi, lahirilah feminisme di dunia barat karena mereka merasa diperlakukan tidak adil.
Sistem taghut mengganti aturan Allah dengan aturan manusia dan kesetaraan gender yang hasilnya malah merusak tatanan hidup.	Gender setara? Anak <i>broken home</i> menjamur, <i>incest</i> (seks antarkeluarga) bermunculan, depresi dan stres perempuan meningkat.	Gender wanita diperlakukan berbeda, masyarakat mengadopsi anggapan Katolik, lalu menganggap wanita sebagai warga kelas dua, di bawah laki-laki.	Kapitalis liberal mengukur kecantikan dari lekuk tubuh, sementara Islam mengukur lewat ketakwaan dan amal ibadahnya.
Islam memerintahkan wanita menutup aurat dan tak banyak menampakkan dirinya karena yang berharga memang harus dilindungi dan dijaga.	Kesetaraan gender menyamakan antara lelaki dan wanita padahal keduanya berbeda dan punya jalur masing-masing.	Dalam sejarah Yunani, Romawi, kemudian Kristen Katolik, wanita tak berhenti dianggap sebagai bawahan pria (subordinat).	Gender laki-laki dan gender wanita seharusnya punya akses yang sama terhadap harta, kerja, dan semua kebebasan lainnya.
Islam menggariskan aktivitas wanita bersama-sama dengan jamaah wanita karena Islam menghormati wanita dan wanita tak dikumpulkan dengan pria.	Cacatnya kapitalis adalah menganggap pria dan wanita sama, padahal sudah jelas-jelas tak bisa disamakan secara gender.	Gender wanita dieksploitasi secara seksual di patung-patung, lukisan-lukisan, dan menjadi objek nafsu pria.	
Islam menaruh posisi ibu tiga kali lipat lebih dari posisi ayah, siapa yang harus ditaati ya Rasul? "ibumu!" "ibumu!" "ibumu!" "lalu ayahmu!"	Kapitalis menjadikan standar kebahagiaan ada pada materi, dan hal ini tidak menguntungkan bagi gender wanita.	Gender wanita dianggap beban karena tak mampu mencari nafkah, dikuasai laki-laki, dan boleh diperlakukan semena-mena.	
Rasul mengatakan, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan wanita <i>shalihah</i> " (HR Muslim).	Kaum liberalis kapitalis, merusak tatanan masyarakat hingga mereka mengambil keuntungan dan menjauhkan Islam.	di Eropa, penyihir wanita dinamai <i>witches</i> , makna konotatif yang kasar dibanding <i>wizard</i> atau <i>magician</i> yang merupakan penyihir laki-laki	
Rasul mengucapkan, "Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya" (HR Ahmad).	Gender ini berasal dari tatanan hidup Barat sekuler, dan sama sekali bukan berasal dari Islam.	Wanita tak diperbolehkan belajar, ahli-ahli kimia wanita dianugerahi gelar <i>witches</i> dan dihukum bakar.	
Pendukung pertama Rasul adalah wanita, <i>syahidah</i> pertama juga wanita, dan Rasul juga wafat dalam pelukan wanita.	Lelaki berlomba syahid di medan jihad, perempuan berumrah pun mendapat pahala yang sama. jalurnya sudah ada, tak perlu disetarakan jender	Gender wanita betul-betul menderita, dosa sejak lahir, karena Kristen menganggap merekalah sebab keluar dari surga.	

Berkaian dengan keagamaan	Kesetaraan gender	Isme	Lembaga, negara
Harkat dan martabat wanita diangkat Islam dengan penerapan syariat Islam. Dalam masa Khilafah Islam, kedudukan wanita mulia.	Lelaki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan mengurus rumah dan keluarganya, semua dapat rido. Tak perlu berlomba di jalur yang sama.		
	Bila ingin disetarakan gender, hasilnya jadi hancur. Pria cari nafkah dengan angkat-angkat barang, lantas apakah perempuan bisa menyamai? Tidak.		
	Laki-laki bisa menyamai wanita? Tidak. Laki-laki memimpin kaumnya. Bila wanita yang memimpin, bisa stres dia.		
	Tak perlu kesetaraan gender karena Allah yang lebih tahu tentang jalur perlombaan kebaikan bagi wanita dan pria, bukan manusia yang mengetahui.		
	Suami adalah pemimpin istri. Dia disertai wewenang oleh Allah agar menuntun istri ke surga Allah dan menjaganya dari maksiat.		

Sumber: Diolah penulis dari berita yang beredar di WA grup April 2018 (tulisan diambil sesuai dengan berita di WA group dengan perubahan seperlunya).

Pandangan tersebut memperlihatkan pemaknaan yang beredar di ruang maya dan ruang publik di Indonesia. Paparan ini merupakan gambaran antitesis terhadap diskursus dominan yang beredar dan isinya sangat berbeda dengan kenyataan yang berhubungan dengan masalah sosial, khususnya terkait dengan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan bagian dari pertempuran diskursus yang terjadi di masyarakat, yang memengaruhi konstruksi tentang gender yang dikembangkan. Para pendukung gender menghadapi banyak hal, misalnya lambatnya masyarakat dan birokrasi melihat pentingnya gender dan konstruksi gender yang berbeda dengan yang saat ini dikembangkan di masyarakat. Dalam konstruksi tersebut, ada kepentingan politik yang dibalut dalih keagamaan. Adanya HTI dibalik pemaknaan ini merupakan pandangan yang dilihat sebagai antitesis terhadap pemaknaan yang ada.

KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PEREMPUAN

Pada tingkat kebijakan, terlihat lemahnya representasi perempuan. Lembaga utama yang menjaga isu-isu perempuan adalah Komnas Perempuan (Santoso, 2015). Sementara itu, NGO perempuan yang mengembangkan isu-isu perempuan pada masa Orde Baru kini seperti kehilangan gaungnya. Organisasi pada masa Orde Baru yang masih ada hingga saat ini contohnya Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, dan PEKKA. Hal ini sangat terlihat karena lingkup jejaring dan berita kegiatan organisasi-organisasi ini menjadi terbatas. Selain karena terbatasnya *expose* terhadap media massa, hal ini juga terjadi karena berkembangnya media sosial membuat pemberitaan terpecah dan kurang terpapar pada masyarakat umum. Kajian P2KK LIPI tentang

hak asasi manusia yang dilihat dari problematika RUU KKG, kasus UU Pornografi, kepemilikan perempuan, perempuan di birokrasi dan di dalam konflik sosial, memperlihatkan bahwa isu perempuan tidak dianggap penting. Selain itu, isu perempuan juga dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial dan seolah-olah tidak penting untuk dibahas.

Di Indonesia pada 2013, target MDG's tidak berhasil dan bahkan kematian ibu dan anak meningkat (Komnas Perempuan, 2013; Santoso, 2016). Gerakan perempuan menyediakan kebutuhan bagi perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa pada tingkat kelembagaan formal, perempuan belum menjadi pertimbangan yang penting. Namun, dari sisi kepemimpinan, terlihat bahwa kegiatan gerakan perempuan menjadi tempat yang kondusif bagi pengembangan kepemimpinan perempuan.

Ada buku sebagai refleksi dari dominasi heterogender yang berkembang di Indonesia, misalnya *Seksualitas di Indonesia, Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman dan Representasi* (2018). Dalam konteks perkembangan ilmu, terlihat adanya kelemahan karena representasi keilmuan yang diwakili oleh Kajian Gender UI terlihat sulit berkembang karena aturan yang tidak kondusif. Jadi, meskipun memiliki keterwakilan melalui KPPPA, pada kenyataannya, kepentingan perempuan di Indonesia masih rentan.

Berikut ini ilustrasi tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan yang kurang terprentasikan. Dalam tulisan tentang PUG, ada beberapa agenda yang dibicarakan (Santoso, Djohan, 2016):

1. Konstruksi simbol dan citra tentang gender sudah ada dalam bentuk peraturan perang-sutamaan gender.
2. Sistem sosial yang ada masih melihat bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang netral gender. Aturan yang ada belum membedakan dan memasukkan elemen gender. Lebih buruk lagi, gender belum dianggap penting dalam organisasi. Hal ini diperlihatkan oleh lemahnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan Kajian Gender dan PSW secara keilmuan.

3. Organisasi yang bergerak pada isu perempuan sudah ada di masyarakat, namun yang bergerak pada isu akademis baru muncul melalui kegiatan seperti Pelita Ilmu. Dalam organisasi, dibutuhkan komponen yang sensitif gender berupa individu yang peduli dan melakukan pemberdayaan berdasarkan kebutuhan gender.
4. Organisasi perlu memperhatikan supaya gender masuk dalam proses organisasi. Hal ini merupakan sebuah isu yang perlu diangkat di masyarakat.

Laporan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan SDG's (2016) mengamanatkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia yang memasukkan:

1. Pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dalam implementasi SDGs;
2. Penguatan koordinasi antara kementerian/ lembaga dalam implementasi SDGs;
3. Pelibatan lembaga HAM Nasional (Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) dalam koordinasi pelaksanaan SDGs;
4. Pelibatan CSO perempuan dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan SDGs.

Dalam amanat tersebut, Komnas Perempuan mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kemenko PMK mengoordinasikan indikator gender di tingkat K/L dan memperhatikan target yang tegas, misalnya menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Amanat seperti ini memperlihatkan kecenderungan bahwa acara atau kebutuhan tentang perempuan dilakukan oleh perempuan. Dalam proses ini, mereka yang diberikan mandat biasanya adalah perempuan. Pola dan proses seperti ini memperlihatkan bahwa lingkup pelatihan perempuan di birokrasi masih terbatas pada pola ghettoisasi, yakni dari perempuan untuk perempuan.

Belum tuntas masalah perkawinan anak yang dibahas sejak Konferensi Perempuan Indonesia I tahun 1928, sekarang terdapat pernyataan sikap yang muncul karena abainya masyarakat

terhadap isu ini dari BERAGAM. Berikut ini pernyataan “Indonesia BERAGAM Menuntut Setop Perkawinan Anak.” Tuntutan dilakukan pada:

1. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan komitmen politik dengan mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang merevisi UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segera mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang gerakan nasional penghentian perkawinan anak sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu;
4. Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan kebijakan penghapusan perkawinan anak, melakukan penyadaran melalui kursus pra-nikah dan memastikan petugas KUA dan institusi di bawah naungannya tidak melegitimasi praktik perkawinan anak;
5. Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk memastikan wajib belajar 12 tahun dijalankan di seluruh wilayah dan mengintegrasikan Kespro dan Seksualitas dalam proses pendidikan formal maupun pendidikan kemasyarakatan;
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia supaya menjalankan rekomendasi Komite CEDAW PBB untuk merevisi UU Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang penentuan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 18 tahun;
7. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang menjadi dampak dari perkawinan anak terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam negeri dan migran dengan meratifikasi Konvensi ILO 189, percepatan revisi Undang-Undang 39 No. 39/2004 yang berpihak pada buruh migran dan anggota keluarga serta mengajukan inisiatif RUU Perlindungan PRT;

8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meninjau dan membatalkan aturan-aturan diskriminatif pada perempuan dan minoritas yang selama ini menjadi penghambat proses penyadaran hak-hak perempuan;
9. Bappenas untuk memastikan pencapaian SDGs khususnya tujuan 5 untuk mengakhiri perkawinan anak;
10. Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data terpilah perkawinan anak usia di bawah 18 tahun;
11. Masyarakat sipil untuk memberikan perhatian terhadap masalah perkawinan anak, mengorganisasi diri menjadi kelompok penekan dan pengontrol pencegahan perkawinan anak;

Dari sebelas butir pernyataan tersebut, perhatian terhadap butir 11 memperlihatkan bahwa pelatihan kepemimpinan perempuan berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Dengan demikian, melalui kegiatan masyarakat sipil, perempuan mendapatkan kesempatan untuk melatih potensi kepemimpinannya. Isu yang diangkat seputar masalah perkawinan, hak pekerjaan bagi perempuan, dan diskriminasi kelompok minoritas. Jika dikaitkan dengan situasi perempuan berdasarkan paparan sejarah, masalah perempuan tidak bergerak jauh dari masalah yang mereka bahas pada 1928 sehingga cukup relevan untuk mempertanyakan posisi perempuan pada masa kini.

PENUTUP

Diskusi tentang heterogender memberikan wawasan bahwa konstruksi femininitas yang berkembang dipengaruhi oleh pandangan heteronormativitas dan seksualitas pun memainkan peran. Dalam konstruksi tersebut, femininitas yang berkembang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berkaitan dengan konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, heteronormativitas dianggap sebagai nilai yang normal dan tidak dipertanyakan kembali. Oleh karena itu, dalam analisis gender sering kali terdapat situasi yang terasa kurang mendalam. Kasus yang terjadi di Indonesia, kebebasan yang terjadi sebagai efek dari Reformasi 1998 menghasilkan serangkaian Perda tidak ramah perempuan. Perkembangan ini

menjadi paradoks karena ketika semua bergerak untuk memaknai kebebasan, perempuan justru ditarik kembali pada peran-peran tradisional.

Di satu pihak, perkembangan sosial politik membutuhkan sosok pemimpin sehingga yang dilakukan lebih pada mengaitkan kepemimpinan dengan konstruksi heterogender dibanding mengindahkan potensi perempuan. Di pihak lain, perkembangan perempuan berhadapan dengan perkembangan konstruksi femininitas feminin yang mendudukkan ruang privat sebagai laman dari perempuan. Konstruksi ini berjalan bersamaan dengan perkembangan Islamisasi yang direpresentasikan oleh pandangan Felix Siauw yang populer di kalangan muda. Perkembangan yang serupa juga terjadi di kalangan perempuan dewasa yang melakukan beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi perempuan di ruang publik menjadi bunda. Konstruksi seperti ini bukan sesuatu yang unik, karena pada masa Orde Baru, konstruksi ibuisme dilakukan negara melalui organisasi perempuan, seperti Darma Wanita. Perbedaannya adalah pada masa Orde Baru, negara memainkan peran besar dalam proses tersebut, sekarang hal tersebut dilaksanakan sendiri oleh masyarakat sipil yang melihat kepentingan tentang konstruksi perempuan dengan keluarga sebagai tolok ukurnya.

Konstruksi perempuan yang berdasar pada kepentingan perempuan dijaga oleh serangkaian institusi, seperti Komnas Perempuan, Jurnal Perempuan, NGO Perempuan, Kajian Jender, dan KPPPA. Upaya institusi ini menjaga kepentingan perempuan dilakukan melalui usulan RUU KKG yang menghasilkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dasar yang dipergunakan untuk melihat posisi kesetaraan gender berbeda dengan kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan juga mengalami kesulitan karena selain isu yang diusung berbeda-beda, gerakan ini pun mengalami masalah kesenjangan jaringan. Selain itu, kegiatan gerakan perempuan merupakan kegiatan “ghettoisasi” di mana kegiatan perempuan dilakukan dan ditujukan dan oleh perempuan. Kegiatan ini menghasilkan urusan perempuan hanya dipantau atau diinisiasi oleh perempuan dan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan jaringan.

Pandangan seperti Felix Siauw menjadi lebih populer di kalangan orang muda. Hal ini belum disadari oleh gerakan perempuan karena gerakan perempuan terpaksa terfokus pada kepentingan perempuan. Dengan demikian, terjadi kontestasi antara diskursus kepentingan perempuan yang perlu menghadapi konstruksi sosial seperti pemahaman Felix Siauw, dengan pandangan yang dikemukakan oleh gerakan perempuan. Masyarakat tidak memahami posisi Felix Siauw sebagai anggota HTI yang memiliki agenda yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar dakwah. Selain itu, posisi pemaknaan kesetaraan gender yang berada di ranah hubungan antara manusia mendapatkan pemaknaan yang lebih mendalam karena diskursus dominan menggunakan sumber keberagaman yang lebih mendalam. Masyarakat tidak melihat hal ini sebagai perbedaan pemaknaan karena interpretasi yang berbeda, dan tidak melihat masalah perempuan dari sisi kepentingan perempuan.

Dalam situasi ini, kepemimpinan perempuan perlu melihat hal lebih luas daripada kepentingan perempuan yang diangkat dan dilaksanakan gerakan perempuan. Namun, tantangannya sungguh besar karena perlu mengembangkan *critical mass* yang memahami perspektif ini sekaligus melakukan pembacaan kembali sebagai usaha untuk mendentralisasi pemahaman berdasarkan pendekatan heterogender. Melalui pendekatan heterogender, masyarakat dapat memahami bahwa konstruksi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai heteronormativitas. Gerakan perempuan perlu menyadari bahwa laman virtual menjadi ajang untuk mengonstruksikan peran dan posisi perempuan. Ruang publik virtual menyasar individu dengan konstruksi yang secara gamblang menunjukkan peran perempuan berdasarkan konteks heteronormativitas.

Femininitas yang dikembangkan perlu mengangkat gambaran yang mampu mengkritisi konstruksi heterogender dengan tokoh seperti Menteri Susi yang memiliki karakter berbeda sebagai perempuan yang berhasil. Konstruksi femininitas perlu diperhatikan untuk mengangkat konstruksi femininitas alternatif. Artinya, dalam masyarakat terlihat konstruksi tentang perempuan yang beragam dan saling berkelindan, namun

perlu diangkat ruang publik virtual sebagai laman alternatif dari kegiatan gerakan perempuan. Dalam ruang publik virtual, muncul tokoh atau individu yang memainkan peran konstruksi terhadap peran perempuan. Para tokoh ini populer dan memiliki *follower* yang cukup banyak sehingga menghadirkan tantangan baru bagi gerakan perempuan.

PUSTAKA ACUAN

- Adam, A. (2017, Maret 14). Cara Indonesia memperlakukan perempuan. *Tirto.id*. Diakses pada 14 Maret 2017 dari <https://tirto.id/cara-indonesia-memperlakukan-perempuan-ckFf>
- Affiah, N.D. (2014). Gerakan perempuan di era reformasi, capaian dan tantangan, makalah untuk Hari Kartini 21 April 2014. Diakses pada 16 September 2016 dari http://www.komnas-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf. →laman tidak ditemukan
- Bennet, L.R., Davies S.G., & Hidayana, I.M. (2018). *Seksualitas di Indonesia, politik seksual, kesehatan, keberagaman dan representasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hew, W.W. (2018, Januari 2). Piety, politics, and the popularity of Felix Siauw. *New Mandala*. Diakses pada 12 April 2018 dari <http://www.newmandala.org/piety-politics-popularity-felix-siauw/>
- Indonesia Imaji. (2018, Februari 27). Prospek pemimpin perempuan di Indonesia [foto]. Diakses pada? dari <http://indonesiaimaji.com/prospek-pemimpin-perempuan-di-indonesia/>
- Ingraham, C. (1994). The heterosexual imaginary: feminist sociology and theories of gender. *Sociological Theory*, 12 (2), 203–219. American Sociological Association. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/201865>.
- Jones, C. (2010). Better women: the cultural politics of gendered expertise in Indonesia. *American Anthropologist*, 112(2), 270–282. Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/40801779>
- Kalyanamitra. (2013). Ancaman target MDG, angka kematian ibu melonjak. Diakses pada 27 Maret 2014 dari <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/09/ancaman-target-mdg-angka-kematian-ibu-melonjak-drastis/> →laman tidak ditemukan
- Komnas Perempuan. (tanpa tahun). Siaran pers Komnas Perempuan mengawal upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam regulasi dan pelaksanaan SDG's di Indonesia. Diakses pada 6 april 2018 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-komnas-perempuan-mengawal-upaya-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-regulasi-dan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia>
- Larasati, R.D. (2013, Oktober 1), Ranah tubuh dalam pemetaan gerakan perempuan, sebuah pemikiran tentang estetika, metodologi dan refleksi tentang konsep partisipasi dan visibilitas. Diakses pada 13 Juni 2016 dari <http://etnohistori.org/edisi-genealogi-gerakan-dan-studi-perempuan-indonesia-ranah-tubuh-dalam-pemetaan-gerakan-perempuan-oleh-rachmi-diyah-larasati.html>
- Muctar, Y. (2016). *Tumbuhnya gerakan perempuan Indonesia masa Orde Baru*. Jakarta: Institut Kapal Perempuan.
- Pernyataan sikap Indonesia beragam-ragam menunjuk stop perkawinan anak. (2017). Diakses pada 17 November 2017 dari <http://www.kalyanamitra.or.id/2016/11/pernyataan-sikap-indonesia-beragam-menuntut-stop-perkawinan-anak/> →laman tidak ditemukan
- Pramodhawardani J., Santoso W.M., Purwoko, D., & Ocktaviana S. (2014). *Perempuan dan hak asasi manusia*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Qibtiyah, A. (2009). Indonesian Muslim women and the gender equality movement. *Journal of Indonesian Islam*, 3, 168–196.
- Rahayu RI. (2007). Konstruksi historiografi feminisme Indonesia dari tutur perempuan, workshop historiography Indonesia: di antara historiography nasional dan alternatif. Yogyakarta 2–4 Juli, 2007. Diakses pada? dari https://www.academia.edu/3256748/Historiografi_Feminisme_Indonesia
- Santoso WM. (2013). Executive Summary Labsos IPSK, perempuan bisa pemberdayaan perempuan di Desa Ligarmukti daerah peri urban. (Makalah tidak diterbitkan). Jakarta: IPSK-LIPI.
- Santoso, W.M. (2015). Perempuan dan kebijakan: lemahnya representasi perempuan. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, Yogyakarta 20–23 Mei 2015.
- Santoso, W.M., & Djohan, E. (2016). Kajian gender dan tantangannya bagi perkembangan multidisiplin di Indonesia. Dalam W.M Santoso (ed.), *Ilmu sosial di Indonesia: perkembangan dan tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sunindyo, S. (1998). When the Earth is female and the nation is mother: gender, the armed forces and nationalism in Indonesia. *Feminist Review*, 58, 1–21, Diakses pada? dari <http://www.jstor.org/stable/1395677>

- Suryakusuma, J.I. (1996). The state and sexuality in New Order Indonesia. Dalam Sears L.J (ed.), *Fantasizing the feminine in Indonesia*. Durham, NC: Duke University Press.
- Wahid, M. (2014). *Figh Indonesia, kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.
- Wieringa, E.S. (1999). *Penghancuran Gerakan perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.
- Wisnubrata, A. (ed.). (2012, November 23). Komnas Perempuan temukan 282 Perda diskriminatif. Kompas.com. Diakses pada 19 September 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/23/05393810/Komnas.Perempuan.Temukan.282.Perda.Diskriminatif>.

https://www.google.com/search?biw=1360&bih=611&tbn=isch&sa=1&ei=BTLdWrmTAoeUvQTloZboAg&q=pemimpin+perempuan+indonesia&oq=pemimpin+perempuan+indonesia&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.920932.926426.0.927280.28.13.0.15.15.0.116.920.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.28.1044...0j0i67k1j0i10k1j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i19k1j0i30i19k1.0.wv5c6QeyI_8#imgrc=pPjJLw8ZVl41kM: gambar perempuan HTI anti pemimpin perempuan. Apakah maksudnya link ini? <https://www.youtube.com/watch?v=t6WoW1qJjsQ>

ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA

Rosita Dewi

Research Center for Politics, Indonesian Institute of Science

ro_sita2000@yahoo.com

Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (win-win solution) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (corrupted recognition) melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.

Kata kunci: *rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif*

ABSTRACT

The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with ethnographic method consisted of participant observations, interviews, and literature studies.

Keywords: *recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, participatory mapping*

INTRODUCTION

Land rights, land use, and resource management remain critical issues for indigenous peoples. But, development projects, mining, forestry activities, and agricultural programs continue to displace indigenous peoples. Land always becomes the central issues in the struggle for indigenous peoples' rights. It has an important role in the continuation of indigenous peoples' livelihood. It is not only land per se, but also the

natural resource contained on that land and their livelihood. Therefore, the legal recognition of land ownership becomes the goal for indigenous peoples' struggle (Xanthaki, 2003, 467–496). However, policy implementation is not always in line with regulation. Therefore, we still can find many land grab cases in these countries.

The food and energy crises in 2008 created the opportunity for developing countries, including Southeast Asia countries, to provide land for

large scale agricultural use. It caused a land grab boom in Southeast Asia. It became the national setting of several countries in Southeast Asia, such as Indonesia, Vietnam, Laos, the Philippines, and Cambodia where large areas of land have been converted into large-scale plantation (Hall, Hirsch, & Li, 2011, 843). This is worrisome since the parcels of lands that were diverted into large-scale plantation were those under the category of non-private lands. For example, in Indonesia, these are considered as state lands, which are usually cultivated by indigenous people (Borras & Franco, 2011, 27).

Papuan *adat* communities gained legal recognition through the special autonomy law for Papua (Law No. 21/2001). It seems, however, that legal recognition through this law has failed to protect the customary rights of *adat* communities, particularly with regards to their *adat* land. Although legal recognition is believed to be the best method to guarantee these rights, it has clearly proved insufficient in the case of Papua. This is most clearly shown in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate or MIFEE project was developed. MIFEE is the first national project in Papua developed by the Indonesian government after Papua was granted special autonomy comprises over one million hectares of land. For this project, the Merauke local government granted location permits for concessions to companies without any prior and informed consent from the Marind Anim as the *adat* landowners, and thus land grabbing has been a major issue in the area. The establishment of the MIFEE project can be seen as the corruption of the recognition policy toward Papuan's as an *adat* community that has gained the legal recognition of their *adat* lands.

The central government launched the MIFEE project in August 2010. The project aimed to strengthen the national food and energy stock and, at the same time, accelerate economic development in Merauke district (GoI, 2010). MIFEE is an extended version of the Merauke District Program which the Merauke district government launched on the 105th anniversary of Merauke district in 2007. A year later, in 2008, the local government and investors agreed to cre-

ate a special project called Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) (Awat MIFEE, n.d.a). The establishment of MIRE was in line with President Susilo Bambang Yudhoyono's speech on the Great Rice Harvest Event in 2006 in Merauke. He said, "First, let's develop Merauke as a rice granary; second, develop plantations in Merauke, such as sugarcane and palm oil plantation to address food security problems" (Yudhoyono, 2006).

Merauke District has vast arable land and, therefore, has attracted investors to invest in agriculture sectors since the Dutch colonial period. From 1939 to 1958, Merauke was designated as a rice granary for the South Pacific (interview with John Gluba Gebze, 29 August 2014). The Dutch colonial government made the Kumb sub-district in Merauke district into an agricultural project site with the name Rijstproject Koembe. This project changed the swamp area in the downstream of Kumb River into farmland. An irrigation canal was built from the Bian River to water the rice fields in the Kumb sub-district. This project was quite successful and the Kumb sub-district became the center of rice production in Merauke district (Koentjaraningrat & Bachtiar, 1963).

A consortium of fifteen Saudi Arabian investors and Indonesian corporations was established to finance the project in 2008 (Rulistia, 2014). The Bin Laden Group, an investor from Saudi Arabia, committed to invest USD 4 billion to develop 500,000 ha of land in Merauke (Awat MIFEE, n.d.a). The investment did not come, however, because of the global financial crisis that swept the whole world in 2008.

Facing this sudden cancellation of large investment, the local government decided to start a more investment-friendly scheme that is MIFEE. MIFEE was expanded to invite the investors not only in the rice cultivation sector but also in the plantation and forestry sectors. It was in line with President SBY's ambition to "feed Indonesia, feed the world" after the global food and energy crisis in 2008 (Awat MIFEE, n.d.a). A statement from Arifin Panigoro, CEO of the Medco Group, showed his strong support of the government plan to establish MIFEE (Tabloid Jubi, 27 August 2009). He stated that Indonesian government has to expand the agricultural lands

to achieve food and energy security. According to him, Merauke district provides large idle lands for agricultural expansion, therefore establishing estate project would be suitable (Panigoro, 2009).

This project is expected to attract investment in Merauke not only in rice cultivation sector, but also the plantation and forestry sectors. According to the grand design of MIFEE, the area of 1.2 million hectares should be divided, as follows 50% for food crop, 30% for sugarcane, and 20% for oil palm (GoI, 2010). The MIFEE project is expected to produce 1.95 million tons of rice, 2.02 million tons of corn, 167,000 tons of soybeans, 2.5 million tons of sugar, 937,000 tons of crude palm oil (CPO), and 64,000 tons of beef by 2030 (Zakaria, Kleden, & Frangky, 2011, 17).

At the national level, the central government released the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (*Master Plan Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, MP3EI) in 2011 to reinforce the development project, including the implementation of MIFEE. MP3EI determined the six economic corridors for the acceleration of Indonesian economic development. MIFEE was included in the Moluccas–Papua corridor of the MP3EI policy as a center of agricultural production. MP3EI aimed to accelerate the implementation of the MIFEE project to boost agricultural production. The success of MIFEE is heavily dependent on investment. Creating a good investment climate and loosening regulations that hindered the investment became the duty of the central government in MP3EI. Several policies were implemented to attract investments, such as tax holidays, simplification of permission and license for investment and plantation. MP3EI documents mentioned the necessity to revise the agrarian law in order to include the *adat* land as a part of investment location. The agrarian law revision was put first on the law revision list (Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, 2011, 179–181).

This kind of policy needs to be implemented to attract massive investments, considering the number of investment in Merauke district is important to support the development of agricultural sector. This district has a significant contribution

toward the gross domestic product (GDP) of Papua Province, especially from agricultural sectors. Rice becomes comparative advantage product from Merauke district. In average, Merauke has produced more than 50% of all the rice in Papua Province. Merauke became one of the main pillars to Papua succeeding as a national rice granary (*lumbung padi*). Merauke district has to boost the rice production as well as other agricultural production to fulfill the national rice necessity and achieve food security. Together with central government, local government invited the investments through MIFEE to boost agricultural production through land expansion, modernization and mechanization of agricultural management as mentioned in the Grand Design of MIFEE. Land expansion through MIFEE project is expected to fulfill this target by 2019 (Bappenas, 2015).

The establishment of MIFEE has attracted more investments in Merauke. The number of domestic investments in Merauke district was the biggest in Papua Province. The number of domestic investment projects in Merauke is 45 projects, with a total of IDR 91.808 billion (USD 6,842 million), or around 25% of the total investment in Papua. For foreign investment, there are 19 companies with IDR 3.531 billion (USD 263 million) in investments. The number of foreign investments in Merauke is 12% of the total investment in Papua. Foreign investment in the Mimika district is the biggest in Papua due to the existence of Freeport and mining resources (Papua Statistic, 2015).

AIMS AND ARGUMENTS

This study aims, first, to describe the enactment of the Papua special autonomy law. It provides an understanding of the reasons that Papua received special autonomy from central government and the contestation between central government and Papua local government during the process of passing the special autonomy law.

Second, it aims to explain the legal recognition that has been gained by Papuan as *adat* community in Papua in the terms of the implementation of the special autonomy law. The special autonomy law for Papua was mandated to

recognize and protect Papuan rights, which had been disrespected and marginalized. This study discusses the blossoming of *adat* organization as a response of enactment of this law. This study also analyzes the community participatory mapping conducted by *adat* community in order to gain the legal recognition over their *adat* lands as mentioned in the law. Furthermore, it also examines the corruption of this recognition as a form of paradox after the implementation of special autonomy. In this section, I highlight in particular the establishment of the MIFEE project that leads to *adat* land grabbing, contrary to the Special Autonomy Law, which stipulated *adat* land protection.

Third, it aims to analyze the pitfalls of *adat* recognition in the implementation of the MIFEE project. It provides an explanation of government efforts to utilize Papuan recognition by co-opting the *adat* institution in the Merauke district to smooth the implementation of the MIFEE project. It also examines the pitfalls of the participatory mapping that was conducted by the *adat* community in the Merauke district.

With these aims, this research explores a number of questions, e.g. why did the Papuans receive special autonomy from the central government? What forms of recognition are regulated in Papua Special Autonomy Law? How was the recognition policy implemented under the Special Autonomy Law? Why did the central government launch the MIFEE project—which may lead to the land grab of *adat* land—after the Papuan indigenous people gained legal recognition? And how has the Papuan recognition been utilized in the implementation of the MIFEE project?

To address those questions, I argue that the government applies a corrupted form of recognition. Central government tries to implement recognition based on the government's perception of recognition. The institutionalization of recognition that formed to fulfill the obligations of special autonomy, unfortunately, is still based on Jakarta's perspective. Central government has given legal recognition and formed the *adat* institution for Papuans. By using this form of policy, it cannot be said that central government does not recognize the Papuan. Ironically, it is not

for Papuan protection, but becomes an instrument for smoothing government policy by hijacking the *adat* recognition.

There are some forms of *adat* recognition hijacking in the implementation of the MIFEE project. First, the hijacking of *adat* recognition is shown through the existence of the Customary Community Council as a government broker that utilizes *adat*. This institution acts as an *adat* representative and serves government interest. Second, the hijacking of *adat* recognition can also be seen in the government's intention to allow participatory mapping. The result of the *adat* mapping makes clear who the owners of *adat* lands are. Even though the local government is unwilling to legalize this map, government utilizes this map to help finding the exact *adat* land-owners. It is thus easier for the company and the government to negotiate with the right *adat* land-owner. This accelerates the land grab of *adat* land.

ANALYTICAL FRAMEWORK

The MIFEE project comprises over a million hectares of land, and is the first national project in Papua developed by the Indonesian government after Papua was granted autonomy. Based on the previous research I mentioned above, land grabbing has been a major issue in this project. This is the paradoxical situation that has emerged after the implementation of the MIFEE project. The Papuan has gained legal recognition through the implementation of Papua special autonomy. Legal recognition is believed to be the best method to guarantee the *adat* land rights; however, this has clearly proved to be insufficient in the case of Papua. One pitfall of Papuan recognition is that it can smooth the way for land grabs in the MIFEE project. To analyze this pitfall, I utilize the politics of recognition and the land grabbing concept. The politics of recognition framework can be used to explain the post recognition struggle for the Papuan after receiving legal recognition, especially in the case of the MIFEE project. Meanwhile, the land grab concept can help to understand the context of the land grabbing that took place in the MIFEE project.

Politics of Recognition

The struggle for recognition has been widespread since the enactment of the ILO Convention 169. This became the first instrument that rejected the assimilation policy for indigenous people and called for the full realization of the social, economic, and cultural rights of these peoples, and respect for their customs, traditions, and institutions (Article 2/2 of ILO Convention 1969). This struggle focused on the insufficient attention that was being paid to the processes of political identity formation and the framing of claim. In this context, identity becomes the core of recognition. The politics of recognition is concerned with the question of how identity politics can repair internal self-dislocation by contesting a dominant culture's demeaning representation of one's group (Fraser, 2003).

Taylor (1994) divided the politics of recognition into two classifications. First is the politics of equality—influenced by the democratic system—whereby everyone has equal rights and is worthy of respect. This recognition aims to diminish ideas of class and the difference between first and second classes. All groups can get the same access to political and economic spheres.

Second is the politics of differences. This politics of difference tries to recognize a certain group is based on distinctions or uniqueness. This uniqueness needs different policies to reflect this. In short, certain groups have exclusive rights that are not enjoyed by other groups. According to Taylor, these two kinds of recognition can be used to address the misrecognition problem of indigenous people and minority groups. An indigenous people will receive affirmation from the state government in order to gain equality with the majority groups (Taylor, 1994). Supported by Honneth (2003), recognition is a struggle to use identity politics to repair internal self-dislocation; and legal recognition is the key aspect of self-respect. Legal recognition is expected to guarantee that a person appears as a full member of society. Through legal recognition, they will be able to enjoy the same rights as all other member of society. Taylor and Honneth argue that the recognition of rights and cultural appreciation can subsume the problematic of redistribution.

Fraser stated that cultural injustice is often linked with economic injustice, which is created by the economic structure and causes economic misdistribution. Misrecognition will create a status problem for certain groups, which will cause subordination. Furthermore, subordination will cause misdistribution. In here, Fraser divides the concept of misrecognition into two forms of injustice. "First, people can be impeded from full participation by economic structures that deny them the resources they need in order to interact with others as peers; in that case they suffer from distributive injustice or misdistribution. Second, people can also be prevented from interacting on terms of parity by institutionalized hierarchies of cultural value that deny them the requisite standing; in that case they suffer from status inequality or misrecognition" (2007, 20). Therefore, Fraser (2003) tries to integrate distribution and recognition. Integrating distribution and recognition can grasp the imbrication of class inequality and status hierarchy in contemporary society.

I tend to agree that the problem of recognition is not only one of cultural injustice, but also one that cross-cuts with the economic injustice. The problem in Papua is not only one of economic misdistribution, but also of misrecognition (Widjojo, 2009). The tendency of central government policy is to posit Java Island as a center of development and governance—Javacentric—that makes Java domination in politics, economics, and culture. Javacentric policy not only gives an abundance of benefit to the Javanese, but also creates socio-economic and cultural domination over the Papuan. This policy imposed a uniformity of development and state apparatus to help with the integration of Indonesia. This condition was exacerbated by military repression during Soeharto's regime in Papua.

In terms of economic structure and access, the Papuan has been marginalized. Similarly, the Papuan was also culturally undermined; Javacentrism created the stereotype that the Papuan is stupid, primitive, and so on. Sometimes, even the Papuan has stated that "*lahir sebagai Papua saja sudah salah*" (it was wrong to be born as a Papuan). This kind of injustice has to be addressed through recognition; it cannot be

solved only through economic redistribution. Recognition policies that address misrecognition must be implemented, together with economic redistribution to address the economic problems.

Furthermore, Frazer (2003) argued that this is an institutional problem that must be remedied by the state system. It cannot only be solved by affirmative remedies; it also needs transformative remedies. Affirmative remedies aim to correct inequitable outcomes without addressing the underlying structure. Transformative remedies aim to correct inequitable outcomes by addressing the underlying generative framework that produces the inequalities in the first place.

The enactment of the Papua Special Autonomy Law is a form of remedy for the misrecognition and misdistribution problem of Papuan. This law stipulated that the special autonomy gives the provincial government the power to regulate community interests autonomously, based on Papuan aspirations and rights. This law recognizes the *adat* community in Papua, specifically stating that the *adat* community is the Papuan (*Orang Asli Papua*) from the Melanesian race, and consists of native tribes and/or people who are accepted by the Papuan. The Papua Special Autonomy Law mandated the formation of the Papuan People Assembly (*Majelis Rakyat Papua*, MRP) as cultural representatives and the Papuan People Representative Council (*Dewan Perwakilan Rakyat Papua*, DPRP) as Papuan representatives, and stated that all members of these bodies must be Papuan. The formation of these formal bodies aims to recognize and protect the Papuan rights based on the Papuan *adat* and culture. It is expected to be a structural change in Papua, which used to be dominated by the Javanese. The special autonomy law for Papua can be seen as a form of transformative remedy for Papuan misrecognition.

The tendency to use a top-down approach to solve the problem became characteristic of state policy; from a state perspective, its implementation will be more effective. Often, in practice, it did not address the problem of structures that needed restructuring. I see this kind of approach as being similar to that which Fraser refers to as

affirmative remedies. It will cause the emergence of other misrecognition and/or misdistribution problems. Therefore, what Fraser is proposing is transformative remedies, which restructures the institutions and structures of the dominant culture. It needs both the dominant and subordinate culture to be willing to change. Usually, it can come from bottom-up initiatives, which are well accommodated by the state. The slow process of MRP's formation as a formal body to protect the Papuan can be seen as an example of the central government's anxiety to accommodate the bottom-up initiative. The formation of the customary community council (LMA) is another example of a policy that comes from government initiative. It can be used as a tool of recognition from the government's perspective, but on the other side it cannot solve the problem of misrecognition and the economic disadvantages of the Papuan. Another example is participatory mapping. This mapping initiative came from Papuan in villages. However, the government utilizes this mapping in order to pave the way for land grabbing through the implementation of the MIFEE project, whilst presenting it as recognition and respect for the *adat*.

According to Hegelian thought on recognition, there are four principals of recognition that can lead to corrupted recognition. First, a party needs a recognizer and a recognizee. There is always one group who is recognizing another group and another group who is recognized. Second, parties are in positions of superiority and inferiority. The recognizer will become the superior party, creating an asymmetric relation. Third, a party that resists and is forced to give recognition will become inferior. Fourth, there is a domination and subordination party. These lead to corrupted recognition because the dominant party is not willing to recognize the party that is marginalized or discriminated against; this is not the pure recognition that is expected from Hegelian thought. The requirement for building pure recognition is that both parties, recognizer and recognizee, are willing to recognize each other; this cannot be achieved through coercion (Monahan, 2006, 391).

Corrupted recognition happens because the dominant party, which is usually represented by state government, is forced to recognize the marginalized party. Corrupted recognition is still recognition; however, the impact of the recognition will differ from that of pure recognition. In the implementation of corrupted recognition, a party that is discriminated against or marginalized, such as indigenous people or minority groups, will still have to struggle for recognition (Monahan, 2006, 393). It can be seen as beyond of recognition. State recognition is not the end of their struggle when the form of recognition policy is based upon corrupted recognition. The recognizee group must still struggle to gain the full protection of their rights after receiving legal recognition (Li, 2001). The recognition given by state governments under the influence of international movements does not mean the end of struggles to gain full recognition. The dominant parties still has the will and desire to maintain their dominance. This can be seen from government policy. For example, there is an intention of national elites to make customary law compatible with ordinary law; make subordination of customary law compatible with ordinary law. The subordinated party must adjust to this situation. Then, the subordinated party responds with the formation of institutions that can promote and struggle for their rights in order to fulfill the legal recognition that they have already achieved (Sieder, 2012).

This can help to analyze the misrecognition in Papua that that took place after Papuan received legal recognition. It can be used to analyze the formation of the *adat* institution called the LMA in order to implement legal recognition. The LMA is expected to protect and struggle for recognition. In the case of the MIFEE project, the LMA is supposed to represent the *adat* community in the process of negotiation and to protect the *adat* community's interests. However, where there is corrupted recognition, this can present a pitfall.

To help measure the implementation of recognition in Papua, I use the indicators of recognition from the United Nations. There are several aspects that can measure recognition,

whether this is pure or corrupted; these also apply to the recognition of *adat* lands. By using these indicators, it can be seen how far these aspects have been accommodated into national law and other laws that regulate the existence of the *adat* community.

Corrupted recognition can be measured from the recognition policy initiative and/or the deviation of its implementation. From the initiative, the central government half-heartedly gave special autonomy for Papua, which can be seen as an indication that corrupted recognition will happen, and that central government will also find the way to hinder implementation. For example, free, prior, and informed consent (FPIC) is one indicator that is mentioned by the UN, which must be present in order to demonstrate that the state recognizes and respects the existence of the indigenous people. However, FPIC was not fully implemented; the central government tried to hinder this through top-down institutions. The legal and formal structure to protect the Papuan has been created, but central government will try to hamper the implementation of recognition, which has been mandated by Special Autonomy Laws, without the stigmatization, neglect, or repression of the Papuan.

Land Grabbing

The term land grabbing refers to the purchase or leasing of vast tracts of land by wealthier parties to create agricultural operations producing food or biofuels, the aim being to secure long term supplies. This is based on the standard definition of land grabs by the Food and Agricultural Organization (FAO). According to the FAO, there are three characteristics of land grabbing. First, it always includes large tracts of land. Second, it also involves direct foreign investment. Third, the new land investments have a negative impact on the recipient countries (Borras, Kay, Gomez, & Wilkinson, 2012, 403).

However, this definition is countered by research conducted by Borras. He took the case of Latin America, and argued that land grabbing is not determined by the scale of land leasing or the purchase area. It can be done by national or international corporations. Therefore, it does not

always directly involve foreign investment. According to this research, the state is the key actor in facilitating capital accumulation (Borras, Kay, Gomez, & Wilkinson, 2012, 405). Land grabbing becomes a contested interaction between parties such as the state and civil society. The state engages in re-ordering or restructuring the country's land tenure system through policies that justify the use of idle, under-utilized, or sparsely populated territorial spaces (Daniel & Mittal, 2009). Land grabbing denies land for local communities, destroys livelihoods, reduces the political space for peasant oriented agricultural policies, and distorts markets towards increasingly concentrated agribusiness interests and global trade (Stephen, 2011, 6). Unfair procedures for the compulsory acquisition of land and inequitable compensation for its loss can increase tensions and conflicts between the government and citizen (FAO, 2008, 2).

For the purpose to analyzing the MIFEE project, land grabbing is defined as controlling or taking possession of large areas of land in order to transform them into agricultural estates by domestic and/or transnational companies with the engagement of local and central governments through unfair procedures that harm local livelihoods.

METHODOLOGY

In this dissertation, I examine four cases in four villages—Duku, Sulu, Alu, and Muli¹—that serve as examples of the land grab process. Sulu represents a village that accepted company cultivation of their *adat* land in the early stages of the MIFEE implementation, when John Gluba Gebze still served as the head of Merauke district (2001–2010). Duku represents a village that accepted company cultivation of their *adat* land after Romanus Mbaraka became the new head of Merauke district in 2011. Alu and Muli are villages that rejected company cultivation of their *adat* land. All four villages initiated and conducted participatory mapping.

The research scope is limited to the period between the implementation of the MIFEE project (2010) and the end of Susilo Bambang Yudhono's

¹ Due to the sensitivity of the issue, the names of the villages have been changed.

(SBY) presidential term (2014). Data collection was carried out in the Merauke district in January, August, and September of 2014, and October and November of 2015. Data was collected through interviews with leaders in each of the four villages, *adat* community members in each village, the former governor who initiated the MIFEE project, local government representatives, the company that holds concessions in that area, and NGOs which act as advocates on behalf of the *adat* communities in these villages. Data was also collected in Jakarta, where the decision about Papua was made.

DISSERTATION STRUCTURE

The dissertation with the title “*Adat* Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia” is set out into seven chapters including introduction and conclusion. The first chapter is the introduction, which explains the background, aims, and arguments of this study, and provides the analytical framework used.

The second chapter analyzes the policy after Papua integration with Republic of Indonesia that did not recognize the Papuan, and which caused their marginalization during Soekarno (1945–1967) and Soeharto (1967–1998) presidential term. The central government policy was emphasizing on the Indonesianization policy, which limited the role of *adat*.

The third chapter explains the enactment of special autonomy for Papua as a legal recognition of the Papuan as *adat* communities (indigenous people) in Papua. This chapter attempts to explain the background and the process of the birth of the special autonomy law. The next section deals with the establishment of the Papuan Customary Council (*Dewan Adat Papua*, DAP) and shows that the DAP is one of the results of the space opened for the Papuans by the special autonomy law. The final discussion in this chapter is about the central government's half-hearted implementation of the special autonomy law, which caused the corrupted recognition.

The fourth chapter starts from the analysis on the background and development of MIFEE. It is followed by the analysis on the spatial planning

policies as the main instrument to determine the investments' locations in the MIFEE project. Finally this chapter discusses the pros and cons on the implementation of MIFEE.

The fifth chapter attempts to explain the pitfalls of *adat* recognition of the formation of the Customary Community Council or called new LMA in Merauke District. It analyzes the new LMA position in the Marind Anim community after the establishment of the new LMA of Merauke district and the formation of LMAs in the sub-districts and villages. This section explains the relationship of the existence of the new LMA and the process of land grabbing in the MIFEE project.

The sixth chapter discusses the limit of participatory mapping in four villages in the MIFEE project areas. At the beginning, this chapter explains about the legal recognition of *adat* lands (customary land) rights. It continues with an explanation of conducting participatory mapping to gain recognition of *adat* land in Papua. This chapter will close with a discussion of the negative impacts, which are unintended consequences of participatory mapping, can accelerate land grab.

The final chapter is the conclusion and reviews the current situation under the new president of Indonesia. This dissertation will fill the study on *adat* communities in Papua, which has been less researched than in other regions of Indonesia; one reason for this is the limitation for foreign researcher to visit Papua regarding security issue. Finally, through this finding, it is hoped that it can provide possible resolution for conflict in Papua through respecting and recognizing the rights of Papuan with noble ways.

DISCUSSION

The enactment of the Special Autonomy Law in Papua aimed to redress the problem of marginalization of Papuan and, by so doing, to suppress the enduring separatism movement. The misdistribution and misrecognition were the causes of marginalization. Therefore, the remedy for marginalization in the law was the redistribution and recognition for Papuan. The problem of recognition entwines with the economic injustice.

The form of recognition in the law accommodates what Taylor called as politics of equality and politics of difference (Taylor, 1994). This law gives the Papuan the acknowledgement of their distinctive Melanesian culture, which is different from the cultures of other parts of Indonesia. The law stipulates several affirmative and positive discrimination policies by the central government. This affirmative policy became a vehicle for Papuan to get the equal rights. The affirmative policy was applied so that the Papuan could be put as the central actors and they could catch other Indonesian ethnic groups up in the field of development. The policy also aimed to mend the previous policy that neglected the Papuan existence. Papuan have long felt that they have been dominated and threatened by the increasing number of transmigrants, especially from Java and Mollucas, and also by their increasing political and economic influence. The Papuan has had the psychological sense of inferiority towards them and also faced the economic and political marginalization in the Papua province. In order to address these problems, the law opened wider opportunity for Papuan in the economic and political participation. For example, the law regulated more engagement of Papuan in the natural resource management in Papua, which was dominated by the non-Papuan.

Actually, the Special Autonomy Law has fulfilled many indicators of recognitions if we compare the law with the UN measurement of recognitions (See table 2). Or we could say that the central government tried to adopt the ideal recognition of UN version by making the special autonomy law.

The enactment of the law doesn't mean the Papuan struggle for recognition has come to an end, however. The government recognition is just a half-hearted or partial one. Or it is a corrupted recognition if we borrow the term from Hegel (Monahan, 2006, 393). It turned out that the central government has no intention and will to implement the law. The government has always been suspicious of the Papuan and it has intended to implement the policies based on its own version of recognition, which is far from the recognition requested by the Papuan.

This government's suspicion against the Papuan is not new and it has haunted the central government policy to Papua since Soekarno period. The government policy is not the Papuanization as done by the Dutch colonial regime, but the Indonesianization. The Indonesianization policy is to disregard the uniqueness of Papuan culture and society and to Indonesianize the Papuan people and space with the combined and intertwined approaches of security and development.

The first president of Indonesia, Soekarno started the Indonesianization policy after Papua was integrated with Indonesia. On one hand, the Soekarno regime orchestrated a series of military operations to suppress the separatism movement. On the other hand, the regime intervened in various sectors. One of the typical Indonesianization policies was the replacement of Papua administration officers from Papuan with non-Papuan. The policy was not only implemented in

Table 2. Comparison of UN and Special Autonomy Version of Recognition

Indicators	UN	Special Autonomy
Non-discrimination	Indigenous peoples are equal to all other peoples in the exercise of their right, in particular that based on their indigenous identity	State will recognize the <i>adat</i> law community based on Indonesian Republic of Unitary State (NKRI) principles based on law
Self-Determination	To collective rights of indigenous peoples to freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development is recognized in the constitution or other forms of superior law	(Not mentioned about self-determination in this law)
Self-Government	<ul style="list-style-type: none"> • Recognition of indigenous people's right to self-government in national legislation • Recognition of indigenous peoples' self-governing institutions and territories in the political administrative structure of the state 	Special Autonomy
Identity	Recognition of indigenous peoples' distinct identity in the constitution or national legislation	Papuan identity: Melanesian race, which has its own culture, history, and languages
Customary Law	<ul style="list-style-type: none"> • Customary law institutions with jurisdiction over internal and local affairs • Customary law practiced in accordance with internationally recognized human rights standards, including provision for gender equality and the rights of the child. 	<i>Adat</i> law as long as it does not contradict with Indonesian legal law
Military Activities	Military activities on indigenous peoples' lands and territories only based on peoples' agreement	Military for keeping the integrity of NKRI is the central government authority
Economic development	<ul style="list-style-type: none"> • Food accessibility, nutrition and food safety • Security in the enjoyment of means of subsistence and development, and freedom to engage in traditional and other economic activities 	<ul style="list-style-type: none"> • It is related with the recognition on customary rights (<i>hak ulayat</i>). • Papuan can utilize the lands, forests, water, and all inside their customary rights
Autonomous Institution	Just and fair redress for deprivation of means of subsistence and development	<ul style="list-style-type: none"> • Formation a Papuan People Assembly (MRP) as a formal institution that represented Papuan • Customary Law
FPIC	Self-determination with regards to development strategies and priorities	State consultation with <i>adat</i> representative after process of internal discussion of <i>adat</i> community

Lands, territories and resources	<ul style="list-style-type: none"> • Possibility to maintain, strengthen and transmit the future generations indigenous peoples' distinct spiritual relationship with lands, territories and resources • State legal recognition and protection of indigenous peoples' lands, territories, and resources based in traditional ownership, occupation and use or acquisition • Effective control over lands, territories and resources • State implementation of a fair independent, impartial, open, and transparent process, with participation of indigenous peoples, to recognize and adjudicate their rights to lands, territories, and resources in accordance with their customs and procedures • No displacement without FPIC • Redress, restitution, and compensation for dispossession, or use or exploitation of lands, territories and resources without FPIC • No hazardous disposal on indigenous people lands/territories without FPIC • Access to state assistance programs for conservation and protection without discrimination 	<ul style="list-style-type: none"> • The Papua local government has to recognize, respect, protect and develop the rights of Papuan. The meaning of Papuan rights is the customary rights (<i>hak ulayat</i>). • <i>Adat</i> community controls <i>hak ulayat</i> • State legal recognition and protection of indigenous peoples' lands, territories, and resources based in traditional ownership, occupation, and use or acquisition • The investors have to recognize and respect the Papuan <i>adat</i> rights. • The <i>adat</i> land transfers have to do through discussion (<i>musyawarah</i>) with the <i>adat</i> community to agreement on land leasing or transferring, including the compensation.
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

the government sector, but also in the economic sector. The currency of Papua was changed from Dutch currency (NNGf) into Irian Barat Rupiah in 1963, and it was changed again into Indonesia Rupiah in 1965.

The Indonesianization was also implemented in the education sector. The school had to use Indonesia language, teach the Indonesia national anthem and also indoctrinated the student that Papua people were Malay Mongoloid race. This Indonesianization remarked the oppression of Papuan identity.

This policy continued under the Soeharto regime or it became intensified under the Soeharto regime. The Indonesianization was implemented through the development policy with the strong military involvement. The Soeharto regime started the transmigration program and sent mainly the Javanese to the Papua Province for the sake of development equitability and also for the Indonesianization of the space in Papua. The implementation of this program caused the marginalization of Papuan. The central government took the *adat* land of Papuan for the transmigrant settlement areas without the consent

from the Papuan. It was expected to help the cultural assimilation of Papuan into Indonesia (Indonesianization), or actually Java culture as major ethnic group in Indonesia. Other than the government transmigration program, there was also the military transmigration program to stabilize Papua. The usage of Bahasa Indonesia into education system and *Operasi Koteka* became the instrument for unification. These different types of Indonesianization policies caused the marginalization of Papuan.

This marginalization was seen more clearly in the investment policy through exploitation of natural resources in Papua. The *adat* land appropriation took place during this policy implementation. The Law No. 5/1979 on village government facilitated the exploitation of natural resources in Papua, together with other laws governing agrarian, investment, and forest policies. This village law reduced the role of *adat* leader by replacing the *adat* government system with a Java-originated village government system. The newly created village head became an instrument to facilitate the transfer of natural resources to non-Papuans. This also resulted in

the marginalization of Papuan not only in the economic sector but also in the political sector.

One rare exception from the government's Indonesianization policy was the recognition of Papuan Customary Deliberative Assembly (*Lembaga Musyawarah Adat*, LMA) as an *adat* institution. It was created by the Papuan elite such as Theys Hiyo Eluay and it was believed to represent the Papuan. The central government was co-opted LMA to control the traditional/*adat* leaders and minimize conflict in Papua. This council served as an agent for implementing government developmental policies until it changed to oppose the government in 1993 because of the dissatisfaction of Theys with the Soeharto regime.

Under the special autonomy law regime, the central government took a similar strategy by creating a new Customary Community Council (*Lembaga Masyarakat adat*) also called LMA in 2010. First of all, this council aimed to counter the power of the Papuan Customary Council (DAP), the successor of old LMA under Theys Hiyo Eluay. Mostly, the new LMA functioned as a security guardian on behalf of the Indonesian government in order to control the *adat* authority in the government's hands. Secondly, this council has been successfully used as a tool to achieve the exploitation of land and natural resources in Papua, thus positioning the LMA as the development broker of Papua.

The creation of the new LMA is a relatively peaceful mechanism of securing control of Papua by the central government. Unlike previous approaches that utilized repression and violence under the Soeharto regime, the central government has made the new LMA a purported *adat* organization to smooth and achieve the policies without violating human rights. Furthermore, this serves to justify the implementation of policies, which have supposedly been subjected to a process of community consent, through the representatives of the new LMA of Papua. Central government has tried to transform vertical conflicts between the central government and the Papuan indigenous society into horizontal conflicts between different *adat* bodies. The birth of new LMA is causing the tension and conflict between the members and supporters of

DAP—which opposes the central government policy—and the pro-Indonesia members and supporters of LMA which supported the central government policy without using the government attribute. Thus, threats to Indonesian sovereignty are to be successfully reduced. By changing the conflict from vertical to horizontal, the central government has more chances of intervention in Papua. For example, a conflict that was used to be solved through *adat* mechanism can now be a conflict involving the local government and/or security forces because the new LMA is semi-government organization.

Although it may be argued that the establishment of new LMA is a form of government recognition of Papuan communities, this recognition is not based on the Papuan's idea of *adat* as contained in the Indicators of Papua as Land of Peace (Jaringan Damai Papua 2014). In the end, this institutional recognition of *adat* is only artificial and has paved the way for the entrance of the government's policies in Papua in collaboration with a small segment of opportunistic Papuan elite. This government version of recognition made the aim of recognition to fulfill the *adat* community's right more difficult to achieve. The process of *adat* recognition has been corrupted by the government. The government has performed what Hegel called corrupted recognition.

If we look at the MIFEE program in Merauke district, the central government has utilized the new LMA, too by establishing a Merauke district LMA. Merauke LMA was already established in 2003, but the leader of new LMA of Papua, Lenis Kogoya, together with the central government representatives from Ministry of Home Affairs and Ministry of Political, Legal, and Security Affairs officially inducted this council as a part of new LMA in 2012. The district government also supported the new LMA-Merauke by the local regulation No. 4/2013 that is seemingly giving the LMA the authority to represent the Marind people in Merauke. This council helped to smooth the MIFEE project by accelerating the process of land leasing that in the end is causing the grabbing. However, the local government or company cannot be accused of grabbing *adat* lands because the land leasing has been through free, prior, informed, consent (FPIC) from the

Marind people represented by the *adat* institution, new LMA.

The corrupted recognition helps the government free from any severe accusation that the government is neglecting or repressing the Papuan rights. This policy might also help to wipe out the previously tarnished international image of Indonesian government as the serious human right violator by showing the refurbished image of defender of Papuan *adat*. Moreover, the policy could defy the criticism of international NGOs against the current governance of Papua, too.

Different from institutional recognition, spatial recognition is a new issue in Indonesia. Participatory mapping is one way to gain this spatial recognition. The plan to use community participation in national spatial planning formation was started in 1996. In this year, central government enacted the government regulation No. 6/1996 on public participation in spatial planning. After this enactment, several participatory mapping was conducted in several provinces, including Papua. In Papua, participatory mapping was conducted in 1997 for the first time. This mapping was aimed to map the village border. It was difficult, however, for these maps to be adopted into government policies on spatial planning. The government policies on spatial planning were still top-down policies to design the lands and forest for commercial activities. Adopting the map from participatory mapping would be an obstacle for government to appropriate resources.

The participatory mapping has gained importance since the enactment of the Special Autonomy Law No. 21/2001 in Papua. This law has opened up wider opportunities for participation, which has been used by NGOs to carry out participatory mapping in several villages in Papua in order to ensure land formalization and titling. Unlike the participatory mapping in 1997, recent participatory mapping is aimed to map the *adat* territories in the village. Maps produced from participatory mapping are expected to support legal recognition through land formalization or titling. Therefore, participatory mapping has been considered as an important mechanism for *adat* communities in their struggle to claim rights to customary land.

This perception is boosted by NGOs in Indonesia who also advocate on behalf of the Marind Anim indigenous people in Merauke. They believe that participatory mapping can stop the land grabbing under the MIFEE project in Merauke district, Papua, and protect the *adat* land of the Marind Anim. The analysis of the processes of land grabbing as well as subsequent participatory mapping in four villages in the MIFEE area has shown the results contrary to the intended purpose. The participatory mapping has initiated problems. Firstly, it has caused fragmentation and conflict among *adat* communities.

Secondly, the legal recognition of *adat* land through land formalization has led to the co-optation of *adat* land by companies and/or the state. Usually, the key problem for a company is the vagueness that surrounds *adat* land ownership. Participatory mapping renders visible the clear ownership of *adat* land, making it easier for a company to identify the target of negotiation for land. In addition, once a parcel of *adat* land is fixed as land owned by *one* person, *adat* land can be easily transferred into private land and can then be more easily leased by legal means. It is often forgotten that not only the *adat* communities themselves and NGOs, but also investors want legal recognition for *adat* communities. Traditional communities are always seen as obstacles to development and are difficult to target for investors. The map as a result of participatory mapping brings advantage for government, even though local government has not legitimized this map yet. It makes easier for them to find the target person with whom the company representative has to speak and negotiate. Thus, it can be said that participatory mapping is creating a new space for legal land grabbing. By using this map, government can argue that the government recognize and respect the existence of *adat* land, even though this map is only utilized for the sake of investment. This policy also can eradicate the negative image that the government is neglecting the *adat* lands right in the implementation of MIFEE. The corrupted recognition also applies in the participatory mapping.

Based on the description above, institutional recognition has left some serious problematics.

With quite complicated *adat* structures of Papuan, the government has had difficulties in taking the so-called representative demand of the Papuan to be accommodated. Hence it is necessary for the government to have a “representative” agency and the creation of “representative” body causes politics of brokerage among the *adat* elites. By bringing a new representative in the name of *adat* called LMA, the central government has wrenched invisible *adat* structures open and extended the access to the resources within.

Furthermore, spatial recognition has been seen by government as the way to escape from the Papuan’s lingering distrust against the government and from *adat* elites’ competition on development program. Spatial recognition provides basic safety for Papuan livelihood. This is because Papuan has the ability to describe their resource and capital in legal basis. This legal narrative description is important for the Papuan to have equal position against the government and company encroachment on their livelihood. However, this legal basis has sharp blade on the other edge. It expands the opportunity for brokers to pave their way for appropriating resources by encompassing the authority of *adat*. It gives alternative legal routes for personal resource transaction. Both institutional and spatial recognitions leave the scar open for Papuan.

CONCLUSION

The new government under President Joko Widodo (2014–2019) intends to continue the agricultural expansion in Merauke. After President Joko Widodo (Jokowi) visited Merauke district on 10 May 2015, the central government planned to open another 1.2 million ha for rice cultivation (Presentasi Bupati Merauke, n.d.). The Research Center for Economics and Business of Universitas Gadjah Mada (P2EB-UGM) conducted a research on the availability of potential areas for rice field in Merauke. This research concluded that Merauke District has a vast tract of potential lands for rice fields. The research found out that Merauke district has more than two million hectares of land as available and suitable for rice fields (P2EB UGM, n.d.). Besides that, the central government designated Merauke as

a special economy region (*Kawasan Ekonomi Khusus*, KEK).

This project is also to accelerate the development of regional economy. In Papua, the central government designated four districts, including Merauke district as special economic region, KEK. Based on this plan, Merauke district will develop the agricultural and forestry sectors. This new project is also well equipped with the establishment of new map of spatial planning. Merauke district has launched the new spatial planning which includes the area for 1.2 million hectare of rice field. This new spatial planning has not accommodated the map as a result of participatory mapping yet. This project will be developed and managed by the cooperation between Indonesian state owned company (70% of the total investment) and private companies (30% of the total investment). This one million hectares project is targeted for rice cultivation in three years from 2015 to 2017.² The ministry of agriculture has already sent a request to the ministry of environment and forestry to lease the forest status to start this project (Awat MIFEE, 2016). The question raised is where the position of *adat* community will be?

Moreover, to make the land status clear, Jokowi launched the one map policy. The policy aims to create one map as a basis for spatial planning and for the release of all further investment permits. We are not sure if this policy is an opportunity for indigenous peoples to incorporate their traditional territories based on *adat* maps resulting from participatory mapping to strengthen their rights for their own land. In the worst case, the participatory mapping might further facilitate the investment in *adat* land in a greater scale and with greater speed, which has been seen in the implementation of MIFEE. This has to be considered by NGOs in their support of participatory mapping.

² It needs to lease the forest status for the lands on the forest areas to open the plantation. It was regulated in article 19 of Forest Law No. 41/1999 and Government Regulation No. 104/2015.

REFERENCE

- Ada apa dibalik pemberian gelar adat? (August 27th, 2009). *Tabloid Jubi*. Retrieved from <http://tabloidjubi.com/arch/2009/08/27/ada-apa-dibalik-pemberian-gelar-adat/>
- Awasmiffee. (n.d.a). An agribusiness attack in West Papua: Unraveling the Merauke Integrated Food and Energy Estate. Retrieved from https://awasmiffee.potager.org/uploads/2012/03/miffee_en.pdf
- Awasmiffee. (n.d.b). MIFEE diluncurkan kembali, Jokowi ingin bangun 1,2 juta hektare sawah baru dalam 3 tahun! Retrieved from <https://awasmiffee.potager.org/?p=1210&lang=id>
- Bappenas. (2015). *Seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Papua 2015*. Jakarta: Bappenas.
- Borras Jr., S. M. & Franco, J. C. (2011). *Political dynamics of land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's role*. Amsterdam: Transnational Institute.
- Borras, S. M., Kay, C., Gomez S., & Wilkinson, J. (2012). Land grabbing and global capitalist accumulation: Key features in Latin America. *Canadian Journal of Development*, 33(4), 402–416.
- Brink, B. & Owen, D. (Ed). (2007). *Recognition and the power: Axel Honneth and the tradition of critical social theory*. New York: Cambridge.
- Daniel, S. & Mittal, A. (2009). *The great land grab rush for world's farmland threatens food security for the poor*. Oakland: The Oakland Institute.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). *FAO land tenure studies: Compulsory acquisition of land and compensation*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Fraser, N. (2003). Shifting paradigm? Recognition and redistribution. In B. Hobson (Ed.), *Recognition struggles and Social Movement: Contested Identities, Agency, and Power*, 21–34. Madrid: Cambridge.
- Fraser, N. (2007). Re-framing justice in a globalizing world. In T. Lovell (Ed.), *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*, 17–35. New York: Routledge.
- GoI. (2010). *Grand design pengembangan pangan dan energy skala luas (food and energy estate) di Merauke*. Jakarta: Ministry of Agriculture.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Power of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Honneth, A. (2003). Redistribution as recognition: A response to Nancy Fraser. In N. Frazer & A. Honneth (Eds.), *Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, 110–197. London: Verso.
- Jaringan Damai Papua. (2014). *Buku saku indikator Papua Tanah Damai: Versi masyarakat Papua*. Jayapura: JDP.
- Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia. (2011). *Masterplan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia 2011–2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia.
- Koentjaraningrat & Bachtiar, H. W. (1963). *Penduduk Irian Barat*. Jakarta: PT Penerbit Universitas.
- Li, T. M. (2001). Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone. *Modern Asian Studies*, 35, 645–676.
- Panigoro, A. (August 29th, 2009). Memandang Indonesia dari Merauke. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/29/03073562/memandang-indonesia.dari.merauke>
- Monahan, M. (2006). Recognition beyond struggle: On a liberatory account of Hegelian recognition. *Social Theory and Practice*, 32, 389–414.
- Rulistia, N. D. (July 3rd, 2008). Saudis plan Rp 600b rice estate investment, Jakarta Post. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2008/07/03/saudis-plan-rp-600b-rice-estate-investment.html>
- Papua Statistic. (2015). *Papua in figure 2015*. Jayapura: Statistic of Papua Province.
- Gebze, F. (n.d). *Merauke menuju kemakmuran*. Presentasi Bupati Merauke (2015–2020), unpublished document.
- P2EB-UGM. (n.d.). *Satu juta hektar lahan Merauke*. Unpublished document.
- Sieder, R. (2012). The challenge of Indigenous legal system: Beyond paradigms of recognition. *The Brown World Journal of World Affairs*, 18(2), 103–114.
- Stephens, P. (2011). The global land grab: An analysis of extant governance institutions. *International Affairs Review*, XX, 1–21.
- Yudhoyono, S. B. (2006, April 5). Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara panen raya padi di Merauke, 5 April 2006. Retrieved from, <http://sby.kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/pidato/2006/04/05/222.html>

- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann & C. Taylor (Eds.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, 25–74. New Jersey: Princeton University Press.
- Widjojo, M. S. (2009). *Papua roadmap: negotiating the past, improving the present and securing the future*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Zakaria, R. Y., Kleden, E. O., & Frangky, Y. L. (2011). *MIFEE tak terjangkau Angan Malind: catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua*. Jakarta: Yayasan Pusaka.
- Xanthaki, A. (2003). Land rights of indigenous people in Southeast Asia. *Melbourne Journal in International Law*, 4, 467–496.

TINJAUAN BUKU:

ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA

Fachri Aidulsyah

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: fachri.aidulsyah@lipi.go.id

Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

PENDAHULUAN

Buku ini merupakan salah satu jawaban penting terhadap merebaknya fenomena “krisis kewargaan” yang kian menghantui masyarakat Indonesia selama dua dekade terakhir ini. Fenomena “krisis kewargaan” tersebut dibuktikan dengan adanya realitas anomali antara semangat kebhinekaan yang bertekad untuk membangun solidaritas dalam keberagaman sekaligus menjamin kesamaan hak dan kewajiban, bebas diskriminasi, serta menghormati aktualisasi ruang privat dan kolektif setiap individu masyarakat. Namun, kini hal itu kian berubah drastis, keberagaman semakin terancam, intoleransi mengkrystal menjadi panglima, diskriminasi bertransformasi menjadi senjata bagi sebagian kelompok untuk merampas hak ekonomi dan sosial budaya kelompok lain, serta konflik etnis dan agama menjelma menjadi parasit terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara (Bagir, 2018; Hefner, 2018).

Buku yang diedit oleh Eric Hiariej dan Kristian Stokke yang merupakan bagian dari hasil proyek penelitian *Power, Welfare, dan Democracy* (PWD) kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan University of Oslo ini berupaya menelaah beberapa model gerakan sosial di Indonesia dalam melakukan “politisasi” terhadap isu “kewargaan.” Terdapat tiga pertanyaan penting yang coba dihadirkan oleh buku ini dalam menjawab realitas tersebut, yaitu; 1) Bagaimana gerakan sosial tersebut mampu memobilisasi massa dan membangun identitas kolektif guna melakukan *countering* dan menantang wacana

dominan tentang identitas dan kewargaan?; 2) Bagaimana pola gerakan sosial tersebut melakukan *claiming* dan interpretasi yang berbeda terhadap *civil right* serta cara mendapatkan rekognisi, redistribusi, dan representasi dari tindakan tersebut?; 3) Strategi apa yang dilakukan oleh gerakan sosial tersebut dalam memobilisasi dukungan dan klaim dari masyarakat terhadap diskursus *civil right* yang berbeda dengan diskursus dominan? (Hiariej & Stokke, 2017, 341).

Secara garis besar, buku ini disusun dalam 12 bab. Empat bab pertama merupakan bagian dari pengantar konseptualisasi, argumentasi analitis, konstruksi teori alternatif, serta historisitas pergulatan konstruksi dan dekonstruksi identitas kewargaan di Indonesia. Tujuh bab berikutnya menguraikan hasil penelitian lapangan tentang perjuangan masyarakat dalam hak-hak kewargaan di beberapa sektor. Bab terakhir merupakan kesimpulan analitis, di mana editor menarik *lesson learned* dari berbagai hasil penelitian tersebut guna memberikan rekomendasi kebijakan dan pengayaan narasi ilmiah terhadap studi kewargaan yang tengah berkembang di dunia saat ini (Hiariej & Stokke, 2017, 7).

Dari dua belas bab yang terdapat dalam volume tersebut, tulisan ini berupaya menelaah *logic* analisis perjuangan gerakan Islamis dalam mengonstruksi identitas kewargaan Indonesia. *Reason* fokus terhadap analisis Islamisme adalah karena gerakan Islamis merupakan gerakan yang paling dominan, pro-aktif, dan dinamis dalam

melakukan konstruksi identitas kewargaan bangsa Indonesia. Tulisan ini berupaya memberikan perspektif baru terhadap trajektori perjuangan identitas kewargaan konvensional yang hadir dalam buku pada kerangka pendekatan studi genealogis. Jika dalam buku ini Hiariej dan Törnquist (2017) hanya membatasi enam periode pergulatan politik kewargaan yang pernah terjadi di Indonesia, yakni; 1) rezim kolonial hingga pertengahan 1940-an; 2) Era kemerdekaan awal hingga tahun 1957; 3) Era Demokrasi Terpimpin hingga akhir tahun 1965; 4) Era Orde Baru hingga pertengahan tahun 1998; 5) demokrasi elitis dan desentralisasi hingga akhir tahun 2000-an, dan; 6) transaksional populis yang terjadi pada periode saat ini, tulisan ini melihat lebih daripada itu. Jika Hiariej dan Stokke (2017) hanya membatasi tiga domain kepentingan aktor untuk terlibat aktif dalam politik kewargaan, yakni pada: i) nasionalisme dan politik rekognisi; ii) perjuangan untuk keadilan sosial; iii) demokrasi dan politik representasi, tulisan ini melihat domain tersebut terlalu simplistis.

Tulisan ini mencoba mengisi kekosongan kerangka analitis yang terdapat dalam buku tersebut dengan menggunakan pendekatan genealogis. Meminjam pendekatan Foucault, genealogi dalam telaah buku ini dipahami sebagai alat analisis historis untuk melihat bagaimana suatu gerakan bermetamorfosis, bertransformasi, dan berstrategi dalam perjuangan politik kewargaan (Foucault, 1977; 1998). Pendekatan genealogi juga digunakan untuk melihat trajektori karakter aktor, diskursus apa yang dihadirkan dalam perjuangan tersebut, serta *form* dan *result* apa yang dihasilkan secara sistematis dan terstruktur.

KEWARGAAN INDONESIA DALAM SKEMA: ANTARA KONSTRUKSI TEORITIS KEWARGAAN DAN ISLAMISME

Harus diakui bahwa buku ini telah memberikan perspektif baru bahwa identitas kewargaan—khususnya yang terjadi di Indonesia—bukanlah suatu hasil yang bersifat *given*, melainkan hal yang bersifat *being* yang merupakan hasil pertarungan, perebutan, dan perjuangan antarkelas dalam mengonstruksi dan dekonstruksi identitas

kewargaannya. Pada bab pengantar buku ini, dijelaskan tentang pentingnya setiap kelas sosial melakukan konstruksi terhadap identitas kewargaannya sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan budaya (politik rekognisi), penegakan keadilan sosial dan ekonomi (politik redistribusi), dan representasi (Stokke & Hiariej, 2017, 5). Untuk memperebutkan pengaruh terhadap konstruksi identitas kewargaan, tidak jarang aktor antarkelas dan antargolongan harus mengalami fragmentasi kepentingan dan gagal membangun konsolidasi massa yang mengakibatkan perjuangan identitas kewargaan mereka berujung sia-sia.

Pada era interkoneksi global seperti saat ini, realitas kebutuhan akan politik rekognisi identitas kewargaan tidak hanya dimaknai secara meso, yakni relasi antara masyarakat dengan negara *an sich*, melainkan lebih jauh daripada itu. Politik rekognisi kewargaan juga kian melampaui lintas-batas negara, di mana identitasnya sering kali menafikan unsur negara, dikonstruksi oleh pasar dan kapitalisme global, ataupun universalisme ideologi tertentu (Stokke, 2017; Klinken & Berenschot, 2018). Konteks inilah yang disebut oleh Stokke (2017, 24–37) pada bab dua sebagai gejala denasionalisasi yang berarti transformasi kewargaan yang melampaui skala nasional serta munculnya multilevel kewargaan. Transnasionalisasi berarti identitas kewargaan formal bisa memiliki lebih dari satu negara teritorial sebagai implikasi perkembangan imigrasi dan transnasional diaspora. Post-nasional berarti identitas kewargaan dikonstruksi di luar relasi masyarakat-negara dan di luar kerangka institusional negara-bangsa. Jika denasionalisasi dan transnasionalisasi kewargaan masih berada dalam *logic* relasional negara, post-nasional justru berupaya menegasikan institusi negara dan lebih berarosiasi pada sebuah komunitas.

Dalam konteks Indonesia, gejala kewargaan post-nasional secara laten terus berkembang dan kian mengakar di setiap lapisan sosial masyarakat. Jauh sebelum berkembangnya gerakan terorisme *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) ataupun *Jamaah Anshoru Daulah* yang menegasikan negara-bangsa dan terasosiasi ke dalam komunitas lintas-batas teritorial pada era kontemporer, meskipun lingkupnya bersifat lokal-

nasional gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang sudah berkembang sejak era kemerdekaan Indonesia sudah memulai agenda post-nasional lebih dahulu. Bangkitnya gerakan *global ummah*, konservatisme Islam, maupun populisme Islam di Indonesia sebagai implikasi dari keterbukaan demokrasi dan budaya masyarakat terhadap berkembangnya berbagai corak ideologi dan pemikiran Islam sering kali memberikan tekanan untuk melakukan denasionalisasi kewargaan. Hal ini merupakan strategi untuk mengukuhkan politik rekognisi gerakan tersebut sekaligus sebagai respons ketidakpuasan gerakan itu terhadap sistem demokrasi dan institusi negara (Roy, 2004; Van Bruinessen, 2011; Fealy, 2016; Hadiz, 2016; 2018).

Dalam konteks yang lain, jauh sebelum munculnya terma “denasionalisasi kewargaan,” “transnasionalisasi kewargaan,” dan “Islamisasi kewargaan” diperbincangkan pada era global seperti saat ini, secara genealogis, preseden tiga tema tersebut di Indonesia sudah berkembang sejak era pembentukan negara bangsa. Pada era 1920-an, gerakan Islamis Indonesia yang terinspirasi semangat Pan-Islamisme memproklamasikan diri untuk membentuk Khalifah Islamiyah global yang melampaui sekat budaya dan teritorial negara bangsa. Pada era 1940-an, gerakan tersebut mulai mengalami perubahan orientasi yang mengarah pada pembentukan negara Islam (Menchik, 2016; Salim, 2017). Pada awal era 1980-an, kondisi “denasionalisasi kewargaan” juga terjadi pada gerakan Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jemaah Tabligh yang merupakan “produk impor,” dan sejak awal visi ideologi gerakan-gerakan tersebut harus terkoneksi dengan agenda perlembagaan ideologi induknya. Agenda “transnasionalisasi kewargaan” gerakan Tarbiyah sebagaimana didengungkan oleh Hasan Al-Banna (pendiri *Ikhwanul Muslimin*) terpaksa harus dinafikan lantaran gerakan Tarbiyah disibukkan dengan respons terhadap berbagai isu politik lokal-nasional serta harus beradaptasi dengan realitas sosio-politik masyarakat Indonesia (Fealy & Bubalo, 2007, 35).

Dalam konteks “Islamisasi Kewargaan,” sejatinya proyek Islamisasi Kewargaan sudah didengungkan sejak era pembentukan negara-

bangsa, yakni saat kalangan Islamis berupaya memasukkan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” ke dalam batang tubuh Pancasila. Setelah sekularisasi negara mengakar dan sangat berkembang pada era Orde Baru, proyek “Islamisasi Kewargaan” baru mendapatkan momentumnya kembali ketika “Era Reformasi” (Lindsey, 2018). Era Reformasi yang memproklamasikan keterbukaan, demokrasi, dan desentralisasi dimanfaatkan oleh berbagai gerakan Islamis di Indonesia untuk mengkampanyekan diadopsinya syariat Islam ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya mereformasi konstitusi kewargaan Indonesia ke arah yang lebih partikularistik (Bush, 2008; Salim, 2016; 2017; Nashir, 2013; Ikhwan, 2015; Buehler & Muhtada, 2016; Lindsey, 2018). Realitas “Islamisasi Kewargaan” sendiri sangat bergantung pada relasi antara masyarakat dan negara. Nashir (2013) dalam tulisannya, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, menggambarkan bahwa proyek Islamisasi Perda dilakukan melalui dua arah, yaitu *Islamisasi Jalur Atas* yang menurutnya direpresentasikan oleh Hizbut-Tahrir dan Majelis Mujahidin dan *Islamisasi Jalur Bawah* yang disokong oleh kekuatan-kekuatan gerakan lokal. Nashir tidak melihat proyek Islamisasi berdasarkan perspektif kelas ala Turner yang menjelaskan bahwa “kewargaan dari atas” merupakan strategi kelas dominan untuk mendapatkan identitas kewargaannya dengan melembagakan hak sosial-politik mereka di level negara. Ia pun tidak melihat bahwa “kewargaan dari bawah” merupakan strategi kelas minor dalam memperjuangkan identitas kewargaan mereka dengan memperkuat politik identitas sebagai instrumen untuk mendapatkan rekognisi negara. Namun, inti dari *logic* Islamisasi Perda juga dalam rangka mengukuhkan identitas Islam sangatlah terintegrasi dengan identitas kewargaan Indonesia dalam kaitannya dengan keanggotaan, legal formal, hukum, dan partisipasi (Hiariej & Törnquist, 2017, 56).

Dalam buku ini, dijelaskan bahwa masifnya proyek “Islamisasi Kewargaan” pada era reformasi-demokrasi-desentralisasi juga ditandai dengan masifnya gerakan Islamis fundamentalis yang kian bermetamorfosis menjadi post-fundamentalis. Cara metamorfosisnya adalah

dengan mengubah strategi perjuangan dari yang awalnya hanya sebatas melakukan aksi tindakan reaksioner “di jalanan” menuju arah yang lebih visioner, yakni berpartisipasi dalam Syariatisasi konstitusi negara (Hiariej dkk, 2017, 306). Pada akhir 2016, setelah terjadinya gerakan 212 yang melibatkan lebih dari enam juta jiwa orang Islam, proyek Islamisasi kewargaan semakin menunjukkan eksistensinya. Sejak saat itulah *pressure* umat Islam terhadap institusi negara semakin menguat dan peranan partai politik sebagai representasi rakyat semakin terabaikan (Fealy, 2016). Perihal tersebut dibuktikan dengan munculnya aktor-aktor politik baru yang lahir dari gerakan tersebut, seperti Habib Rizieq Shihab, Bachtiar Natsir, dan Zaitun Rasmin yang bukan hanya mampu menjadi magnet penggerak kalangan populis Islam, melainkan juga menjadi figur baru pemimpin alternatif negara yang berada di luar lingkaran elite partai politik. Sebaliknya, dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah beberapa tahun terakhir ini, elite gerakan 212 ikut dilibatkan oleh partai politik guna mendongkrak suara massa (Fealy, 2016). Dalam konteks politik kewargaan, fenomena gerakan 212 bukan hanya sebatas menunjukkan kebangkitan populisme Islam, melainkan juga menstimulasi kebangkitan era Post-Klientalisme di mana gerakan tersebut mampu mendobrak kemapanan oligarki elite dalam mengkooptasi ruang politik dan institusi negara dari yang bersifat relasi patron-klien ke arah relasi populis-massa.

POST-KLIENTALISME DALAM LENSA *POST-TRUTH*: WAJAH BARU “ISLAMISASI KEWARGAAN”

Definisi Post-Klientalisme yang dihadirkan oleh Hiariej (2017) dalam buku ini lebih pada proses aktor politik meninggalkan cara lama mendistribusikan patronase ekonomi-politik dan menggantinya dengan penguatan relasi massa melalui pembentukan kegiatan-kegiatan populis, *mainstreaming* popularitas di kanal media sosial, serta menciptakan program optimalisasi pelayanan publik. Namun, dalam konteks gerakan Islamis, definisi Post-Klientalisme justru jauh lebih kompleks karena memadukan narasi “Islam,” sentimen politik, dan keagamaan sebagai

instrumen utama mobilisasi massa. Pembangkitan sentimen politik dan keagamaan tidak selalu dibentuk oleh elite ataupun tidak dari keterhubungan langsung antara elite dengan massa di ruang publik konvensional (seperti sekolah dan rumah ibadah), melainkan lebih jauh daripada itu. Sentimen tersebut semakin masif dibentuk oleh pemberitaan-pemberitaan hoaks yang diviralkan melalui media sosial. Tidak seperti buku ini yang masih menempatkan tokoh populer sebagai aktor utama pembentukan opini kaum populis, tesis lain justru melihat bahwa aktor utama pembentukan opini kaum populis pada era digital seperti saat ini sangatlah *fluid* dan tidak mudah terdefiniskan aktor dan afiliasinya. Hal ini lantaran setiap individu mampu membentuk opini publik dan memviralkannya di media sosial. Kondisi ini mengalami presedennya ketika pemberitaan hoaks yang dibentuk dan diviralkan oleh jaringan *Saracen* dan *Muslim Cyber Army* (yang hingga kini belum diketahui siapa aktor, afiliasi, dan jejaringnya) mudah diyakini dan dipercayai oleh umat Islam tanpa perlu ditelusuri fakta dan kebenarannya. Kondisi inilah yang disebut oleh sebagian sarjana sosial sebagai *Post-Truth Society*, di mana kaum Post-Klientalis kian mengembangkan narasi yang bersifat sensasional yang mudah diamini dan mampu membangkitkan emosi massa tanpa perlu pusing untuk membuktikan fakta dan kebenaran yang disampaikan olehnya (Haryatmoko, 2017).

Meskipun buku ini tidak menjadikan realitas *Post-Truth* sebagai instrumen penting yang dimanfaatkan oleh Post-Klientis dalam mengkampanyekan “Islamisasi Kewargaan” di era Reformasi seperti saat ini, namun buku ini telah memberikan gambaran rinci tentang mengapa realitas Post-Klientalisme dan *Post-Truth* sudah tidak terbendung lagi dalam memengaruhi *logic* pemerintahan dan kewargaan pada era sekarang ini. Adapun faktor-faktor yang memengaruhinya ialah: i) adanya perubahan radikal *logic* pemerintahan dari konsepsi sentralisasi negara ke arah desentralisasi yang berimplikasi pada kemunculan elite baru di aras lokal dan nasional; ii) adanya perubahan radikal dari rezim pemerintahan yang didominasi oleh militer ke arah rezim pemerintahan yang didominasi oleh politisi dan eksekutif politik terpilih; iii) adanya perubahan model dari negara korporatisme dan kronisme ke arah jejara-

ing oligarki dan aktivis lokal-nasional; iv) adanya perubahan karakter dari perspektif keamanan yang bersifat militeristik ke arah keamanan yang bersifat *soft* di mana antara “institusi keamanan” dengan yang mendapatkan pelayanan dari institusi tersebut saling memberikan keuntungan ekonomi-politik satu sama lain (Hiariej & Törnquist, 2017, 66). Faktor-faktor itu membuka kesempatan bagi elite dan massa untuk secara konfrontatif berkolaborasi melakukan tekanan terhadap identitas kewargaan. Di satu sisi, faktor-faktor tersebut memberikan implikasi positif karena individu dan massa dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan konstruksi identitas kewargaan. Di sisi lain, ada implikasi negatif yang muncul, yakni tindakan “konfrontasi” individu dan massa terhadap konstruksi kewargaan sering kali memicu perseteruan, ketegangan sosial, dan disharmoni dengan ideologi ataupun kepentingan yang berseberangan dengannya. Menurut Hiariej dan Törnquist (2017) serta Hadiz (2018), dalam konteks gerakan Islamis, karakter heterogenitas dan polarisasi massa Islam (tradisional, modernis, dan neo-modernis) yang sudah menguat sejak awal abad 20 dan pola relasi Post-Klientis di tubuh gerakan Islamis yang masih yang bersifat *top-down*, tidak demokratis antara elite (tokoh populer gerakan Islamis) dan massa telah membuat gerakan Islamis sangat rentan terhadap konflik dan disintegrasi antara satu sama lain.

PENUTUP

Secara garis besar, buku ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang perjuangan politik kewargaan yang selama ini berkembang di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan liberal *ala* Kymlicka (2003) tentang *kewargaan multikultural* yang terkesan normatif dalam menempatkan *cultural equality* antara masyarakat mayor dan minor, buku ini melihat hal yang lebih kompleks dalam konteks realitas masyarakat Indonesia, yakni dalam perjuangan politik kewargaan, masyarakat mayor dan minor saling berkontestasi dan saling memiliki keterbukaan akses satu sama lain. Buku ini lebih banyak melihat kontestasi politik kewargaan dalam perspektif kelas antara massa dan oligarki negara ataupun antara buruh dan korporat sehingga menafikan

logic politik kewargaan yang berbasis perspektif *local wisdom*, seperti penganut agama-agama lokal dan kebatinan, etnis minor, dan sebagainya. Namun, secara keseluruhan buku ini memberikan perspektif baru terhadap studi-studi kewargaan, khususnya terkait pemetaan transformasi gerakan massa sebagai strategi untuk melakukan konstruksi terhadap identitas kewargaan dalam rangka memberikan penekanan terhadap politik rekognisi, redistribusi, dan representasi. Dalam konteks analisis politik gerakan Islamis, buku ini masih menitikberatkan analisis strategi politik kewargaan kalangan Islamis dengan perspektif yang sangat konvensional (lebih mengedepankan perpektif “komunalitas massa atau *citizens*) dan cenderung mengesampingkan perspektif maya atau *netizen*, namun buku ini memberikan sumbangsih terpenting dalam melihat pola-pola transformasi politik kewargaan tersebut.

PUSTAKA ACUAN

- Bagir, Z. A. (2018). The politics and law of religious governance. Dalam Robert W. Hefner (ed.), *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Bush, R. (2008). Regional Shariah regulations in Indonesia: anomaly in symptom? Dalam Greg Fealy and Sally White (eds.), *Expressing Islam: religious life and politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Hiariej, E., & Törnquist, O. (2017). Indonesian politics and citizenship in historical perspective. Dalam Eric Hiariej & Kristian Stokke (eds.), *Politics of citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor bekerjasama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (eds.). (2017). *Politics of citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor bekerjasama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
- Fealy, G. (2016, Desember 7). Bigger than Ahok: explaining the 2 December mass rally. Diakses pada 15 Juli 2018 dari <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au> →link kurang spesifik
- Foucault, M. (1977). Nietzsche, genealogy, history. Dalam D.F. Bouchard (ed.), *Language, counter-memory, practice: selected essays and interviews*. Ithaca: Cornell University Press.
- Foucault, M. (1998). *Aesthetics, method, and epistemology* (J.D. Faubion, ed). New York: The New Press.
- van Klinken, G., & Berenschot, W. (2018). Everyday citizenship in democratizing Indonesia. Dalam

- Robert W. Hefner (ed.), *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Fealy, G., & Bubalo, A. (2007). *Jejak kafilah: pengaruh radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2018). Islamic populism in Indonesia: emergence and limitation. Dalam Robert W. Hefner (ed.), *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Haryatmoko. (2017). Era Post-Truth: hoax, disinformasi dan populisme untuk emosi sosial. Makalah ini didiskusikan pada kuliah umum yang diselenggarakan oleh LSF Cogito Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta 21 Desember 2017.
- Hefner, R. W (ed.). (2018). *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Ikhwan, H. (2015). Democratic Islamism: Islamists' engagement with democratic politics in post-Suharto Indonesia. *Ph.D. Thesis*. University of Essex.
- Kymlicka, W. (2003). *Kewargaan multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Lindsey, T. (2018). Islamization, law, and the Indonesia courts: the more things change.... Dalam Robert W. Hefner (ed.). *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge.
- Menchik, J. (2016). *Crafting Indonesian democracy: inclusion-moderation and the sacralizing of the postcolonial state*. Dalam Alfred Stepan (ed.), *Islam and democracy in comparative perspective*. New York: Columbia University Press.
- Buehler, M., & Muhtada, D. (2016). Democratization and the diffusion of shari'a law: comparative insights from Indonesia. *South East Asia Research*, 24(2), 261–282.
- Nashir, H. (2013). *Islam syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: the search for a new ummah*. New York: Columbia University Press
- Salim, A. (2016). *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press (Online Version).
- Salim, A. (2017). Competing political ideologies on the implementation of Islamic law in Indonesia: historical and legal pluralist perspectives. *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, 17 (2), hlm?.
- Van Bruinessen, M. (2011). What happened to the smiling face of Indonesian Islam? Muslim intellectualism and the conservative turn in Post-Suharto Indonesia. RSIS Working Paper No. 222. Singapore: Nanyang Technological University.

STT
NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986

ISSN 977-0125-9989-1-9



LIPI Press